Dr. Sri Haryanto, M.Pd.I

KERANGKA PARADIGMATIK PENDIDIKAN DEMOKRATIS DAN HUMANISTIK

Kata Pengantar

Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf

KERANGKA PARADIGMATIK PENDIDIKAN DEMOKRATIS DAN HUMANISTIK

BILDUNG
2023

LEMBAGA KAJIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA

KABUPATEN WONOSOBO

PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. Sri Haryanto, M.Pd.I

KERANGKA PARADIGMATIK PENDIDIKAN DEMOKRATIS DAN HUMANISTIK

Kata Pengantar

Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf

KERANGKA PARADIGMATIK PENDIDIKAN DEMOKRATIS DAN HUMANISTIK

Dr. Sri Haryanto, M.Pd.I

Kata Pengantar: Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf
Editor: Ngarifin
Desain Sampul: Ruhtata
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Kerangka Paradigmatik Pendidikan Demokratis dan Humanistik/Dr. Sri Haryanto, M.Pd.I/Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2023

xxii + 300 halaman; 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-623-8091-52-2

Cetakan Pertama: Juli 2023

Penerbit:
BILDUNG
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

KATA PENGANTAR

KUNCI UTAMA MEMAHAMI DEMOKRASI DAN HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf
Guru Besar Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kunci Memahami Demokrasi dalam Sorotan Islam

Inti demokrasi adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa demokrasi, kreativitas manusia tidak mungkin berkembang. Secara historis, perjuangan melawan kolonialisme merupakan bagian dari perjuangan demokrasi. Ketidakadilan sistem kolonial telah melahirkan tidak hanya tuntutan kemerdekaan tetapi juga tuntutan bagi kebebasan individual. H.O.S. Tjokroaminoto, misalnya, mendesak didirikannya parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat yang di dalamnya penuh dengan hak-hak legislatif, sementara pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen tersebut. Belakangan, para tokoh nasionalis memandang bahwa demokrasi merupakan tujuan utama dari perjuangan anti-kolonialisme. Gerakan ini menguat sejak 1920, dan aktivitas organisasi nasionalis berkembang pada 1930-an, meskipun saat itu mendapat tekanan dari penguasa kolonial. Akhirnya, ketika pendudukan Jepanglah (1942-1945) terbuka jalan lapang menuju akhir perjuangan kemerdekaan. Pascakemerdekaan, kebangkitan gerakan pro-demokrasi di Indonesia muncul di akhir 1980-an.

Dari segi asal usulnya, banyak dari aktivis gerakan pro-demokrasi di Indonesia tidak mengambil inspirasinya dari pemikiran liberal Barat semata, melainkan juga dari *Marxism*, Al-Qur'an (Islam), maupun dari nilai-nilai tradisional Indonesia. Karenanya, demokrasi berspektrum menurut karakternya masing-masing. Skope demokrasi di sini bervariasi dari area pemerintahan (politik) ke seluruh aspek kehidupan, termasuk wilayah sosial-ekonomi. Itu sebabnya bicara soal demokrasi secara konvensional hanya dibatasi oleh sistem politik, padahal makna demokrasi lebih luas, meliputi isu sosial-ekonomi, budaya bahkan demokrasi agama (Kuntowijoyo, 1997: 107).

Di Indonesia, proses demokrasi dan budaya terjadi melalui kultur masyarakat berembuk. Di sini demokrasi berarti partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan politik. Demokrasi harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak sampai kehilangan kepribadian, apalagi anarki. Demokrasi dimaksudkan sebagai sarana bagi pembangunan bangsa dan pendidikan rakyat. Di luar konteks ini, demokrasi berarti diperluas ke semua aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, ekonomi. Bahkan demokratisasi bisa menyentuh bidang pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan Islam.

Baik secara normatif maupun empiris, Islam bukanlah anti-demokrasi (Jalaluddin Rakhmat, 1994: 40-41). Secara normatif, Islam, memang tidak menjelaskan bagaimana bentuk demokrasi yang dianut, namun ajaran Islam mengandung prinsip dan kaidah yang merupakan kunci utama dalam memahami isu demokrasi dan HAM. Di antara kunci dimaksud adalah: *pertama,* kunci dalam kaidah *ta'aruf* (saling mengenal). Prinsip dasarnya diambil dari QS. 49:13. Bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama manusia, dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami atau mengenal (*ta'aruf*), adalah sesuai dengan karak-

ter manusia sebagai *homo-social. Ta'aruf* berjalan kalau ada *equality* (persamaan), *liberty* (kebebasan), komunikasi dialogis tanpa adanya dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain, dan *ta'aruf* mempunyai asumsi negara hukum.

Kedua, kunci dalam kaidah *syura* (musyawarah). Banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan untuk bermusyawarah, misalnya QS. 42:38; QS. 3:159. Nabi s.a.w. pun sendiri menghargai musyawarah. Pada waktu Perang Uhud Beliau s.a.w. mengadakan musyawarah dengan kaum Muslim untuk menentukan pilihan, apakah bertahan di dalam kota atau berperang ke luar kota. Hasilnya, suara mayoritas mengalahkan pendapat Nabi, agar bertempur di luar kota, dan Nabi pun mengalah dengan kehendak mayoritas tersebut. Musyawarah ini membutuhkan sikap *tasamuh* (toleran dan arif) antar pihak yang bermusyawarah. Dalam kesempatan lain Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah". Islam juga menganjurkan orang untuk berani mengatakan yang benar, meskipun di depan penguasa yang dhalim. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan upaya menegakkan yang benar ini, seraya mencegah yang batil. Menegakkan yang benar dan mencegah yang batil demikian tidak dapat dicapai kecuali dengan menegakkan demokrasi itu sendiri. Bagi Umat Islam, musyawarah itu dilaksanakan tanpa melanggar hak Allah dan Rasulnya. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mutlak harus berlaku dan tidak ada musyawarah. Tata cara salat, puasa, haji dan lainnya merupakan *ibadah makhdlah* (ibadah murni) yang *syarat* dan *rukun*-nya telah ditentukan oleh Allah melalui Rasul-Nya, adalah hak Allah, tidak perlu dimusyawarahkan.

Ketiga, kunci dalam kaidah *ta'awun* (kerja sama). Dalam demokrasi ada kerja sama antar berbagai pihak. Kerja sama dalam pandangan Islam dilakukan berdasarkan *mutual cooperation,*

di samping dalam rangka kebajikan dan *taqwa,* bukan perbuatan dosa dan permusuhan (QS. 5:2). Dalam konteks nasional, *ta'awun* ini hanya dapat berjalan jika dualisme ekonomi, monopoli, ologopoli, nepotisme dan *ersatz capitalism* dihilangkan, lalu diganti dengan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan kolusi.

Keempat, kunci dalam kaidah *mashlahah* atau perkara yang dapat menguntungkan masyarakat. Kalau pelaksananya adalah pemerintah, maka seluruh programnya mestilah ditujukan bagi kemakmuran masyarakat umum, mengikuti rumusan *the greatest happiness for the greatest number.* Aspirasi masyarakat menjadi penting untuk dipertimbangkan agar ditindaklanjuti. *Mashlahah* bagi masyarakat adalah *mashlahah* bagi negara, dan belum tentu sebaliknya.

Kelima, kunci dalam kaidah *'adil* atau adil. Islam mengharuskan keadilan secara mutlak (QS. 4:58 dan QS. 6:152). Nabi pun konsisten dengan sikap adil dalam melaksanakan hukum ini meskipun di lingkungan keluarganya, "andaikan Fathimah putri Muhammad mencuri, tentulah pula aku potong tangannya". Perlakuan adil terhadap sesama adalah prinsip yang dibangun Islam, dan itu merupakan pilar demokrasi.

Keenam, kunci dalam kaidah *taghyir* atau perubahan. Bahwa demokrasi adalah bersumber dari rakyat, sementara rakyat itu sendiri berkembang, berbeda, juga berubah. Maka, demokrasi itu pun mengikuti perubahan, dinamis. Masyarakat *status quo* adalah statis, demokrasinya mati. Dalam wawasan Islam, masyarakat itulah yang harus melakukan perubahan (QS. 13:11).

Secara empiris, masa Nabi s.a.w. bisa dijadikan bukti berkembangnya demokrasi di kalangan umat Islam. Dalam banyak kasus Nabi s.a.w. lebih mengutamakan perdamaian dari pada perang. Ketika Perang Badar usai, umat Islam dikaruniai kemenangan,

sejumlah tawanan tidak dibunuh melainkan ditebus dengan mengajar baca-tulis pada kaum *illiterate.* Peristiwa penaklukan Makkah (*fathu al-Makkah*), semula ditakuti oleh penghuninya sebagai balas dendam dan pemusnahan, tapi apa yang dilakukan Nabi s.a.w. justru sebaliknya, memberi rasa aman kepada pihak yang semula memusuhi Nabi s.a.w. Perjanjian Madinah (*mitsaq al-Madinah*) dapat dianggap sebagai ekspresi perundang-undangan demokratis yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah di atas. Bahwa dalam lintasan sejarahnya, umat Islam mengalami serangkaian konflik, perang dan penaklukan, tidak bisa diartikan sepihak, tetapi haruslah adil, sebab jalan damai telah ditempuh baik sebelum maupun sesudah peristiwa tersebut. Meskipun peristiwa sepeninggal Beliau s.a.w., terjadi banyak konflik politik-ideologis yang berakibat munculnya berbagai bentuk negara yang tidak memberi ruang gerak bagi partisipasi rakyat, tidak bisa dipahami bahwa Islam itu identik dengan anti-demokrasi. Karena di sisi lain, gerakan demokratisasi disuarakan secara vokal. Gerakan ke arah demokratisasi di segala bidang oleh umat Islam ini tidak boleh dikesampingkan hanya karena bentuk kenegaraan atau kasus tertentu di kalangan umat Islam yang tidak demokratis. Ambil contoh, perjuangan politik SI, gerakan berbagai Ormas Islam semisal Muhammadiyah, NU, dan lainnya, di bidang ekonomi, sosial, dakwah dan pendidikan, semuanya merupakan fakta empiris upaya demokratisasi menurut bidangnya masing-masing. Lemahnya kehidupan demokrasi di dunia Islam lebih didasarkan oleh argumen di luar doktrin agama Islam, bukan *theologically driven* melainkan *socio-culturally driven.*

HAM versi Islam

Doktrin Islam yang mempunyai afinitas dengan HAM bisa dikatakan lebih banyak daripada prinsip-prinsip Islam tentang

demokrasi. Problem HAM muncul karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, saling berinteraksi dengan manusia lain, di mana saat berinteraksi itu isu HAM selalu menyertainya. Bisa dimengerti pentingnya HAM ini bila dikaitkan dengan interaksi manusia sebagai kelompok menurut suku, adat, ras dan agama. Interaksi antar sesama manusia secara harmonis akan menentramkan kehidupan antar kelompok tadi. Sebaliknya, jika terjadi konflik akibat pelanggaran HAM oleh salah satu kelompok, bisa memecah belah kerukunan dan persatuan mereka. Padahal untuk mengembalikan ke situasi semula tidaklah mudah dan butuh waktu lama, di samping membutuhkan semangat toleransi dan sikap arif antarkelompok. Itu sebabnya internalisasi pendidikan berwawasan HAM perlu dilakukan sejak dini, agar tertanam kesadaran menghargai hak manusia lain.

Jelas sekali, Islam memiliki peran penting dalam masalah HAM ini. Pemahaman HAM dalam sudut pandang Islam yang utuh diharapkan sebagai upaya preventif bagi terjadinya kerusuhan massal, ketegangan sosial dan pelanggaran kemanusiaan yang masih merajalela di bumi ini. Bagaimana kita bisa memahami konsep HAM dalam sudut pandang Islam? Sebenarnya telah dicapai kesepakatan di kalangan umat Islam sedunia menyangkut HAM yang diadopsi dari ajaran Islam, sebagaimana telah disusun dalam Deklarasi HAM versi Islam. Namun begitu, meskipun secara konseptual prinsip-prinsip Islam tentang HAM telah diformulasikan ke dalam Deklarasi HAM pada 19 September 1981 di Kairo, kasus pelanggaran HAM di dunia Islam masih terus terjadi karena tidak ada *imperative action* untuk penegakan HAM tersebut. Sementara Deklarasi HAM oleh PBB pada Desember 1948, tidak semua *statement* dan poin-poinnya sejalan dengan konsepsi Islam.

Dalam konsep Islam, misalnya, disebutkan bahwa pada hakikatnya kewajiban itu melahirkan hak. Sementara di Barat, tidak dijelaskan demikian. Menurut Islam, hak diciptakan supaya kita bisa menyembah Allah. Selain itu, Deklarasi PBB menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh sesuatu seimbang dengan kerjanya. Sementara Deklarasi Kairo, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, membenarkan prinsip itu, tetapi menolak sistem monopoli. Jadi, di bidang ekonomi lebih jelas konsep Islam untuk menolak monopoli karena monopoli merusak kehidupan dan memecah belah bangsa. Sistem monopoli membuat masyarakat tidak puas satu sama lain. Perbedaan lainnya adalah mengenai kebebasan beragama. Deklarasi PBB memandang, keluar-masuk suatu agama merupakan kebebasan. Tapi, di dalam Islam justru tidak diperbolehkan karena hal itu dianggap *murtad* (QS.2:217). Walaupun begitu, kedua versi HAM tersebut dijumpai banyak kesamaan dalam pelaksanaannya, misalnya: keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, dan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab (Baharuddin Lopa, 1998: 194-195).

Beberapa poin Deklarasi HAM versi Kairo di atas dapat dikemukakan isi utamanya adalah sebagai berikut: *Pertama,* hak untuk hidup dan tidak diperlakukan semena-mena. Al-Qur'an memandang bahwa hidup itu merupakan karunia Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Tidak boleh dengan mudahnya membunuh orang/jiwa lain apalagi diri sendiri. Barang siapa membunuh satu orang (jiwa), seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa menghidupi seseorang (jiwa), seolah-olah ia telah menghidupi seluruh umat manusia (QS. 5:32). Pada dasarnya manusia itu tidak ada, lantas diadakan (dihidupkan) dari ketiadaan, lalu dimatikan dan kemudian dibangkitkan kembali dari kematiannya (QS. 2:28). Allahlah

yang menghidupi makhluk hidup, dan menjadikan sesuatu itu hidup atau mati dengan seizinnya (QS. 22: 66; QS.2:258; QS. 3:49; dan QS. 50:43).

Kedua, hak bebas memilih agama dan keyakinan. tidak ada paksaan dalam agama (QS. 2:256), tiap orang berhak untuk bebas melaksanakan ibadah dan keyakinannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Tak seorang pun diperkenankan menghina atau mengejek keyakinan beragama umat lain atau menanamkan permusuhan bagi mereka. Menghormati perasaan umat beragama lain merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Sikap demikian bukan berarti memandang semua agama itu sama atau mencampur-adukkan keyakinan umat beragama, melainkan sikap saling menghormati antarumat beragama, tanpa meninggalkan identitas agamanya sendiri (lihat QS.109:1-6).

Ketiga, hak berpendapat dan berkumpul. Tiap orang berhak ikut serta, baik secara individual atau kolektif dalam kehidupan suatu agama, masyarakat, budaya maupun politik, juga berhak mendirikan badan atau lembaga yang dimaksudkan untuk terlibat dalam melaksanakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar.* Menuntut ilmu dan meneliti kebenarannya bukan saja merupakan hak tapi juga kewajiban bagi setiap Muslim. Tiap orang berhak menerima pendidikan sesuai dengan kemampuan alaminya. Ia pun bebas memilih profesi dan karier serta kesempatan bagi pengembangan karunia alam yang ada dalam dirinya. Termasuk dalam kategori ini adalah hak dan kewajiban tiap Muslim untuk melakukan protes dan gerakan (dalam batas yang telah ditentukan oleh hukum), terhadap penindasan, termasuk yang melibatkan perlawanan terhadap pihak kekuasaan tertinggi dalam satu negara.

Keempat, hak memiliki harta. Islam, di samping mengakui adanya hak milik pribadi, dengan prinsip bahwa segala yang diciptakan oleh Allah ini adalah untuk kesejahteraan manusia, juga mengajarkan adanya hak orang lain terhadap milik pribadi. Wujudnya disalurkan melalui insentif, zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf, waris maupun hadiah atau lainnya. Jadi, tidak ada monopoli sepihak, dan justru menciptakan solidaritas sosial sesama manusia, dan mengharmoniskan antara hak pribadi dengan hak orang lain. Islam juga melarang kepemilikan harta secara tidak sah (KKN, suap, perjudian, pungli, riba' dan lain-lain, lihat QS. 4:29).

Kelima, hak memperoleh kehormatan dan reputasi. Menurut Al-Qur'an, manusia adalah makhluk yang terhormat atau mulia (QS.17:70). Itu sebabnya seseorang dilarang mencela atau mengumpat orang lain (QS.104:1-3; QS. 49:11). Seorang Muslim itu bersaudara bagi Muslim yang lain. Satu sama lain tidak saling mengkianati dan melecehkan kehormatannya, hartanya dan darahnya.

Melaksanakan hak tidak berarti sama dengan berbuat bebas (*liberal*) sebebas-bebasnya, karena di sana terdapat orang lain yang juga berhak melakukan sesuatu. Hak yang tidak dibatasi dapat meruntuhkan suatu sistem. Pembatasan demikian tentunya dilakukan dengan alasan yang jelas, misalnya: demi kepentingan keamanan dan ketertiban, moral, perlindungan hak-hak orang lain, atau demi kesejahteraan dan kesehatan umum. Bukan sebaliknya, karena alasan keamanan lantas hak-hak individu dibatasi. Ini malah menjurus pada otoriterianisme hak, dirinya sendiri yang berhak sementara orang lain tidak.

Dalam Islam, hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Ada dua macam kewajiban: kewajiban *kifayah* (kolektif) dan ke-

wajiban *'ain* (individual). Baik sebagai individu maupun kolektif, manusia memiliki kewajiban kepada Allah, yakni beribadah (QS. 51:56) , kewajiban kepada diri sendiri, kewajiban kepada keluarga (QS. 66:6), kewajiban kepada tetangga (QS. 4:36), kewajiban terhadap buruh (QS. 6:2), kewajiban kepada harta (QS. 51:19), kewajiban kepada negara (QS. 4:59), begitu pula sebaliknya kewajiban negara kepada rakyatnya (QS. 4:135; QS. 5:8), kewajiban terhadap lingkungan (QS. 30:41), dan lain-lain. Pendidikan Islam berwawasan HAM menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Wawasan demikian dibutuhkan untuk mereduksi, kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali, ketegangan sosial, konflik etnis serta kasus pelecehan HAM lainnya yang terjadi selama ini.

Nilai Kontributif Buku ini

Buku yang sedang Anda baca ini merupakan hasil penelitian dalam rangka penulisan tesis di Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Islam Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo di mana saya sebagai pembimbingnya. Oleh karena itu, buku ini telah teruji melalui proses bimbingan, ujian munaqasah, dan perbaikan atas saran dan keberatan dewan penguji yang dilakukan oleh penulis, lalu dikembangkan dalam bentuk buku ini. Perlu niat yang kuat untuk menulis sebuah buku, karena pada umumnya menulis buku memerlukan waktu yang relatif lama dan proses berpikir mendalam, di mana tidak semua orang punya kesempatan dan kemauan untuk itu. Apalagi, olah pikir yang telah diwujudkan dalam bentuk buku ini masih menuntut tanggungjawab ilmiah dari penulisnya. Namun demikian, panggilan jiwa menulis tersebut telah dilalui oleh Saudara Sri Haryanto, sehingga melalui goresan tinta ilmu ini diharapkan membawa manfaat bagi khalayak, khususnya umat Islam.

Karya tulis dalam buku ini patut diapresiasi karena berupaya untuk menguak lebih dalam masalah demokrasi dan humanisme yang dianalisnya dalam perspektif Islam. Pada awalnya saya sendiri ragu bagaimana Saudara Sri Hariyanto bisa menjelaskan konsep demokrasi dan humanisme yang notabene berkembang di dunia Barat dan Eropa yang sekuler tersebut dapat dicermati dalam sudut pandang Islam yang sarat dengan nilai-nilai kewahyuannya. Namun setelah diskusi panjang, ternyata Saudara Sri Haryanto mampu menguraikan benang kusut kesenjangan di antara keduanya. Dunia Barat dan Eropa memaknai demokrasi dan humanisme secara sekuler dan kering agama sehingga menjadikan pola interaksi manusia dalam dimensi antropo-sentris semata, sementara saratnya nilai-nilai ketuhanan dalam ajaran Islam cenderung pada teo-sentris. Dalam titik ini, Saudara Sri Haryanto ternyata mampu mengembangkan konsep dinamis pendidikan Islam yang demokratis dan humanis tanpa terjebak dalam sekularisme, sekaligus menawarkan gagasan pembenahan pendidikan Islam dengan pendekatan teo-demokrasi, dan di saat yang sama pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (*huquq al-Insan*) secara universal. Inilah nilai kontributifnya. Lagi pula, yang spesifik dalam buku ini adalah tinjauannya dalam sudut pandang Islam, atau implementasinya dalam pendidikan Islam cukup kuat, suatu hal yang tidak mudah dilakukan oleh penulis lain.

Saya sendiri mengenal penulis sebagai orang yang proaktif di Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Islam Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo dalam kajian dan forum ilmiah. Hadirnya buku ini di tengah para pembaca yang budiman adalah sebagai bukti bahwa mereka yang terlibat di dunia pendidikan tinggi haruslah memiliki tanggungjawab keilmuan yang tinggi pula. Pada gilirannya buku ini diharapkan dapat berdampak pada pembenahan pendidikan Islam yang selama ini dinilai masih

sarat dengan berbagai keterbatasan. Karenanya, buku ini dapat memberi manfaat tidak hanya pada para guru yang berkecimpung langsung dalam proses pembelajaran melainkan juga dapat menambah wawasan bagi khalayak umum yang berminat. Semoga bermanfaat!

PENGANTAR PENULIS

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul *Kerangka Paradigmatik Pendidikan Demokratis dan Humanistik.*

Buku ini disusun dilatarbelakangi keprihatinan penulis terhadap praktik pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung selama ini, yang tanpa disadari sedang mengalami proses *de-demokrasi* dan *de-humanisme,* hal ini ditandai dengan proses pembelajaran yang masih cenderung memperlakukan peserta didik tidak lebih sebagai pelayan, dengan menempatkan posisi pendidik sebagai tuannya. Peserta didik masih saja menjadi objek pendidikan. Mereka diposisikan sebagai orang yang tertindas, orang kalah, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang harus dikasihani, karenanya harus dijejali dan disuapi berbagai materi, dan bahkan dilakukan indoktrinasi-indoktrinasi. Dengan perkataan lain, proses pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung selama ini juga belum diarahkan untuk memanusiakan manusia secara "utuh" dan "paripurna", tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti luhur.

Bahkan sekolah sebagai ujung tombak pendidik secara sengaja ataupun tidak, selama ini telah menanamkan sikap berlebihan pada diri siswa bahwa pentingnya belajar adalah untuk mengha-

dapi ujian. Ujian merupakan target dan derajat tertinggi yang harus dikuasai dan ditempuh dengan segala cara. Akibatnya makna dan hakekat belajar sudah menjadi semakin sempit dan dangkal; hanya untuk menghadapi ujian. Sekolah telah melupakan betapa pentingnya memperhatikan dan memberikan penghargaan kepada para siswa dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing individu secara optimal.

Seiring dengan itu, tindak kekerasan di dunia pendidikan juga semakin marak, belum lama ini dunia pendidikan tercoreng oleh kasus kekerasan di IPDN, geng motor, tawuran antar mahasiswa, sampai pada perilaku pergaulan bebas yang dilakukan kalangan pelajar dan mahasiswa. Sebelumnya, berbagai kasus kekerasan belum lepas dari ingatan, sebut saja kasus Unas dan Monas yang telah banyak menarik perhatian masyarakat. Terungkapnya Geng Nero di Pati Jawa Tengah, menambah deret panjang perilaku kekerasan dalam dunia pendidikan. Kasus parah lainnya yang tampak sebagai indicator degradasi moral dalam pandangan umum adalah tawuran yang sering dilakukan di kalangan pelajar, yang ternyata juga merambah di kalangan mahasiswa.

Atas dasar itulah, penulis menganggap perlu adanya terobosan baru dalam dunia pendidikan, yakni dengan mengagas format baru dalam pendidikan Islam, sebuah format pendidikan yang menempatkan manusia sebagai manusia (*fi ahsani takwim*) dengan beragam potensinya yang harus dikembangkan secara optimal, pendidikan yang mengembangkan kecakapan hidup untuk dapat hidup selaras dengan kondisi pribadi dan lingkungan, pola pendidikan yang berfokus pada peserta-didik (*student center*), pendidikan yang menghargai keragaman karakteristik peserta didik, pendidikan yang didalamnya terdapat suasana saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkap-

kan gagasan, adanya keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama (komunal-bermasyarakat) di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dan salah satu tawaran strategis dalam tataran paradigmatik adalah dengan membangun dan mengembangkan format pendidikan Islam yang demokratis dan humanistik.

Penulis menyadari penulisan buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang. Kepada Penerbit Bildung, terima kasih telah bersedia menerbitkan dan menyebarkannya secara luas sehingga dapat dapat diakses oleh masyarakat luas. Akhir kata, penulis berharap semoga karya sederhana ini bernilai ibadah di hadapan Allah Swt., bermakna bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Terima kasih.

Wonosobo, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA

BAB 1
PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan komponen kehidupan manusia yang paling penting. Aktifitas ini telah ada dan akan terus berlangsung sejak manusia pertama ada di dunia hingga berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Bahkan jika ditarik mundur lebih jauh, proses pendidikan ini ternyata telah berlangsung semenjak Allah Swt., menciptakan Adam, a.s. Pada saat itu Allah Swt., mengumpulkan tiga golongan mahluk yang telah diciptakan-Nya untuk diadakan Proses Belajar Mengajar (PBM). Tiga golongan mahluk dimaksud adalah Jin, Malaikat dan Manusia.

Setelah Proses Belajar Mengajar selesai, kemudian Allah Swt., mengadakan evaluasi dengan cara bertanya dan menyuruh mereka menjelaskan seluruh materi pelajaran yang telah diberikan. Dan ternyata Adam-lah yang berhasil menjadi juara dalam ujian tersebut.[1] Proses pendidikan ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia. Sejak manusia berinteraksi dengan aktifitas pendidikan ini, maka semenjak itu pula manusia telah berhasil merealisasikan berbagai perkembangan dan kemajuan dalam segala lini kehidupan mereka. Ini sejalan dengan perkataan Ibnu al-Khaldun, bahwa pendidikan adalah suatu yang alami dalam perkembangan peradaban manusia.[2]

---

[1] Proses Belajar Mengajar yang dilakukan Allah Swt., ini selengkapnya baca QS. al-Baqarah [2]: 30 – 33.

[2] Abdurrahman Ibnu Al Khaldun, *Muqaddimah*, cet.I (Beirut: Daar alFikr, 1998), hal. 412.

Secara paralel proses pendidikan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam metode, sarana maupun target yang akan dicapai, karena ini merupakan salah satu sifat dan keistimewaan dari pendidikan, yaitu selalu bersifat maju (*taqaddumiyyah*). Sehingga apabila sebuah pendidikan tidak mengalami serta tidak menyebabkan suatu kemajuan atau justru menimbulkan kemunduran maka tidaklah dapat dinamakan pendidikan, sebab esensi dari pendidikan adalah sebuah aktifitas integral yang mencakup target, metode dan sarana dalam membentuk manusia-manusia yang mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal demi terwujudnya kemajuan yang lebih baik.[3]

Dalam konsepsi Islam pendidikan merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan. Kedewasaan dalam bentuk akal, mental, maupun moral dalam rangka menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba dihadapan khalik-Nya (*Abdullah*) dan sebagai duta Allah (*khalifah Allah)* di alam semesta. Hal ini meniscayakan adanya kebebasan gerak bagi setiap elemen dalam dunia pendidikan (terutama peserta didik) untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal, sehingga memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat.

Pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan suatu generasi baru yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri tapi juga tidak bodoh secara intelektual. Ini artinya, kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikannya. Sebaliknya tanpa pendidikan maka diyakini jika manusia sekarang tidak akan berbeda dengan generasi manusia masa lampau, yang sangat tertinggal baik kualitas ke-

[3] Mushthafa 'Abdus Sami', *Teknolojia At Ta'lim*, (1999), dalam Irsyad Syafar Buan "Orientasi Pembaharuan Pendidikan dalam Tantangan Modernitas", *Jurnal OASE* edisi 16 (2000), hal. 10

hidupan maupun proses-proses pembedayaannya. Bahkan dapat dikatakan maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut.

Potret Pendidikan Islam Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia.[4] Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak-kontak pribadi maupun kolektif antara mubaligh (pendidik) dengan peserta didiknya, setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah, selanjutnya mereka membangun tempat peribadatan seperti masjid.[5] Tahap selanjutnya, muncullah lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti pesantren, mushola, surau, rangkang, dayah. Nama-nama tersebut walaupun berbeda tetapi hakikatnya sama yakni sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan keagamaan. Perbedaan nama itu adalah dipengaruhi oleh perbedaan tempat. Perkataan pesantren popular di masyarakat Jawa, rangkang dan dayah di Aceh, dan surau di Sumatera Barat. Inti dari materi pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu keagamaan yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik.[6]

Dalam konteks ke-Indonesia-an, pendidikan Islam merupakan salah satu variasi dari konfigurasi sistem pendidikan nasional,

---

[4] Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia dipandang dari segi historis dan sosiologis sangat kompleks dan terdapat banyak masalah, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam. Ada perbedaan antara pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 M, dan pendapat baru menyatakan jika Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-7 M. Lihat, A. Mustofa Abdullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah, (*Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 23.

[5] Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama muncul di samping rumah tempat kediaman ulama atau mubaligh.

[6] Kitab-kitab Islam klasik dikarang para ulama terdahulu dan termasuk pelajaran mengenai macam-macam ilmu pengetahuan agam Islam dan Bahasa Arab. Dalam kalangan pesantren, kitab-kitab Islam klasik sering disebut kitab kuning oleh karena warna kertas edisi-edisi kitab kebanyakan berwarna kuning.

tetapi dalam kenyataannya pendidikan Islam di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Apabila dirasakan memang terasa janggal dalam komunitas masyarakat Muslim perhatian pemerintah pada pendidikan Islam sangatlah kecil porsinya. Padahal pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan karakter bangsa.

Pada sisi lain, pendidikan Islam hingga saat ini masih saja menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, dari permasalah yang bersifat konseptual-teoritis hingga persoalan operasional-praktis. Menurut Bassam Tibi, sebagaimana yang dikutip Abdul Wahid, pendidikan Islam saat ini sedang mengalami masalah-masalah yang besar seperti, dikotomi (*dichotomic),* ilmu pengetahuannya yang masih bersifat umum (*too general knowled)*, maupun rendahnya semangat penelitian (*lack of spirit of inquiry)*.[7]

Tidak jauh berbeda Azyumardi Azra, dalam *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milennium Baru* mengatakan, pendidikan Islam di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek, yaitu: berupa persoalan dikotomi pendidikan; kurikulum; tujuan; sumber daya; serta manajemen pendidikan Islam. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional.[8]

---

[7] Abdul Wahid, "Pendidikan Islam Kontemporer: Problem Utama, Tantangan dan Prospek" dalam Ismail SM (*ed.*), *Paradigma Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 275-292.

[8] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milennium Baru,* (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), hal 59. Lihat pula dalam, Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Safiria Insania Press), hal.9

H.M. Idris Suryana KW mengemukakan; "Selama ini pendidikan kita lebih banyak menggunakan literatur barat yang steril dan terlepas dari nilai-nilai penanaman keimanan dan keislaman. Oleh karena itu sumber-sumber informasi perlu diseimbangkan dengan banyak menulis literatur ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam, tapi hal itu bukan berarti mendikotomikan antara umum dan ilmu-ilmu agama". Pendidikan yang hanya terbatas pada belantara kulit-kulit teori hanya akan melahirkan pendidikan yang bersifat "dogmatis" tidak "kreatif".[9] Padahal pendidikan Islam mengemban tugas penting, yakni bagaimana mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar umat Islam dapat berperan aktif dan tetap "survive" di era globalisasi. Dalam kaitan ini Mukti Ali memproyeksikan, kelemahan pendidikan Islam dewasa ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti, kelemahan dalam penguasaan sistem dan metode; bahasa sebagai alat untuk memperkaya persepsi; dan ketajaman interpretasi [*insight*], dan kelemahan dalam hal kelembagaan [organisasi], ilmu dan teknologi.[10]

Dalam realitasnya pendidikan Islam saat ini memang diakui banyak pihak masih terkukung dalam kemunduran, kekalahan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan, di antara indikasinya menurut Abd. Rachman Assegaf, adalah:

1. minimnya upaya pembaharuan;
2. praktik pendidikan Islam sejauh ini masih memelihara warisan yang lama dan tidak banyak melakukan pemikiran kreatif, inovatif dan kritis terhadap isu-isu aktual;
3. model pembelajaran pendidikan Islam terlalu menekankan pada pendekatan intelektualisme-verbalistik dan mengasing-

[9] H.M.Idris Suryana KW, dalam Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal.12

[10] HM. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara1991). hal.3

kan pentingnya interaksi edukatif dan komunikasi humanistik antara guru-murid; dan,

4. orientasi pendidikan Islam menitik beratkan pada pembentukan *abd* atau hamba Allah dan tidak seimbang dengan pencapaian karakter manusia muslim sebagai *khalifah fi al-ardl.*[11]

Berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan Islam yang belum dapat terselesaikan dengan baik inilah yang menyebabkan pendidikan Islam belum mampu menyentuh ranah kemanusiaan, realitas sosial menjadi terabaikan, kreatifitas individu sebagai manusia unik menjadi terpasung, sistem hafalan (*memorization*) lebih dominan daripada dialog, rasa ingin tahu, ide segar, orisinilitas, inovasi dan kreativitas peserta didik menjadi hilang, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan "kelas dua". Sampai-sampai muncul anggapan (*stigma*) pendidikan yang apabila diberi embel-embel Islam, berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan.[12]

Melihat kenyataan ini, maka pendidikan Islam perlu didisain untuk menjawab tantangan prubahan zaman, baik pada sisi konsepnya, kurikulum, kualitas sumberdaya insaninya, lembaga-lembaga dan organisasinya serta mengkonstruksinya agar dapat relevan dengan perubahan masyarakat tersebut. Sebab apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, maka segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan.[13] Sehubungan dengan ini, M.Irsyad Sudiro menawarkan desain pendidikan Islam yang perlu diupayakan un-

---

[11] Abd. Rachman Assegaf, "Membangun Format Pendidikan Islam di Era Globalisasi", dalam Imam Machali dan Musthofa (*ed.*), *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi,* cet. I (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), hal. 8-9.

[12] Meskipun sekarang secara berangsur-angsur banyak diantara lembaga pendidikan Islam yang telah menunjukkan kemajuan. Lihat, Soeroyo, "Berbagai Persoalan Pendidikan; Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume I, (Yokyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Suka, 1991), hal. 77.

[13] H.A.R. Tilar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang:Tera Indonesia, Cet. I, 1998), hal.245

tuk membangun paradigma pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan perubahan zaman:[14]

Pertama, lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu mendisain ulang fungsi pendidikannya, dengan memilih apakah:

1. Model pendidikan yang mengkhususkan diri pada pendidikan keagamaan saja untuk mempersiapkan dan melahirkan ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid tangguh dalam bidangnya dan mampu menjawab persoalan-persoalan aktual atau kontemporer sesuai dengan perubahan zaman;
2. Model pendidikan umum Islami, kurikulumnya integratif antara materi-materi pendidikan umum dan agama, untuk mempersiapkan intelektual Islam yang berfikir secara komprehensif;
3. Model pendidikan sekuler modern dan mengisinya dengan konsep-konsep Islam, atau menolak produk pendidikan barat, berarti harus mendisain model pendidikan yang betul-betul sesuai dengan konsep dasar Islam dan sesuai dengan lingkungan sosial-budaya Indonesia;
4. Pendidikan agama tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah tetapi dilaksanakan di luar sekolah, artinya pendidikan agama dilaksanakan di rumah atau lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat berupa kursur-kursus, dan sebagainya.

Kedua, disain pendidikan harus diarahkan pada dua dimensi, yakni:

1. Dimensi dialektika (horisontal), pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan

[14] M.Irsyad Sudiro, *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern, Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Agama Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern*, Cirebon, tanggal, 30-31 Agusrus 1995), hal. 2

sosialnya. Manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia sekitarnya melalui pengembangan Iptek;

2. Dimensi ketundukan vertikal, pendidikan selain menjadi alat untuk memantapkan, memelihara sumber daya alami, juga menjembatani dalam memahamai fenomena dan misteri kehidupan yang abadi dengan maha pencipta. Berati pendidikan harus disertai dengan pendekatan hati.

Inovasi atau penataan fungsi pendidikan Islam terutama pada sistem pendidikan persekolahan juga harus diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga nanti usahanya dapat menjamah pada perluasan dan pengembangan sistem pendidikan Islam luar sekolah.

Di samping inovasi pada sisi kelembagaan factor tenaga pendidikan juga harus ditingkatkan aspek etos kerja dan profesionalismenya, perbaikan materi [kurikulum] yang pendekatan metodologi masih berorientasi pada sistem tradisional dan perbaikan manajemen pendidikan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan pendidikan Islam tidak tersendat-sendat. Sebab kalau pendidikan Islam masih berpegang kepada tradisi lama yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pendidikan Islam tidak akan bisa mengalami perkembangan.

Inovasi-inovasi yang harus segera dilakukan dalam menata ulang pendidikan Islam, di antaranya adalah:

Pertama, Pendidikan Islam harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama.[15] Sistem pendidikan umat Islam yang masih terdikotomikan kepada sistem

[15] Muhaimin, dkk., *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman, Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Cirebon: Pustaka Dinamika), hal.110-112.

tradisional (Islam) dan modern (sekuler) harus segera dicarikan solusinya. Proses pemecahan masalah atas problem ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu yang dipelajari pada sistem pendidikan tradisional dan yang dipelajari pada sistem pendidikan modern secara organis dan menyeluruh. Akibat dari adanya sistem pendidikan yang dikotomis ini lahir-lah pribadi-pribadi yang memiliki standar moral ganda. Misal-nya, seorang muslim yang taat beribadah, pada saat yang lain melakukan korupsi, menindas orang lain, dan melakukan per-buatan-perbuatan tercela. Untuk mengatasi hal ini, peserta didik harus diberikan pelajaran al-Qur'an melalui metode-metode yang memungkinkan kitab suci itu bukan sekadar sebagai sumber in-spirasi, tetapi juga sebagai sumber rujukan tertinggi untuk me-mecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang se-makin kompleks dan menantang. Cara mengatasi hal di atas perlu juga dilakukan dengan mengajarkan disiplin-disiplin ilmu Islam secara historis, kritis, dan holistik kepada peserta didik.[16]

Kedua, Perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lemba-ga-lembaga pendidikan Islam. Artinya, lembaga-lembaga pendi-dikan meski menjadi tempat untuk mempelajari ilmu umum dan ilmu agama serta *skill* (keterampilan) yang berguna dan dapat di-aplikasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, Menerapkan paradigma baru pendidikan Islam yang ditawarkan Prof. Djohar yakni:

1. pendidikan adalah proses pembebasan;
2. pendidikan sebagai proses pencerdasan;
3. pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak;

[16] Lihat, A. Malik Fadjar, "Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah", *Makalah Seminar dan Lokakarya Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21*, (IAIN, Cirebon, tanggal, 31 Agustus s/d 1 September 1995), hal.5.

4. pendidikan menghasilkan tindakan perdamaian;
5. pendidikan adalah proses pemberdayaan potensi manusia;
6. pendidikan menjadikan anak berwawasan integrative;
7. pendidikan wahana membangun watak persatuan;
8. pendidikan menghasilkan manusia demokratik;
9. pendidikan menghasilkan manusia yang peduli terhadap lingkungan;
10. sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan.[17]

Kelima, Mengintegrasikan pendidikan Islam tradisional (pesantren) yang dikembangkan NU dan pendidikan Islam modern yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Pendidikan Pesantren diharapkan untuk tetap dapat menjaga originilitas ulama. Sedangkan pendidikan Islam modern diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK. Hal ini sejalan dengan kaedah usul yang mengatakan, *"al-muhafadhoh 'alal qodimis soleh wal akhdu biljadidil ashlah"* (menjaga tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Keenam, Membuka lebar ruang interaksi dengan keluarga dan masyarakat agar keduanya dapat berperan optimal dalam menunjang proses pendidikan. Sinergi pengaruh positif dari faktor pendidikan sekolah/kampus - keluarga - masyarakat inilah yang akan membuat pribadi anak didik terbentuk secara utuh sesuai dengan kehendak Islam.

Ketujuh, Perlu adanya rekontruksi metode atau model pembelajaran yang digunakan di dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini pendidikan Islam dapat menggunakan metode pembelajaran yang berkarakter demokratis dan humanistik. Dengan harapan

[17] Djohar, *Omong Kosong, Tanpa Mengubah UU No. 2/89*, dalam *Kedaulatan Rakyat*, Tanggal, 4 Mei 1999), hal, 12.

dapat mengukuti tuntutan anak modern yang selalu kritis dan lebih berpikiran maju dari anak zaman dahulu yang cenderung manut dan tunduk terhadap apa yang disampaikan guru.

Kedelapan, Pendidikan Islam harus lebih memprioritaskan kepada ilmu terapan yang sifatnya aplikatif, bukan saja dalam ilmu-ilmu agama akan tetapi juga dalam bidang teknologi. Sebab selama ini pendidikan Islam terlalu terkonsentrasikan pada pendalaman dikotomi halal haram dan sah batal, namun mengabaikan kemajuan IPTEK yang menjadi sarana untuk mencapai kemajuan di era modern ini.

Kesembilan, Pendidikan Islam haruslah memperhatikan pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomtorik secara integral dan seimbang. Kecerdasan *kognitif* dan *afektif* harus dipadukan agar menjadi pacuan bagi kemampuan gerak dan laku manusia (*psikomotorik*). Sebab jika masing-masing dimensi itu dipisahkan, maka eksistensi kemanusiaan akan terpotong-potong, tak ubahnya makhluk lainnya di muka bumi. Dengan kata lain, pendidikan Islam haruslah berorientasi pada upaya pengembangan potensi manusia sesuai dengan fitrah kemanusiaanya secara komprehensif.

Kesepuluh, Pola pendidikan gaya lama yang menganggap peserta didik sebagai "wadah kosong" yang diisi semaunya oleh pendidik perlu diganti dengan sistem pendidikan yang dapat mengembangkan segenap potensi peserta didik dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek, bukan sebagai objek belajar.

Kesebelas, Pendidikan Islam harus diupayakan untuk mengalihkan paradigma yang berorientasi ke masa lalu (abad pertengahan) ke paradigma yang berorientasi ke masa depan, yaitu mengalihkan dari paradigma pendidikan yang hanya mengawetkan kemajuan, ke paradigma pendidikan yang merintis kemajuan.

Mengalihkan paradigma yang berwatak *feodal* ke paradigma pendidikan yang berjiwa demokratis dan humanistik.

Beberapa hal di atas merupakan tawaran desain pendidikan Islam yang perlu diupayakan untuk membangun pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan perubahan zaman dan memasuki era globalisasi. Perbaikan (inovasi) ini sebenarnya sama dengan menggagas paradigma baru pendidikan Islam. Tegasnya, perlu paradigma baru dalam pendidikan Islam, suatu paradigma pendidikan yang mampu menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru, paradigma pendidikan yang menempatkan manusia sebagai "manusia" mahluk terbaik (*ahsani taqwim*) ciptaan Allah yang memiliki berbagai potensi utuk dikembangkan secara optimal. Dan di sinilah urgensinya mengapa pendidikan Islam yang demokratis dan humanistik penting untuk dikembangkan dalam pendidikan, termasuk dalam pendidikan Islam.

BAB 2
ISLAM DAN DEMOKRASI

Semangat baru demokrasi yang kembali digagas para pemikir dan filosof abad pertengahan (*medieval*) telah melahirkan abad pencerahan di Eropa, menumbangkan banyak penguasa zalim, dan menimbulkan gelombang kesadaran serta kemajuan di negara-negara barat, khususnya kemajuan yang bersifat kuantitatif. Namun ironisnya, hampir seluruh proses demokratisasi di berbagai wilayah dunia justru ditegakkan dengan susah payah dan seringkali berdarah-darah, anarkis, krisis ekonomi, dan bahkan beberapa di antaranya justru karena intervensi asing.

Meski demikian, hingga saat ini ide demokrasi masih menjadi sebuah agenda penting pembicaraan di seluruh dunia. Manusia dari berbagai bangsa, dengan berbagai latar belakang agama, peradaban dan sejarah, umumnya mengakui demokrasi sebagai sesuatu yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan di era global ini, demokrasi telah dianggap sebagai sebuah norma global dunia. Sampai-sampai Saiful Mujani, seorang peneliti pada Pusat Kajian Masyarakat Islam mengatakan, "hampir tidak mungkin menolak demokrasi di zaman sekarang ini. Demokrasi sudah menjadi semangat dan anak zaman. Menolak demokrasi sama artinya dengan menolak zaman".[1]

---

[1] Saiful Mujai, "Demokrasi dan Retorika Kelompok Dominan (Catatan untuk Denny J.A)", *Harian Republika*, (Jakarta: 4 Agustus 1995).

Dalam perjalanannya, konsep yang pada mulanya berkembang dalam pemikiran Yunani itu kemudian banyak berpengaruh terhadap sistem pemerintahan di Eropa, Amerika, Afrika dan termasuk Indonesia. Demokrasi saat ini telah dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang paling baik dibandingkan dengan sistem pemerintahan lain, seperti otokrasi, dan oligarkhi.

A. Makna dan Hakikat Demokrasi

Demokrasi merupakan kata yang mempunyai konotasi istilah khas, yang sengaja dipergunakan oleh pencetusnya untuk menyebut sistem pemerintahan tertentu yang dibangun berdasarkan asas rakyat sebagai sumber kekuasaan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Herodot yang lahir pada abad 5 M, ketika itu ia menggunakan kata *democratia* dalam bentuk pemerintahan hasil pembaruan yang dikemukakan oleh Kleinstenes.[2]

Dalam konteks historis, teori kedaulatan rakyat atau demokrasi ini, timbul sebagai reaksi dari kedaulatan yang diprakarsai oleh Jean Jacques Rousseau yang mengajarkan, bahwa dengan perjanjian masyarakat (*du contract social*), maka orang menyerahkan kebebasan hak-hak serta wewenangnya pada rakyat seluruhnya yaitu *natural liberty,* dalam suasana bernegara kembali sebagai *civil liberty.*[3] Sehingga kekuasaan tertinggi tetap berada ditangan rakyat yang diselenggarakan melalui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak (*volontegenerale*).

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari dua kata yakni *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan (*rule*) atau kekuasaan (*strength*).[4] Dalam Kamus

[2] H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Padagogik Transformatif untuk Indonesia,* (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 26.

[3] Padmo Wahyono, *"Ilmu Negara" Kumpulan Kuliah,* Peng. T. Amir Hamzah, dkk. (Jakarta: tnp., 1996), hal. 161.

[4] Sunil Bastian dan Robin Luckham (*ed.*), *Can Democracy be Designed? The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*, (London & Newyork: Zed Books, 2003), hal.15.

Bahasa Indonesia, istilah demokrasi diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya (pemerintahan rakyat); demokrasi dimaknai pula sebagai sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.[5]

Dalam karya klasik Yunani yang berjudul *Polis*, istilah demokrasi mengacu pada konstitusi (sistem pemerintahan) tempat rakyat yang lebih miskin lebih bisa menggunakan kekuasaan untuk membela kepentingan mereka yang acap kali berbeda dengan kepentingan kaum kaya dan kaum bangsawan.[6] Dalam pemahaman Yunani Kuno, demokrasi setidaknya harus memenuhi syarat-syarat seperti, warga Negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka; mereka harus padu dan homogen; jumlah warga Negara harus kecil (bahkan kurang dari 40.000 orang).

Aristoteles, filsuf Yunani kelahiran 387 SM kemudian menjabarkan istilah demokrasi dalam hubungannya dengan konsep kedaulatan negara, apakah dipegang oleh satu orang, sekelompok orang atau banyak orang. Apabila satu orang yang memegang kedaulatan untuk kepentingan orang banyak maka disebut monarki.[7] Jika yang memegang kedaulatan sekelompok orang untuk orang banyak maka disebut aristokrasi.[8] Bentuk kemunduran dari monarki adalah tirani. Tirani merupakan kedaulatan yang dipegang oleh satu orang, namun untuk kepentingannya sendiri.

---

[5] Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 337.

[6] Loytard, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996), hal. 214.

[7] *Monarchia* berasal dari *monos* dan *arche. Monos* berarti sendiri; dan *arche* berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, monarki secara bahasa berarti pemerintahan satu orang. Baca: J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles,* Cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 46.

[8] Aristokrasi berasal dari *aristos* dan *kratos. Aristos* berarti paling baik; dan *kratos* berarti kekuasaan atau pemerintahan. Oleh karena itu, arti aristokrasi secara bahasa adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh beberapa orang yang paling baik atau paling arif. Baca: J. H. Rapar, *Filsafat Politik,* hal. 46.

Selanjutnya ada oligarki,[9] yang merupakan kemunduran dari aristokrasi, dan akhirnya adalah demokrasi sebagai bentuk penyimpangan dari *politiea,*[10] yaitu jika kedaulatan negara dipegang oleh banyak orang yang tidak punya tujuan.[11]

Senada dengan Aristoteles, Plato menggunakan istilah demokrasi sebagai salah satu dari lima bentuk sistem politik negara lainnya, yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Berbeda dengan sistem politik tersebut, demokrasi ini memberi kesempatan kepada rakyat untuk turut menentukan arah kebijaksanaan pemerintah. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan yang menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Dalam bentuk negara demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum lebih diutamakan.[12]

Dalam konteks ini, Abraham Lincoln[13] pada tahun 1867, memberikan pengertian demokrasi sebagai "*government of the people, by the people, and for the people*". (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Ini artinya, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan otomatis kedaulatan juga berada di tangan rakyat.

Kalangan ilmuwan politik juga telah merumuskan definisi demokrasi secara empirik, di antaranya adalah Deliar yang menganggap demokrasi sebagai dasar hidup bernegara, ini memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ke-

---

9 Oligarki berasal dari kata *oligon* yang berarti sedikit, dan *arche* yang artinya kekuasaan.

10 Secara bahasa, *politeia* berati konstitusi.

11 Slamet Effendy Yusuf, "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila", *makalah* disampaikan dalam Kongres Pancasila, kerjasama Universitas Gadjah Mada Yokyakarta dengan Mahkamah Konstitusi RI, (Yogyakarta, 30 Mei – 1 Juni 2009), hal. 7.

12 *Ibid.,*

13 Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16, ia menjadi salah satu Presiden Amerika yang paling termasyhur dan tokoh politik yang mengagumkan. Namanya terkenal ke seluruh dunia sebagai seorang yang mengakhiri perbudakan di Amerika, tercatat dalam sejarah jika ia telah membebaskan 3.500.000 orang budak. Selengkapnya terkait dengan biografi Abraham Lincoln. Lihat, Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Terjemahan H. Mahbub Djunaidi, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1982).

tentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.[14] Sementara Diamond dan Lipset, mendefiniskan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok, berikut:

1. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa;
2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) yang dikecualikan;
3. Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi yang cukup untuk menjamin integratis kompetisi dan partisipasi politik.

Meskipun terdapat perbedaan pemahaman namun secara umum demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau oleh wakil-wakil rakyat yang pilih melalui pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan periodik. Ini artinya, dalam sistem demokrasi rakyatlah yang sesungguhnya memiliki negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

[14] Deliarr, dalam Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*). Cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 19.

Dari uraian di atas bisa dipahami, jika substansi dari demokrasi adalah tegaknya keberdayaan dan kedaulatan rakyat. Substansi tersebut diwujudkan ke dalam sebuah sistem yang merupakan alat bagi rakyat dalam menciptakan kesejahteraannya. Rakyat benar-benar ditempatkan sebagai subjek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi penentu bagi kepentingan mereka sendiri di bawah pengakuan persamaan derajat antara warga satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, suatu negara dapat disebut Negara yang demokratis, jika dalam negara tersebut sudah berkembang proses-proses menuju kondisi yang lebih baik dalam pelaksanaan supremasi hukum; adanya penegakkan HAM; menjunjung tinggi kebebasan berekspresi; serta adanya prinsip kesadaran dalam konteks pluralisme. Dalam konteks ini, demokrasi bisa dipahami sebagai suatu "*polity*" di mana semua warga Negara menikmati kebebasan untuk berbicara, kebebasan berserikat, mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya.[15]

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Pada esensinya demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas Negara, untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.[16] Konsep ini menekankan kekuasaan yang mutlak berada di tangan rakyat yang dalam pepatah Latin dikatakan bahwa, "*vox populi vox Dei*" (suara rakyat adalah suara Tuhan).[17] Ini artinya, dalam konsep demokrasi kedaulatan rakyat tidak boleh dikom-promikan dengan apa dan siapa pun, kehendak rakyat seakan-akan kehendak Tuhan. Di

---

[15] Ma'mun Murod, *Menyingkap.*, hal. 59.

[16] H.A.R. Tilaar, *Perubahan.*, hal. 27.

[17] M. Amin Rais, "Masalah-masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia", *Jurnal Milenium: Agama dan Tamaddun*, No. 1. Th 1. (Januari-April,1998), hal. 7.

samping itu juga ada pepatah yang mengatakan, "*salus populi supreme lex*" (kekuasaan rakyat adalah hukum yang paling tinggi). Oleh karena itu, dalam demokrasi ditetapkan bahwa hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat.[18]

Konsep demokrasi yang menekankan kedaulatan tertinggi untuk mengelola kehidupan suatu bangsa atau negara ada di tangan rakyat ini, mengharuskan setiap individu memiliki posisi yang sama untuk menentukan kearah mana suatu masyarakat atau bangsa harus melangkah. Hal ini sejalan dengan doktrin politik dari konsep ini, yakni keikutsertaan masyarakat dalam agenda penyusunan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menjadi ketentuan dalam hidup bernegara.[19]

Teori yang berhubungan dengan ajaran kedaulatan rakyat tersebut sehubungan dengan perkembangan kehidupan kenegaraan adalah ajaran pemisahan kekuasaan (*saparation of powers*). Ajaran pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan atau pejabat penyelenggara negara dalam batas-batas cabang kekuasaan masing-masing. Dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut dapat dicegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan sewenang-wenang.

Sebagai sebuah sistem politik yang menekankan kekuasaan yang mutlak berada di tangan rakyat, maka dalam konsep demokrasi terdapat tiga kata penting yang menjadi landasannya, yakni *freedom* (kebebasan), *equality* (persamaan), dan *fraternity* (persaudaraan). Dalam kaitan ini, Amin Rais reformis muslim Indonesia menjelaskan, esensi dari demokrasi adalah kebebasan menyatakan pendapat; kebebasan beragama; kebebasan dari rasa

---

[18] *Ibid.*

[19] Tamrin, "Gagasan Demokrasi Amien Rais: Priode 1994-2005", *Tesis Ilmu Politik,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

takut; kebebasan untuk sejahtera; kebebasan rakyat dalam berpartisipasi politik untuk menentukan nasibnya sendiri; dan berjalannya keseimbangan (*check and balances*), serta tegaknya hukum.[20]

Sementara Hendri B. Mayo sebagaimana yang dikutib Mariam Budiharjo dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik,* mengemukakan beberapa nilai yang mendasari demokrasi, di antaranya:

1. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
2. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
4. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
5. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku; dan
6. menjamin tegaknya keadilan.[21]

Dalam bukunya *Apa Demokrasi itu?* Diane Ravitch mengemukakan soko guru demokrasi sebagai berikut: kedaulatan rakyat; pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; kekuasaan mayoritas; hak-hak minoritas; jaminan Hak Asasi Manusia;[22] pemilihan yang bebas dan jujur; persamaan di depan hukum;[23]

[20] M. Amin Rais, *Jurnal Milenium.,* hal. 6.

[21] Hendri B. Mayo dalam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hal. 62

[22] Secara historis hak asasi manusia sebagaimana yang saat ini dikenal (baik yang di cantumkan dalam berbagai piagam maupun dalam UUD), memiliki riwayat perjuangan panjang bahkan sejak Abad Ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia ini sesudah dimulai segera setelah di tanda tanganinya *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh raja John Lackbland, maka sering kali peristiwa ini di catat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia, sekali pun sesungguhnya piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana yang di kenal surat ini. Baca, Kusnardi, Muhammad Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI & C.V. Sinar Bakti, 1981), hal. 307.

[23] Persamaan yang dimaksud adalah bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di pemerintahan. Baca: Yedi Purwanto, "Masa Depan Partai Politik Islam dalam Pertarungan Pemilu", *Jurnal Sosioteknologi*, edisi 16. th.8 (April 2009), hal. 31.

proses hukum yang wajar; pembatasan pemerintah secara konstitusional; pluralisme sosial, ekonomi dan politik; dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.[24]

Tak jauh berbeda dengan yang dikemukakan Diane Ravitch, Sadek J. Sulaymân, juga mengemukakan sejumlah prinsip yang diyakini sebagai standar bakunya demokrasi, seperti: Kebebasan berbicara setiap warga Negara; Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti; Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas; Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat; Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum); Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu.[25]

Robert A. Dahl, dalam Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, juga mengemukan enam prinsip yang harus ada dalam sistem negara demokrasi, yakni:

1. Para pejabat yang dipilih. Pemegang atau kendali terhadap segala keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi, pemerintahan demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan;
2. Pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan periodik. Para pejabat ini dipilih melalui Pemilu;
3. Kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa halangan dan ancaman dari penguasa;

[24] Diane Ravitch, *Apa Demokrasi itu?,* hal. 6

[25] Sadek J. Sulaymân, "Apakah Sistem Demokrasi haram?", dikutip dari http://www.Syariah Online.com.

4. Akses informasi-informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif;
5. Otonomi asosiasional, yakni warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan; dan,
6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.[26]

Sedangkan menurut Urofsky, dalam konsep demokrasi juga terdapat 11 (sebelas) prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi bertumbuhkembang, kesebelas prinsip utama demokrasi dimaksud adalah:

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan Konstitusi.

   Proses pembuatan undang-undang harus dilakukan dengan aturan-aturan tertetu; harus ada cara yang telah disepakati untuk pembuatan dan pengubahan undang-undang, dan area-area tertentu yang disebut sebagai hak-hak individu yang tidak bisa disentuh oleh kehendak mayoritas. Konstitusi adalah sebuah produk hukum, namun pada saat yang bersamaan ia harus lebih sekadar hal itu. Ia adalah dokumen organik dari pemerintahan, yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintah.

2. Pemilihan Umum yang demokratis.

   Sebaik apapun sebuah pemerintahan dirancang, ia tak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya.

[26] Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia,2007), hal.119-120

3. Federalisme, Pemerintahan Negara Bagian dan Lokal.

   Sebuah negara federal mempunyai sebuah keunikan, di mana kekuasaan dan kewenangan dibagi dan dijalankan oleh pemerintahan lokal, negara bagian, dan nasional. Namun jika model ini tak cocok untuk sebuah negara, tetap ada pelajaran yang bisa dipetik. Semakin jauh suatu pemerintahan dari rakyatnya, maka ia semakin kurang efektif dan semakin kurang mendapat kepercayaan.

4. Pembuatan Undang-undang.

   Kunci pembuatan hukum (undang-undang) yang demokratis tidak terletak pada tata cara atau bagaimana atau bahkan forum di mana peraturan itu dihasilkan, melainkan pada sifat keterbukaan prosesnya bagi penduduk dan perlunya pemahaman terhadap harapan rakyat.

5. Sistem peradilan yang independen.

   Pengadilan bisa menjadi sangat kuat dalam demokrasi, dan melalui banyak cara ia adalah tangan yang menafsirkan dan memberlakukan aturan-aturan yang ada di konstitusi.

6. Kekuasaan lembaga kepresidenan.

   Semua masyarakat modern harus memiliki pimpinan eksekutif yang mampu memikul tanggung jawab pemerintahan, mulai dari administrasi sederhana sebuah program sampai menggerakkan angkatan bersenjata untuk membela negara semasa perang.

7. Peran media yang bebas.

   Yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah media yang bebas, surat kabar, jaringan radio dan televisi yang bisa menginvestigasi jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan.

8. Peran kelompok-kelompok kepentingan.

   Pemerintah harus memperhatikan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat baik itu partai politik maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan guna menyampaikan kehendak dan tuntutan rakyat.

9. Hak masyarakat untuk tahu.

   Dalam demokrasi, pemerintah seharusnya bersikap terbuka, yang artinya gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Sudah barang tentu tidak semua langkah pemerintah harus dipublikasikan, namun rakyat punya hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak mereka dibelanjakan, apakah penegakan hukum efisien dan efektif, dan apakah wakil-wakil terpilih mereka bertindak secara bertanggung jawab.

10. Melindungi hak-hak minoritas

    Jika "demokrasi" diartikan sebagai kehendak mayoritas, maka salah satu masalah besar adalah bagaimana minoritas diperlakukan. Minoritas tidak diartikan sebagai orang-orang yang memilih lawan dari partai yang memenangkan pemilihan umum, melainkan pada mereka yang jelas-jelas berbeda dengan mayoritas karena alasan ras, agama, atau ke-etnisan.

11. Kontrol sipil atas militer

    Dalam demokrasi, militer bukan hanya harus berada di bawah kontrol kewenangan sipil sepenuhnya, namun ia juga harus memiliki budaya yang menegaskan bahwa peran tentara adalah sebagai abdi dan bukannya penguasa masyarakat.[27]

Selain beberapa prinsip di atas, dalam demokrasi juga terdapat empat fungsi yang saling terkait dan tak terpisahkan satu

[27] Urofsky, M. I. *Jurnal Demokrasi*. (Office of International Information Program, U.S. Department of State, 2001), hal. 2-5.

dengan yang lain, fungsi-fungsi tersebut sebenarnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi:[28]

1. Demokrasi sebagai kebebasan (*freedom*)

   Demokrasi sebagai kebebasan (*freedom*), artinya dengan demokrasi orang akan bebas melakukan apa saja. Setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, berhak mengekpresikan apa yang ia kehendaki lewat perbuatan atau perilaku, karena manusia secara alamiah ingin hidup bebas. Kebebasan sebagai salah satu prinsip demokrasi harus disertai pula dengan nilai etis dan normatif sehingga tidak berbenturan dengan norma yang berkembang di masyarakat.

2. Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain (*as respect for dignity of person*)

   Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain artinya dengan demokrasi seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya, atau memperlakukan orang lain sebagai manusia yang mempunyai martabat, dan akan diperlakukan sebagaimana adanya, memperlakukan manusia sebagai manusia yang disebabkan oleh kemanusiannya, bukan karena jenis kelamin, ras, suku dan lain sebagainya.

3. Demokrasi sebagai persamaan (*equality*)

   Demokrasi sebagai persamaan artinya setiap orang dalam kelompok masyarakat tertentu mempunyai hak yang sama, karena sudah menjadi kesepakatan umum (*consensus)*, bahwa manusia dilahirkan sama dalam hak dan kewajibanya.

4. Demokrasi sebagai wahana untuk berbagai (*sharing*)

   Demokrasi sebagai wahana untuk berbagai (*sharing*) dengan kelompok lain, artinya kelompok mayoritas yang sedang

[28] Sahal Muhfuzd dkk, *Pendidikan.,* hal. 59-61.

berkuasa tetap menghargai kelompok minoritas dengan cara membagi kekuasaan. Demikian ini agar hak-hak kelompok minoritas tetap terjamin dengan membuka kran komunikasi antar kelompok.

Keempat hal di atas, merupakan prinsip sekaligus fungsi utama demokrasi, hal ini disebabkan karena dalam hampir semua Negara demokrasi ke-empat unsur ini akan ditemukan. Dan jika di analisis lebih mendalam, meskipun ke-empat prinsip di atas selalu kita temui dalam negara demokrasi, namun secara filosofis ternyata 3 (tiga) prinsip terakhir sesungguhnya hanyalah implikasi dari prinsip yang pertama, yakni kebebasan (*freedom*). Musyawarah (berbagai:*sharing)* misalnya, prinsip ini harus ada karena dalam demokrasi kedaulatan dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga suara dan pendapat seluruh rakyat harus didengarkan. Demikian halnya dengan prinsip persamaan, karena demokrasi memandang bahwa secara filosofis status manusia sebagai pusat dari segalanya (humanisme) mengharuskan manusia berkedudukan sama tanpa memandang status apapun.

C. Demokrasi dalam Islam

Memperbincangkan hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat *aksiomatis*, sebab Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang diyakini membawa banyak nilai-nilai positif.[29] Polemik hubungan demokrasi dengan Islam ini

[29] Namun demikian sebagian filosof ada yang beranggapan bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang dinilai paling buruk. Pemerintahan yang didasarkan asas demokrasi adalah pemerintahan yang pemimpinnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kondisi seperti ini hampir sulit didapatkan; yang tampak dihadapan mata adalah segelintir orang menentukan atau mengendalikan orang banyak. Lihat, Yedi Purwanto, "Masa Depan Partai Politik Islam dalam Pertarungan Pemilu 2009", *Jurnal Sosioteknologi,* Edisi 16 Tahun 8, (April 2009), hal. 543.

berakar pada sebuah *ketegangan teologis* antara rasa keharusan memahami doktrin yang telah mapan oleh sejarah dinasti-dinasti Muslim, dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respon atas fenomena sosial yang terus berubah.[30]

Hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan hubungan yang kompleks, sebab dunia Islam tidak hidup dalam keseragaman ideologis, sehingga terdapat satu spektrum panjang terkait hubungan antara Islam dan demokrasi ini. Dalam kaitan in, Khalid Abu al-Fadl[31] mengatakan, meskipun al-Quran tidak secara spesifik dan eksplisit menunjukkan preferensi terhadap satu bentuk pemerintahan tertentu, namun ia dengan gamblang memaparkan seperangkat nilai sosial dan politik penting dalam suatu pemerintahan untuk Muslimin. Di antaranya adalah tiga nilai penting berikut, keadilan melalui kerja sama sosial dan prinsip saling membantu;[32] membangun suatu sistem pemerintahan konsultatif yang tidak otokratis; dan melembagakan kasih sayang dalam interaksi social.[33]

Masykuri Abdillah juga melihat bahwa di dalam al-Qur'an tidak dapat ditemukan konsep negara, karena konsep negara adalah buah pemikiran yang muncul belakangan. Bahkan kata "*dawlah Islamiyah*" sendiri adalah kata baru yang muncul di abad ke-20. Istilah "*dawlah*" sendiri baru dipakai sejak masa Dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah, yang dipakai dalam arti dinasti. Meskipun demikian ia juga melihat bahwa di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip hidup berkemasyarakatan yang di antaranya: kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*); keadilan (*al-adalah*); persauda-

---

[30] M. Imdadun Rahmat, "Demokrasi dan Penegakan Keadilan", *makalah,* disampaikan dalam Halqah Islam di Pesantren Cijawura Bandung, Bandung 15-17 Juni 2007, hal. 1.
[31] Khalid Abu al-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, (Jakarta: Ufuk Press, 2004), hal. 12
[32] Di antaranya terungkap dalam QS. Al Hujuraat (49): 13, QS. Huud (11): 119
[33] Lihat, QS. Al An'am (6): 12, QS. Al Anbiyaa' (21): 77.

raan (*al-ukhuwah*); menghargai kemajemukan dan pluralisme (*al-ta'adduddiyah*), persamaan (*al-musawah*); permusyawaratan (*al-syura*); mendahulukan perdamaian (*al-silm*), dan kontrol (*amr bi al-maruf nahy an al-munkar*).[34] Secara prinsipil hal ini sejalan dengan doktrin politik dari konsep demokrasi.

Dalam konteks ini, John L Esposito dan James P Piscatori, sebagaimana yang dikutib Riza Sihbudi, menyatakan bahwa Islam pada kenyataannya memberikan kemungkinan pada bermacam interpretasi, Islam bisa digunakan untuk mendukung demokrasi maupun kediktatoran, republikanisme maupun monarki.[35] Lebih lanjut, Esposito dan Piscatori, mengidentifikasi tiga pemikiran mengenai hubungan Islam dengan demokrasi. *Pertama*, Islam menjadi sifat dasar demokrasi, karena konsep *shura*, *ijtihad*, dan *ijma'* merupakan konsep yang sama dengan demokrasi; *Kedua*, menolak bahwa Islam berhubungan dengan demokrasi. Menurut pandangan ini kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri diatas kedaulatan Tuhan, juga tidak bisa disamakan antara muslim dan non-muslim dan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan equalitynya demokrasi; *Ketiga*, sebagaimana pandangan pertama bahwa Islam merupakan dasar demokrasi. Meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan tetapi perlu diakui, bahwa kedaulatan rakyat tersebut merupakan subordinasi hukum Tuhan. Terma ini dikenal dengan *theodemocracy* yang diperkenalkan oleh al-Maududi.[36]

Senada dengan yang disampaikan Esposito dan Piscatori di atas, A. Ubaedilah, Abdul Rozak, menegaskan secara garis besar wacana Islam dan demokrasi terdapat tiga kelompok pemikiran,

---

[34] Abdillah, *Negara Ideal menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini, dalam Islam, Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramida,2005), hal.73-75

[35] John L Esposito dan James P Piscatori, dalam Riza Sihbudi, *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*. (Jakarta: Pustaka Hidayah,1993), hal. 124-125

[36] John L. Esposito and Jame P. Piscatori, Democratization and Islam, *MiddleEast Journal 45*, No. 3, (1991), hal. 427- 440

yakni pandangan yang menyatakan jika Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda; Islam berbeda dengan demokrasi; dan Islam adalah sistem nilai yang membenarkan serta mendukung demokrasi.[37]

1. Islam dan Demokrasi adalah Dua Sistem yang Berbeda

Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok Islamis atau Islam ideologis, menurut kelompok ini Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. Mereka memandang jika Islam sebagai sistem alternatif demokrasi, karenanya Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda sehingga demokrasi sebagai konsep barat tidak tepat dijadikan acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[38]

Logika yang sering dipakai oleh kelompok Islamis ini adalah, Pemerintahan demokrasi berasal dari barat, dan barat bukanlah Islam, sehingga barat adalah kafir. Segala sesuatu yang kafir tentunya berdosa, dengan demikian mengikuti demokrasi bagi seorang Islam sejati adalah berdosa. Terlebih lagi karena Islam telah memberikan tuntunan total melalui al-Qur'an bagi seluruh sendi kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Oleh karena itu, layak dan wajiblah seorang muslim untuk mendukung pemerintahan yang menerapkan syariat Islam sebagai kewajiban agamanya. Pilihannya cukup jelas, yang satu berdosa, dan yang satu wajib sehingga mendatangkan surga.[39] Pendeknya, menurut kelompok ini, Demokrasi merupakan sistem kafir, karena telah meletakan kedaulatan Negara ditangan rakyat bukan tuhan.

---

[37] A. Ubaedilah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegraan (Civic Education). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.* Edisi Revisi II (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hal.158-159

[38] A. Ubaedilah, Abdul Rozak, *Pendidikan* , hal. 158.

[39] Esposito, *Teori dan Praktik, dalam Islam dan Tantangan Demokrasi*, 2004, hal.57

Kelompok ini diwakili oleh Taqiyuddin an-Nabhani dengan Partai pembebasannya *Hizb ut-Tahrir*. Pergerakan *Hizb ut-Tahrir* (HT) adalah salah satu yang sangat menentang ide-ide demokrasi dan bependapat bahwa sebagian besar dari aktivitas demokrasi tertolak secara *syar'i*. Mereka memandang bahwa prinsip pemilu secara jelas melangar azas "*wakalah*" (perwakilan), sebab salah satu syarat "*wakalah*" terlanggar yakni materi yang diwakilkan didasarkan atas asas demokrasi, yang menurut pandangan *Hizb ut-Tahrir* adalah bathil.

Pandangan ini juga didukung oleh cedekiawan muslim seperti, Shaikh Fadlallah Nuri, Sayyid Qutb, Shaykh Muhammad Mutawwali al-Sha'rawi, dan Ali Benhajd. Shaikh Fadlallah Nuri mengatakan, salah satu kunci gagasan demokrasi, *persamaan* semua warga negara adalah *imposible* dalam Islam.[40] Sayyid Qutb menekankan, bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Ia percaya syariat Islam sudah sangat lengkap sebagai suatu sistem moral dan hukum, sehingga tidak diperlukan legislasi lain. Sementara Shaikh Muhammad Mutawwali al-Sha'rawi menyatakan, Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi. Dan Ali Benhajd menegaskan, bahwa konsep demokrasi harus digantikan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang Islami.[41]

2. Islam Berbeda dengan Demokrasi

Kelompok ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi apabila demokrasi di difinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikan di negara-negara barat. Sebaliknya jika demokrasi dimaknai secara subtantif,

---

[40] John L. Esposito and Jame P. Piscatori, "*Democratization*, hal. 436.
[41] *Ibid.*

yakni kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat, maka Islam merupakan sistem politik yang demokratis. Pendeknya, kelompok ini berpandangan bahwa demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri.

Di antara tokoh muslim yang mendukung pandangan ini adalah al-Maududi, menurutnya dalam demokrasi sekuler barat pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi dalam Islam juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau di dalam sistem barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang digariskan hukum Ilahi.[42] Selain al-Maududi, Mohammad Natsir salah seorang tokoh, pemikir, dan 'ulama Islam Indonesia yang sempat terjun dalam dunia politik juga mendukung pandangan ini, dalam artikelnya yang berjudul, *Islam Demokrasi?,* ia menulis:

> "Barangkali orang akan bertanya: "Bukankah Islam itu bersifat "demokratis?" Kita jawab: Islam bersifat "demokratis" dengan arti bahwa Islam itu istibdad, anti absolutisme anti sewenang-wenang. Akan tetapi ini, tidak berarti, bahwa dalam pemerintahan Islam semua urusan diserahkan kepada keputusan musyawarat Majelis Syura.
>
> Dalam parlemen negara Islam, tidaklah akan dipermusyawaratkan terlebih dahulu, apakah yang harus menjadi dasar bagi pemerintahan, dan tidaklah mesti ditunggu keputusan parlemen terlebih dahulu, apa-

[42] Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam, (Jakarta:* Mizan, 1990), hal. 243.

kah perlu diadakah pembasmian minuman arak atau tidak. Tidak ditunggu persetujuan parlemen untuk penghapusan judi dan kecabulan, dan tidak perlu dimusyawaratkan apakah perlu diadakan pemberantasan khurafat dan kemusyrikan atau tidak, dan sebagainya. Bukan! Ini semua bukan hak musyawarat Parlemen.

Kita akui demokrasi baik! Akan tetapi sistem kenegaraan Islam tidak menggantungkan semua urusan kepada kerahiman instelling-instelling demokrasi. Perjalanan demokrasi dari abad ke abad telah memperlihatkan beberapa sifatnya yang baik. Akan tetapi ia tidak pula sunyi dari pelbagai sifat-sifat berbahaya".[43]

Dalam konteks ini Dr. Imaduddin Abdurrahim, salah satu tokoh perintis pergerakan Islam kampus dalam bukunya, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, menulis sebagai berikut:

"Para 'ulama kita ketika itu dengan sengaja tidak menggunakan istilah "kedaulatan rakyat", yang biasanya dipakai sebagai terjemahan dari kata "demokrasi", yang berasal dari falsafah barat. Demokrasi ini berasal dari kata "demos" dan "cratos", yang berarti rakyat punya kedaulatan membuat dan menciptakan hukum. Di dalam ajaran Islam, kita meyakini bahwa hanya Allah yang berdaulat menciptakan hukum Manusia hanya boleh membuat derivasi hukum menjadi peraturan pelaksana dari sunnah Allah Swt..."

"Kebanyakan negara berpenduduk mayoritas muslim sekarang ini telah merubah landasan dan falsafah hidup mereka menjadi nasionaisme, sosialisme, feodalisme, dengan sistem authoritarisme bahkan sekular-

[43] Mohamad Natsir, *Capita Selekta,* Jilid 1, Cet. II (Jakarta: Yayasan Bulan Bintang Abadi dan Yayasan Media Dakwah, 2008), hal. 550-552.

isme dan isme-isme lain yang asing bagi ajaran Islam yang asli..." [44]

Dr. Anis Malik Toha dalam disertasinya membuktikan bahwa pada hakikatnya pluralisme adalah sebuah agama yang menentang keberadaan agama-agama. Beliau menganalisis bahwa demokrasi adalah perwujudan liberalisme dalam ranah politik. Karena menurutnya liberalisme terbukti memiliki karakter totaliter (*totallity*),[45] maka demokrasi alih-alih memproyeksikan diri sebagai wasit yang netral di antara kelompok agama-agama yang sedang bertikai dan saling berebut klaim kemutlakan, dia sendiri malah berubah peran menjadi salah satu kelompok tersebut.[46] Senada dengan itu, pengamat politik Islam dan Peneliti Lembaga Studi Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI) Dr. Bachtiar Effendy menekankan, bahwa penerimaan demokrasi di dunia Islam Indonesia khususnya haruslah disertai pribumisasi, beliau juga mengkritik cendekiawan Muslim yang melakukukan demokratisasi Islam yang terkesan dipaksakan.

3. Islam Membenarkan dan Mendukung Demokrasi

Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini, Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikan di negara-negara maju. Penerimaan ini dikarenakan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran Islam seperti, keadilan (*'adl*), persamaan (*musâwah*), musyawarah (*syura*), dan sebagainya.

Pandangan ini mendapat dukungan dari banyak cedekiaan muslim, di antaranya Yusuf Qardawy yang berpendapat bahwa

---

[44] Imaduddin Abdurrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu,* (Jakarta: Gema Insani Press), hal 138 dan 142.

[45] Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal.131

[46] Anis Malik Toha, *Tren*, hal. 43.

substansi demokrasi sesungguhnya berasal dari ajaran Islam, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

a. Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.

b. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan *amar makruf* dan *nahi mungkar* serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.

c. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.

d. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.

e. Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.[47]

Meski demikian Asy-syaikh mengakui kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem demokrasi selain kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dengan menggunakan kaidah ushul fiqih *"apabila yang wajib tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib"*. Asy-Syaikh berpendapat bahwa ummat Islam perlu mengambil manfaat dari demokrasi. Bahkan beliau dalam bukunya, *min fiqh ad-daulah fil Islam* mengemukakan keheranannya terhadap kalangan yang menolak demokrasi. Dia berkata: *"Atau bisa saja Anda berkata, 'substansi demokrasi serupa dengan ruh syuro' Islam'.*[48]

Tokoh ini tidak sendirian, pemikir-pemikir Islam lainnya seperti Hamid Enayat, Husain Haekal, Zakaria Abdul Muin, Muhamad Abduh, Jamauludin al-Afghani, Abdurahman Wahid, Musthafa Manshur atau Abbas Mahmud al-Aqqad, Nurcholis Majid, Amin Rais dan sebagainya, juga mengamini jika demokrasi sebagai bagian dari Islam. Para demokrat muslim bahkan mengatakan bahwa jauh sebelum demokrasi dilahirkan masyarakat Barat, Islam terlebih dulu menancapkan prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis, dengan menafikan pengertian dan karakter demokrasi itu sendiri, demokrasi dipahami secara simplikatif sebagai proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang pemimpin. Menurut asumsi mereka, adanya pemilu, meminta pendapat rakyat, menegakkan ketetapan mayoritas, multipartai politik, kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, dan otoritas pengadilan adalah bagian kehidupan

[47] *Apakah Sistem Demokrasi haram?* Syariah Online. http://www.Syariah Online.com/new index.php/id/7/cn/19725

[48] Yusuf Qordhowi, *Min Fiqh ad Daulah fil Islam* (Edisi terj.), (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2006), hal. 205

demokrasi yang substansinya telah ada dalam kehidupan Islam.

Pemikir Muslim lain yang menerima konsep demokrasi adalah Fazlur Rahman. Beliau mengatakan bahwa *syura'* adalah sebuah institusi Arab yang demokratis dari masa sebelum Islam yang kemudian didukung oleh al-Qur'an melalui surat asy-Syuraa: 38, berikut:

> *"dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka".* (QS. Asy-Syuraa [42]: 38).

Tiga pandangan di atas merupakan akumulasi yang berangkat dari kriteria umum Islam dan demokrasi, sehingga ketiga pandangan tadi tidak berjalan beriringan, bahkan berlawanan. Karena itulah, untuk melihat hubungan Islam dan demokrasi, setidaknya harus dilihat dari sisi sistem, dasar-dasar politik dan nilainya.[49] Jika demokrasi dilihat dari segi sistemnya yang diikuti dengan realisasi asas pemisahan antara kekuasaan, model seperti ini juga diterapkan dalam Islam. Demikian halnya jika yang dimaksudkan demokrasi itu terkait dengan adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu, misalnya asas persamaan dihadapan undang-undang, kebebasan berfikir dan berkeyakinan, keadilan sosial dan sebagainya, maka hak-hak tersebut juga terdapat dalam al-Qur'an.[50]

Begitu pula jika demokrasi yang dimaksud sebagaimana dikatakan Abraham Lincoln, sebagai pemerintahan dari rakyat oleh

---

[49] Turan, *Religion and Political*, hal. 35.

[50] Javid Iqbal, "Demokrasi dan Negara Islam Modern" Dalam *Dinamika Kebangkitan Islam: Watak Proses dan Tantangan*, John L.Esposito (ed.), Terj. Bakri Seregar (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hal. 323.

rakyat dan untuk rakyat (*Government from people by people and for people*), pengertian ini juga terdapat dalam Islam, dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif. Tetapi jika demokrasi di difinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikan di negara-negara barat, maka demokrasi akan bertentangan (tidak sejalan) dengan ajaran Islam.

D. Prinsip-Prinsip Demokrasi Islam

Dalam al-Qur'an memang tidak terdapat rumusan terperinci tentang sistem politik yang dapat diterapkan umat Islam, akan tetapi dalam al-Qur'an terdapat beberapa prinsip pokok yang dapat menjadi landasan bagi penerimaan demokrasi dalam Islam, seperti *syura'* (permusyawaratan), *al-'adalah* (keadilan), *ijma'* (konsensus), *ijtihâd* (kemerdekaan berpikir), *tasamuh* (tolerensi), *al-hurrîyah* (kebebasan), *al-musâwah* (egalitarian), *ash-shidqu wal amânah* (kejujuran dan tanggung jawab), *maslahah* (kepentingan awam), kepelbagaian (*al-ta`addudiyyah*), *al-mas'uliyyah* (pertanggung jawaban awam) dan *shafafiyyah* (ketulusan).

Menurut Azyumardi Azra, prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar penerimaan demokrasi melalui kerangka fikih siyasah tidak dilihat mengurangi *kedaulatan Tuhan.* Ia menjelaskan, jika kedaulatan Allah terhadap makhluknya merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Allah tetap Mahakuasa (*vis-à-vis*) makhluknya meski ada *kedaulatan rakyat* yang diwujudkan melalui sistem politik demokrasi. Karena itu, kedua bentuk kedaulatan -yang sebenarnya tidak sebanding- tak perlu dipertentangkan. Atas dasar kerangka itulah, para pemimpin umat Muslim umumnya dapat menerima demokrasi, khususnya di Indonesia sejak negara ini memaklumkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.[51] Tidak hanya itu, prinsip-prinsip di atas juga menunjuk-

[51] Azyumardi Azra, "Lagi, Soal Islam dan Demokrasi", *Republika*, (28 Mei 2009).

kan bahwa Islam tidaklah kurang dalam landasan-landasan asas yang serasi dengan matlamat demokratik.[52]

Dalam perspektif historis, konsep demokrasi sebenarnya telah teraplikasikan pada tahap awal pemerintahan Nabi Muhammad Saw., di Madinah. Tidak diragukan bahwa Negara Madinah adalah satu contoh negara yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, dan pada masa yang sama tidak terpisah daripada agama. Menurut para ahli sejarah peraturan negara yang didirikan oleh Nabi di Madinah pada massa itu, adalah asas politik yang benar karena ia menghimpun antara dua prinsip, yaitu musyawarah (demokrasi) dan kekuasaan. Dan hal ini didukung firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat ke-159;

> *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".* (QS. Ali Imran [3]: 159).

Sistem demokrasi yang diamalkan oleh Rasulullah Saw, pada masa awal kemunculan Islam jelas menunjukkan hubungan antara kedaulatan rakyat dalam demokrasi Islam. Jadi demokrasi barat yang berlandaskan kekuasaan rakyat berbeda dengan Islam karena di dalam demokrasi Islam kedaulatan rakyat haruslah mengikuti (tidak bertentangan) dengan hukum-hukum yang termaktub dalam al-Quran dan as-Sunnah.

---

[52] Baca dalam Mohd Izani, "Konsep Theo-Democracy, Popular Vice Regency" dalam Wacana Islam Dan Demokrasi, *Jurnal Usuluddin,* Bil 26 (2007), hal.105-113

Menurut Othman Alias, kebebasan atau kedaulatan rakyat di dalam demokrasi Islam, adalah: Kebebasan Rohani; Bebas daripada perhambaan sesama manusia; Bebas daripada perhambaan Masalah Hidup; Bebas daripada perhambaan Nilai dan Norma Masyarakat; Bebas daripada perhambaan kepada Hawa Nafsu; Kebebasan Mendapat Hak; Kebebasan Peribadi; Kebebasan Beragama/Akidah; Kebebasan Politik; Kebebasan Milik.[53] Selain itu, dalam konsep demokrasi juga terdapat elemen yang sejalan dengan Islam, seperti, partisipasi politik rakyat, kebebasan, penegakan hukum, pemerataaan, keadilan sosial, peningkatan mutu pendidikan, dan pembentukan masyarakat Madani.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa sebetulnya dalam Islam telah tertanam beberapa prinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menunjang lajunya proses demokrasi, yang di antaranya:[54]

1. Prinsip Keadilan (*al-'Adl*)

Kata adil dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali, sinonimnya kata *al-qisti* (keseimbangan) yang disebutkan sebanyak 25 kali. Dalam konsepsi Islam berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. Menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum yang objektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia dan bersifat *immutable* (tidak akan berubah). Karena hakikatnya yang objektif dan *immutable* ini maka menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan, bagi siapapun yang melaksanakannya, dan sebaliknya ketidakadilan akan mengakibatkan malapetaka.

[53] Othman Alias, *Asas-Asas.,* hal.105

[54] Baca dalam Bahtiar Effendy, "Mohamad Roem, Islam dan Demokrasi untuk Membangun Indonesia", *Annual Lecture* yang diselenggarakan oleh BEM Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) UIN Jakarta, (Jakarta, 16 Juni 2008).

Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan harus dijalankan dengan teguh terhadap semua manusia tanpa terkecuali, dan mengingatkan jangan sampai kebencian kepada suatu golongan membuat orang tidak mampu menegakkan keadilan. Sebab berbuat adil merupakan nilai yang absolut dan harus ditegakkan dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang genting (perang) sekalipun, dalam konteks ini Allah Swt., berfirman:

> *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".* (QS. al-Maidah [5]: 8).

Dalam konsepsi al-Qur'an, adil adalah memberikan hak kepada yang berhak, dan harus ditegakkan dalam dua ranah sekaligus, *Pertama*, *Adl 'am,* bermakna perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini merupakan tanggungjawab penguasa dan pemerintah. *Kedua*, *Adl khas,* bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar kaum muslim dan sesama manusia. Keadilan juga disebut sebagai perbuatan yang paling mendekati taqwa kepada Allah Swt. Bahkan dalam sebuah hadist Rasulullah Saw., menegaskan bahwa orang yang paling dicintai Allah, yang kedudukannya paling dekat dengan-Nya pada hari kiamat adalah seorang pemimpin yang adil. Sebaliknya, orang yang paling dibenci Allah dan paling keras siksanya di hari kiamat, adalah penguasa yang dzalim (tiran). Sabda Nabi Saw: *"Sesungguhnya orang yang paling mulia dan terhormat bagi Allah adalah raja yang adil".*

Komitmen Nabi Saw., dalam menegakkan keadilan tampak nyata sejak Beliau mendakwahkan Islam di Mekah, yang dapat dilihat dari perjuangan mendasar yang Beliau lakukan yakni membebaskan umat dari aqidah yang sesat, dan membebaskan umat manusia dari belenggu kezaliman, kekuasaan ekonomi dan politik yang menindas. Di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw., inilah Islam menjadi sebuah kekuatan yang merubah pemahaman tentang Tuhan (*teologi*), pandangan tentang dunia (*world view)* dan struktur sosial. Sehingga tidak mengherankan jika Islam ketika itu mampu melahirkan peradaban besar yang menandingi peradaban Romawi dan Persia yang telah mapan sebelumnya.

Selain al-Qur'an dan Sunnah, para ulama juga menegaskan pentingnya keadilan sebagai elemen dasar Islam. Imam Syatibi dalam *al-muwafaqat* mengatakan, keadilan di antara manusia adalah tujuan yang dicita-citakan oleh syariat Islam. Dalam bab lain ia mengatakan bahwa tujuan syariat adalah memelihara lima kemashlahatan asasi, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam al-Ghazali dan para ulama ushul yang lain. Lima kemashlahatan ini jika terwujud akan melahirkan keseimbangan sosial dan ini merupakan inti dari keadilan.

Imam Ibnu Qayyim dalam *I'lam al-muwaqqiin* menegaskan, bahwa Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab suci dengan tujuan agar manusia bisa berlaku adil. Keadilan merupakan landasan tegaknya langit dan bumi. Menurut Ibn Al-Qayyim, jalan apapun yang mengarah kepada pencapaian keadilan sama maknanya dengan jalan yang mengarah kepada Allah Swt. Dan Ibnu Taymiyyah dalam *al-Khisbah* mengatakan, berbagai urusan manusia di dunia akan lebih sering ditegakkan dengan keadilan meski di dalamnya terkontaminasi dengan berbagai dosa, daripada ditegakkan dengan kezaliman terhadap hak-hak

meskipun tidak terkontaminasi dosa. Sementara Al-Mawardi dalam *al-ahkam al-sulthaniyah* mengatakan, keadilan adalah syarat pertama seorang pemimpin. Ia mengatakan, seorang penguasa "ia turun dari kekuasaan (*imamah*) karena dua sebab: keluar dari prinsip keadilan dan kedua cacat fisik". Sedangkan Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah* menempatkan keadilan sebagai syarat kedua seorang pemimpin setelah ilmu. Dan Imam Ibnu Abdi Rabbih dalam *al-Iqd al-farid* mengatakan: salah satu syarat penguasa adalah keadilan dalam penampakan tindakannya untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kekuasaannya dan keadilan dalam hatinya untuk menjalankan urusan agamanya.

2. Prinsip Persamaan (*al-Musawa*)

Islam tidak mengenal perbedaan strata dan suku, sebab dalam konsepsi Islam semua manusia sama dalam martabat dan kedudukannya, tidak ada perbedaan antara satu orang dengan yang lainya dihadapan Sang Maha Pencipta, kecuali dalam hal ketakwaannya. Hal ini ditegaskan Allah Swt., dalam firman-Nya:

> *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".* (QS. al-Hujuraat [49]: 13).

Persamaan (*egaliter*) adalah hal yang sangat substansial dalam Islam, mengingat kekuasaan Sang Maha Pencipta tidak hanya berhenti pada titik penciptaan manusia, namun juga kepada penciptaan akhir dari segala kehidupan. Kekayaan, kekuasaan, ke-

hormatan, popularitas dan lainnya tidak menjadi hal yang diperhitungkan di hadapan Allah Swt., jika tidak ada ketakwaan.

3. Kebebasan (*Huriyya*)

Prinsip kebebasan berada pada tempat yang istimewa dalam Islam. Prinsip ini didasari oleh konsep yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang memandang bahwa manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Dalam Islam prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) adalah ayat perjanjian, ketika manusia secara serempak membenarkan ke-*rububiyah*-an Tuhan.

> *"dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",* (QS. Al-A'raf [7]: 172)

Jawaban "*bala syahidna*" (benar kami bersaksi) dalam dialog azali tersebut mengasumiskan bahwa setiap orang telah mengetahui dan menerima segala implikasi dari kesaksian tersebut. Artinya, fitrah manusia menyadari bahwa konsekuensi dari pengakuan itu adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Pengakuan ini adalah sebuah pilihan yang jika dipegang secara konsisten akan membawa manusia kepada kebahagiaan abadi. Kebebasan manusia lebih jelas lagi tergambar dalam peristiwa penawaran amanah kepada manusia pada zaman azali. Ketika itu, Allah memberi tawaran amanah kepada segenap makhluk-Nya. Namun, langit, bumi, dan gunung-gunung menolak tawaran tersebut, sedangkan

manusia menerimanya. Peristiwa ini tertuang dalam firman Allah surat al-Ahzab ayat 72:

> *"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh",* (QS. al-Ahzab [33]: 72)

Berdasarkan ayat di atas, kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan memilih setelah dijelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab, pada awalnya, manusia dalam perjanjian pertama (*al-wathiqah al-ula*) telah mengakui dan menerima amanah dengan suka rela. Sesuai dengan perjanjian ini, maka Allah tidak memaksa manusia untuk memeluk Islam.[55] Islam tidak memaksa manusia untuk mengikuti salah satunya, sebab konsekuensi dari kedua jalan tersebut telah jelas dan nyata. Di bawah bimbingan wahyu dan akalnya, manusia diberikan kebebasan memilih dan berusaha menentukan jalan terbaik baginya. Kebebesan memilih merupakan landasan etik bagi salah satu prinsip Islam tentang tanggung jawab individual setiap muslim di hadapan Tuhan-nya, Dan setiap orang berhak atas apa yang diusahakannya. Sebagaimana firman Allah Swt;

> "*dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya",*(QS. al-Najm [53]:39).

Kebebasan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam Islam, karenanya amal perbuatan seseorang hanya bisa diukur jika ia memiliki kebebasan memilih (*free will*). Tidak hanya itu, dalam

[55] Baca, Q.S. Al-Baqarah [2]: 256.

Islam kebebasan juga dipandang sebagai fitrah manusia yang tidak boleh digantikan dengan apapun.

Prinsip kebebasan dalam Islam ini dibingkai dalam hukum *syara'*, sehingga kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang dijamin dalam Islam, selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat. Dalam konteks inilah al-Qur'an menyatakan:

> *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".* (QS. Ali Imran [3]:110).

4. Musyawarah (*Syura'*)

Dalam khazanah Islam dikenal istilah *syura* yang secara prinsip sejalan dengan demokrasi, kata *syura'* merupakan bentuk *mashdar* dari *syaawara*, yang artinya meminta pendapat orang lain yang bisa dan layak dimintai pendapat. Dasar diperintahkannya melakukan *syura'* (musyawarah) dalam Islam di antaranya adalah surat Ali-Imran ayat ke 159.

> *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".* (QS. Ali Imran [3]: 159).

Dan dalam al-Qur'an Surat Asy-Syuura ayat 38, Allah berfirman:

> *"dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka".* (QS. Asy Syuura [42]:38).

Musyawarah hakikatnya adalah interaksi positif berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. Dengan kata lain, musyawarah merupakan interaktif untuk saling mengingatkan tentang kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama, dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antara warga masyarakat . Ini seperti kandungan firman Allah Swt, dalam Q.S al-'Ashar [103] ayat 1-3, yang artinya:

> *"Demi Massa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran".*

Secara substansial, musyawarah mencerminkan monopoli akan "kebenaran" akan hal ihwal peri kehidupan tidak mungkin dilakukan, karena masing-masing orang per-orang atau kelompok-kelompok masyarakat berbeda pandangan dalam satu hal strategis. Karena itu, *musyawarah* adalah sebuah mekanisme operasional menemukan "*common platform*" di antara keberagaman itu. Sistem musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama ini, telah dimulai sejak Nabi Saw., menjadi pemimpin umat di

Madinah. Karena itulah dalam Islam terdapat istilah ahli *syura* yang tergabung dalam "*ahlul halli wal aqdi"* sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kepada merekalah aspirasi umat disalurkan lalu dimusyawarahkan untuk dijalankan penguasa.[56]

Sampai di sini dapat ditegaskan bahwa Islam tidaklah anti demokrasi, akan tetapi sejatinya Islam adalah risalah yang mendukung dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini terbukti dengan begitu banyaknya prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Sampai-sampai tokoh muslim sekaliber Mohammad Natsir mengatakan, bahwa Islam *bersifat demokratis* dalam arti Islam anti-istibdad, anti-absolutisme dan anti-sewenang-wenang.[57] Bahkan Natsir mencita-citakan sebuah *"negara demokrasi berdasarkan Islam"* bukan *negara Islam* saja.[58] Dalam konteks ini Enayat Hamid,juga mengatakan, bahwa Islam sejalan dengan demokrasi karena dalam Islam tidak hanya terdapat prinsip *syura* (musyawarah), tapi juga karena konsep-konsep, seperti *ijtihâd* (*independent reasoning*) dan *ijma'* (*consensus*/permufakatan).[59] Ini artinya dengan sendirinya Islam adalah sistem nilai yang demokratis.

Dalam pada itu menurut hemat penulis, umat Islam saat ini tidak seharusnya terus berada dalam ruang pertentangan hubungan Islam dengan demokrasi, akan tetapi hal lebih penting (*urgent*) untuk dilakukan umat Islam sekarang, adalah bagaimana memberikan spirit Islam dalam pelaksanaan demokrasi dengan mengacu kepada ajaran kemaslahatan *(mashalih ammah*), keadilan

[56] Para ulama berbeda pendapat tentang keputusan ahli syura: wajib dijalankan penguasa atau sekadar anjuran; boleh menolak atau menerima. Hasal al Banna berpendapat sebagai anjuran saja, sedangkan al Qaradhawy berpendapat wajib dijalankan.

[57] Mohamad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hal. 89.

[58] *Ibid*., hal. 89

[59] Enayat Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-20,* (Bandung: Pustaka, 1988), hal. 201.

(al-adalah), ijtihâd (kemerdekaan berpikir), *tasamuh* (tolerensi), *al-hurrîyah* (kebebasan), *al-musâwah* (persamaan), *ash-shidqu wal amânah* (kejujuran dan tanggung jawab), dan sebagainya.

Setelah melakukan penulusuran dari berbagai literatur terkait, penulis menemukan rumusan konsep demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam, yakni konsep demokrasi yang setidak-tidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Demokrasi tersebut berada di bawah payung agama (tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist);
2. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah, mekanisme musyawarah ini hanya berlaku pada persoalan *ijtihâdi,* bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah;
3. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama, dan harus dipatuhi oleh semua warga dengan kesadaran yang tinggi dan tanggung jawab yang tinggi;
4. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya, selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat; dan,
5. Kemaslahatan umat haruslah menjadi prioritas yang utama.

BAB 3
ISLAM DAN HUMANISME

Humanisme merupakan salah satu istilah dalam sejarah intelektual yang sering digunakan dalam berbagai bidang khususnya filsafat, pendidikan dan literatur. Dalam konteks historis, paham humanisme berasal dari suatu gerakan intelektual dan kesusastraan yang pertama kali muncul di Italia pada paruh kedua abad ke-14 Masehi, di mana ketika itu agama “digerogoti” dan dikeluarkan dari ring wacana keilmuan dan kehidupan keduniawiaan.

Abad ini sering disebut ”abad kegelapan” karena cahaya akal budi manusia tertutup kabut dogma-dogma Gereja. Kuasa manusia dipatahkan oleh pandangan Gereja yang menganggap bahwa hidup manusia telah digariskan oleh kekuatan-kekuatan Ilahi, dan akal budi manusia tidak akan pernah sampai pada misteri dari kekuatan-kekuatan itu. Pikiran-pikiran manusia yang menyimpang dari dogma-dogma tersebut adalah pikiran-pikiran sesat dan karenanya harus dicegah dan dikendalikan. Dalam zaman seperti itulah, gerakan humanisme muncul, gerakan ini pada dasarnya bertujuan untuk melepaskan diri dari belenggu dari kekuasaan gereja dan membebaskan akal budi dari kungkungannya yang mengikat, melalui pendidikan liberal, mereka mengajarkan bahwa manusia pada prinsipnya adalah makhluk bebas dan berkuasa penuh atas eksistensinya sendiri dan masa depannya.

Kemunculan paham humanisme pada mulanya ditandai dengan munculnya gagasan-gagasan mengenai kebebasan manusia *(free will and free act)* untuk menentukan sendiri nasibnya. Kaum humanis bertekad untuk mengembalikan kepada manusia spirit yang pernah dimiliki manusia pada era klasik dan kemudian musnah pada zaman pertengahan. Spirit itu tak lain ialah spirit kebebasan yang telah menjustifikasi klaim-klaim mengenai otonomi manusia dan yang telah merestui manusia untuk mencari kemampuan membuat alam natural dan sejarah sebagai wilayah kekuasaannya serta menguasainya tatkala manusia melihat dirinya dibuat tak berdaya oleh faktor alam dan sejarah. Di saat yang sama, kaum humanis telah melenyapkan sebagian kepercayaan dan keyakinan masyarakat abad pertengahan. Faktor yang menstimulasi kaum humanis menaruh perhatian kepada kesusasteraan klasik (syair, makna-makna ekspresif, moral, dan politik) ialah keyakinan mereka bahwa kesusasteraan ini sanggup mendidik manusia agar bisa memanfaatkan kebebasan dan ikhtiarnya secara efektif.[1]

Berdasarkan catatan sejarah, paham ini pernah memperoleh pengakuan pada abad ke-14 di Italia melalui pemajangan berbagai literatur dan demonstrasi seni Yunani dan Romawi pra-Kristen yang ditemukan kembali oleh para Pastur di dinding-dinding museum. Ciri khas humanisme adalah sikap keberagamaan yang inklusif. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai karya Plato dan Aristoteles yang mengusung kandungan moral dari Injil.

Pada tahap selanjutnya paham kemanusiaan ini mengalami proses kemunduran, karena tidak ada ruang dialog antara humanisme yang muncul di Barat dan peradaban lainnya, yaitu agama dan kebudayaan lokal. Jarak antara humanisme dan agama inilah yang menimbulkan kesan jika paham kemanusiaan jauh dari per-

[1] Paul Edwards (*ed.*), *Encyclopedia of Philosophy*, Jilid IV (Macmillan: New York, 1972), hal. 69-70.

an agama. Padahal, pengembangan ajaran kemanusiaan bisa digali dari pendekatan agama.

A. Makna dan Hakikat Humanisme

Dilihat dari sisi kebahasaan istilah humanisme berasal dari kata latin *humanus,* dan mempunyai akar kata *homo* yang berarti *manusia*. *Humanus* berarti sifat manusiawi, atau sesuai dengan kodrat manusia.[2] Adapun secara terminologis, humanisme berarti martabat dan nilai dari setiap manusia, dan semua upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan alamiahnya (fisik non fisik) secara penuh.[3] Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, humanisme diartikan sebagai sebuah aliran (pemikiran) yang bertujuan menghidupkan rasa peri-kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik; dan diartikan pula sebagai paham yang menganggap manusia sebagai objek studi terpenting (bukan alam atau Tuhan).[4]

Humanisme merupakan sebuah konsep monumental yang menjadi aspek fundamental bagi *renaisans*, yaitu aspek yang dijadikan para pemikir sebagai pegangan untuk mempelajari kesempurnaan manusia di alam natural dan di dalam sejarah, sekaligus meriset interpretasi manusia tentang ini. Istilah humanisme dalam pengertian ini adalah *derivat* dari kata humanitas, yang pada zaman *Cicero* dan *Varro* berarti pengajaran masalah-masalah yang oleh orang-orang Yunani disebut "*paidea*",[5] yang berarti kebudayaan.

---

[2] A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dari A sampai Z.* (Yogyakarta: Kanisius,1997), hal. 93.

[3] Hasan Hanafi,dkk, *Islam.*, hal. 210.

[4] Tim Penyusun, *Kamus.,*hal. 533.

[5] Zainal Abidin, dalam *Filsafat Manusia,* menjelaskan *paideia* adalah pendidikan yang didukung oleh manusia-manusia yang hendak menempatkan seni liberal sebagai materi atau sarana utamanya. Karena alasan seni liberal inilah yang menjadi sarana terpenting dalam dunia pendidikan pada waktu itu (retorika, sejarah, etika dan politik) adalah kenyataan bahwa hanya dengan seni liberal, manusia akan tergugah untuk menjadi manusia, menjadi makhluk bebas yang tidak terkungkung oleh kekuatan-kekuatan dari luar dirinya. Lihat, Zainal Abidin, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hal. 41.

Humanisme berasal dari Barat dan mengalami perkembangan dalam lingkungan pemikiran filsafat Barat. Karenanya untuk mengkaji dan menganalisis gerakan humanisme beserta pengaruhnya pada dasar-dasar epistemologi Barat sudah seharusnya kita merujuk ke berbagai ensiklopedia Barat agar kajian bisa dilakukan secara ilmiah dan bebas dari berbagai kecenderungan subjektif.

Merujuk pada *American Humanist Association* (1968) yang berwawasan naturalisme humanistik, humanisme dimaknai sebagai cara hidup berdasarkan kemampuan-kemampuan manusia, sumber-sumber alam, dan masyarakat. Dalam *Encyclopedia of Philoshopy,* Paul Edward menjelaskan, humanisme adalah sebuah gerakan filsafat dan literatur yang bermula dari Italia pada paruh kedua abad ke-14 kemudian menjalar ke negara-negara Eropa lainnya. Gerakan ini menjadi salah satu faktor munculnya peradaban baru.[6] Menurutnya humanisme adalah paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria segala sesuatu.[7]

Sementara dalam *The New Oxford Dictionary of English* diterangkan, humanisme pada intinya adalah pandangan atau sistem pemikiran yang lebih menyandarkan pada kepentingan manusia daripada Tuhan atau hal-hal spiritual lainnya. Dan dalam *Ensiklopedi Britannica*, humanisme adalah istilah yang diaplikasikan secara bebas pada bermacam-macam keyakinan, metode dan falsafah yang memposisikan pusat penekanannya pada manusia. Istilah ini merujuk pada sistem pendidikan yang dikembangkan di Italia utara pada abad ke-14 M dan kemudian berkembang melalui Eropa dan Inggris.

---

[6] Paul Edwards (*ed.*), *Encyclopedia*, hal. 69.
[7] *Ibid*

Zainal Abidin dalam *Filsafat Manusia,* memberikan penjelasan tentang latar belakang pemahaman humanisme ini. Menurutnya, istilah humanisme akan lebih mudah dipahami dengan meninjaunya dari dua sisi, yakni; sisi historis dan sisi aliran-aliran di dalam filsafat.[8] Dari sisi historis, humanisme berarti suatu gerakan intelektual dan kesusastraan yang awalnya muncul di Italia pada paruh kedua abad ke-14 M. Gerakan ini boleh dikatakan sebagai motor penggerak kebudayaan modern, khususnya di Eropa. Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagi pelopor gerakan ini di antaranya Dante, Petrarca, Boccaceu dan Michael Angelo.[9]

Sementara dari sisi aliran filsafat, humanisme diartikan sebagai paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia sedemikian rupa sehingga manusia menempati posisi yang sangat tinggi, sentral dan penting, baik dalam perenungan teoritis-filsafati maupun dalam praktis hidup sehari-hari.[10] Salah satu asumsi yang melandasi pandangan filsafat ini adalah manusia pada prinsipnya merupakan pusat dari realitas, berbeda dengan filsuf abad pertengahan, para filsuf humanisme berpegang teguh bahwa manusia pada hakikatnya adalah bukan *Viator Mundi* (peziarah dimuka bumi) melainkan *Vaber Mundi* (pekerja atau mencipta dunianya)[11]

Tak jauh berbeda, Lorens Bagus dalam kamus filsafat-nya berpendapat, humanisme sebagai sebuah filsafat yang: (a) memandang individu rasional sebagai mahluk tertinggi; (b) memandang individu sebagai nilai tertinggi; dan (c) ditujukan untuk membina perkembangan kreatif dan moral individu dengan cara bermakna dan rasional tanpa merujuk pada konsep-konsep adi kodrati.[12]

[8] Zainal Abidin, *Filsafat Manusia,* (Bandung: Rosdakarya,2001), hal. 25
[9] *Ibid*, hal.25
[10] *Ibid,* hal. 25
[11] *Ibid*, hal. 26
[12] Lorens Bagus, dalam Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat,* (Bandung: Rosdakarya, 1999), hal. 140.

Sejalan dengan Lorens Bagus, Ali Syari'ati mengartikan humanisme sebagai aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok yang dimilikinya adalah untuk keselamatan dan kesempurnaan manusia. Humanisme memandang manusia sebagai makhluk yang mulia, dan prinsip-prinsip yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok yang bisa membentuk species manusia.[13]

Definisi lebih jelas tentang humanisme ini dikemukakan oleh salah seorang pendukung dan juru bicara humanisme paling terkemuka masa kini Corliss Lamont yang menyatakan:

> "…humanisme meyakini bahwa alam… merupakan jumlah total dari realitas, bahwa materi-energi dan bukan pikiran yang merupakan bahan pembentuk alam semesta, dan bahwa entitas supernatural sama sekali tidak ada. Ketidaknyataan supernatural ini pada tingkat manusia berarti bahwa manusia tidak memiliki jiwa supernatural dan abadi; dan pada tingkat alam semesta sebagai keseluruhan, bahwa kosmos kita tidak memiliki Tuhan yang supernatural dan abadi".[14]

Berangkat dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa makna humanisme merujuk pada kemampuan manusia sebagai individu yang rasional dan dipakai sebagai ukuran segala bentuk pemahaman terhadap realitas, dan berbagai jalan pikiran yang memfokuskan diri dalam masalah-masalah atau isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Dengan perkataan lain, Humanisme adalah pandangan hidup yang menganggap hidup manusia, harga diri manusia, nilai-nilai kemanusiaanya, dan hak-hak asasinya sebagai tujuan utama hidup ini. Ini artinya paham humanisme in-

---

[13] Ali Syari'ati, *Humanisme antara Islam dan Mazhab Barat*, (Jakarta: Pustaka Hidayah Jakarta, 1992), hal. 39

[14] Corrliss Lamont, *The Philosophy of Humanism* (New York: Humanist Press,1977), hal. 116.

gin meneguhkan kemampuan manusia secara bebas dan berdaulat untuk mengarungi hidupnya sendiri.

Pada mulanya pemikiran humanism ini ditujukan pada guru atau murid yang mempelajari kebudayaan seperti gramatika, retorika, sejarah, seni puisi atau filsafat moral. Pelajaran-pelajaran inilah yang dalam konsep humanisme biasa disebut sebagai *studia humanitatis,* yang pada era *renaisans*, ilmu-ilmu tersebut menduduki kedudukan yang amat penting. Oleh sebab itu, kaum humanis ketika itu memiliki kedudukan yang cukup terpandang dalam komunitas intelektual.[15]

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah humanisme ini menjadi tema utama bagi banyak filsuf untuk menguraikan filsafatnya, menariknya dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip humanisme. Sebut saja seperti, Maurice Merleau Ponty yang menulis *Humanisme dan Teror* (1969); suatu pembahasan tentang komunisme, kemudian Karl Jaspers tahun 1949 memberikan ceramah tentang, *Syarat-syarat dan Kemungkinan bagi suatu Humanisme Baru*, serta Martin Heidegger yang menulis surat berjudul, *Surat tentang Humanisme* (1947). Bahkan dari pihak Kristen mengadakan percobaan untuk mengklaim nama "humanisme" semisal Jacques Maritain, yang menulis *Humanisme Menyeluruh* (1936) yang menganggap humanisme Kristiani sebagai sintesa paling baik dari unsur-unsur humanistis yang tampak sepanjang sejarah dari humanisme klasik di zaman *renaisans* sampai dengan humanisme *marxistis* dan humanisme *liberal.*[16]

Dalam pada itu terminologi humanisme juga mengalami perluasan pemahaman, dalam hal ini Frederick Edword dalam

---

[15] Hasan Hanafi, dkk, *Islam dan Humanisme.* Cetakan Kesatu. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 210.

[16] Listiyono Santoso, "Patologi Humanisme (Modern): Dari Krisis Menuju 'Kematian' Epistemologi Rasional", *Jurnal Filsafat*, Jilid 33, No.1. (April 2003), hal. 35.

What is Humanism?, sebagaimana yang dikutip Zaenal Abidin dalam *Filsafat Manusia,* telah membuat ringkasan mengenai pengertian-pengertian humanisme, sebagai berikut:[17]

1. Humanisme renaisans, sebagai semangat belajar yang mulai berkembang pada akhir abad pertengahan, yang ditandai dengan bangkitnya kembali karya-karya klasik dan keyakinan yang diperbaharui atas kemampuan manusia untuk menentukan kebenaran dan kepalsuan bagi diri mereka sendiri;
2. Humanisme literer, yakni penyerahan kepada budaya humanitas atau literer;
3. Humanisme budaya, yakni budaya rasional dan empiris, khususnya yang berasal dari Romawi dan Yunani Kuno, dan berevolusi sepanjang sejarah Eropa. Sekarang ini menjadi bagian yang mendasar dari pendekatan Barat terhadap ilmu pengetahuan, teori politik, etika dan hukum;
4. Humanisme filsufis, yakni pengekspresian cara hidup yang dipusatkan pada kebutuhan dan minat manusia. Humanism filsufis ini terbagi menjadi dua, yakni humanisme Kristiani dan Humanisme modern;
   a. Humanisme Kristiani, yakni filsafat yang menekankan pemenuhan diri dalam rangka prinsip-prinsip Kristiani. Menurut Abdurahhman Mas'ud, humanisme Kristiani ini lebih berorientasi pada kepercayaan manusia yang sebagian besar merupakan produk pencerahan dan sebagian dari apa yang membuat humanisme pencerahan.[18]
   b. Humanisme modern, adalah sebuah pemikiran filsafat yang menolak hal-hal supranatural. Ia bersandar pada

[17] Frederick Edword, dalam Zainal Abidin, *Filsafat.,*hal.36

[18] Lihat, Abdurahhman Mas'ud, *Mengagas Format Pendidikan Non Dikotomik: Humanism Religiuos sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yokyakarta: Gema Media, 2002), hal. 129.

kemampuan akal dan ilmu pengetahuan, demokrasi dan kasih sayang manusia. Humanisme modern mempunyai sifat; sekuler dan religius; Humanism modern disebut juga dengan humanisme naturalistik/alam, humanisme *scientific*/ilmiah, humanisme etik dan humanisme demokrasi.[19]

5. Humanisme sekuler, adalah perkembangan lanjutan dari era pencerahan abad ke-18 dan abad ke-19. Humanisme sekular, mencerminkan bangkitnya globalisme, teknologi, dan jatuhnya kekuasaan agama. Humanisme sekular percaya pada martabat dan nilai seseorang dan kemampuan untuk memperoleh kesadaran diri melalui logika.[20] **Humanisme sekuler** ini merupakan cabang humanisme yang menolak keyakinan agama theistik dan keyakinan pada keberadaan dunia supernatural. Sedangkan prinsip dari humanisme sekuler adalah segala dogma, ideologi dan tradisi baik itu agama, sosial atau politik mesti ditimbang baik buruknya dan di uji, tidak diterima begitu saja. Ini artinya, humanisme sekuler berkomitmen untuk mencari jawaban pertanyaan dan solusi masalah kemanusiaan, bukan lewat mistik dan keyakinan, tetapi lewat nalar kritis, bukti nyata dan metode ilmiah. Humanisme sekular juga percaya pada martabat dan nilai seseorang dan kemampuan untuk memperoleh kesadaran diri melalui logika.
6. Humanisme Religius, sebagai humanisme yang muncul dari budaya etis, *utilitarianisme* dan *universalisme.* Pemikiran humanisme yang berdasarkan atas agama (*humanism religious*) ini menghendaki agar kaum agama mempunyai perhatian dalam menciptakan tata sosial moral yang adil dan *egaliter*,

[19] *Ibid*., hal. 129.
[20] Lihat, Baedhowi, *Humanisme Islam Kajian terhadap Pemikiran Filosofis Mohammed Arkoun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.72.

dalam rangka menghilangkan apa yang dalam agama disebut sebagai *"fasad fil ardl"*.[21]

Dalam konteks ini Mohammed Arkoun, juga telah menggolongkan humanisme dalam tiga tipologi, yakni humanisme literer, humanisme religius, dan humanisme filosofis:

1. Humanisme literer

   Humanisme literer ini digambarkan sebagai semangat aristokrasi, uang, dan kekuasaan dalam era Islam klasik (abad ke-3-4/9-10). Pada abad ke-16, humanisme digambarkan sebagai sebuah pengetahuan dan kebudayaan, manusia dibatasi secara spesifik oleh disiplin ilmu. Humanisme literer membangun pola pikir melalui dan berdasarkan literatur dan teks.

2. Humanisme religious

   Humanisme religious merupakan konsepsi guna mengukur ketaatan keberagamaan dan kesalehan manusia melalui dunia mistik (tasawuf), yakni dunia spiritual yang dapat dijalankan oleh setiap orang yang mempercayainya melalui penyatuan diri secara langsung dengan Tuhan. Konsepsi humanisme religius dibangun dengan subjektifitas para tokoh, yakni menekankan pada rasa dan penghayatan daripada menggunakan konsep dalam cara-cara mendekati dan menyatu dengan Tuhan.

3. Humanisme filosofis

   Humanisme filosofis merupakan penyatu dari elemen-elemen humanisme literer dan humanisme religius tanpa membedakan disiplin keilmuan yang lebih jelas. Melalui ketenangan yang menghanyutkan dan kecemasan lebih metodis dan lebih solider terhadap kebenaran antara manusia, dunia dan Tuhan. Adapun yang hendak dicapai oleh humanisme filo-

[21] Mamad Sa'bani S, *Memahami Agama Post Dogmatik*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), hal. 60.

sofis adalah mengharmoniskan atau menyeimbangkan antara material, jiwa dan spiritual.[22]

Pada tahap selanjutnya, pemikiran tentang humanisme ini terbagi menjadi dua aliran besar yakni, Humanisme keagamaan/religi (*humanism religious*) yang berakar dari tradisi Renaisans-Pencerahan dan diikuti banyak seniman, umat Kristen garis tengah, dan para cendekiawan. Dan Humanisme sekular, yang mencerminkan bangkitnya globalisme, teknologi, dan jatuhnya kekuasaan agama.

Humanisme sebagai sebuah aliran kefilsafatan yang menempatkan "kebebasan" manusia baik berpikir, bertindak dan bekerja sebagai segala-galanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya bangunan peradaban modern, serta telah memberikan kontribusi positif bagi kemajuan peradaban manusia yang mencoba memanusiakan manusia. Dan sebagai paham tentang manusia dan pemikiran etis, humanisme juga telah berjasa mengembalikan harkat dan martabat manusia, menyadarkan potensinya dan menandaskan tanggungjawabnya dalam kehidupan.[23] Namun di pihak lain, sebagai sebuah bangunan peradaban yang meletakkan manusia sebagai pusat dan ukuran semua yang "ada" (*beings*), ternyata pemikiran humanisme telah memunculkan sejumlah problem serius justru terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini diperjuangkan oleh humanisme itu sendiri.[24]

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan pemikiran humanisme di atas, yang jelas hingga saat ini masih banyak kalangan yang memandang jika humanisme merupakan sebuah gagasan positif, sebab pada esensinya humanisme merupakan sebuah aliran pemikiran yang mengacu pada keutamaan nilai-nilai kemanu-

[22] Mohammed Arkoun dalam Baedhowi, *Humanisme Islam Kajian terhadap Pemikiran Filosofis Mohammed Arkoun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.65-81

[23] Paul Edwards (ed.), *Encyclopedia*., hal. 70.

[24] *Ibid.*

siaan, yang menempatkan individu yang rasional dalam kedudukan yang tinggi dan sebagai sumber nilai paling puncak.

B. Prinsip-Prinsip Humanisme

Meskipun dalam sejarah pemikirannya paham humanisme mengambil bentuk yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua pandangan tersebut memiliki kesamaan yakni konsent terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, serta mengandung tiga unsur berikut:

1. *Humanum;*

   Humanum yaitu gambaran manusia dalam hakikat dan kedudukannya di dunia. Hakikat manusia sering dikatakan sebagai pribadi merdeka, makhluk Tuhan, bahkan dalam Islam disebut sebagai *Khalifah* atau Wakil Tuhan di dunia. Kedudukannya selaku individu disebut *animal rational* (hewan berakal; *al-haywan al-natiq*), *zoon politicon* (binatang yang berpolitik), *animal symbolicum* (binatang yang menggunakan simbol-simbol), *homo faber* (makhluk yang senang bekerja), *homo eroticus* (makhluk yang senang bercinta-cintaan), dan lain sebagainya.

2. *Humanitas;*

   Humanitas yaitu hubungan baik dan harmonis antara seseorang dengan manusia lain yang ditandai oleh kehalusan budi pekerti dan adab, pengertian, apresiasi, simpati, kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan, dan sebagainya.

3. *Humaniora;*

   Humaniora yakni sarana pendidikan untuk mencapai humanitas berupa ilmu pengetahuan budaya warisan berbagai

bangsa, termasuk warisan budaya bangsanya sendiri. Termasuk bidang humaniora ialah ilmu-ilmu seperti, sejarah, antropologi budaya, bahasa, kesusastraan, seni, arkeologi, filsafat, ilmu-ilmu keagamaan, dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah aliran pemikiran, dalam humanisme terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar bakunya dan sekaligus yang membedakannya dengan pemikiran lain. Menurut Paul Edwards, di antara prinsip baku pemikiran humanisme, adalah:

1. Manusia adalah standar dan kriteria segala sesuatu;
2. Penekanan terhadap urgensi kembali kepada peradaban era klasik untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan potensi dan kekuatan yang diyakini orang-orang terdahulu;
3. Penekanan secara berlebihan kepada kebebasan dan ikhtiar manusia akibat kebencian kepada intimidasi dan kediktatoran para penguasa abad pertengahan;
4. Pengingkaran terhadap status para rohaniwan sebagai perantara antara Tuhan dan manusia;
5. Penyerahan sepenuhnya kekuasaan dan penentuan nasib, dan kekuasaan despotisme harus ditolak mentah-mentah;
6. Manusia adalah sentral alam semesta;
7. Akal manusia sejajar dengan akal Tuhan;
8. Penolakan sistem-sistem tertutup filsafat, prinsip dan keyakinan-keyakinan agama, serta argumentasi-argumentasi ekstraktif mengenai nilai-nilai kemanusiaan;
9. Penolakan terhadap praktik-praktik asketisme, dan perhatian mesti dipusatkan kepada faktor jasmani dan kenikmatan-kenikmatan fisik;

10. Akal manusia adalah pimpinan manusia, dan status agama sebagai komando harus ditiadakan;
11. Kenikmatan-kenikmatan jasmani adalah tujuan final segala aktivitas manusia;
12. Manusia adalah binatang politik;
13. Dunia politik harus diceraikan dari segala pandangan metafisik atau agama, dan manusia adalah aktor yang memiliki wewenang mutlak dalam dunia politik.
14. Dalam psikologi, setiap manusia diteliti sebagai satu spesis tunggal, dan bukan sebagai satu individu yang merupakan bagian dari satu spesis manusia. Atas dasar ini, manusia berwenang untuk semata-mata mengikuti tatanan nilainya sendiri;
15. Aktualisasi diri, pemeliharaan diri dan peningkatan diri mesti dipelajari dalam setiap individu;
16. Manusia adalah pencipta lingkungannya dan bukanlah hasil lingkungannya;
17. Manusia harus terkonsentrasi sepenuhnya kepada dirinya;
18. Kelayakan kepribadian setiap individu bisa terbentuk tanpa keimanan kepada Tuhan;
19. Keberadaan agama dipandang sebagai faktor superfisial yang diperlukan demi popularitas nilai-nilai kepribadian manusia dan perbaikan sosial, namun agama ini bisa jadi merupakan agama produk manusia ala August Comte;
20. Penekanan terhadap persatuan antar segenap agama, baik agama yang berpangkal dari Nabi Ibrahim maupun agama khurafat. [25]

---

[25] Baca, Paul Edwards (*ed.*), *Encyclopedia*., hal. 69-70.

Di sini dapat dipahami jika paham kemanusiaan ini bermaksud mempromosikan kenikmatan-kenikmatan jasmani sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem Gereja yang lebih memberikan perhatian secara berlebihan kepada masalah-masalah spiritual. Bahkan kaum humanis memandang kenikmatan-kenikmatan fisik itu sebagai tujuan final aktivitas manusia, sampai-sampai paham humanisme secara prinsipal menilai peranan puritan dan ketakwaan sebagai faktor negatif bagi proses pencaharian kenikmatan dan keuntungan.[26]

Tidak hanya itu, kaum humanis juga percaya bahwa rasio dapat melakukan segalanya dan lebih penting dari pada iman, sehingga kitab suci mulai di pelajari, di tafsirkan kembali dengan akal (rasio) belaka. Walaupun tidak memberikan penekanan terhadap keimanan kepada Tuhan, namun kaum humanis tetap memandang harus konsisten kepada doktrin-doktrin keagamaan, kendati agama itu ternyata berlandaskan ateisme, sebab mereka meyakini tatanan sosial akan porak poranda tanpa adanya komitmen kepada serangkaian prinsip agama, baik yang berdasarkan *monoteisme* maupun *ateisme*.

Selain prinsip-prinsip di atas, dalam pemikiran humanisme juga terdapat beberapa aspek penekanan yang menunjukkan kualitas insani yang membedakannya dengan binatang, menurut Stevick, aspek yang menunjukan kualitas insani tersebut adalah:

1. Perasaan (*feelings*), yang meliputi segenap emosi pribadi maupun apresiasi estetis. Aspek ini cenderung menolak segala sesuatu yang merusak maupun yang menghambat penikmatan estetis;
2. Relasi sosial (*social relations*), merupakan satu sisi humanisme yang mendorong ke arah jalinan kerjasama, perkerabatan ser-

[26] George A.M, *Cita Humanisme Islam,* (Bandung: Serambi Ilmu Semesta, 2000), hal. 7.

ta menentang kecenderungan yang mereduksi tergalangnya jalinan sosial tersebut;

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), merupakan aspek humanisme yang menyepakati perlunya control dari masyarakat, kritik dan koreksi serta mengutuk siapa saja yang mengingkarinya;
4. Intelek (*intellect*), melibatkan pengetahuan, pemikiran dan pemahaman. Aspek ini membongkar segala sesuatu yang mempengaruhinya dengan membiasakan berlatih membebaskan pikiran, serta menyelidiki segala sesuatu yang tidak diuji secara intelektual; dan,
5. Aktualisasi diri (*self-actualization*), merupakan penelusuran kesadaran dari kualitas kesejatian diri yang paling dalam. Aspek ini meyakini bahwa konformitas menggiring ke arah perbudakan, karena itulah pengejaran keunikan membawa ke arah pembebasan.[27]

C. Humanisme dalam Islam

Pemikiran humanisme yang berdasarkan atas agama menghendaki agar kaum agama mempunyai perhatian dalam menciptakan tata sosial moral yang adil dan egaliter, dalam rangka menghilangkan apa yang dalam agama disebut sebagai *"fasad fil ardl"*.[28] Kalangan humanis beragama juga memandang manusia, nilai, dan kebebasannya sebagai tujuan, dan bahwa pengenalan Tuhan dan kekuasaan-Nya adalah satu jembatan untuk mencapai kepada tujuan tersebut.

Dalam Islam pandangan tentang humanisme dapat dieksplorasi dengan mengembalikan pemaknaan agama pada nilai-

[27] Lihat, Stevick Earl W, *Humanism,* (Oxford: Oxford University Press,1991), hal. 23-24.
[28] Mamad Sa'bani S, *Memahami Agama Post Dogmatik*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), hal. 60.

nilai kemanusiaan. Manusia perlu ditempatkan sebagai subjek dan objek dalam proses humanisasi agama. Apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan manusia dan masyarakat adalah tujuan dari pembelaan agama. Secara vertikal dan transedental, bisa saja pengamalan agama untuk orientasi kepada Tuhan, tetapi dalam agama juga terkandung dimensi *horizontal*, *imanental*, dan *humanistik*, yaitu beragama untuk manusia dan demi memenuhi harapan kemanusiaan.

Dalam konteks ini, Joel L. Kreamer dalam *Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival During the Buyid Adge* menulis, bahwa humanisme Islam mempunyai spirit yang berorientasi kepada keinginan untuk menyerap seluruh pengetahuan Yunani dengan menghidupkan kembali falsafahnya serta untuk mengembalikan warisan ilmu pengetahuan dan falsafah Yunani Kuno, sehingga para sarjana Islam abad pertengahan ini terlibat aktif dalam menyerap pengetahuan falsafah Yunani dan Arab secara keseluruhan sebagai pembentukan karakter dan pikiran.[29] Happy Susanto dalam artikel yang dimuat dalam *Harian Sinar Harapan* mengatakan, bahwa humanisme dalam Islam mengandung dua dimensi, yaitu ”rasionalitas” (*rationality*) dan ”pembebasan” (*humanity*). Dua dimensi ini harus melekat pada teks agama, yang perlu dicarikan pemaknaannya secara kontekstual.[30]

Abdurahman Mas'ud menegaskan bahwa “humanisme Islam adalah memanusiakan manusia sesuai dengan perannya sebagai *abdi* dan *khalifah* Allah di bumi ini,[31] yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang nyata, fitri dan rasional. Lebih lanjut ia menjelaskan, humanisme Islam merupakan konsep keagamaan yang menempatkan manusia sebagai manusia, serta upaya humanisasi

---

[29] Joel L. Kreamer, *Renaisans.,* hal. 28.

[30] Happy Susanto, “Islam Humanis”, *Harian Sinar Harapan*, (15 Oktober 2003

[31] Abdurahhman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik*; *Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal.130.

ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia.[32]

Humanisme Islam juga dikenal dengan istilah *humanisme teosentris,* sebagaimana konsep iman yang diaktualisasikan dalam amal saleh. Menurut Kuntowijoyo, humanisme bersifat teosentris (*humanisme teosentris*), artinya manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, akan tetapi tujuannya untuk manusia itu sendiri.[33] Maksudnya, keyakinan religius yang berakar pada pandangan *teosentris*, selalu dikaitkan dengan amal atau perbuatan manusia, keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Atas dasar itulah, konsep humanisme Islam melarang mendewakan manusia atau makhluk lain, dan juga tidak merendahkan manusia sebagai makhluk yang hina dan berdosa.

Di sini dapat disimpulkan bahwa Humanisme Islam adalah adalah memanusiakan manusia sesuai dengan perannya sebagai abdi dan khalifah Allah di bumi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang nyata, fitri dan rasional. Ia melarang mendewakan manusia atau makhluk lain dan tidak merendahkan manusia sebagai makhluk yang hina dan berdosa. Humanisme dalam ajaran Islam haruslah didasarkan pada hubungan sesama umat manusia, baik hubungan sesama muslim ataupun hubungan dengan umat lainnya.

Pembicaraan tentang humanisme dalam Islam, tentu kita akan berbicara mengenai sebuah kerajaan yang telah memprakarsai adanya faham atau gerakan ini, yakni Dinasti Buwaihiyyah. Sebab pada masa Dinasti Buwaihiyyah inilah lahir suatu faham atau gerakan yang disebut dengan Humanisme. Faham atau gerakan Humanisme ini timbul ketika dinasti Buwaihiyyah berkuasa

[32] *Ibid.,*hal.193.
[33] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi,* (Bandung: Mizan,1993), hal. 229.

di wilayah Irak dan Iran bagian utara yang sebelumnya adalah wilayah kekuasaan dinasti ʻAbbâsiyyah.

Kelahiran dinasti Buwaihiyyah ini sebelumnya dipicu oleh terjadinya *split intern* dinasti ʻAbbâsiyyah dengan lepas kendalinya kekuasaan khalifah dan meluasnya perselisihan masyarakat di Ibu kota Baghdad.[34] Dinasti ini didirikan oleh tiga bersaudara dari putra-putra Buwaih (Buya) yaitu; Ali, Hasan dan Ahmad yang kemudian mendapat gelar dari *Khalifah al-Mustakfi* sebagai *Imad al-Daulah* (Fondasi Negara), *Rukn al-Daulah* (Penyanggah Negara) dan *Mu'izz al-Daulah* (Penegak Negara).

Masa Dinasti Buwaihiyyah merupakan titik puncak dari apa yang disebut "humanisme", karena betapa kosmopolitannya atmosfer budaya pada saat itu. Secara general, gerakan ini adalah sebuah gerakan yang lebih mengedepankan corak falsafah Yunani khususnya Platonik dan Aristoteles, mainstream mereka pun bersifat Platonik dan spekulasi mereka dalam bidang metafisika merupakan perpaduan antara Aristotelianisme dan Neoplatonsme. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari kajian kurikulumnya yang bersandar pada klasifikasi autentik Aristoteles tentang ilmu. Di sana mereka banyak memasukkan cabang falsafah dalam kajian mereka, di antaranya tata bahasa, puisi, retorika, logika, etika politik, metafisika dan sebagainya.[35] Sebelumnya, gerakan ini adalah gerakan yang di rintis oleh seorang dari golongan filosof Kristen, Ya<u>h</u>yâ ibn ʻAdî dan murid-muridnya. Adapun murid-muridnya tersebut ada dua golongan yang terdiri dari golongan Kristen dan Muslim. *Pertama,* meneruskan tradisi (Kristen) dalam menyunting, menerjemahkan dan mengomentari teks-teks secara cermat sekali, yang di antaranya adalah <u>H</u>unain ibn Is<u>h</u>âq, aliran ini di-

[34] Baca: Joel L. Kremer, *Humanism in the Renaissance of Islam*, Terjemahan "Renaisans Islam: Kebangkitan Intelektual dan Budaya Pada Abad Pertengahan". (Bandung: Mizan, 2003), hal. 18.

[35] Madjid Fakhri, *Sejarah filsafat Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hal.264

sebut oleh Richard Wilzer sebagai "aliran falsafah Kristen Baghdad". dan, *Kedua,* para sarjana Muslim seperti, Îsâ ibn 'Alî (putra wazir terkenal, Alî ibn 'Îsâ).[36]

Dalam perkembangannya paham kemanusiaan (*humanisme*) ini sempat mengalami ketegagan dengan agama. Ketegangan ini berawal, ketika buku-buku Ibn Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, lalu disebut sebagai Latin Averoesm atau Averoesme Latin, rupanya pembagian antara *khawâs* dan *awam* ini bagi orang-orang Eropa begitu impresif, sehingga mereka langsung mengambil kesimpulan bahwa Ibn Rusyd sebetulnya membela adanya dua kebenaran, yaitu kebenaran falsafi dan kebenaran agama, dan kedua-duanya tidak perlu dipersatukan. Akibatnya ialah mereka betul-betul membedakan antara ilmu dan agama. Itulah permulaan dari sekularisme yang sampai sekarang masih bertahan di Barat. Ia juga muncul di dalam humanisme di Barat, karena humanisme adalah suatu paham yang mempercayai kemampuan manusia terutama kualitas manusia sebagai makhluk. Kalau seorang Barat mengaku sebagai *"I am humanist*", maka itu sebetulnya *"almost I am a secularist",* karena humanisme itu juga berasal dari falsafah Yunani yang distimulir oleh Islam.[37]

Berdasarkan argumentasi di atas, maka secara geneologis paham kemanusiaan atau humanisme di Barat boleh dikatakan mewarisi atau masih merupakan kelanjutan langsung dari pemikiran Islam yang diintrodusir oleh Ibn Rusyd. Sampai di sini dapat dipahami bahwa Islam dan humanisme tidak selamanya berada pada ruang penuh pertentangan. Karena, ajaran agama yang dimaknai secara humanis dan rasional akan melapangkan citra positif bagi peran agama yang apresiatif dengan konteks kemanusiaan.

[36] *Ibid.,*

[37] Budhy Munawar Rachman (ed.), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Sketsa Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban,* (Jakarta: Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun, 2008)

D. Dasar Humanisme Islam

Islam berasal dari kata *aslama* yang berarti patuh dan menyerahkan diri. Kata ini berakar dari kata *silm* yang diartikan, *selamat sejahtera* atau *damai*.[38] Dari kata dasar tersebut, maka Islam dapat dimaknai berserah diri, tunduk, dan patuh kepada kehendak Sang Pencipta. Dengan demikian, secara literal Islam berarti pasrah, berserah diri, atau menyerahkan diri.

Islam merupakan agama samawi, yang merupakan ikatan antara Tuhan sebagai Tuhan dan manusia sebagai manusia.[39] Artinya, Tuhan merupakan pencipta manusia dan alam semesta yang memiliki suatu kekuatan yang Maha di luar diri manusia, karenanya manusia harus tunduk, patuh, dan berserah diri terhadap kehendak-Nya.

Sebagai wahyu dan hasil ciptaan Tuhan Islam memiliki ajaran kedamaian, dan kebenaran yang hakiki. Dalam pada itu, Islam memiliki ciri-ciri konsep ketuhanan, kerasulan dan ajaran-ajaran yang menunjukkan kesatuan yang murni.[40] Islam merupakan wahyu yang memiliki ajaran berupa al-Qur'an yang berisikan petunjuk dan pembeda antara yang benar (*haq*) dan yang salah (*batil*), kisah-kisah (sejarah), hukum dan moralitas. Al-Qur'an juga membicarakan hubungan Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Artinya, al-Qur'an menegaskan fungsi manusia, tugas manusia, tujuan penciptaan manusia, kebutuhan manusia dan hakikat manusia.[41] Hal ini karena pada dasarnya Islam merupakan agama untuk manusia. Segala sesuatu yang terkandung dalam al-Qur'an adalah untuk bimbingan dan perkembangan manusia dalam memenuhi

[38] Abdul Majid, et.al., *Al-Islam*, (Malang: UMM Press,1998), hal. 43.
[39] Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (*L 'Humanisme de L 'Islam*), Terjemahan M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 41.
[40] Abdul Majid, et., al., *al-Islam*., hal.42
[41] *Ibid*., hal.57.

kebutuhan-kebutuhan fitrahnya.

Dalam konteks ini, Amin Abdullah menjelaskan bahwa al-Qur'an menjadikan manusia sebagai objek kritik yang tidak ditemui dalam kitab-kitab agama selain Islam. al-Qur'an terlibat dalam transformasi sosial manusia dan Nabi Muhammad Saw., berperan dalam mentransformasikan tanah Arab dari sebuah tatanan masyarakat penyembah berhala, pertalian darah, dan kekerabatan menuju komunitas masyarakat berkeyakinan yang lebih maju, yakni komunitas muslim (*ummah*). Hal ini dijelaskan dengan pertanyaan Rasulullah Saw., menjelang wafatnya kepada pengikutnya *"Apakah mereka akan kembali kepada perilaku yang lama?*", mereka menjawab: *"Ya Rasulullah, kita tidak akan pernah kembali".* Sementara itu hingga kini terbukti masyarakat Arab telah lama meninggalkan ritual dan penyembahan berhala dan tidak kembali lagi.[42]

Dalam paradigma Islam, humanisme haruslah dipahami sebagai suatu konsep dasar kemanusiaan yang tidak berdiri dalam posisi bebas. Ini mengandung pengertian bahwa makna atau penjabaran arti memanusiakan manusia itu harus selalu terkait secara teologis. Oleh karena itu, agar dapat mengetahui dasar dan nilai humanisme dalam Islam, maka kita harus berpaling kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai sumber hukum Islam yang utama.

Dalam Islam, dasar pemikiran humanisme ini sebenarnya sudah terumuskan dalam konsep "*khalifatullah*". Konsep ini bisa dilacak pada sumber dasar Islam yakni al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 30-32, yang artinya sebagai berikut:

> "*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang*

[42] Hasan Hanafi*, et,.al., Islam*., hal.189-190

> *khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (QS. al-Baqarah [2]: 30- 32)

Substansi dari firman Allah Swt., di atas ada tiga hal secara jelas diterangkan, yaitu:

1. Manusia adalah mahluk pilihan Tuhan;
2. Keberadaan manusia dengan segala kelebihannya dimaksudkan sebagai wakil Tuhan di atas bumi (*khalifah fil ardh*); dan,
3. Manusia adalah pribadi yang bebas, yang menanggung segala risiko atas perbuatannya.

Berbeda dengan prinsip humanisme sekuler (barat), humanisme Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang nyata, fitri dan rasional, seperti, saling mencintai, kasih sayang dan menjaga kebersamaan (Q.S. al-Hujarat [49]:10); berpegang teguh pada agama Allah, tidak berselisih, tidak bercerai berai dan selalu menghindari permusuhan (Q.S. Ali Imran [3]:103); menjalin hubungan dengan umat lain yang tidak memusuhi umat Islam dengan jalan saling kenal mengenal, saling berbuat baik, saling mengasihi dan

bersikap adil terhadap siapapun (Q.S. al-Hujarat [49]:13); menjamin kebebasan beragama (QS. al-Baqarah [2]:256; saling menghormati dan menjunjung kehormatan diri sendiri, memelihara hak orang lain, dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip di atas, sangat melekat dengan kehidupan kaum muslim yang ketika mereka memulai menjalankan shalat, mereka memutuskan hubungan dengan seluruh ikatan duniawi, mereka tunduk dan bersujud dihadapan Tuhan, lalu berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan seraya mengagungkan-Nya. Ketika mereka selesai melaksanakan shalat, mereka memulai kehidupan baru mereka. Mereka mengakhiri shalat mereka dengan salam dan berdoa dengan mengharapkan kesehatan, keamanan dan kedamaian bagi orang lain. Memberi salam dan mendoakan kedamaian kepada orang lain merupakan tindakan yang paling mulia dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Abdulllah bin Amru, r.a, yang berkata:

> "Pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw: *"Islam manakah yang paling baik?* (*Ayyul Islam khayrun?*)" Rasulullah Saw., menjawab: *"Memberikan makan* (kepada orang miskin), *mengucapkan salam* (*taqra'u salâm*) *kepada orang yang engkau kenal ('arafta), maupun yang tidak engkau kenal (lam ta'rif)*".[43]

Penggalan hadist di atas juga menunjukan bahwasanya Rasulullah Saw., dengan tegas mengajarkan agar setiap muslim mendoakan keselamatan dan memberikan pertolongan kepada siapapun, tanpa memandang status, kedudukan dan bahkan keyakinannya, sebab hal itu merupakan amalan Islam yang paling utama.

[43] Shahih Bukhari, Kitab al-Iman, hadist no. 11, dan 27. dan Kitab Isti'zan, hadist no. 5767; Al-Nasai, Bab Iman, hadist No.13.

Islam juga mengajarkan kasih sayang dan toleransi kepada siapa pun, bahkan salah satu tujuan diutusnya Nabi Saw., ke dunia pun semata-mata sebagai penyebaran kasih sayang atas seluruh alam semesta (*rahmatal lil 'lamin*), bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tetapi juga ditunjukan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dalam konteks inilah Allah Swt., berfirman:

> *"... dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".* (Q.S. al-Anbiya [21]:107)

Dalam banyak riwayat juga ditemukan hadist yang mengajarkan agar umat Islam bersikap toleran dan berlaku kasih sayang terhadap orang-orang yang berbeda pandangan atau berbeda agama sekalipun. Imam Bukhari meriwayatkan;

> "Pada suatu ketika Rasulullah Saw., pernah dilewati iringan jenazah, lalu beliau berdiri (untuk menghormati). Ketika dikatakan: *"Itu Jenazah orang Yahudi!"* Rasulullah Saw., menjawab: *"Bukankah ia juga manusia!".*[44]

Perkataan Rasulullah Saw., yang cukup tegas: *"Bukankah ia juga manusia!"* ini menunjukkan pola pandangan humanisme Rasulullah Saw., yang universal. Artinya, walaupun memiliki pandangan atau agama yang berbeda namun seorang muslim tetap wajib menghormati manusia dari sisi kemanusiaannya.

Terkait dengan hal ini, dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Sarjana Muslim Mahmud al-Aqqad, diceritakan;

---

[44] Shahih Bukhari, Kitab Al-Jana'iz, hadist No. 1229; Shahih Muslim, Kitab Al-Janaiz, Hadist No. 1596; Al-Nasai, Kitab Al-Janaiz, hadist No. 1895; Musnad Ahmad, Juz 6, hal. 6.

“Pada masa kekhalifahannya, sekali waktu Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib menemukan baju besinya berada di tangan seorang Nasrani (Kristen) dan karenanya ia segera menghadap kepada Qadhi (Hakim) untuk menuntut baju besi miliknya itu. Hakim menghadapkan Imam Ali kepada lelaki Nasrani ini sebagaimana layaknya orang biasa, tanpa hak istimewa sedikit pun juga. Di hadapan pengadilan, Imam Ali berkata, “Itu adalah baju besi milik saya. Saya tidak pernah menjualnya atau memberikannya kepada siapa pun jua.” Sang Hakim lalu bertanya kepada lelaki Nasrani yang menjadi lawan Amirul Mukminin ini, “Apa pendapatmu tentang apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin?” Orang Nasrani itu menjawab, “Baju besi ini milik saya, akan tetapi Amirul Muminin juga bukan seorang pendusta!.”

Hakim berpaling lagi kepada Imam Ali, “Wahai Amirul Mu’minin, apakah Anda mempunyai saksi?” Mendengar pertanyaan ini, Imam tertawa dan berkata, “Suraih (nama lelaki Nasrani itu) menang, saya memang tidak memiliki saksi dan bukti.” Hakim pun kemudian memutuskan bahwa baju besi itu menjadi milik Suraih, yang serta merta mengambil baju besi tersebut dan langsung beranjak pergi.

Sementara Imam Ali hanya memandangnya saja. Namun belum lagi beberapa langkah si Nasrani itu pergi, ia berbalik kembali menghadap ke Imam Ali seraya berkata, “Sungguh saya bersaksi bahwa ini adalah pengadilan yang hanya mungkin dilakukan oleh para Nabi saja. Seorang khalifah menuntut saya di hadapan Hakim yang nyata-nyata adalah bawahannya, tetapi keputusannya demikian ini. *Asyhadu anlaa ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu*

> *war rasuluh*. Saya bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Baju besi ini demi Allah, wahai Amirul Mukminin, memang milik Anda! Saat itu saya menyertai Anda di dalam perang Shiffin dan saya mengambilnya ketika baju ini terjatuh dari kuda Anda!"
>
> Mendengar pengakuan Suraih itupun, Imam Ali tersenyum dan berkata, "Tapi kalau Anda sudah menyatakan Islam, biarlah baju besi ini menjadi milik Anda!"

Dalam riwayat lain, dikisahkan pada masa kekhalifahannya, Imam Ali pergi bersama sahabat-sahabatnya. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang laki-laki tua yang sedang mengemis. Imam Ali bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Mengapa laki-laki ini mengemis?" Mereka menjawab, *"Dia seorang Nasrani."* Imam Ali r.a, marah seraya berkata: *"Pada saat ia masih muda bukankah kalian mempekerjakannya, lalu mengapa setelah ia tua kalian membiarkannya begitu saja?"* Setelah itu Imam Ali r.a memerintahkan agar laki-laki tua itu diberi tunjangan hari tua dari Baitul Mal.[45]

Inilah dasar-dasar humanism dalam Islam.

Dasar pemikiran humanisme dalam Islam juga dapat dilihat dari kepemimpinan Rasulullah Saw., di awal perkembangan Islam. Betapa ketika itu Rasulullah Saw., mampu memikat seluruh elemen penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai suku, agama dan latar belakang sosial yang beragam. Padahal beliau belum pernah bertemu dengan mereka, dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Pertama sekali yang Rasulullah Saw.,

---

[45] Ali Shafi, *Kisah-Kisah Imam Ali*, (Bandung: Lentera, 2003), hal. 55.

deklarasikan bagi penduduk Madinah yang sedang menanti-nanti kedatangan beliau adalah nilai-nilai humanisme dan kepedulian yang dilandasi dengan sikap mental yang kuat dan rasa kasih sayang yang tulus. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan tulus Abdulllah bin Salam r.a., akan kepribadian Rasulullah Saw., katanya: Ketika Rasulullah Saw, hendak datang di Madinah, manusia pada menunggu-nunggu dan saling memberi kabar: Rasulullah datang, Rasulullah datang. Aku datangi kerumunan manusia. Ketika aku pastikan bisa melihat wajah Rasulullah Saw, maka aku yakin bahwa raut wajahnya bukan tipe wajah pembohong. Dan pertama kali yang beliau ucapkan adalah:

> *"Sebarkanlah salam, berilah makan orang yang membutuhkan, sambunglah persaudaraan dan shalat malamlah ketika manusia pada tertidur. Maka anda akan masuk surga dengan selamat"*.[46]

Sampai di sini, dapat dipahami bahwasanya Islam tidaklah bertentangan dengan pemikiran humanisme, melainkan Islam sejalan dan mendukung pemikiran humanisme. Bahkan Kuntowijoyo pernah mengatakan, jika Islam adalah sebuah humanisme, yaitu agama yang sangat mementingkan manusia sebagai tujuan sentral.[47] Ia juga menegaskan, bahwa *Humanisme* merupakan nilai inti (*core-value*) dari seluruh ajaran Islam,[48] sebab Agama adalah untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Pengamalan dalam beragama, disamping sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, juga diorientasikan untuk membebaskan manusia dari segala macam ketidakadilan, penindasan dan kemiskinan. Bahkan Ali Syari'ati pemikir muslim terkemuka memasukkan agama (termasuk Islam) sebagai salah satu madhab atau aliran humanisme.

---

[46] Sunan Tirmidzi, Jilid 9, hal. 25

[47] Kuntowijoyo, *Paradigma.,* hal. 229.

[48] *Ibid.*

BAB 4
HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM

Bagi umat manusia pendidikan adalah proses yang sangat penting, melalui pendidikan inilah setiap orang belajar seluruh hal yang belum mereka ketahui. Melalui pendidikan akan lahir seorang yang berilmu, yang dapat menjadi *abdi* dan *khalifah* Allah di alam semesta sesuai dengan kehendak Sang pencipta-Nya. Dengan pendidikan, seorang dapat menguasai dunia dan tidak terikat lagi oleh batas-batas yang membatasi dirinya. Seperti yang diungkapkan Muhammad 'Abduh, tokoh pembaharu Muslim, bahwa pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat merubah segala sesuatu.[1]

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya, sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan suatu generasi baru yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri tapi juga tidak bodoh secara intelektual. Ini artinya, kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikannya. Tanpa pendidikan maka diyakini jika manusia sekarang tidak

[1] Muhammad 'Ammarah, *Al-Imam Muhammad 'Abduh, Al-Imam Muhammad 'Abduh: Mujaddid al-Islam* (Beirut: Al-Muassassah al-Islamiyyah li al-Dirasah wa al-Nasyr, 1981), hal.207.

akan berbeda dengan generasi manusia masa lampau yang sangat tertinggal, baik kualitas kehidupan maupun proses-proses pembedayaannya.

Dalam lintasan sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang, dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendeknya, bagi manusia pendidikan adalah hal yang sangat penting dan berguna bagi kehidupan dan perkembangan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus menjadi landasan yang diperlukan untuk meraih kemajuan suatu bangsa di masa depan.

A. Pengertian Pendidikan

Sebelum mengkaji konsep dan hakikat pendidikan Islam, maka kita tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang pengertian pendidikan secara umum, sebab antara pendidikan Islam dengan pendidikan secara umum terdapat faktor keterkaitan (*relation factor*), yang tak terpisahkan.

Pendidikan dari segi bahasa dapat diartikan sebagai perbuatan mendidik; berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan badan, batin dan sebagainya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diterangkan, secara bahasa pendidikan berasal dari kata dasar *didik*, yang diberi awalan *me* menjadi *mendidik (*kata kerja) yang artinya memelihara dan memberi latihan. Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.[2]

[2] W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1985), Cet. XII. Hal.702

Dalam Bahasa Jawa pendidikan diartikan sebagai *penggu-lawentah* yang berarti mengolah, jadi mengolah kejiwaannya ialah mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak sang anak.[3] Dalam bahasa Yunani, kata *pendidikan* dikenal dengan istilah *paedagogis* yang berarti *penuntun anak*. Dalam bahasa Romawi, dikenal dengan istilah *educare,* yang artinya membawa keluar (sesuatu yang ada di dalam). Bahasa Belanda menyebut istilah pendidikan dengan *opvoeden,* yang berarti membesarkan atau mendewasakan, atau *voden* yang artinya *memberi makan*.

Sedang dalam Bahasa Inggris, pendidikan dikenal dengan istilah *education.* Kata *education* berasal dari bahasa latin yaitu *ex* yang berarti keluar, dan e*ducere* yang berarti mengatur, memimpin dan mengarahkan.[4] Istilah *educate* atau *education,* juga berarti *to give moral and intellectual training,* yakni menanamkan moral dan melatih intelektual.[5] Dan dalam *Dictionary of Education,* makna *education* adalah kumpulan dari semua proses yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan-kemampuan, sikap-sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif di dalam masyarakat ia hidup.[6]

Dalam Bahasa Arab pendidikan disebut dengan istilah *tarbiyah* dan *ta'lim.* Kedua istilah tersebut diambil dari kata dasar *rabbaa* dan *'allama.* Dr. Ahmad Syarabashi membedakan antara *ta'lim* dan *tarbiyah*. Menurutnya *ta'lim* ialah pengajaran dan menghimpunan informasi-informasi, biasanya dalam otak; sedang *tarbiyah* mengandung pengertian pengarahan, pendidikan, dan latihan. *Ta'lim* mengarahkan pertama-tama kepada pencerdasan akal, ingatan, dan hafalan, sedangkan *tarbiyah* mengarahkan kepada pen-

[3] Zakiah Daradjat, *et.al, Ilmu Pendidikan Islam,* Cet. IV (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 25.
[4] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus.,* hal. 250.
[5] A. Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam,* (Malang: UIN-Press. 2008), hal. 16
[6] Zahara Idris, *Pengantar Pendidikan I,* (Jakarta: Grasindo, 1992), hal. 2.

didikan jiwa, rohani, dan hati.[7]

Secara terminologis dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* pendidikan dimaknai sebagai proses perubahan sikap dan tata-laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.[8] Adapun secara konstitusional dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1, dinyatakan:

> ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.[9]

Para ahli mendifinisikan istilah pendidikan berbeda-beda, perbedaan ini dipengaruhi oleh pandangan dunia (*weltanschauung*) masing-masing ahli. John Dewey mewakili aliran filsafat pendidikan modern merumuskan: “*Education is all one growing; it has no end beyond it self”.* Pakar pendidikan dari Amerika Prof. Horne, mendifinisikan pendidikan sebagai proses abadi bagi menyesuaikan perkembangan diri manusia yang merangkumi aspek jasmani, alam, akliah, kebebasan dan perasaan manusia terhadap Tuhan sebagaimana yang ternyata dalam akliah, perasaan dan kemahuan manusia.[10] Herbert Spencer, ahli falsafah Inggris (820-903 M) mengatakan, pendidikan ialah mempersiapkan manusia

---

[7] Anshori, “Pendidikan Menurut Pandangan Islam “ dalam *Jurnal al-Furqan,* IIQ Jakarta, No. 8 Tahun VI 1998, hal. 68

[8] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus.,* hal. 232.

[9] Depdiknas, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, 2003), hal. 65.

[10] Lihat, Hermen Harrel Horne, *The Democratic Philosophy of Education*, (Mac Millan & Co., New York, 1939). hal. 6. Lihat juga, Mook Soon Sang, *Pendidikan di Malaysia*, Kumpulan Budiman, (Kuala Lumpur, 1988.) hal. 414.

supaya dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna.[11]

M.J. Langeveld, sebagaimana dikutip Kartini Kartono mengatakan, pendidikan sebagai upaya manusia dewasa membimbing yang belum kepada kedewasaan.[12] Sementara Frederick J. MC. Donald menerangkan: "*Education in the sense used here, is a process or an activity which is directed at producingdesirable changes in the behavior of human being*"[13] (pendidikan adalah proses yang berlangsung untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan dalam tingkah laku manusia).

Dalam kaitan ini Ki Hajar Dewantara[14] pakar pendidikan dan pendiri taman siswa berpendapat, pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Menurutnya pendidikan berarti usaha berkebudayaan, berasas peradaban yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.[15] Lebih lanjut ia mengatakan, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.[16]

H.M. Arifin dalam bukunya *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama,* mendifinisikan pendidikan sebagai usaha orang

---

[11] Lihat, Herbert Spencer, *Education: Intelectual, Moral and Physical*, (Wiiliam and Nongete, 1906), hal. 84.

[12] M.J. Langeveld dalam Kartini Kartono, *Tinjuan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Perdaya Paramita,1997), hal. 11.

[13] Frederick J. MC. Donald, *Educational Psychology*, (Tokyo: Overseas Publication LTD,1959), hal. 4

[14] RM Suwardi Suryaningrat (RM SS), yang kemudian bergelar DR Ki Hadjar Dewantara (KHD) adalah Bapak Bangsa yang ajarannya relevan sepanjang jaman untuk diaplikasikan oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia. RM SS adalah cucu Sri Paku Alam III,

[15] Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962), hal.166.

[16] Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, cet. 4), hal.4

dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian, serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal.[17] Dengan lebih filosofis Noeng Muhajir, mengatakan pendidikan merupakan upaya terprogram mengantisipasi perubahan sosial oleh pendidik dalam membantu subjek didik dan satuan sosial untuk berkembang ke tingkat normatif yang lebih baik. Bukan hanya tujuannya, tetapi juga cara dan jalannya.[18]

Dengan redaksi yang berbeda Ahmad D. Marimba mendifinisikan, "Pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama".[19] Adapun pendidikan menurut Soegarda Poerbakawatja, ialah semua perbuatan atau usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan ketrampilannya kepada generasi muda. Sebagai usaha menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani.[20]

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan secara terperinci di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha untuk membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan keberagamaan sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan, yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama. Dengan lebih singkat dapat dikatakan, bahwa pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mengandung unsur-unsur pengajaran, latihan, bimbingan dan pimpinan dengan

---

[17] HM. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hal. 12.

[18] Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif,* Cet. V (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 7-8.

[19] Ahmad D. Marimba, *Pengantar.,* hal.19.

[20] Soegarda Poerbakawatja, *et. Al., Ensiklopedi Pendidikan,* (Jakarta:Gunung Agung,1981) hal. 257

tumpuan khas kepada pemindahan berbagai ilmu, nilai agama dan budaya serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu (pengajar) kepada individu yang memerlukan pendidikan itu (pembelajar).

B. Pendidikan Islam

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam pembangunan sebuah peradaban, termasuk peradaban Islam. Dalam konteks Islam, pengertian pendidikan merujuk pada istilah yang biasa dipergunakan yaitu, *ta'lim*, *tarbiyah* dan *ta'dib.*

Istilah *ta'lim* (التعليم) dengan kata kerja *allama* (علّم) mengandung pengertian memberi tahu atau memberi pengetahuan.[21] Jadi istilah ini dapat diartikan sebagai pengajaran, seperti dalam bahasa Arab sering digunakan istilah *tarbiyah wa ta'lim* (التربية والتعليم) berarti Pendidikan dan Pengajaran.[22] Menurut Zakiah Daradjat, kata *allama* memberi pengertian sekadar memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan ke arah pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberian pengetahuan.[23]

Sedangkan istilah *tarbiyyah,* yang dalam kamus bahasa Arab berasal dari *fi'il* madhi *robba* dan mudhari'nya *yurobba,* yang berarti memelihara, mengasuh, mendidik. Dalam bentuk masdarnya menjadi *tarbiyyah,* yang berarti pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan.[24] Dari pengertian tersebut dapat dipahami jika konsep *tarbiyyah* merupakan proses mendidik manusia dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia ke arah yang lebih

---

[21] Lihat, Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hal. 26.

[22] Abd. Rahman Abdullah, *Aktualisasi Pendidikan Islam; Rekonstruksi Pemikiran dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 27.

[23] Zakiah Daradjat, *et.al, Ilmu,* hal. 26

[24] Lihat, A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 462.

sempurna. Ia bukan saja dilihat proses mendidik akan tetapi juga meliputi proses mengurus dan mengatur supaya perjalanan kehidupan berjalan dengan lancar.

Dan istilah *ta'dib* yang secara bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata *addaba* (أدب) yang berarti memberi adab dan mendidik. Dalam kamus *al-Mu'jam al-Washith*, sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Rahman Abdullah, istilah *ta'dib* yang biasanya diartikan sebagai "pelatihan" dan "pembiasaan" mempunyai makna dasar sebagai berikut:

1. Ta'dib berasal dari kata dasar *aduba–ya'dubu* yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun;
2. Berasal dari kata dasar *adaba–ya'dibu* yang berarti mengadakan pesta atau perjamuan yang berarti berbuat dan berperilaku sopan;
3. Kata *addaba* sebagai bentuk kata kerja *ta'dib* mengandung pengertian mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan, dan memberi tindakan.[25]

Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang makna ketiga istilah di atas, namun ketiga istilah tersebut dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya tercangkup dalam konsep pendidikan Islam. Hal ini sebagaimana diterangkan Jalaluddin Rahmat, bahwa ketiga istilah (*at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib)* ini mempunyai konteks makna yang berbeda, akan tetapi kalau dikaji dari segi etimologi ketiga kata tersebut mengandung kesamaan dalam segi esensi, yaitu mengacu pada sebuah proses. Apabila ketiga istilah tersebut dikembalikan pada asalnya, maka ketiga-tiganya mengacu pada sumber dan prinsip yang sama, yaitu pendidikan Islam bersumber dari Allah dan didasarkan pada prinsip

[25] Abd. Rahman Abdullah, *Aktualisasi,* hal. 33-34.

ajaran-Nya.[26]

Namun menurut al-Attas istilah *ta'dib* merupakan istilah yang paling tepat untuk menunjuk arti pendidikan Islam, sebab tidak terlalu sempit sekadar mengajar saja, tetapi juga tidak terlalu luas meliputi makhluk-makhluk selain manusia.[27] al-Attas, menjelaskan:

> "Bahwa Tarbiyah dalam pengertian aslinya dan dalam pemahaman dan penerapannya oleh orang Islam pada masa-masa yang lebih dini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan pendidikan maupun proses pendidikan penonjolan kualitatif pada konsep tarbiyah adalah kasih saying (rahmah) dan bukannya pengetahuan ('Ilm) sementara dalam Ta'lim, pengetahuan lebih ditonjolkan dari pada kasih sayang. Dalam konseptualnya ta'dib sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan ('Ilm), pengajaran (ta'lim) dan pengasuhan yang baik (tarbiyah). Karenanya, tidak perlu lagi untuk mengacu pada konsep pendidikan dalam Islam sebagai Tabiyah, ta'lim dan ta'dib sekaligus, karena itu, ta'dib merupakan istilah yang paling tepat dan cermat untuk menunjukkan pendidikan dalam arti Islam".[28]

[26] Baca, Jalaluddin, *Teologi Pendidikan.,* hal. 73

[27] Muhmmad al-Nauquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam, Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam,* (Bandung: Mizan, 1984), hal. 53.

[28] Imam Bawani dan Isa Anshori, *Cendekiawan Muslim,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hal.73.

Selain dari ketiga istilah di atas, dalam khasanah Islam juga dikenal istilah *irsyad*,[29] *tadris*,[30] *tazkiyah*,[31] dan *tilawah*.[32] Istilah-istilah di atas memiliki makna yang sepadan dengan pendidikan. Adanya penekanan makna yang berbeda dari masing-masing istilah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dalam perspektif Islam mengandung makna yang luas dan mendalam seperti yang dikemukakan Zarkowi Soejoeti, yang mendifinisikan pendidikan ke dalam tiga pengertian.

1. Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam;
2. Jenis pendidikan yang memberikan perhatian yang sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan; dan,
3. Jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian tersebut di atas.[33]

Dalam rangka merumuskan pendidikan Islam yang lebih spesifik lagi para tokoh pendidikan Islam kemudian memberikan

---

[29] Istilah *irsyad* biasanya digunakan dalam *thariqat* (tasawuf). *Irsyâd* merupakan aktivitas pendidikan yang berusaha menularkan penghayatan (transinternalisasi) akhlak dan kepribadian kepada peserta didik, baik yang berupa etos kerjanya, etos belajarnya, maupun dedikasinya yang serba *lillahi ta'ala*.

[30] Istilah *tadrîs* berasal dari akar kata *"darasa-yadrusu-darsan wa durusan wa dirasatan",* yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, dan mempelajari. Dari pengertian ini, maka aktivitas pendidikan merupakan upaya pencerdasan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

[31] Istilah *tazkiyah* berasal dari kata *zaka'* yang berarti tumbuh dan berkembang, atau dari kata zakah yang berarti kesucian, kebersihan. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam pendidikan terkandung proses penumbuhan atau pengembangan diri peserta didik atau satuan sosial sehingga ia menjadi suci dan bersih sesuai dengan fitrahnya.

[32] Istilah *tilâwah* berarti mengikuti, membaca atau meninggalkan.dalam konteks ini pendidikan merupakan upaya meninggalkan atau mewariskan nilai-nilai Ilahi dan insani agar diikuti dan dilestarikan oleh peserta didik atau generasi berikutnya. Selengkapnya terkait dengan istilah-istilah di atas, baca Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 11-13)

[33] Marno, *Islam by Management and Leadership; Tinjauan Teoritis dan Empiris Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2007), hal 92-93.

konstribusi pemikirannya, di antaranya Zakiyah Darajat yang mendefinisikan, pendidikan Islam sebagai usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim.[34] Menurut Sayid Sabiq, pendidikan Islam adalah suatu aktivitas yang mempunyai tujuan mempersiapkan anak didik dari segi jasmani, akal, dan ruhaninya sehingga nantinya mereka menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun umatnya (masyarakatnya).[35]

Omar Muhammad al-Toumy as-Syaibany, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkah-laku yang terjadi pada diri individu maupun masyarakat.[36] Dan Muhammad 'Atiyah Al-Abrashy menerangkan, pendidikan Islam bukanlah sekadar pemenuhan otak saja, tetapi lebih mengarah kepada penanaman akhlak, *fadhilah* (keutamaan), kesopanan, keikhlasan serta kejujuran bagi peserta didik.[37] Sejalan dengan itu Yusuf al-Qardhawi mengatakan, pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam perang dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.[38]

Pendidikan Islam menurut H. Maksum adalah segala proses pendidikan Islam yang bersumber dari al-Quran, Sunnah Nabi,

---

[34] Zakiah Daradjat, *Ilmu.*, hal. 27.

[35] Sayyid Sabiq, *Islamuna,* (Beirut: Darul Kitab, ttp.), hal. 237.

[36] Omar Muhammad al-Toumy as-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 134.

[37] Muhammad 'Atiyah al-Abrashy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 15.

[38] Yusuf al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Bana*, (Jakarta: Bulan Bintan, 1980), hal. 39.

perkataan dan perbuatan sahabat, serta ijtihad para ulama. Dengan tujuan untuk membentuk kepriadian muslim yang tangguh dan mampu mengatasi masalah-masalah dikehidupannya dengan cara Islam, sehingga tercapai tujuan akhir yaitu bahagia dunia dan akhirat dengan Ridho Allah.[39] Hassan Langgulung sebagaimana yang dikutip Azyumardi Azra, mendifinisikan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia sebagai *khalifah fil ardl* untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akherat.[40]

Senada dengan pendapat di atas, Chabib Thoha dalam *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam,* menjelaskan "Pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dasar dan tujuan, serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktik pandidikan berdasarkan nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits".[41] Dalam definisi lain dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya menyeimbangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.[42]

Dan masih banyak lagi pengertian pendidikan Islam menurut para ahli pendidikan Islam, namun dari sekian banyak pengertian pandidikan Islam tersebut pada dasarnya pendidikan Islam adalah usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu, dan sosial untuk mengembangkan *fitrah* manusia ber-

---

[39] Maryam, Siti (*ed*)., *Sejarag Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: Lesfi, 2004), hal. 4.

[40] Azyumardi Azra, *Esai.,* hal. 5.

[41] Chabib Thoha, (*ed*.)., *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), hal. 99.

[42] Muhammad Fadhl al-Jamali, *Filsafat Pendidikan Islam dalam al-Qur'an*, Terj. Ahmad Zaenal Abidin (Jakarta: Pepara,1981), hal. 3.

dasarkan hukum-hukum Islam, menuju terbentuknya manusia ideal (*insan kamil)* yang berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada Islam, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat.

C. Perkembangan Pendidikan Islam

Dalam lintasan sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang, dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Aktifitas ini telah dan akan terus berjalan semenjak manusia pertama ada di dunia sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Bahkan kalau ditarik mundur lebih jauh, proses pendidikan ini ternyata telah berlangsung sejak Allah Swt., baru selesai menciptakan Adam, a.s.

Dikisahkan dalam al-Qur'an, setelah Allah Swt., menciptakan Adam yang akan dijadikan sebagai wakil-Nya di muka bumi (*khalifah fil ardl*), maka Allah Swt., mengumpulkan tiga golongan mahluk yang telah diciptakan-Nya untuk diadakan Proses Belajar Mengajar (PBM). Tiga golongan mahluk dimaksud adalah Jin, Malaikat, dan Manusia. Setelah PBM selesai selanjutnya Allah Swt., mengadakan evaluasi dengan cara bertanya dan menyuruh mereka menjelaskan seluruh materi pelajaran yang telah diberikan, dan ternyata Adam-lah (dari golongan manusia) yang berhasil menjadi juara dalam ujian tersebut. Kejadian tersebut diabadikan al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah [2] : 30-33, yang artinya sebagai berikut:

> "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seo-

rang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Ketika Allah mengajarkan Adam tentang nama-nama benda,[43] tujuannya bukan hanya agar Adam, a.s., tahu dan mengerti, tetapi juga agar ia sadar akan esensi ciptaan, sadar akan sifat-sifat Allah dan hubungan antara Allah dan ciptaan-Nya. Integrasi kesadaran intelektual dengan kesadaran spiritual inilah yang menjadi dasar

[43] Baca Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 31, yang artinya "*dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"*

konsepsi pendidikan Islam sejak awal. Konsepsi pendidikan Islam yang dibangun atas dasar metafisika, di mana hubungan antara Tuhan sebagai Pencipta dan manusia sebagai subjek di muka bumi berada dalam suatu rangkaian orientasi religius dan kerangka etis inilah yang menurut al-Ghazali menjadi ciri khas konsep pendidikan Islam.

Sejak manusia berinteraksi dengan aktifitas pendidikan semenjak itu pula manusia telah berhasil merealisasikan berbagai perkembangan dan kemajuan dalam segala lini kehidupan mereka. Bahkan pendidikan adalah suatu yang alami dalam perkembangan peradaban manusia.[44]

Dalam konteks historis, pendidikan benar-benar mempunyai peran yang sangat signifkan dalam penyiaran Islam. Pendidikan Islam merupakan mediator agar ajaran dan nilai-nilai Islam dapat dipahami, dihayati dan diamalkan oleh umat di setiap aspek kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam merupakan pilar utama dalam upaya mengajak umat untuk menjalankan perintah Allah Swt., dan menjauhi larangan-Nya. Dalam persepektif sejarah, Rasulullah Saw., menyebarluaskan ajaran Islam juga dengan memanfaatkan pendidikan, beliau bertindak sebagai gurunya. Hal ini dapat dipahami dari kandungan firman Allah dalam Surah Ali Imran [3] ayat 164, yang artinya:

> *"Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata".* (Q.S. Ali Imran [3]: 164).

[44] Abdurrahman Ibnu Al Khaldun, *Muqaddimah*, Cet. I (Beirut: Daar Al Fikr,1998), hal. 412.

Dengan memanfaatkan media pendidikan inilah dalam waktu yang relatif singkat masyarakat Islam pada masa Rasulullah Saw., mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama yang bersifat ukhrawi saja tetapi juga teraplikasi pada aspek kehidupan duniawi.[45]

Kejayaan Islam di masa Dinasti Abbasiyah, juga tidak terlepas dari peran pendidikan. Pada masa Dinasti Abbasiyyah pendidikan Islam menemukan bentuknya yang sangat maju. Banyak Ilmuan besar yang lahir pada zaman ini, banyak pusat-pusat pendidikan dan perpustakaan dibangun salah satunya adalah Madrasah Nizamiyyah yang dibangun dengan sistem pendidikan perguruan tinggi yang diakui oleh banyak kalangan sebagai inspirator model pendidikan perguruan tinggi di barat modern. Nouruzzaman Shiddiqi mengatakan, pada masa pemerintahan bani Abbas telah memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. la tidak hanya menyangkut persoalan ritual keagamaan, tetapi hampir seluruh sektor kehidupan.[46] Pendidikan Islam ketika itu tidak mengenal pemisahan antara wahyu dan akal bahkan keduanya saling menyempurnakan.

Terkait dengan perkembangan pendidikan Islam ini,[47] setidaknya dapat dibagi menjadi lima periodesasi atau tahapan, yakni;

[45] Pada awal kemunculannya pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mentransformasikan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits dan yang termanifestasikan dalam istilah *syari'ah* (hukum Islam). Semua materi yang disampaikan dalam proses pendidikan juga sangat terkait dengan usaha untuk menemukan dan memahami syari'ah tersebut.

[46] Lihat Nouruzzaman Shiddiqi. *TamuuMum Muslim: Bunga Rampai kebudayaan,* (Jakarta: Bulan Bintang,1986) hal.19.

[47] Pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, tidak dapat terlepas dari sejarah Islam. Menurut Harun Nasution, sejarah Islam terbagi ke dalam tiga periode, periode Klasik, Pertengahan dan Modern. Kemudian perinciannya dapat dibagi lima periode, yaitu: Periode Nabi Muhammad SAW (571-632 M), periode Khulafa ar Rasyidin (632-661 M), periode kekuasaan Daulah Umayyah (661-750 M), periode kekuasaan Abbasiyah (750-1250 M) dan periode jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad pada 1250 M sampai sekarang. Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 11. Lihat pula dalam Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 7.

Periode pembinaan pendidikan Islam; Periode pertumbuhan pendidikan; Periode kejayaan pendidikan Islam; Periode kemuduran pendidikan Islam; dan Periode pembaharuan pendidikan Islam.[48]

1. Periode pembinaan pendidikan Islam

Pendidikan yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw, (610-632 M) inilah yang disebut sebagai periode pembinaan pendidikan Islam. Periode ini berlangsung selama lebih kurang 23 tahun, yaitu sejak beliau menerima wahyu pertama sampai wafat baginda. Secara umum periode pembinaan pendidikan Islam ini terbagi menjadi dua periode, yakni periode Makkah dan periode Madinah.

a. Pada periode Mekah

Pada periode Mekah, Nabi Saw., menggunakan Darul Arqam (rumah kediaman sahabat, al-Arqam bin Abi Al-Arqam r.a.) sebagai tempat pertemuan sekaligus sebagai kegiatan belajar mengajar para sahabat. Inti materi yang diajarkan, berkisar pada masalah keimanan, ibadah dan akhlak, baca-tulis dan berhitung untuk tingkat dasar. Al-Quran dan dasar-dasar agama untuk tingkat lanjut. Ketika itu guru disebut *mu'allim* atau *mu'addib*, serta tidak dibayar, dan bagi tingkat dasar gurunya non muslim.[49]

Praktek belajar-mengajar yang dilakukan Nabi Saw., di Mekkah, menurut Muhammad Raf'at Sa'id, betul-betul sudah terorganisir dengan rapi, sesuai dengan target yang hendak dicapai terhadap peserta didik. Jadi bukan hanya sekadar pemahaman,

[48] Zuhairini menegaskan, Pembagian periodesasi dalam pendidikan Islam tersebut, hanyalah sebagai usaha untuk memudahkan urutan pembahasan saja, karena pada hakikatnya suatu peristiwa sejarah selalu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa lainnya, baik yang sebelum, yang semasa maupun yang sesudahnya. Baca, Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hal. 7-8.

[49] Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 5-22, dan lihat pula, Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*, cet. ke-1. (Bandung: Mizan, 1994), hal. 27.

hafalan, dan pelaksanaan, tetapi lebih dari itu untuk melahirkan kader-kader pendidik.[50] Sedang terkait dengan pola pendidikan yang diterapkan Rasulullah Saw., selama di Mekah secara terperinci sebagai berikut:

1. Rasulullah menyampaikan ilmu kepada ahli keluarga terdekat terlebih dahulu, seperti isterinya Khadijah, sepupunya Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang yang terdekat baginda;
2. Kaidah yang digunakan dalam penyampaian ilmu secara lemah lembut dan penuh cinta kasih, sehingga orang ramai tertarik untuk belajar:
3. Kegiatan pendidikan dilakukan di rumah sahabat al-Arqam, inilah tempat pendidikan Islam yang pertama:
4. Pendidikan lebih tertumpu kepada perkara akidah dan akhlak;[51]
5. Rasul Saw., mengajar manusia supaya mengamalkan sifat sederhana, tolong menolong, dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Swt;
6. Pendidikan dilaksanakan dengan cara membudayakan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran al-Qur'an.

b. Periode Madinah

Dalam periode Madinah tempat belajar sudah ditambah dengan masjid, materi yang diajarkan juga ditambah dengan pendidikan kesehatan dan kemasyarakatan.[52] Secara garis besar sistem pendidikan yang diterapkan Rasul Saw, ketika di Madinah dapat

---

[50] Muhammad Ra'fat Said, *Rasulullah SAW. Profil Seorang Pendidik: Methodologi Pendidikan dan Pengajarannya*, esidi Indonesia (Jakarta: Firdaus, 1994), hal. 93.

[51] Akidah ialah kepercayaan yang menghubungkan seseorang dengan penciptanya. Rasulullah, Saw., menyampaikan segala perintah Allah Swt., kepada manusia dan menyeru mereka menyembah Allah Swt., semata-mata tanpa melakukan penyekutuan terhadapNya

[52] Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*, cet. ke-1. (Bandung: Mizan, 1994), hal. 27.

diuraikan sebagai berikut:

1. Setelah terbina Masjid Quba' dan Masjid Nabawi, sistem pendidikan Islam mengalami perubahan. Masjid telah menjadi sekolah yang pertama dalam sistem pendidikan lslam;[53]
2. Konsep pendidikan lebih tertumpu kepada perkara ibadat dan syariah tanpa melupakan soal-soal yang lain;
3. Dalam pendidikan ibadah, terdapat perkara yang diwajibkan seperti shalat Jum'at. Selain itu, terdapat juga perkara yang disunatkan seperti shalat hari raya;
4. Pendidikan berpuasa telah bermula pada tahun ke dua Hijrah dan ibadat Haji diajarkan pada tahun keenam Hijrah. Selain itu, pendidikan zakat dan hukum perkawinan turut juga diperkenalkan.
5. Pendidikan membaca dan menulis telah berkembang. Rasul Saw., memerintahkan para sahabat yang pandai menulis dan membaca supaya mencatat dan menulis ayat-ayat al-Quran yang diwahyukan. Mereka juga diminta supaya mengajar umat Islam yang tidak bisa menulis dan membaca.

Pada zaman Rasulullah, sistem pendidikan, kurikulum (materi) maupun tujuan pendidikan menjadi kewenangan beliau. Belum ada seorang pun yang mampu memberikan masukan bahkan menentukan materi-materi pendidikan Islam. Pada massa itu, materi pendidikan masih berkisar pada norma-norma ajaran al-Qur'an dan petunjuk al-Hadits mengenai bidang keagamaan, akhlak, kesehatan jasmani, dan pengetahuan kemasyarakatan.

---

[53] Pada masa klasik Islam, Masjid mempunyai fungsi yang jauh lebih besar dan bervariasi dibandingkan fungsinya yang sekarang. Disamping sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial dan politik umat Islam. Lebih dari itu, masjid adalah lembaga pendidikan semenjak masa paling awal Islam. Masjid pula yang menjadi pilar utama pembangunan peradaban pada suatu negeri. Inilah yang dicontohkan Rasulullah ketika pertama kali beliau menginjakan kakinya di Madinah.

Tradisi belajar yang telah ada pada masa Nabi Saw., tersebut terus berkembang pada masa-masa sesudahnya, dan sebagaimana tercacat dalam sejarah bahwa puncak kemajuannya tercapai pada masa khalifah Harun al-Rasyid dan al-Makmun yang berpusat di Bagdad, dan pada masa kejayaan 'Usmaniyah di Spanyol dan Cordova yang berlangsung sekitar delapan abad [711-1492 M],[54] kemudian sistem pendidikan Islam itu diperluas dengan sistem madrasah yang mencapai puncaknya pada Madrasah Nidzamiyah yang didirikan di Bagdad oleh Nizam al-Mulk.[55]

2. Periode pertumbuhan pendidikan Islam

Pendidikan Islam pada masa Nabi Saw., merupakan *prototipe* yang terus menerus dikembangkan umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Setelah itu dilanjutkan periode *Khulafar al-Rasyidin* dan Dinasti Umayyah yang merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Periode pertumbuhan pendidikan Islam ini berlangsung sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw., sampai dengan akhir kekuasaan Bani Umaiyah, yang diwarnai oleh penyebaran Islam ke dalam lingkungan budaya bangsa di luar bangsa Arab dan perkembangannya ilmu-ilmu *naqli*.[56]

Pada masa *Khulafa al-Rasyidin* pendidikan telah mengalami perluasan, dengan pusat-pusat pendidikan antara lain: Makkah, Madinah, Basrah, Kuffah, Damsyik (Syam). Sistem pendidikan Islam pada masa *khulafa al-Rasyidin* dilakukan secara mandiri, tidak dikelola oleh pemerintah, kecuali pada masa Khalifah Umar bin al Khattab,r.a yang turut campur dalam menambahkan materi kurikulum pada lembaga kuttab.

[54] Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, (Pustaka al-Husna, Jakarta, 1986), hal.13

[55] Muhammad Munir Mursi, 1994, dalam Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam,* Cet. 2, Bandung: Remaja Rosdakarya.

[56] Baca, Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hal. 7-8.

a. Periode Khulafa al-Rasyidin

Pada masa Abu Bakar as-Shidiq (632-634 M) pendidikan tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah, dengan guru-guru dari para sahabat terdekat Rasulullah dan tidak digaji.[57] Dari segi materi pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Pada masa Abu Bakar as-Shidiq, masjid dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani, tempat pertemuan, dan lembaga pendidikan Islam, sebagai tempat shalat berjama'ah, membaca al-Qur'an dan lain sebagainya.

Masa Umar bin Khattab (634-644 M) pendidikan bertempat di masjid dan kuttab. Materi yang diajarkan masih berkisar pada baca tulis al-Quran, dasar-dasar agama Islam, tafsir, fikih, sastra, astronomi, dan kedokteran. Pada waktu itu, sudah ada pendidikan tinggi di masjid.[58] Pada masa Umar inilah permulaan dijadikannya hari jumat sebagai hari libur mingguan untuk persiapan shalat jumat.[59] Khalifah Umar bin Khattab juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukan, mereka bertugas mengajarkan isi al-Qur'an dan ajaran Islam lainnya. Adapun metode yang mereka pakai adalah guru duduk di halaman masjid sedangkan murid melingkarinya. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Kattab r.a ini lebih maju bila dibandingkan dengan masa khalifah Abu Bakar ra, sebab selama Umar memerintah Negara berada dalam keadaan stabil dan aman.

Pada masa Usman bin Affan (644-656 M), pendidikan diserahkan kepada masyarakat, negara sibuk menyusun mushaf, guru

---

[57] Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 45

[58] Samsul Nizar, *Sejarah,* hal. 47.

[59] Abdurrahman An-Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyat al-Islamiyat wa asalibuha*, Cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1983), hal. 207.

tidak digaji dan masih bertempat di masjid dan kuttab.[60] Pada masa khalifah Usman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, hanya sedikit terjadi perubahan. Adapun pola pendidikan pada masa Usman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam dan dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak, sebab pada masa ini para sahabat memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.[61] Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa ini diserahkan pada umat itu sendiri, artinya pemerintah tidak mengangkat guru-guru, dengan demikian para pendidik sendiri melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharapkan keridhaan Allah.

Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (656-661 M), pendidikan kurang mendapatkan perhatian karena sering terjadi konflik,[62] sehingga pemerintahan tidak stabil, hal inilah yang menyebabkan kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu Ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan sebab keseluruhan perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Islam.

b. Periode Kekuasaan Bani Umayyah

Dengan berakhirnya masa *Khulafaur al-Rasyidin* maka mulailah kekuasaan Bani Umayyah (661-750 M).[63] Pada masa ini

[60] Samsul Nizar, *Sejarah,* hal. 149.

[61] Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa khalifah Umar, maka pada masa Usman diberikan kelonggaran untuk keluar di daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah.

[62] Samsul Nizar, *Sejarah,* hal. 149.

[63] Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Muawwiyah Ibn Abi Sofyan adalah pendiri Dinasti Umayyah yang berasal dari suku Quraisy

pendidikan Islam telah mengalami banyak berkembangan bila dibandingkan pada masa *Khulafa al-Rasyidin* yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid,[64] dan berkembangnya Khuttab[65] serta Majelis Sastra.[66]

Peserta didik dalam Khutab adalah anak-anak, dan tidak dibatasi baik miskin ataupun kaya. Para guru tidak membedakan murid-murid mereka, bahkan ada sebagian anak miskin yang belajar di Khuttab memperoleh pakaian dan makanan secara cuma-cuma. Anak-anak perempuan pun memperoleh hak yang sama dengan anak-anak laki-laki dalam belajar.[67] Namun tidak tertutup kemungkinan bagi orang yang mampu mendidik anak-anak mereka di tempat khusus yang mereka inginkan dengan guru-guru yang khusus pula seperti: Hajjad ibn Yusuf yang pernah menjadi guru bagi putra Sulaiman Nasuh seorang Menteri dari khalifah Abdul Malik ibn Marwan.[68]

Setelah pelajaran anak-anak di khutab selesai mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah yang dilakukan di masjid. Peranan Masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran sen-

keturunan Bani Umayyah yang merupakan khalifah pertama dari tahun 661-750 M, nama lengkapnya ialah Muawwiyah bin Abi Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Manaf. Baca, Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad-21*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980), hal. 17

[64] Pada Dinsti Umayyah, Mesjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah khuttab. Pelajaran yang diajarkan meliputi Al Quran, Tafsir, Hadist dan Fiqh. Juga diajarkan kesusasteraan, sajak, gramatika bahasa, ilmu hitung dan ilmu perbintangan. Lihat Athiyyah Al Abrasi, , *Tarbiyah Al Islamiyah*, hal. 56)

[65] Khuttab atau Maktab berasaal dari kata dasar *kataba* yang berarti menulis atau tempat menulis, jadi Khuttab adalah tempat belajar menulis. Khuttab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al Quran serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Baca, Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1981), hal. 39.

[66] Majelis sastra merupakan tempat berdiskusi membahas masalah kesusasteraan dan juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Perhatian penguasa Ummayyah sangat besar pada pencatatan kaidah-kaidah nahwu, pemakaian Bahasa Arab dan mengumpulkan Syair-syair Arab dalam bidang syariah, kitabah dan berkembangnya semi prosa, Ahmad Salabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hal. 72

[67] Athiyya Al Abrasi, *Tarbiyah Al Islamiyah*, Terjemahan Bustami A. Ghani, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993). Hal. 56

[68] Asma Hasan Fahmi, *Mabadi'at Tarbiyyah Al Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Mukhtar Yahya dan Sanusi Latif, (Jakarta: Bulan Bintang, tth), hal. 47.

antiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya tetap dan mampu untuk memberikan atau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Sedangkan majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah yang dihiasi dengan hiasan yang indah, dan hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Dalam kaitan ini, Al Athiyyah Al Abrasy menerangkan;

> "Balai-balai pertemuan tersebut mempunyai tradisi khusus yang mesti diindahkan seseorang yang masuk ketika khalifah hadir, mestilah berpakaian necis bersih dan rapi, duduk di tempat yang sepantasnya, tidak tertawa terbahak-bahak, tidak meludah, tidak mengingus dan tidak menjawab kecuali bila ditanya. Ia tidak boleh bersuara keras dan harus bertutur kata dengan sopan dan memberi kesempatan pada sipembicara menjelaskan pembicaraannya serta menghindari penggunaan kata kasar dan tawa terbahak-bahak. Dalam balai-balai pertemuan seperti ini disediakan pokok-pokok persoalan untuk dibicarakan, didiskusikan dan diperdebatkan".[69]

Jika pendidikan Islam pada masa *Khulafa al-Rasyiddin* hanya dilaksanakan di kuttab, masjid dan rumah, maka pada masa dinasti Umayyah pendidikan juga dilaksanakan di istana untuk mendidik anak-anak keluarga kerajaan. Pada masa ini pula mulai ada perhatian pembidangan ilmu, seperti tafsir, hadist, fikih dan ilmu kalam. Dibidang ilmu kalam mulai tampak salah satu gerakan teologi Islam yang dipelopori oleh Washil ibn 'Atho' yaitu mu'tazilah sebagai respon terhadap aliran khawarij dan murji'ah.

Di antara jasa besar Dinasti Umayyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah menjadikan Masjid sebagai pusat ak-

[69] Al-Abrasyi, *Athiyyah, al-Tarbiyyah al-Islamiyah*, Terj. Bustami A. Gani, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 6.

tifitas ilmiah termasuk sya'ir, sejarah bangsa terdahulu, diskusi dan akidah.[70] Usaha yang tidak kalah penting Dinasti Umayyah adalah dimulainya penterjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, tetapi penerjemahan itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis, seperti ilmu kimia, kedokteran, ilmu tatalaksana dan seni bangunan. Menurut Franz Rosenthal, orang yang pertama kali melakukan penerjemahan adalah Khalid ibn Yazid cucu dari Muawwiyah.[71] Pada umumnya gerakan penerjemahan ini terbatas pada orang-orang tertentu dan atas usaha sendiri, bukan atas dorongan negara dan tidak dilembagakan.

3. Periode kejayaan pendidikan Islam

Periode kejayaan pendidikan Islam berlangsung sejak permulaan Daulah bani Abbasiyah sampai dengan jatuhnya kota Bagdad. Dinasti ini didirikan oleh keturunan al-Abbas paman Nabi Saw, yaitu Abdullah al-Saffan Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn al-Abbas. Pada dinasti Abbasiyah Islam mencapai puncak kejayaannya, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, kekuasaan dan pendidikan.

Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode di mana pendidikan Islam berkembang sangat pesat yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan madrasah (sekolah-sekolah) formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam.[72] Lembaga-lembaga pendi-

[70] Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad 21*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), hal. 19.

[71] Suwedi, *Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 16. Lihat pula, Ahmad Salabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972) hal. 19.

[72] Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, terutama pada pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid (170-193 H) yang berpusat di Bagdad, karena selain beliau adalah ahli ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan serta didukung negara dalam kondisi aman, tenang dan dalam masa pembangunan sehingga dunia Islam pada saat itu diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Baca, Zuhairini, dkk., *Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, (*Jakarata*:* IAIN,1986), hal. 95.

dikan sangat dominan pengaruhnya dalam membentuk pola kehidupan dan pola budaya umat Islam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui lembaga pendidikan itu menghasilkan pembentukan dan pengembangan berbagai macam aspek budaya umat Islam. Pada masa kejayaan ini, pendidikan Islam merupakan jawaban terhadap tantangan perkembangan dan kemajuan kebudayaan Islam.[73]

Pada massa Abbasiyah juga berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan dan melahirkan tokoh-tokoh intelektual muslim dalam berbagai bidang. Dalam bidang filsafat muncul nama-nama seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, al-Ghazali, dan Ibnu Rusyid. Dalam bidang kedokteran lahir, Jabir ibnu Hayan, Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, Ar-Razi. Di bidang Matematika, muncul Umar al-Farukhan, al-Khawarizmi. Dan dalam bidang astronomi terdapat al-Fazari, al-Battani, Abul Watak, al-Farghoni dan sebagainya.

4. Periode kemunduran pendidikan Islam

Sebagaimana tercacat dalam sejarah pendidikan islam mencapai puncaknya kemajuan pada masa Bani Abbasiyah terutama pada pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid dan al-Makmun yang berpusat di Bagdad, dan pada masa kejayaan 'Usmaniyah di Spanyol dan Cordova yang berlangsung sekitar delapan abad [711-1492 M]. Pada masa jayanya kota Baghdad dikenal secara luas sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan dan telah berhasil mengungguli kota-kota lain yang dikenal sebagai pusat peradaban manusia. Namun hal itu berubah drastis sejak penyerangan yang dilakukan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Abbasiyah.

---

[73] Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999), hal.77

Ketika itu kota Bagdad sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dibumihanguskan. Sekitar 800.000 penduduk kota Bagdad dibunuh, perpustakaan dihancurkan dan ribuan rumah penduduk dibakar. Dalam peristiwa tersebut umat Islam kehilangan lembaga-lembaga pendidikan dan buku-buku ilmu pengetahuan yang sangat berharga. Musnahnya ribuan buku, baik buku-buku keagamaan maupun buku-buku tentang sains dan filsafat mempengaruhi perkembangan intelektualisme Islam, apalagi yang menyangkut kelestarian ilmu-ilmu pengetahuan dan filsafat dalam Islam.

Dengan dibumihanguskannya kota Baghdad berikut kekayaan intelektual yang ada didalamnya, maka berakhirlah kebesaran pemerintahan Islam masa lalu, baik dalam wilayah kekuasaan maupun intelektual. Penghancuran pusat kebudayaan Islam itu juga berakibat hilang dan putusnya akar sejarah intelektual yang telah dengan susah payah dibangun pada masa awal-awal Islam. Tidak hanya itu, kekalahan politik itu juga berpengaruh besar pada cara pandang dan berpikirnya umat Islam yang semula berpaham dinamis berubah menjadi berpaham fatalis.[74]

Jika pendidikan Islam di masa kemajuannya telah berhasil memberikan sumbangan dalam melahirkan sumber daya manusia unggul melalui lembaga-lembaga pendidikan-nya yang belum pernah dikenal di masa itu, maka pada masa kemunduran semua itu telah terhenti atau minimal beralih fungsi. Pendidikan kuttab, masjid, dan madrasah merubah fungsinya, yang dulunya dikenal sebagai lembaga penelitian dan riset yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, telah beralih fungsi menjadi suatu lembaga yang terbatas kajiannya pada bidang-bidang keislaman dan pada ting-

[74] Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religion Though in Islam* (New Delhi: Kitab Bhaven, 1974), hal. 8., lihat pula dalam Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia. (*Jakarta: Kencana, 2007), hal.173.

kat pembinaan lebih banyak ditekankan pada kemahiran penghafalan siswa-siswanya daripada melatih mereka berpikir.[75]

Lembaga-lembaga pendidikan Islam juga mengalami dis-orientasi, demikian halnya dengan literature Islam. Literatur Islam sejak masa kemunduran ini sudah tidak lagi menonjolkan sisi orisinalitasnya, atau melahirkan sesuatu yang "baru", tetapi lebih banyak menggambarkan pengulangan-pengulangan dari apa yang pernah ditulis pendahulunya.[76] Secara umum masa kemunduran pendidikan Islam ini dapat di identifikasi sebagai berikut:

a. Kurangnya perhatian para pemimpin (*khalifah*) terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan ulama. Sehingga perkembangan intelektual agak tersendat-sendat para pemimpin terlalu sibuk memikirkan pemerintahan;[77]
b. Terbakarnya perpustakaan serta lembaga pendidikan yang ada, menyebabkan banyaknya khazanah intelektual Islam yang hilang dan hangus terbakar;[78]
c. Suasana gelap dan mencekam yang dialami dunia Islam benar-benar memprihatinkan. Pada saat yang bersamaan, bangsa Eropa justru sedang mencapai kejayaan sebagai pengaruh dari berkembangnya paham *renaissance,* dan sibuk melakukan misi penjajahan ke negara-negara Islam. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang frustasi dan akhirnya berusaha menjauhi kehidupan duniawi, termasuk meninggalkan kehidupan intelektual. Mereka lebih memilih menutup diri dan menjalani kehidupan sebagai seorang sufi. Akhirnya

---

[75] Penjelasan lebih rinci tentang system dan metode pengajaran di tiga lembaga tadi (*Kuttab*, Masjid dan Madrasah). Lihat misalnya Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam* (Bandung: Mizan, 1994 M.), hal. 24-36.

[76] Fazlurrahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hal. 38.

[77] Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000), hal.110

[78] Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam-Periode Klasik & Pertengahan,* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 156.

perkembangan ilmu pendidikan menjadi mandeg.

d. Kehidupan sufi berkembang pesat. Madrasah-madrasah yang ada berkembang menjadi *zawiyat-zawiyat* untuk mengadakan *riyadhah* di bawah bimbingan dan otoritas seorang *Syaikh* yang akhirnya berkembang menjadi lembaga tarekat. Dan di madrasah-madrasah yang masih tersisa itu, hampir seluruh kurikulum diisi dengan karya-karya sufistik;[79]

e. Berkembangnya praktek bid'ah dan khurafat, hal itu ditandai dengan banyaknya umat Islam yang mengkultuskan posisi seorang *Syaikh* dalam suatu tarekat, sampai-sampai ada yang berdoa minta di kuburan seorang *syaikh;*

f. Dalam bidang fikih, yang terjadi adalah berkembangnya *taklid* buta di kalangan umat. Dengan sikap hidup yang statis itu, tidak ada lagi penemuan-penemuan baru dalam bidang fikih. Apa yang sudah ada dalam kitab-kitab lama dianggap sebagai sesuatu yang baku, mantap, benar, dan harus diikuti serta dilaksanakan sebagaimana adanya.[80]

Kemunduran pendidikan Islam mencapai puncaknya dengan "penutupan pintu ijtihad" yang pada masa puncak kegemilangan Islam telah mampu melahirkan dan mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatif yang digunakan untuk merespon keadaan zamannya. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah perkembangan intelektual umat Islam. Akibatnya para cendekiawan sesudahnya hanya membahas dan mensyarah kitab-kitab pendahulu mereka dengan memberikan komentar-komentar detial yang kadangkala mengaburkan inti permasalahan yang dibahas, dan akhirnya justru mendangkalkan pemikiran mereka yang hanya ber-taqlid pada pendahulu mereka.

---

[79] Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia, (*Jakarta: Kencana, 2007), hal.179.

[80] Zuhairini, dkk, *Sejarah.,* hal.111.

Penutupan pintu ijtihad yang terjadi pada abad ke-4 H./10 M, dan abad ke-5 H./11 M., telah membawa kemacetan dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Intelektual. Ilmu-ilmu Intelektual, seperti Ilmu Teologi dan Pemikiran Keagamaan mengalami kemunduran, dan menjadi miskin. Kejadian itu karena pengucilan mereka yang sengaja dari intelektualisme sekuler dan karena kemunduran yang terakhir ini, khususnya filsafat, dan pengucilannya dari bentuk-bentuk pemikiran keagamaan seperti yang dibawa oleh sufisme.[81] Keadaan seperti itu berlanjut sampai berakhirnya masa Kerajaan Turki Usmani. Tercatat bahwa penguasa Turki Usmani lebih cenderung untuk menegakkan suatu paham keagamaan saja dan menekan (*pressure*) kepada madzhab lain. Akibat dari itu semua adalah terjadinya kelesuan intelektual di bidang ilmu keagamaan dan mulai berkembang dan merajalelanya sikap fanatik yang berlebihan kepada satu madzhab atau syaikh, karena itu *ijtihad* hampir-hampir tidak dapat berkembang.[82]

5. Periode pembaharuan pendidikan Islam

Periode pembaharuan pendidikan Islam berlangsung sejak pendudukan Mesir oleh Napoleon, pada akhir abad ke-18 M. sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan masuknya unsur-unsur budaya dan pendidikan modern dari dunia Barat ke dunia Islam,[83] dan munculnya kesadaran kaum muslimin akan kelemahan dan ketertinggalan dari Bangsa Eropa.[84] Dalam membuka mata kaum muslimin akan kelemahan dan keterbelakangan-

---

[81] Fazlurahman, *Islam*, hal.38

[82] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, (Jakarta:* PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 137.

[83] Lihat, Zuhairini, dkk., *Sejarah,* hal. 7-8.

[84] Kesadaran ini sebenarnya telah timbul mulai abad ke 11 sampai ke 17 Masehi. Dengan kekalahan-kekalahan yang diderita oleh Turki Utsmani dalam peperangan dengan Negara-Negara Eropa. Mereka mulai memperhatikan kemajuan yang dialami Eropa dengan mengirimkan utusan-utusan untuk mempelajari kemajuan Eropa terutama dari Prancis, dan didirikannya sekolah-sekolah Militer di Turki pada tahun 1734, Lihat Edi Yusrianto, *Lintasan Sejarah Pendidikan Islam*. (Pekanbaru: Intania Grafika), hal: 52.

nya, timbulah berbagai macam usaha pembaharuan dalam segala bidang kehidupan untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan, termasuk usaha-usaha dibidang pendidikan.[85]

Kebangkitan kembali umat Islam khususnya bidang pendidikan Islam adalah dalam rangka untuk pemurnian kembali ajaran-ajaran Islam dengan pelopor-pelopor di berbagai daerah masing-masing.[86] Di antara tokoh-tokoh Muslim yang melakukan upaya pembaharuan khususnya dalam bidang pendidikan, di antaranya Muhammad Ali Pasya, Muhammad Abdah Sultan Mahmud II di Turki. Muhammad Abduh, Jamaludin al-Afgani, Rasyid Ridha, dan lain-lain.

a. Muhammad Ali Pasya

Muhammad Ali Pasya lahir di Kawallah, Yunani, pada tahun 1765, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Pada usia dewasa ia berkerja sebagai pemungut pajak, kemudian ia diangkat sebagai menantu oleh salah seorang Gubernur Utsmani. Selanjutnya ia masuk dinas militer dan kariernya terus naik. Ketika pengiriman pasukan ke Mesir, ia diangkat sebagai wakil perwira yang mengepalai pasukan.[87]

Beliau mempunyai kesadaran yang tinggi akan arti penting pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi kemajuan sebuah bangsa. Ia sadar bahwa usaha untuk mengadakan pembaharuan tradisi pendidikan di Mesir, sebagaimana yang terjadi di lembaga pendidikan *Kuttab* dan *al-Azhar* tidaklah mudah. Karena kuatnya tradisi dalam mempertahankan keberadaan lembaga pendidikan

---

[85] Zuhairini dkk. *Sejarah.,* hal.117.

[86] Pada umumnya kebangkitan pendidikan Islam ini mengacu kepada tema yang sama, yakni: Mengembalikan ajaran Islam kepada unsur-unsur aslinya, dengan bersumberkan kepada al-Qur'an, Hadist dan membuang segala bid'ah, khurafat, tahayul, dan mistik, dan Menyatakan dan membuka kembali pintu ijtihad setelah beberapa abad dinyatakan ditutup. Lihat, Edi Yusrianto, *Lintasan.,* hal. 51.

[87] Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 34-35.

tersebut. Langkah pertama yang dilakukannya adalah mengadakan pembaharuan pendidikan dengan sistem sekolah modern. Tujuan utama pendirian sekolah ini adalah untuk mengisi kekosongan tenaga administrasi pemerintah dan tenaga ahli dalam bidang tertentu. Sekolah pertama yang dibangun adalah sekolah tinggi dan sekolah spesialisasi. Untuk mengisi sekolah ini, maka dibukalah sekolah menengah dan persiapan *(madaris tajhiziyah)* dan selanjutnya sekolah dasar. Pada tahun 1833, untuk pertama kali sekolah dasar di bangun di Kairo, Alexandria, dan diberbagai tempat lain, sebagai persiapan untuk sekolah menengah.[88] Usaha-usaha beliau kemudian dilanjutkan para pembaharu Mesir seperti: Rifat al-Tahtawi, Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh.

b. Jamaluddin Al-Afghani

Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Mesir tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Beliau adalah seorang pemimpin pembaharuan dalam Islam yang aktifitasnya berpindah-pindah dari satu negara Islam ke nagara Islam yang lain. Pemikiran pembaharuan yang dilakukan al-Afghani, didasari pada pendapatnya bahwa Islam adalah relevan pada setiap zaman, kondisi, dan bangsa. Untuk itu kemunduran umat Islam adalah karena tidak diterapkannya Islam dalam segala segi kehidupan, dan meninggalkan ajaran Islam murni. Jalan untuk memperbaiki kemunduran Islam menurutnya hanyalah dengan membuang segala bentuk pengertian yang bukan berasal dari Islam, dan kembali pada jaran Islam murni.[89]

[88] Kedutaan Besar RI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Islam di Mesir Pada sekolah Dasar dan Perguruan Tinggi ,* Buku III, (Kairo: KBRI,1984), hal. 6.

[89] Jamaluddin Al-Afghani mengatakan bahwa, "kemunduran umat Islam bukanlah karena Islam, sebagaimana dianggap oleh kebanyakan orang karena tidak sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi baru. Umat Islam mundur, karena telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran yang datang dari luar lagi asing bagi Islam. Ajaran Islam sebenarnya hanya tinggal dalam ucapan dan diatas kertas. Baca, Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang,1982), hal.55.

c. Muhamad Abduh

Muhammad Abduh adalah tokoh pembaharuan paruh kedua abad XIX. Beliau lahir dan besar dilingkungan pedesaan dalam keluarga bukan pendidik yang memegang teguh ajaran agama. Ia belajar kepada Syaikh Ahmad di Thantha pada tahun 1862. Dan pada tahun 1866 ia meneruskan pendidikannya di al-Azhar. Di sini ia berjumpa dengan Jamaluddin al-Afghani dan menjadi muridnya pada tahun 1871. Pada tahun 1877 ia berhasil menyelesaikan studi di al-Azhar dengan mendapatkan gelar *'alim* dan mengajar di sana. Tidak lama kemudian ia bersama-sama dengan gurunya diusir dari Mesir karena kasus politik.

Pada tahun 1880 ia kembali lagi ke Mesir dan diangkat menjadi redaktur *Waqa'iul Mishriyyah,* surat kabar resmi pemerintah Mesir. Kariernya terus menanjak, hingga akhirnya diangkat menjadi anggota *Majlis al-'Ala al-Azhar* pada tahun 1894. Pada saat inilah ia banyak melakukan perombakan dan perbaikan secara mendasar terhadap al-Azhar menjadi Universitas.[90] Muhammad Abduh adalah orang pertama yang memasukkan mata pelajaran mengenai ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Ide-ide besarnya tertransformasikan melalui karya-karya dan murid-muridnya yang tersebar ke berbagai pelosok dunia. Abduh banyak mencetak generasi pemikir muslim handal. Konon, terbelahnya pemikiran fundamental dan liberal dalam Islam muncul dari guru yang sama, yakni Muhammad Abduh. Murid-muridnya terbagi menjadi dua kelompok, kelompok kiri-liberal (seperti: Qasim Amin, Ali Abd al-Raziq) dan kanan-fundamental (seperti: Muhammad Rasyid Ridha, Syakib Arslan).

---

[90] Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuan.,*hal. 60-61. Lihat pula, Harun Nasution, *Islam.,*hal. 99.

d. Rasyid Ridha

Rasyid Ridha adalah murid Muhammad Abduh. Ia lahir pada 1865 Suria. Semasa kecil ia dimasukkan ke sekolah madrasah tradisional, kemudian ia meneruskan sekolah ke Sekolah Nasional Islam. Setelah selesai ia meneruskan ke sekolah agama yang ada di Tripoli, dan banyak belajar dari *Al-urawatul wusqa* Jamaluddin dan Muhammad Abduh.

Ia mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuan ketika masih berada di Suria dan mendapat tantangan dari Pihak Turki Utsmani, lalu ia memutuskan pindah ke Mesir dan berada di dekat gurunya Muhammad Abduh pada tahun 1898. Beberapa bulan setelah itu, ia menerbitkan majalah *Al-Manar*, yang juga terkenal.[91] Rasyid Ridha merasa perlu diadakan pembaharuan dibidang pendidikan, dan melihat perlu ditambahkannya kedalam kurikulum mata pelajaran, seperti teologi, pendidikan moral, sosiologi, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, ilmu hitung, kesehatan, bahasa asing disamping ilmu fiqih, tafsir, hadist dan lain-lain.[92]

e. Sayyid Akhmad Khan

Ahmad Khan lahir tanggal 6 Dzulhijjah 1232 Hijriyah atau 17 Oktober 1817 Masehidi di kota Delhi. Ia biasa dipanggil dengan Sir Sayyid. Sebutan Sir ia dapatkan dari bangsa Inggris atas jasa-jasanya terhadap Inggris. Sedangkan sebutan Sayyid karena ia masih keturunan langsung Nabi Muhammad Saw. Ia merupakan keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Ia berpendapat bahwa peninggkatan kedudukan umat Islam di India dapat diwujudkan dengan bekerjasama dengan Inggris. Kemudian mendirikan lembaga pendidikan sekolah Inggris *mudarabbah* 1864. Ia juga mendirikan *scientific society*, dan lembaga

[91] Harun Nasution, *Pembaharuan.,*hal. 69-70.
[92] *Ibid.*, hal. 71.

pendidikan yang didalamnya mengkaji ilmu pengetahuan umum.

f. Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal merupakan sosok reformis Islam, politisi, penyair, ahli hukum serta sosok yang ahli dalam filsafat pendidikan. Ia dilahirkan di Sialkot, Punjab, India (sekarang termasuk wilayah Pakistan) pada 9 November 1877 M, bertepatan tanggal 3 Dzul Qa'idah.[93] Sama dengan pembaru lainnya, ia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam selama 500 tahun dikarenakan kebekuan dalam pemikiran. Hukum dalam Islam telah sampai pada keadaan statis. Untuk memperbaharui Islam di segala bidang (termasuk pendidikan), maka diperlukan sebuah institusi penegak Hukum Islam yang menanaungi seluruh umat Islam dalam sebuah naungan negara yang dinamakan Khilafah Islamiyah.[94]

Iqbal memberi kritik terhadap umat Islam untuk segera memperbaharui sikap menjadi progresif. Kritik tersebut selain ditujukan dalam bidang filsafat, hukum, sufisme, juga masalah budaya yang di dalamnya terkait masalah pendidikan. Sebab "pendidikan itu dipandang sebagai suatu keseluruhan daya budaya yang mempengaruhi kehidupan perorangan maupun kelompok masyarakat".[95] Menurutnya pendidikan itu bersifat dinamis dan kreatif, diarahkan untuk memupuk dan memberikan kesempatan gerak kepada semangat kreatif yang bersemayam dalam diri manusia serta mempersenjatainya dengan kemampuan untuk menguasai bidang seni, dan ilmu pengetahuan yang baru, kecerdasan dan kekuatan.[96]

---

[93] Hal ini diperkuat dari hasil penelitian terakhir yang mengungkapkan bahwa Muhammad Iqbal lahir pada 9 November 1877, bukan 22 Februari 1873 seperti yang kita kenal selama ini. Baca, Ahmad Syafi'i Ma'arif, dalam Pendahuluan; *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, (Yogyakarta: Jalasautra, 2008), hal. xi

[94] Harun Nasution, *Pembaharuan.*, hal.194.

[95] K. G.Saiyidain, *Percikan Filsafat Iqbal Mengenai Pendidikan*, Terj. M. I. Soelaeman, (Bandung: CV. Diponegoro, 1986), hal. 21.

[96] *Ibid.,* hal. 170.

Di Indonesia juga terdapat tokoh-tokoh pembaharuan pendidikan Islam yang telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan pendidikan Islam, diantranya kita mengenal Syekh Muhammad Jamil Jambek,[97] Haji Karim Amrullah (Hamka),[98] Haji Abdullah Ahmad,[99] Ahmad Dahlan,[100] Haji Hasan,[101] K.H Hasy-

---

[97] Syekh Muhammad Jamil Jambek adalah ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatra Barat. Nama Syekh Muhammad Jamil Jambek lebih dikenal dengan sebutan Syekh Muhammad Jambek, dilahirkan dari keluarga bangsawan di Bukittinggi pada tahun 1860. Ayahnya bernama Saleh Datuk Maleka, seorang kepala nagari Kurai, sedangkan ibunya berasal dari Sunda. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu falak terkemuka. Selengkapnya baca Mahmud Yunus, dalam *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1960), hal. 141-143

[98] Syekh Haji Abdul Karim Amarullah lahir pada tanggal 10 Pebruari 1879 di Maninjau, lingkungan keluarganya termasuk terkenal di Sumatera Barat dan taat menjalankan ajaran agama. Ayahnya seorang guru agama Islam di Maninjau. Setelah tamat mengaji al-Quran ia melanjutkan dengan pelajaran Ilmu Nahwu dan Ilmu Syaraf dengan ayahnya kemudian melanjutkan pelajarannya kepada Tuanku Sultan Muhamad Yusuf di Sungai Rokan Pariaman untuk mempelajari Ilmu Fikih dan Ilmu Jalalain. Selengkapnya **lihat** Mahmud Yunus, dalam *Sejarah… hal. 131-135*

[99] Syekh Abdullah Ahmad lahir pada tahun 1878 di Padang Panjang, ia berasal dari keluarga terkemuka di Padang Panjang dan taat menjalankan agama. Ayahnya bernama H. Ahmad adalah seorang guru pada Pengajian al-Quran di Padang Panjang, saudara tua ayahnya, Syekh Abdul Halim, seorang ulama Islam yang terkenal waktu itu di Padang Panjang dan Padang. Selengkapnya **lihat** HAMKA, dalam *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia,* (Jakarta: Tinta Mas,1961), hal. 8-12.

[100] Ahmad Dahlan lahir di Kauman (Yogyakarta) pada tahun 1968 dan meninggal pada tanggal 25 Februari 1921. Ia berasal dari keluarga yang didaktis dan terkenal alim dalam ilmu agama. Ayahnya bernama K.H. Abu Bakar, seorang imam dan khatib masjid besar Kraton Yogyakarta. Sementara ibunya bernama Siti Aminah, putri K.H. Ibrahim yang pernah menjabat sebagai penghulu di Kraton Yogyakarta. Sebelum mendirikan Organisasi Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan aktif di berbagai perkumpulan, seperti *Al-Jami'at Al-Khairiyyah* (organisasi masyarakat Arab di Indonesia), Budi Utomo dan Sarekat Islam. Ia termasuk salah seorang ulama yang mula-mula mengajar agama Islam di Sekolah Negeri, seperti Sekolah Guru (Kweekschool) di Jetis Yogyakarta dan OSVIA di Magelang.

[101] Hassan bin Ahmad, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Hassan Bandung ketika sudah tinggal di kota Bandung. Saat masih menetap di Bangil, biasa dipanggil dengan Ahmad Hassan Bangil. Beliau lahir di Singapura pada tahun 1887. Beliau lahir hasil pernikahan Ahmad dan Muznah. Beliau adalah ulama yang dikenal sangat berpendirian teguh dan ahli dalam berbagai ilmu keagamaan. Pembaru terkemuka dari kalangan Persatuan Islam (Persis) ini, juga terkenal sebagai politikus ulung. Melalui gerakan Persis, Ahmad Hassan menyebarkan ide-ide pembaruannya. Ia menyadari betul bahwa pemikirannya harus dituangkan dalam sebuah gerakan agar bisa berkembang secara efektif. Bahkan, ia berhasil membawa organisasi ini menjadi sebuah gerakan islah. Tokoh kharismatik ini meninggal dunia pada usia 71 tahun di Bangil (Jawa Timur), 10 November 1958.

im Asy'ari,[102] Ki Hajar Dewantara.[103] Inilah beberapa pembaharu pendidikan Islam Indonesia, tentunya selain mereka masih banyak tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap kebangkitan dan pemabaharuan pendidikan Islam di Indonesia.

D. Landasan Pendidikan Islam

Islam memandang dan memposisikan sendi-sendi keilmuan atau ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sesuatu yang sangat utama. Ia merangkul iptek sedemikian rupa sehingga menganggap suci dan disamakan derajatnya dengan jihad bagi orang-orang yang berilmu dan yang mencari ilmu, dalam konteks ini Allah Swt., berfirman:

> *"Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."* (Q.S. Al-Mujadalah [58]: 11).

Bahkan dalam konsepsi Islam mencari ilmu (belajar) adalah keharusan bagi setiap orang Islam tanpa terkecuali. Hal ini tidak lepas dari tujuan Allah Swt., menciptakan manusia yaitu pendi-

[102] Kyai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Pondok Nggedang, Jombang, Jawa Timur, 10 April 1875. Ayahnya bernama Kiai Asyari, pemimpin Pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya VI, yang juga dikenal dengan Lembu Peteng, ayah Jaka Tingkir yang menjadi Raja Pajang (keturunan kedelapan dari Jaka Tingkir). Kyai haji Hasyim Asy'ari adalah Pendiri dan pengasuh pesantren Tebuireng dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (31 Januari 1926), salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai tokoh pendidikan pembaharu pesantren. Selain mengajarkan agama dalam pesantren, ia juga mengajar para santri membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato.

[103] Ki Hajar Dewantara adalah cucu Sri Paku Alam III. Tokoh peletak dasar pendidikan nasional ini terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Akan tetapi, setelah menjalani hukuman pengasingan di negeri Belanda ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan nama lama dan gelar kebangsawanannya. Ia dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau memiliki konsep pendidikan yang benar-benar bersifat pribumi (yakni yang nonpemerintah dan non-Islam). Konsep pendidikan seperti itu berarti pendidikan yang memadukan pendidikan gaya Eropa yang modern dengan seni-seni Jawa tradisional. Ia dengan tegas menolak pendidikan yang terlalu mengutamakan intelektualisme dan mengorbankan aspek kerohanian atau jiwa para siswa. Lihat M.C. Ricklefs *A History of Modern Indonesia since 1200* (Terj. Tim Serambi). (Jakarta: Serambi), hal. 367.

dikan penyerahan diri secara ikhlas kepada sang Khalik yang mengarah pada tercapainya kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Seperti firman-Nya:

> *"dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku*". (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 56).

Atas dasar itu, maka pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan dalam Islam, haruslah sejalan dengan pandangan hidup muslim yakni, al-Qur'an yang merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan as-Sunnah sebagai penjabaran al-Qur'an. Dalam hal ini, Ahmad D. Marimba mengatakan, bahwa yang menjadi landasan atau dasar pendidikan diibaratkan sebagai sebuah bangunan sehingga isi al-Qur'an dan al-Hadits menjadi pondamen, karena menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap berdirinya pendidikan.[104] Sejalan dengan yang dikemukakan Ahmad D. Marimba, Abdurrahman An Nahlawi menegaskan, keberadaan sumber dan landasan pendidikan Islam haruslah sama dengan sumber Islam, yaitu al-Qur'an, As Sunah,[105] dan juga pendapat para sahabat dan ulama (*Ijtihâd*).

1. Al-Qur'an

Secara etimologis al-Qur'an berarti bacaan, dan secara terminologis al-Qur'an adalah firman-firman Allah Swt., yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw., dengan perantara Malaikat Jibril a.s. Dalam konsepsi Islam al-Qur'an merupakan sumber ajaran (hukum) yang pertama dan yang paling utama. Kedudukan al-Qur'an sebagai sumber ajaran dalam Islam di antaranya dapat dilihat dari kandungan firman Allah dalam surat Ali

[104] Ahmad D. Marimba, *Pengantar.,* hal.19

[105] Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat,* (Jakarta: Gema Insani Press,1995), hal.28

Imran ayat ke-138, yang artinya:

> "*(Al Qur'an) Ini adalah penerang bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa"*. (Q.S. Ali Imran [3]: 138).

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Swt, kepada Nabi Muhammad Saw., untuk seluruh umat manusia. Al-Qur'an merupakan firman Allah yang selanjutnya di jadikan pedoman hidup (*way of life*) kaum muslim. Di dalamnya memuat panduan-panduan hidup terlengkap yang dijelaskan secara ilmiah. Lahirnya ilmu pengetahuan dalam Islam diyakini tidak terlepas dari kandungan yang ada dalam al-Qur'an ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar ilmu pengetahuan ilmiah dalam Islam bersumber dari struktur keilmuan dalam al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk (*hudâ*) yang bila dipalajari akan membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman berbagai problem hidup, apabila dihayati dan diamalkan menjadi pikiran rasa dan karsa mengarah pada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat.[106] Sebagai kitab petunjuk yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia termasuk aspek pendidikan, maka tidak sulit untuk menemukan prinsip dasar pendidikan dalam ajarannya, karena sejatinya al-Qur'an merupakan asas dari teori pendidikan. Semua ayat yang ada di dalamnya merupakan ayat-ayat pendidikan, tidak hanya terbatas pada ayat-ayat yang diasumsikan sebagai ayat pendidikan saja. Dengan demikian maka jelaslah bahwa al-Qur'an merupakan pondasi atau dasar pendidikan Islam karena didalamnya memuat sejumlah penjelasan yang mempunyai nilai penting bagi mengembangkan pendidikan Islam.

[106]M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 13.

Dalam konteks ini, Deliar Noer mengatakan bahwa al-Qur'an dan al-Hadits bukan saja sebagai sumber pemikiran agama, melainkan juga pemikiran tentang masalah pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya.[107] Al-Qur'an merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), spiritual (kerohanian), material (kejasmanian) dan alam semesta. Ia merupakan pedoman normatif-teoritis bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang memerlukan penafsiran lebih lanjut bagi operasional pendidikan Islam.[108] Zakiah Daradjat menegaskan, bahwa di dalam al-Qur'an terdapat ajaran yang berisikan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan.[109]

Di antara prinsip yang berkenaan dengan kegiatan pendidikan dalam al-Qur'an dapat dilihat bagaimana Luqman al-Hakim dalam memberikan pendidikan yang mendasar kepada putranya, memberikan contohnya, juga menunjukkan perbuatannya lewat pengamalan dan sikap mental yang dilakukannya sehari-hari dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.[110] Dan di antara wasiat pendidikan monumental yang dicontohkan Luqman al-Hakim lewat materi "*bil lisan*" dan dilakukannya lewat "*bil amal*" terlebih dahulu adalah:

a. jangan sekali-kali menyekutukan Allah,
b. berbuat baiklah kepada kedua orang tua,
c. jangan mengikuti seruan syirik, ingatlah bahwa manusia itu pasti mati,
d. hendaklah kita tetap merasa diawasi oleh Allah,

[107] Delier Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, dalam A. Tafsir, dkk, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), hal. 53.
[108] Samsul Nizar, *Pengantar ...*, hal. 95.
[109] Zakiah Daradjat, *et.al., Ilmu Pendidikan*, hal. 20.
[110] *Ibid*.

e. hendaklah selalu mendirikan shalat,

f. kerjakan selalu yang baik dan tinggalkan perbuatan keji,

g. jangan suka menyombongkan diri,

h. sederhanalah dalam berpergian, dan

i. rendahkanlah suaramu.

Hal ini jelas tersirat dalam firman Allah Swt., surat al-Luqman ayat ke 13-19, yang artinya;

> *"dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*
>
> *dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*
>
> *dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*
>
> *(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.*

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai". (Q.S. Luqman [31]:13-19).

Al-Qur'an sebagai kerangka dasar pemikiran Islam telah memberikan inspirasi kependidikan yang perlu dikembangkan baik secara filosofis maupun konseptual keilmuan. Ia adalah sumber nilai kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya yang telah memperkenalkan dan mengajarkan manusia untuk selalu berpikir, sehingga ia harus dijadikan sebagai pondasi ideal pendidikan Islam.[111] Atas dasar itu maka pendidikan yang baik menurut Islam adalah pendidikan yang sesuai dan sejalan dengan nilai yang terkandung pada al-Qur'an, sebab sistem pendidikan yang disusun berdasarkan nilai-nilai al-Qur'an merupakan suatu sistem transformasi nilai-nilai al-Qur'an itu sendiri, dan dengan berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, maka akan dapat dirumuskan pendidikan yang sesuai dengan jiwa al-Qur'an. Jadi, pendidikan tidak sekadar proses transfer pengetahuan dari satu orang ke orang lain saja tapi juga sebagai proses transformasi nilai Qur'ani dan pembentukan karakter Islami dalam segala aspek.

---

[111] Tedi Priatna, "Pondasi dan Fungsi Pendidikan Islam", dalam *Cakarawala Pendidikan Islam.* (Jakarta: Mimbar Pustaka, 2004), hal. 289.

2. As-Sunah

Setelah al-Qur'an, pendidikan Islam juga menjadikan as-Sunnah sebagai dasar dan sumber kurikulumnya. Secara harfiah sunnah berarti jalan, metode dan program. Dan secara istilah sunnah adalah perkara yang dijelaskan melalui *sanad* yang shahih baik itu berupa perkataan, perbuatan atau sifat Nabi Muhammad Saw.[112] Umat Islam menyepakati bahwa sunnah merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Bahkan, sunnah (hadits) bisa berdiri sebagai sumber ajaran. Hal ini didasarkan kepada perintah normatif untuk mentaati Nabi di dalam al-Qur'an. Untuk itulah sifat otoritatif pribadi Nabi Saw., tidak terlepas dari keyakinan bahwa pribadi Nabi merupakan representasi dari wahyu Allah Swt. Nabi juga menyebutkan bahwa al-Qur'an dan sunnah adalah warisan-nya yang paling agung, dan bagi manusia yang bersedia memegang teguh keduanya tidak mungkin tersesat selamanya. Baginda Saw., bersabda:

> "*Telah kutinggalkan dua perkara bagi kamu yang kamu tidak mungkin tersesat selamanya apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya. Dua perkara itu adalah al-Kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah..."(*Hr. Imam Malik*).*[113]

As-Sunnah yang merupakan perwujudan perkataan dan ketetapan Rasulullah Saw., merupakan kerangka acuan bagi pengembangan kehidupan umat Islam, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam pandangan Muhaimin, konsep dasar pendidikan Islam yang dicetuskan Nabi Saw., secara garis besarnya memiliki corak sebagai berikut:

---

[112]Abdurrahman An Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam,* (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 31.
[113]Imam Malik dalam al-Muwaththa' No. 1594.

a. Disampaikan sebagai *rahmatal lil alamin* yang ruang lingkupnya tidak hanya sebatas manusia, tetapi juga pada mahluk biotik dan abiotik lainya (Q.S.21:107)

b. Disampaikan secara universal, mencakup kehidupan apapun yang berguna untuk kegembiraan dan peringatan bagia umat manusia (Q.S.34:28).

c. Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak (Q.S.2:119), dan keontikan kebenaran itu terjadi (Q.S.15:9).

d. Kehadiran Nabi sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan terus bertanggung jawab terhadap aktivitas pendidikan (Q.S.42:48, 33:45, 38:8).

e. Perilaku Nabi Saw., tercermin sebagai uswatun khasanah yakni sebagai seorang figur yang semua tindak tanduknya menjadi teladan (Q.S.33:22) karena perilakunya terkontrol dari Allah (Q.S.53:3-4) sehingga hampir tidak pernah melakukan kesalahan.

f. Masalah teknis praktis dalam masalah pendidikan Islam diserahkan penuh kepada umatnya diatantarnya dalah mengutus Mushab bin Umar dan Umi Maktum untuk mengajar beberapa orang pengikutnya.[114]

Bagi dunia pendidikan, sunnah memiliki dua faedah yang sangat besar, *Pertama*, menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an atau menerangkan hal-hal yang tidak terdapat didalamnya; *Kedua*, menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasul Saw., bersama anak-anaknya, dan penanaman keimanan ke dalam jiwa yang dilakukannya.[115]

[114] Muhaimen, *et.al, Pemikiran Pendidikan Islam*: *Kajian Teoritis dan Kerangka Dasar Oprasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya,1993), hal.147

[115] Lihat Abdurrahman An Nahlawwi, *Prinsip-Prinsip.,* hal. 47.

3. Ijtihâd

Selain al-Qur'an dan as-Sunah, *ijtihâd* juga dapat dijadikan sebagai landasan pendidikan Islam. Kata *ijtihâd* berasal dari kata *jahada*, kata ini beserta derivasinya berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan.[116] Menurut Abu Hamid Hakim, *ijtihâd* adalah upaya yang sungguh-sungguh dalam memperoleh hukum syara' berupa konsep yang oprasional melalui metode *istinbath* dari al-Qur'an dan as-Sunah.[117] Menurut syara' *ijtihad* berarti berpikir dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin untuk mengetahui syara' dengan jalan *dzanni*.[118] *Ijtihâd* bagi umat Islam adalah sebuah kebutuhan dasar, tidak saja ketika Nabi sudah tiada, bahkan ketika Nabi masih hidup.

Pendidikan adalah masalah duniawi yang dalam ajaran Islam diberikan dasar pokok-pokoknya saja, berupa petunjuk-petunjuk dalam wahyu yang masih perlu dijabarkan secara detail. Sehingga arahan detailnya diserahkan kepada akal sehat dalam melakukan pemikiran-pemikiran secara mendalam. Dengan perkataan lain, persoalan pendidikan sebenarnya merupakan persoalan *ijtihadiyah*, karenanya umat Islam diperintahkan untuk mencermati, mengkritisi dan mengkonstruks formula baru sehingga menjadi lebih baik.

Dalam bidang pendidikan, *ijtihad* dilakukan sejalan dengan perkembangan zaman serta tuntutan manusia. Penggunaan dalil-dalil *ijtihâd* dalam lapangan pendidikan ini pada dasarnya merupakan pantulan dan cerminan fleksibilitas hukum Islam dalam semua bidang. Karena dengan menggunakan dalil-dalil *ijtihâd*

---

[116] Muhammad Musa Towana, *al-Ijtihad: Madha Hajatina Ilaihi fi Hadha al-'Asr.* (Dar al-Kutub al-Hadithah, 1972), hal. 97.

[117] Muhaimin, *et.al, Pemikiran.,* hal.150.

[118] Abdurrahman Mas'ud, *Antologi Studi Agama dan Pendidikan* (Semarang: Aneka Ilmu, 2004), hal. 148.

inilah persoalan-persoalan pelik yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, dan masa depan akan memiliki tempat yang sesungguhnya dan damai.[119] Selain itu, penggunaan *ijtihâd* juga akan menjadikan pendidikan Islam tetap eksis dan sesuai dengan perkembangan zaman (*adaptif*).

E. Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam

Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan. Kedewasaan dalam bentuk akal, mental, maupun moral dalam rangka menjalankan fungsi kemanusiaan sebagai seorang hamba dihadapan Sang khalik (*abdullah*) dan sebagai duta Allah pada alam semesta (*khalifah fil ardh).* Sebagai sebuah usaha dan cara kerja maka pendidikan Islam haruslah memiliki tiga karakter, *Pertama,* penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah Swt; *Kedua,* pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian; dan *Ketiga,* merupakan sebuah pengamalan ilmu atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.[120] Dan pendidikan Islam juga mengemban misi Islam dalam tiga dimensi, yakni:

1. Dimensi kehidupan duniawi, dimensi ini mendorong manusia sebagai hamba Allah Swt, untuk mengembangkan dirinya dalam ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan, yaitu nilai-nilai Islam;
2. Dimensi kehidupan ukhrawi, mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya dalam pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan Tuhanya. Dimensi inillah yang mela-

[119] Baharudin dan Muh. Makin, *Pendidikan Humanistik: Teori, Konsep dan Aplikasi Praktsis dalam Dunia Pendidikan,* (Yokyakarta: ar Ruzz Media, 2009), hal.160.

[120] Azra, Ayzumardi, *Pendidikan Islam (Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium baru), (*Ciputat: Logos, 2000), hal. 10

hirkan berbagai usaha agar kegaitan *ubudiyah* manusia senantiasa berada dalam nilai-nilai Islami; dan,

3. Demensi hubungan antar kehidupan duniawi dan ukhrawi, dimensi ini akan mendorong manusia untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang utuh dan paripurna dalam ilmu pengetahuan dan ketrampilan dan menjadi pendukung serta pelaksana nilai-nilai Islam.[121]

Pendidikan Islam juga harus selalu mengemban misi yang memihak kepada nilai-nilai kemanusiaan, sebab corak yang diinginkan pendidikan Islam ialah pendidikan yang mampu membentuk manusia unggul secara intelektual, kaya dalam amal serta anggun dalam moral dan kebijakan.[122] Ketiga keunggulan tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri secara bertingkat; *Pertama*, Keunggulan intelektual, keunggulan ini berfungsi untuk mempertajam pemikiran sehingga mampu menghasilkan ide-ide segar orisinal, mempercepat tumbuhnya kreativitas, dan mengejar kemajuan; *Kedua*, Keunggulan amal, keunggulan amal berfungsi untuk mentransfer pengetahuan yang bermanfaat kepada orang lain agar kemanfaatan itu bisa berkembang terus menerus, menumbuhkan kesadaran untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi umat, dan berusaha keras untuk mengangkat derajat dan martabat mereka; *Ketiga*, Keunggulan moral, yang berfungsi sebagai penjagaan dari tindakan-tindakan yang merugikan, tindakan yang merusak dan tindakan yang menyesatkan.[123]

Ketiga keunggulan di atas haruslah bertumpu pada keimanan kepada Allah Swt., sehingga terselamatkan dari segala pengaruh yang menyesatkan, serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip

---

[121] Tedi Priatna, *Pondasi .... Op.cit.,* hal.281

[122] Muslih Usa (*ed.*), *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta,* (Yokyakarta: Tiara Wacana,1991), hal. 155.

[123] Mujamil Qomar, *Epistimologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 246.

yang menjadi dasar dan landasan bagi pelaksanaan pendidikan Islam. Prinsip prinsip dimaksud adalah: [124]

1. Prinsip tauhid

Prinsip ini merupakan prinsip paling utama dalam pendidikan Islam. Dalam konsepsi pendidikan Islam tauhid dikonstruksikan sebagai paradigma kebebasan manusia baik secara lahiriah maupun ruhaniah, kecuali hanya kepada Allah Swt., hal ini mengisyaratkan sebuah ajaran bahwasanya praktik pendidikan Islam tidak mengenal diskriminasi terhadap siapapun.[125] Pendidikan dalam pandangan tauhid adalah pendidikan yang berdasarkan nilai-nilia Ilahiah (*teologis*) sebagai landasan etis dan normatif; dan nilai-nilai insaniyah serta alamiah (*kosmologi*, *antropo-sosiologis*) sebagai nilai-nilai oprasional.[126]

2. Prinsip integrasi

Prinsip integrasi yakni suatu prinsip yang seharusnya dianut adalah bahwa dunia ini merupakan jembatan menuju kampung akhirat. Karena itu, mempersiapkan diri secara utuh merupakan hal yang tidak dapat dielakkan agar masa kehidupan di dunia ini benar benar bermanfaat untuk bekal yang akan dibawa ke akhirat. Perilaku yang terdidik dan nikmat Tuhan apapun yang didapat dalam kehidupan harus diabdikan untuk mencapai kelayakan-kelayakan itu terutama dengan mematuhi keinginan Tuhan. Firman Allah Swt :

> *"dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah*

[124] Penjelasan selengkapnya terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, baca dalam Abd. Halim Soebahar, *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002). hal.71-82. Baca pula, Munzir Hitami, *Menggagas Kembali Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Infinite Press, 2004), hal. 25-30.

[125] M. Rusli Karim, "Pendidikan Islam sebagai upaya Pembebasan" dalam, *Pendidikan Islam antara Cita dan Fakta* (Yokyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 31.

[126] Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan.,* hal.69.

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Q.S. al-Qashash [28]:77).

Ayat ini menunjukkan prinsip integritas di mana diri dan segala yang ada padanya dikembangkan pada satu arah, yakni kebajikan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan.

3. Prinsip keseimbangan

Prinsip ini merupakan kesemestian hingga dalam pengembangan dan pembinaan manusia tidak ada kepincangan dan kesenjangan.[127] Prinsip keseimbangan dalam pendidikan Islam ini meliputi; Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat; Keseimbangan antara kebutuhan jasmanai dan rohani; Keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial; Keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan amal.

4. Prinsip persamaan

Prinsip ini berakar dari konsep dasar tentang manusia yang mempunyai kesatuan asal yang tidak membedakan derajat, baik antara jenis kelamin, kedudukan sosial, bangsa, suku, ras, atau warna kulit. Sehingga budak sekalipun mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Nabi Muhammad Saw., bersabda: "*Siapapun di antara seorang laki laki yang mempunyai seorang budak perempuan, lalu diajar dan dididiknya dengan ilmu dan pendidikan yang baik kemudian dimerdekakannya lalu dikawininya, maka (laki laki) itu mendapat dua pahala"* (HR. Bukhari).

---

[127] Munzir Hitami, *Mengkonsep Kembali Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 24-26.

Prinsip persamaan juga mengandung arti bahwa pendidikan Islam tidak mengenal perbedaan dan tidak membeda-bedakan latar belakang orang itu jika dia mau menuntut ilmu. Semua punya potensi yang sama untuk di didik dan punya kesempatan yang sama untuk memproses dirinya dalam pendidikan.

5. Prinsip pendidikan seumur hidup

Prinsip ini bersumber dari pandangan mengenai kebutuhan dasar manusia dalam kaitan keterbatasan manusia di mana manusia dalam sepanjang hidupnya dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan dirinya sendiri ke jurang kehinaan. Dalam hal ini dituntut kedewasaan manusia berupa kemampuan untuk mengakui dan menyesali kesalahan dan kejahatan yang dilakukan, disamping selalu memperbaiki kualitas dirinya. Firman Allah Swt.,:

> *"Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*. (Q.S. Al Maidah [5]: 39).

Prinsip seumur hidup juga menunjukan bahwa pendidikan Islam tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal umur. Seumur hidup manusia harusnya digunakan sebagai proses pendidikan, proses untuk menjadi hamba yang baik. Pendidikan seumur hidup ini tergambar secara implisit dalam Surat al-'Alaq, yaitu tidak adanya batasan yang konkret tentang kapan seorang harus mulai belajar dan sampai kapan. Tuhan hanya menjelaskan bahwa manusia harus membaca dan belajar. Dengan demikian, manusia perlu belajar sejak dilahirkan sampai ajalnya tiba terdidik (mulai dari lahir sampai ke liang lahat).

6. Prinsip keutamaan

Prinsip ini merupakan inti dari segala pendidikan, prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah sekadar proses mekanik, melainkan proses yang mempunyai ruh di mana segala kegiatannya diwarnai dan ditujukan kepada keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan tersebut terdiri dari nilai nilai moral. Nilai moral yang paling tinggi adalah tauhid. Sedangkan nilai moral yang paling buruk dan rendah adalah syirik. Dengan prinsip keutamaan ini, pendidik bukan hanya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi subjek didik, tetapi lebih dari itu turut membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pendidik tersebut. Nabi Saw., bersabda: *"Hargailah anak anakmu dan baikkanlah budi pekerti mereka"* (HR. Nasa'i).

F. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan merupakan masalah sentral dalam pendidikan, tanpa tujuan, maka semua usaha pendidikan yang dilakukan akan berakhir dengan kegagalan atau mungkin tersesat dan salah langkah. Oleh karena itu perumusan tujuan pendidikan yang tegas dan jelas merupakan inti dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofis.[128] Sebelum merumuskan tujuan pendidikan Islam maka perlu dipahami terlebih dahulu hakikat pendidikan Islam, sebab pemahaman terhadap hakikat pendidikan Islam akan memberikan dasar filosofis untuk merumuskan tujuannya.

Dalam konsepsi Islam, pendidikan merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan. Kede-

[128]Tujuan dalam bahasa arab dinyatakan *ghayat*, atau *andaf* atau *maqasid*. Sedang dalam bahasa Inggris kata tujuan dinyatakan dengan *goal* atau *purpose* atau *objective* atau *aim*. Secara umum istilah-istilah itu mengandung pengertian, yaitu perbuatan yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu, atau arah, maksud yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas. Lihat, Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hal. 117–118.

wasaan dalam bentuk akal, mental, maupun moral dalam rangka menjalankan fungsi kemanusiaan sebagai seorang hamba dan duta Allah di alam semesta. Pendidikan Islam bukan hanya sekadar *transfer of knowledge* ataupun *transfer of training,* tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan kesalehan; suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Konsepsi pendidikan Islam juga tidak hanya melihat pendidikan sebagai upaya mencerdaskan semata (pendidikan intelek), melainkan sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakekat eksistensinya.

Berangkat dari uraian di atas, maka pendidikan Islam haruslah berorentasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek, berikut:[129]

1. Tujuan dan tugas hidup manusia.

   Manusia hidup bukan karena kebetulan,[130] melainkan Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. Tujuan dicipatakan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah Swt. Indikasi tugasnya berupa ibadah (sebagai *'abda Allah*) dan tugas sebagai wakil-Nya di muka bumi (*khalifah Allah*).[131] Sebagaimana firman Allah Swt, yang artinya; *"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam".* (Q.S. al-An'am [6]: 162)

2. Memerhatikan sifat-sifat dasar (*nature*) manusia.

   Yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai berbagai potensi bawaan, seperti fitrah, bakat,

---

[129] H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bina aksara,1987), hal. 120

[130] Baca, Q.S. Ali Imran [3]: 191, yang artinya: *"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka".*

[131] Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Putra Grafika, 2008), hal.71-72,

minat, sifat, dan karakter yang berkecenderungan pada *al-hanief* (rindu akan kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam (Q.S. al-Kahfi [18]:29) sebatas kemampuan, kapasitas, dan ukuran yang ada.[132]

3. Tuntutan masyarakat

   Tuntutan ini berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat, maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dunia modern.

4. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam

   Di mana kehidupan ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat, serta mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang lebih membahagiakan, sehingga menusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang dimiliki. Namun demikian, kemelaratan dan kemiskinan dunia harus diberantas, sebab kemelaratan dunia bisa menjerumuskan manusia pada kekufuran.

Adapun arah dari pendidikan Islam adalah menuju terbentuknya peserta didik yang mempunyai kognitif intelektual dan cerdas,[133] dengan kecerdasannya manusia akan dapat melakukan sesuatu yang baik menurut Islam untuk kemaslahatan hidup bersama.[134] Dalam kaitan ini al-Attas mengatakan, tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup, jika

[132] Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka al-Khusna, 1989), hal. 34.

[133] Cerdas di sini bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, moral dan spiritual.

[134] Hidup bersama dalam artian mengetahui dan menghargai adanya perbedaan serta saling menghargainya sebagai milik seluruh umat manusia dan bukan sebagai dasar untuk memecah belah kehidupan.

pandangan hidup itu Islam maka tujuanya adalah membentuk manusia yang sempurna *(insan kamil*) menurut Islam.[135] Sejalan dengan pernyataan al-Attas, al-Ghozali mengatakan, tujuan pendidikan harus sesuai dengan pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sesuai dengan filsafatnya, yakni memberi petunjuk akhlak dan pembersihan jiwa dengan maksud dibalik itu membentuk individu-individu yang tertandai dengan sifat-sifat utama dan takwa.[136]

Dengan demikian, maka konsep dasar dan tujuan pendidikan dalam Islam harus dilandaskan kepada pola pikir, atau sudut pandang yang Islami, yaitu sudut pandang yang berprinsip pada al-Quran dengan pola menurut yang dicontohkan Rasul Allah. Sebab tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan hamba Allah yang selalu bertakwa kepadaNya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Swt., dalam al-Qur'an surat al-Ali Imran ayat ke-2, yang artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.* (Q.S. Ali Imran [3]: 102).

Tujuan Pendidikan Islam adalah suatu kondisi ideal dari objek didik yang akan dicapai, kemana seluruh kegiatan dalam sistem pendidikan diarahkan. Segala gagasan untuk merumuskan tujuan pendidikan Islam haruslah memperhitungkan bahwa kedatangan Islam adalah permulaan baru bagi manusia. Islam datang untuk memperbaiki keadaan manusia dan menyempurnakan utu-

[135] Naquib al-Attas, dalam Moh. Raqib *"Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integrative Disekolah, Keluarga dan Masyarakat*, (Yokyakarta:LKiS, 2009), hal. 27.

[136] Sulaiman, dalam Ibid, hal. 33 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; *Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hal. 5

san-utusan (*anbiya*) Tuhan sebelumnya, dan juga dalam rangka mencapai kesempurnaan agama. Seperti arti firman Allah Swt.:

> "*Hari ini Aku sempurnakan agamamu dan Aku lengkapkan nikmatKu padamu dan Aku rela Islam itu sebagai agamamu...*". (Q.S. Al-Maidah [5]: 4).

Berpijak pada ayat tersebut, Hasan Langgulung menyimpulkan "Tujuan utama atau akhir (*ultimate aim*) pendidikan dalam Islam adalah pembentukan pribadi *khalifah* bagi anak didik yang memiliki fitrah, roh dan jasmani, kemauan yang bebas, dan akal".[137]

Lebih mendalam terkait tujuan pendidikan Islam, para ahli pendidikan telah memberikan rumusan yang berbeda-beda, menurut Abd. Ar-Rahman an-Nawawi tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku, serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat.[138] Tidak jauh berbeda Abdul Fattah Jalal menyatakan, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang mampu beribadah kepada Allah, baik dengan pikiran, amal, maupun perasaan.[139]

Menurut Rahman tujuan pendidikan Islam, adalah untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat sesuai dengan ajaran al-Qur'an.[140] Kemudian menurut Athiyah Al -Abrasy tujuan yang paling asasi dari pendidikan Islam setidaknya ada lima hal, yakni:

1. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia;

---

[137] Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam,* (Bandung: Al-Ma.arif, 1995), hal. 67.

[138] Abd. Ar-Rahman an-Nawawi, *Prinsip.,* hal.162.

[139] Abdul Fatah Jalal, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1988), hal.119

[140] Muhaimin, dkk., *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman, Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999), hal. 110.

2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat;
3. Persiapan untuk mencari rezki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan;
4. Menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*) pada belajar dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekadar sebagai ilmu;
5. Menyiapkan pelajar dari segi profesional; tehnis dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, supaya ia dapat mencari rezki dalam hidup dan hidup dengan mulia disamping memelihara segi kerohanian dan keagamaan.[141]

Dan Hasan Langgulung telah meringkas tujuan pendidikan Islam menjadi dua hal,

Pertama, Pembentukan insan yang shaleh. Insan shaleh adalah manusia yang mendekati kesempurnaan, dengan kata lain pengembangan manusia yang menyembah dan bertaqwa kepada Allah sebagaimana dalam firmanNya: "*Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaKu*.. (Q.S. Adz-Dzariat [51]: 56), manusia yang penuh keimanan dan taqwa, berhubungan dengan Allah memelihara dan menghadap kepadaNya dalam segala perbuatan yang dikerjakan dan segala tingkah laku yang dilakukannya, segala pikiran yang tergores di hatinya dan segala perasaan yang berdetak di jantungnya.

Kedua, Pembentukan masyarakat yang shaleh. Masyarakat shaleh adalah masyarakat yang percaya bahwa ia mempunyai risalah (*message)* untuk umat manusia, yaitu risalah keadilan, kebenaran, dan kebaikan, suatu risalah yang akan kekal selamanya, tidak terpengaruh faktor waktu dan tempat.[142]

---

[141] Athiya Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal.1-4

[142] Hasan Langgulung, *Kreativitas dan Pendidikan Islam,* cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), hal. 296-297

Sementara Zakiyah Derajat, sebagaimana yang dikutip Zuhairini dalam *Filsafat Pendidikan Islam*, memaparkan:

> "Tujuan pendidikan Islam adalah membibing dan membentuk manusia menjadi hamba Allah yang saleh, teguh imanya, taat beribadah dan berahlak terpuji. Bahkan keseluruhan gerak, baik bersifat pribadi maupun sosial dalam kehidupan seorang muslim mulai dari perbuatan, perkataan, dan tindakan apapun yang dilakukannya dengan nilai mencari ridha Allah, memenuhi segala perintahNya dan menjauhi laranganNya adalah ibadah. Maka untuk melaksanakan tugas kehidupan itu, baik bersifat pribadi maupun sosial perlu dipelajari dan dituntun dengan iman dan ahlak terpuji. Dengan demikian identitas muslim akan tampak dalam semua aspek kehidupanya".[143]

Masih terkait dengan tujuan pendidikan Islam ini, dalam *World Conference on Muslim Education,* yang pertama di Mekkah yang diselenggarakan pada 31-Maret hingga 8-April 1977, merumuskan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut:

> *"Education should aim at balanced growth of the total personality of man through the training of mans spirit, intellect, the rational self, feelings, and bodily senses. Education should therefore cater for the growth of man in all its aspects, linguistic both individually and collectively and motivate all these aspects towards goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large.*[144]

[143] Zuhairini (ketua tim), *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Depag.1982/1983), hal. 40.

[144] Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam,* cetakan II (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), hal. 308, dan lihat pula, Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam,* hal. 49, dan dalam Azumardy Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Mlilenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 57.

> (Pendidikan seharusnya bertujuan menimbulkan pertumbuhan kepribadian total manusia secara seimbang, melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, perasaan, dan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam aspeknya: spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, linguistic baik secara individual maupun secara kolektif, dan memotivasi semua aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan Muslim terletak pada realitas kepasrahan mutlak kepada Allah pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusian pada umumnya).

Hal tersebut dipertegas lagi dalam Kongres Pendidikan Islam se-dunia di Islamabad pada Tahun 1980, yang merumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam, adalah:

> Merealisasikan cita-cita (idealisme) Islami yang mencakup pengembangan kepribadian muslim yang bersifat menyeluruh secara harmonis, berdasarkan potensi psikologis dan fisiologis (jasmaniah) manusia yang mengacu pada keimanan dan sekaligus ilmu pengetahuan secara berkeseimbangan, sehingga terbentuklah manusia muslim paripurna yang berjiwa tawakal (menyerahkan diri) secara total kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya: *"Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah Tuhan Semesta Alam"* (Q.S. Al-An'am : 162).

Di sini dapat pahami bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam sejatinya adalah Allah, Sang Pendidik Pertama, yang menjadi Pusat untuk mendidik, mengontrol, dan membimbing manusia. Maka tema pemerdekaan dan pembebasan dalam konsepsi pendidikan Islam adalah memotivasi semua aspek manusiawi un-

tuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan yang berujung pada penyerahan diri secara mutlak kepada Allah, pada tingkat individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya.[145] Sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Tujuan pendidikan Islam sebagaimana yang diuraikan di atas, sejalan dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Bab II. Dasar, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 3, yang merumuskan:

> "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".[146]

Dalam pasal tersebut jelas terungkap bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pencerdasan kehidupan bangsa dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan peserta didik dan pembentukan watak. Watak yang dimaksud adalah:

1. Manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Manusia Indonesia yang berakhlak mulia;
3. Manusia Indonesia yang sehat; Manusia Indonesia yang berilmu;

[145] Ahmad Gaus AF, *"Pendidikan yang Memerdekakan"*, dalam Mingguan Hikmah Jum'at No. 25/TH.VIII/1997

[146] Selengkapnya baca, Depdiknas, *UU Sisdiknas* No. 20 tahun 2003, Bab II. Pasal 3.

4. Manusia Indonesia yang cakap;
5. Manusia Indonesia yang kreatif;
6. Manusia Indonesia yang mandiri;
7. Manusia Indonesia yang demokratis;
8. Manusia Indonesia yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa tujuan pendidikan Islam, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yakni tercapainya tujuan *hablum minallah;* tercapainya tujuan *hablum minas;* dan tercapainya tujuan *hablum minal'alam* atau manusia sempurna, yakni manusia yang memahami tentang Tuhan, diri, dan lingkungannya (*insan kamil*).

BAB 5
PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS

Dalam era global ini masyarakat Indonesia menginginkan terwujudnya suatu masyarakat baru, masyarakat yang mengharapkan terwujudnya kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan, keterbukaan, keadilan, saling menghormati dan menghargai adanya penegakkan hukum dengan adil, menghargai hak asasi manusia, masyarakat yang *baldatun toyyibatun warobbun gofur* (bangsa yang aman sejahtera ada dalam ampunan Allah) bagi seluruh penghuninya, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Masyarakat Madani*.

Dalam *Kamus Arab-Indonesia* Munawir menjelaskan, istilah *madani* sebenarnya berasal dari bahasa Arab, *madaniy.* Kata *madaniy* berakar dari kata kerja *madana* yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi *madaniy* yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata.[1] Dengan demikian, istilah *madaniy* dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Namun demikian secara umum istilah masyarakat madani dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju yang mempunyai nilai-nilai luhur dan menghasilkan suatu budaya yang baik.

[1] Munawir, A.W, *Kamus Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif,1997),hal. 1320

Istilah masyarakat madani sebenarnya hanya salah satu di antara beberapa istilah yang sering digunakan orang. Menurut Gellner seperti yang dikutip Mahasin, masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris *civil society*. Kata *civil society* berasal dari bahasa Latin yaitu *civitas dei* yang artinya *kota Illahi* dan *society* yang berarti masyarakat. Dari kata *civil* akhirnya membentuk kata *civilization* yang berarti peradaban.[2] Seligmen mendefinisikan *civil society* sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantahkan dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya yang manyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara.[3] Sedang *civil society* menurut Havel seperti yang dikutip Hikam, ialah rakyat sebagai warga negara yang mampu belajar tentang aturan-aturan main melalui dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni.[4]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami, masyarakat madani atau *civil society* ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, dicecal, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan sejenisnya. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

---

[2] Mahasin, "Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah", dalam Gneller, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat menuju Kebebasan,* Terj. Hasan. Cet. I. (Bandung: Mizan,1995), hal. ix.

[3] Seligmen dalam Mun'im, "Masyarakat Sipil sebagai Masyarakat Beradab", *Republika,* 20 September 1994, hal. 6

[4] Havel dalam A.S Hikam., "Demokrasi adakan Wacana Civil Society", *Republika,* 10 Oktober 1994. hal. 6

Di Indonesia istilah masyarakat madani atau *civil society*[5] baru populer pada tahun 1990-an, bersamaan dengan masa berkembangnya keterbukaan politik. Masyarakat madani yang didambakan dan sedang diperjuangkan oleh kekuatan reformatif bangsa Indonesia adalah suatu masyarakat yang bercirikan prinsip:

1. Demokrasi sebagai ciri utama masyarakat madani memiliki konsekuensi yang luas di antaranya adalah menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi yang mandiri sehingga memungkinkan pengawasan aktif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan;
2. Kepastian hukum atau masyarakat yang diwarnai oleh *rule of law* bukan kekuasaan yang sangat dominan, tetapi hukumlah yang perlu ditegakkan;
3. Egalitarian artinya suatu masyarakat yang memperjuangkan keadilan, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat bukan hanya segelintir kelompok elite untuk maju dan berkembang;
4. Penghargaan yang tinggi atas *human dignity*;
5. Kemajemukan budaya dan bangsa dalam satu kesatuan, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang multi-etnik sekaligus multikultural; dan
6. Religius yakni masyarakat sipil yang diinginkan bukan suatu masyarakat yang sekuler-materialistik, tetapi etis-religius.[6]

---

[5] Orang yang pertama kali mencetuskan istilah *civil society* ialah Cicero (106-43 SM). *Civil society* menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (kewargaan) dan *urbanity* (budaya kota), maka kota difahami bukan hanya sekadar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Lihat, Dwam Rahardjo, dalam "Relevansi Iptek Profetik dalam Pembangunan Masyarakat Madani", dalam *Academika*, Vol. 01, Th. XV, 1977, hal.17-24.

[6] Diding Nurdin, "Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani", *Harian Pikiran Rakyat,* Minggu 23 Nopember 2008

Sejalan dengan pandangan di atas, Nurkholis Madjid juga mengungkapkan ciri-ciri mendasar dari masyarakat madani antara lain: egalitarisme; penghargaan kepada orang yang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras dan sebagainya); keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat; penegakan hukum dan keadilan; toleransi dan pluralism; dan musyawarah.[7]

Di sini dapat dipahami, suatu masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat madani, jika memiliki karakteristik berikut:

1. Masyarakat yang mengakui akan hakikat kemanusiaan (*dignity of human*) yang bukan hanya sekadar untuk mengisi kebutuhannya untuk hidup (proses hominisasi), tetapi juga untuk eksis sebagai manusia (*humanisasi*);
2. Masyarakat yang hidup dalam kebersamaan sebagai makhluk sosial melalui sarana yang berbentuk organisasi sosial;
3. Masyarakat yang mengakui hak asasi manusia dalam kehidupan yang demokratis.[8]
4. Masyarakat yang harmonis, dan bebas dari eksploitasi serta penindasan.[9]
5. Masyarakat yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti: kebebasan, hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika, moralitas, dan sebagainya.

Untuk mewujudkan masyarakat madani menuntut suatu pendidikan yang sesuai, yakni pendidikan yang mampu membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam membangun masyarakatnya sendiri yakni pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik, pendidikan yang meng-

[7] Baca dalam Nurcholis Madjid, *Menuju.,* hal. 51-55

[8] *Ibid*., hal, 155

[9] Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan,* Terj. Hasan. Cet. I , (Bandung: Mizan, 1995), hal.2.

hargai kemuliaan manusia (*dignity*); individualitas dan kebebasan (akademis); pendidikan yang mengakui adanya perbedaan dan keanekaragaman; serta pendidikan yang mengakui adanya persamaan hak (*equalitarianism*), dan pendidikan yang berupaya mengembangkan segenap potensi peserta didik secara optimal. Di sinilah urgensinya pendidikan Islam yang demokratis.

A. Epistimologi Pendidikan Islam Demokratis

Pendidikan demokratis merupakan paradigma pendidikan yang harus dikembangkan di era global ini,[10] sebab pendidikan yang eksekutif dan anti demokrasi akan ditingalkan oleh para peminatnya karena kontra produktif dengan realita yang berkembang, dan karakter masyarakat global.

Pendidikan demokratis merupakan model pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi yakni pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat (*the right to be different*), kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri-sendiri (*self realization*), pendidikan yang membangun moral, dan pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin)*, telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan yang demokratis. Hal ini dapat dipahami dari kandungan firman Allah dalam Surat as-Syura' ayat ke-38, yang artinya:

> *"… dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan*

[10] Ada 4 ciri penting era global yaitu, transparansi, demokrasi, kesadaran akan hak azasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Transparansi artinya keterbukaan. Tidak ada manusia era global yang dapat menghindarkan diri dari pengaruh dunia luar. Demokrasi dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama/adil bagi setiap manusia. Jadi di sini hak-hak azasi manusia dihargai dan dijunjung tinggi.

mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka". (Q.S. Asy Syuura [42]: 38).

Dari penggalan firman Allah Swt., di atas dapat dipahami bahwa di dalam Islam prinsip musyawarah dan persatuan kesatuan umat merupakan salah satu sendi demokrasi disamping sendi yang lain, misalnya tolong menolong, tegang rasa (rasa kebersamaan) dan sebagainya mendapatkan perhatian yang serius dan harus dikembangkan di dalam kehidupan umat Islam, termasuk dalam bidang pendidikan.

Landasan bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang demokratis juga dapat diketemukan dalam al-Qur'an Surat al-Saffat ayat ke-102-107, yang menjelaskan tentang interaksi pendidikan Ibrahim terhadap putranya Isma'il. Interaksi pendidikan Ibrahim terhadap Isma'il ini terlihat pada peristiwa yang memerintahkan penyembelihan Isma'il. Untuk tugas berat inilah, Ibrahim berusaha memahami kejiwaan Isma'il, bagaimana kesanggupannya menjalankan perintah Allah. Ibrahim telah meminimalisir sikap *otoritatif* (pemaksaan) dalam pendidikan, yaitu dengan memahami kesiapan mental Isma'il. Ibrahim sebagai seorang ayah meskipun meyakini perintah tersebut dari Allah, namun masih mengedepankan cara-cara dialogis kepada Isma'il. Demokratisasi Ibrahim dalam mendidik Isma'il ini merupakan kearifan pendidik yang professional. Kearifan itu muncul karena mempertimbangkan sikap mental dan kejiwaan anak didik.

Selengkapnya dengan kronologis peristiwa penyembelihan Isma'il ini, terungkap dalam firman Allah Swt, yang artinya:

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapa-

*tmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar". (*Q.S. al-Saffat [37]: 102-107).

Untuk menggali lebih jauh landasan epistimologi pendidikan Islam yang demokratis, juga dapat dimulai dengan melacak kembali hakikat dan prinsip dasar pendidikan Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pendidikan Islam terdapat empat prinsip utama, yakni prinsip tauhid; prinsip integrasi; prinsip keseimbangan; dan prinsip keutamaan.[11] Prinsip utama dalam pendidikan Islam adalah "tauhid".

Dalam konsepsi pendidikan Islam tauhid dikonstruksikan sebagai paradigma kebebasan manusia, baik secara lahiriah maupun ruhaniah, kecuali hanya kepada Allah Swt., hal ini mengisyaratkan sebuah ajaran bahwasanya praktik pendidikan Islam tidak mengenal diskriminasi terhadap siapapun.[12] Pendidikan dalam pandangan tauhid adalah pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Ilahiah (*teologis*) sebagai landasan etis dan normatif; dan nilai-nilai insaniyah serta alamiah (*kosmologi*, *antropo-sosiologis*) sebagai nilai-nilai oprasional.[13] Karenanya pendidikan Islam haruslah

[11] Penjelasan tentang prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam ini, lihat kembali dalam sub bab, *Landasan Pendidikan Islam*, hal.80-81.

[12] M. Rusli Karim, "Pendidikan Islam sebagai upaya Pembebasan" dalam, *Pendidikan Islam antara Cita dan Fakta,* (Yokyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 31.

[13] Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan.,* hal. 69.

melahirkan dua kemestian strategis, yakni menjaga keharmonisan untuk meraih kehidupan yang abadi dalam hubungannya dengan Allah dan melestarikan serta mengembangkan terus menerus nilai-nilai kehidupan sesuai kodratnya.

Dasar bagi pelaksanaan pendidikan yang demokratis juga dapat diketemukan dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional, yakni dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas dikenal dengan apa yang disebut dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Prinsip penyelenggaraan ini diatur UU No. 20 Tahun 2003. Bab III, Pasal 4, yang secara lengkap berbunyi:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa:
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyeleng-

garaan dan pengen-dalian mutu layanan pendidikan.[14]

Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam UU Sisdiknas tersebut terlihat lebih demokratis dan lebih berorientasi pada teori dan praksis pendidikan yang semakin mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai global-universal. Dari prinsip tersebut demokratisasi pendidikan dapat dikembangkan baik dalam tataran konseptual maupun praksisnya. Hal ini dikuatkan lagi dalam Pasal 9 yang menyatakan, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.[15]

Keikutsertaan masyarakat ini terwujudkan dalam bentuk keterlibatan mereka dalam komite sekolah atau dewan pendidikan daerah. Komite sekolah berhak ikut serta dalam merumuskan perencanaan pendidikan, tidak saja dalam perencanaan makro tapi sampai pada kebijakan restrukturisasi kurikulum, walaupun dalam batas-batas gagasan besar dan tidak harus memasuki wilayah teknis, karena itu sudah menjadi otoritas guru dan kepala sekolah. Demikian pula dengan evaluasi keberhasilan sekolah, masyarakat juga berhak untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah, tidak saja dalam kerangka program pendidikan secara makro, tapi pada wilayah mikro kebijakan pengembangan sekolah dalam semua aspeknya.

B. Karakteristik Sekolah yang Demokratis

Menurut John Dewey untuk mewujudkan pendidikan demokratis haruslah dimulai dari sekolah, sebab sekolah merupakan ujung tombak pendidikan, sekaligus sebagai institusi yang sangat penting dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendi-

[14] Baca, Depdiknas, *UU RI Nomor 20 Tahun 2003.*
[15] Selengkapnya baca, *UU RI Nomor 20 Tahun 2003,* Bab III, Pasal 4.

dikan.[16] Pengembangan sekolah menuju sekolah yang demokratis ini relevan untuk dilakukan karena berbagai argumentasi;

1. Sekolah merupakan institusi yang sangat penting dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan;
2. Sekolah merupakan lembaga *normative* yang dibangun dan berdiri atas dasar nilai–nilai dan kebenaran ilmiah;
3. Sekolah bukanlah lembaga yang bersifat totaliter dan tidak pula menggunakan pendekatan otoriter menurut mereka yang memiliki kekuasaan di lembaga tersebut. Tetapi siapapun yang terlibat dalam lembaga pendidikan, tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama dan harus tunduk kepada norma-norma ilmiah dan kebenaran yang dianutnya;[17]
4. Membangun kultur pendidikan yang demokratis di sekolah, yang mengakui dan menghargai hak-hak peserta didik merupakan kebutuhan mendesak dalam era global, sebab pendidikan yang *inklusif* dan anti-demokrasi tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan karakter masyarakat global;
5. Sekolah sebagai ujung tombak pendidikan dan agen perubahan sosial harus tampil di depan memberi ruang seluas-luasnya untuk tumbuh-kembang dan mekarnya nilai-nilai demokrasi.

Agar kultur sekolah yang demokratis ini dapat terwujud maka proses pendidikan yang masih didominasi dengan kegiatan ceramah (penyampaian informasi), didominasi kegiatan mendengarkan dan menghafal bukan interpretasi dan pemaknaan, dan masih berpusat pada guru (*teacher centris*), harus dirubah dengan

[16] John Dewey, dalam Y Priyono Pasti, "Menuju Pendidikan Demokratis-Humanistik" dimuat, Kompas, 23 Juli 2005.

[17] Chabib Toha, "Demokratisasi Dalam Pendidikan Islam", dalam Sahal Mahfud, *dkk*. *Pendidikan Islam Demokrastisasi dan Masyarakat Madani*, (Yokyakarta: Kerjasama IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar Yokyakarta,2000), hal. 69

pola pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pribadi yang unik, dengan memberi peluang yang luas kepada siswa untuk berkreasi, membangun imajinasi, serta mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal.

Dalam kaitan ini, Freire menyarankan untuk mencapai demokratisasi pendidikan yang berwawasan adalah dengan menciptakan kebebasan interaksi antara pendidik dengan peserta didiknya dalam PBM di kelas.[18] Sebab itu, PBM harus terbuka dan penuh dialog yang sehat dan bertanggung jawab antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam bentuk *egaliter* dan *equity* (kesetaraan). Dengan adanya kesetaraan ini, kebebasan berinisiatif, berbeda aspirasi dan pendapat, dan keadilan dalam pendidikan akan terakomodasi dengan baik. Bahkan Wahid seperti yang dikutip Freire telah meyakinkan kita bahwa pendidikan memang merupakan wahana terpenting untuk mencapai kemerdekaan (kebebasan).[19] Dengan kebebasan ini menurut Russel akan mewujudkan demokratisasi pendidikan.[20]

Upaya pengembangan sekolah yang lebih demokratis ini setidaknya ada tiga aspek yang harus menjadi pusat perhatian yakni; demokratisasi dalam penyusunan; demokratisasi dalam pengembangan; dan demokratisasi dalam implementasi kurikulum di sekolah. Demokratisasi dalam proses pembelajaran sejak penyiapan program pembelajaran, sampai implementasi proses pembelajaran dalam kelas dengan memberikan perhatian pada aspirasi siswa, tidak mengabaikan mereka yang lamban dalam proses pemahaman, dan tidak merugikan mereka yang cepat dalam pemahaman bahan ajar. Semua memperoleh pelayanan yang proporsional, dan semua harus berakhir dengan batas minimal pencapaian kompe-

[18] Fiere, P. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan.* (Jakarta: Gramedia, 1984), hal. 24
[19] *Ibid*., hal. xv
[20] Russel, B, *Pendidikan dan Tatanan Sosial.* Terj. Abadi, A.S. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 63

tensi sesuai angka yang ditetapkan bersama dalam koridor *master learning.*[21] Dalam proses PBM di kelas, demokrasi pendidikan dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keberadaban, sebab hal ini merupakan inti dari proses pendidikan.

Di samping itu, untuk membangun sekolah yang demokrastis juga harus memperhatikan dan melakukan inovasi dalam element-element berikut:

1. Kurikulum sekolah harus terdapat mata pelajaran yang menciptakan suasana demokratis sehinga memungkinkan berkembangnya nilai-nilai demokrasi pada pribadi peserta didik;
2. Sekolah diberikan kesempatan untuk memilih sendiri bahan belajar yang dinilai baik. Bahan belajarnya dikemas sedemikian rupa sesuai dengan kondisi dan situasi kehidupan peserta didik. Peserta didik harus dilihat sebagai subjek (pelaku) pendidikan yang memiliki kelebihan dan kekurangan, bukan sebagai objek yang diperlakukan semuanya oleh guru (pendidik);
3. Proses pendidikan di sekolah harus menghargai kebebasan peserta didik dalam mengekspresikan dirinya;
4. Ruang kelas ditata sedemikian rupa, posisi kursi meja tidak kaku. Perpustakaan (baik sekolah maupun kelas) menyediakan buku-buku yang memadai dalam menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi;
5. Sekolah harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial peserta didik;
6. Guru harus bersikap demokratis, guru harus berani menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa, tidak *sock tahu*

[21] Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis; sebuah model pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,* Cet.1 (Jakarta:Kencana,2007), hal. xiii.

dan *sock berkuasa*, akan tetapi guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang demokratis;

7. Peran guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar karena ada banyak sumber belajar di sekitar siswa;
8. Guru hanya menjadi fasilitator, motivator, dinamisator dan counselor.
9. Sekolah perlu mengembangkan kegiatan intrakurikuler melalui muatan kewarganegaraan dan kokurikuler melalui kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni budaya, dan sebagainya;
10. Menciptakan proses pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai demokratis (penciptaan suasana belajar yang demokratis), di antaranya:
    a. Proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik, yang memiliki minat, bakat, kecerdasan, cara merespons pelajaran, ketrampilan, dan sikap yang berbeda satu sama lain sehingga perlu diberi treatment yang berbeda pula;
    b. Pembelajaran hendaknya bersifat individual sesuai karakter siswa masing-masing;
    c. pembelajaran perlu diterapkan sistem *continuous progress* (maju berkelanjutan) yang membuka kesempatan perkembangan pribadi anak maju tanpa hambatan. Kelas atau tingkatan tak lagi menjadi *barrier* untuk maju terus;
    d. Pembelajaran dikemas dalam bentuk kelompok. Proses ini membantu peserta didik membina sikap toleransi, belajar menghargai pendapat sesama, saling membantu, mengadakan interaksi sosial, dan terbuka terhadap perubahan;

e. Pembelajaran ditata dan dikondisikan sedemikian rupa yang memberikan *kebebasan* kepada peserta didik untuk melakukan pilihan-pilihan tindakan belajar dan mendorong mereka untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar;
f. Metodologi pembelajaran didesain sedemikian rupa yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan dirinya secara optimal baik melalui media tulis maupun lisan;
g. Evaluasi dilakukan dua arah, guru ke siswa dan juga siswa ke guru. Guru harus rendah hati dan legowo menerima penilaian kinerjanya dari peserta didik;
h. Grafik prestasi kelas dan pribadi dipajang di ruang kelas untuk memperlihatkan posisi masing-masing peserta didik dalam pelajaran tertentu. Ini mengajarkan soal keterbukaan dan kejujuran kepada peserta didik untuk mengakui dan menyadari kelebihan serta kelemahannya, sekaligus merangsang anak meningkatkan motivasinya, semangat juangnya untuk berprestasi.
i. Berupaya menciptakan kelas sedemikian rupa sehingga menjadi lingkungan kehidupan demokratis yang mikro atau *micro cosmos of democracy*, dan masyarakat menjadi *open global classroom*. Model-model pengembangan sikap demokratis dan tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan menggunakan *good news class meeting, circle wihp,* dan *appreciation time.*

Dalam kerangka ini, James A. Beane dan W. Aplle sebagaimana yang dikutib Dede Rosyada, mengungkapkan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya membangun sebuah sekolah yang demokratis, di antaranya:

1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehinga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin;
2. Memberi kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok-kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah;
3. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah;
4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik;
5. Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas;
6. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diedealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membibing keseluruhan hidup manusia;
7. Terdapat intitusi yang dapat terus menerus mempromosikan dan mengembangkan cara-caa hidup yang demokratis.[22]

Untuk mewujudkan sekolah yang demokratis juga diperlukan syarat-syarat berikut:

1. Adanya komitmen sebagian besar warga bangsa untuk melakukan pembangunan pendidikan;
2. Mobilisasi sumber daya manusia besar-besaran untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pendidikan;
3. Komitmen dan penyediaan fasilitas pendidikan yang realistik dan memadai;
4. Adanya rekruitmen dan promosi tenaga pendidikan yang

[22] Dede Rosyada, *Paradigma*., hal.15-16

memiliki keseimbangan antara tuntutan sosial dan aspirasi individu;[23]

5. Membangun persepsi dan sikap positif terhadap upaya peningkatan kinerja pembelajaran sekolah yang bermutu;
6. Merancang dan melaksanakan serta menilai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mampu mengembangkan konsep, nilai, sikap, dan keterampilan demokrasi sesuai dengan UUD 1945 dan perubahannya melalui variasi interaksi edukatif yang mengaktifkan, mencerdaskan, dan memberdayakan siswa;
7. Membangun budaya sekolah yang demokratis melalui pengembangan materi kewarganegaraan secara intrakurikuler dan berbagai kegiatan kewarganegaraan baik melalui mata pelajaran maupun kegiatan pembiasaan hidup demokratis di lingkungan sekolah;
8. Berupaya membangun kultur sekolah yang demokratis yang mengilhami nilai-nilai cita-cita dan prinsip-prinsip demokrasi.

Upaya mewujudkan sekolah yang demokratis juga menuntut semua unsur (*stake holder*) harus mengetahui berbagai informasi penting yang berkaitan dengan sekolah, mengetahui arah pengembangan/kebijakan sekolah, berbagai problem serta langkah-langkah yang sedang ditempuh untuk mengatasi problem-problem yang sedang dihadapi. Ini artinya, demokratisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, tetapi juga berkaitan dengan seluruh dimensi pendidikan, termasuk aspek kelembagaan, tenaga pengajar dan lain sebagainya.

[23] Nurul Zuriah, "Analisis Model Teoritik Inovasi Pembelajaran Ilmu Sosial Berbasis Demokratisasi di Lingkungan Pendidikan Dasar", disampaikan dalam *Simposium Tahunan Penelitian Pendidikan*. Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta, 11 – 14 Agustus 2008), hal, 12-14

Dari uraian di atas, dapat dikatakan Sekolah yang demokratis tiada lain adalah pengimplementasikan pola-pola demokratis dalam pengelolaan Sekolah yang secara umum yang mencakup dua aspek yakni, struktur organisasi dan prosedur kerja dalam struktur tersebut, serta merancang kurikulum yang bisa mengantarkan anak didik memiliki berbagai pengalaman tentang praktik-praktik demokrasi. Dengan demikian, sebuah sekolah atau lembaga pendidikan layak disebut sebagai Sekolah yang demokratis, jika memiliki karakteristik berikut:

1. Berorientasi normative, yakni manajemen harus selalu berdasarkan pada kesepakatan. Artinya apapun program yang hendak diemplementasikan harus didasarkan pada kesepakatan seluruh komponen yang ada dalam sekolah;
2. Menggunakan atau menerapkan pendekatan demokratis dalam pengambilan kebijakan sekolah, maupun dalam proses pembelajaran;
3. Penanaman nilai kultur dan kebiasaan-kebiasaan dalam berdemokrasi sudah dimulai sejak fase pendidikan dan tahun-tahun pertama mereka belajar;
4. Pengambilan keputusan tentang berbagai kebijakan penting dilakukan oleh sebuah komite dan tidak dilakukan secara individual oleh seorang kepala sekolah dengan menggunakan otoritas kepemimpinannya;
5. Semua unsur memiliki wakil dalam komite yang harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya terhadap *constituent*;
6. Semua putusan ditetapkan dengan cara consensus atau kompromi, yang sedapat mungkin dihindari polarisasi organisasi karena perbedaan pendapat dan pandangan.

Sedangkan tujuan dari membangun Sekolah yang demokratis adalah terciptanya peserta didik yang memiliki kualitas demokrasi yang dapat dilihat dari ciri kualitatif dan indikator perilakunya. Sikap-sikap itu antara lain:

1. Mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi atau golongan;
2. Mengutamakan kepentingan negara atau umum dan rela berkorban untuk negara atau kepentingan umum;
3. Toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda;
4. Terbuka menerima pendapat orang lain;
5. Tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik, benar dan bertanggung jawab;
6. Bersikap kritis terhadap informasi atau pandangan sehingga tidak mudah menerima atau menolak pandangan orang lain;
7. Cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan;
8. Menghormati hak orang lain;
9. Menghormati kekuasaan yang sah;
10. Bersikap adil dan tidak diskriminatif;
11. Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab;
12. Berusaha selalu berkomunikasi individual;
13. Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan;
14. Berani mengajukan petisi (saran/usul);
15. Berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding;

16. Selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS;
17. Berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program OSIS dan sebagainya.

C. Paradigma Pendidikan Islam yang Demokratis

Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai pembebasan pendidikan dan manusia dari struktur dan sistem perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen.[24] Dan menurut Hujair Sanaky, demokratisasi pendidikan merupakan pendidikan hati nurani, artinya pendidikan yang lebih menghargai potensi manusia, lebih humanis, beradab dan sesuai dengan cita-cita masyarakat madani.[25] Melalui demokratisasi pendidikan ini diharapkan akan terjadi proses kesetaraan antara pendidikan dan peserta didik di dalam proses belajar mengajar.

Sementara Moh Shofan dalam *Realistik Education* megatakan, demokrasi pendidikan bukan hanya prosedur, tetapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Sehingga demokratisasi pendidikan diharapakan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif tanpa harus mengorbankan martabat dirinya.[26] Sedang Mastuhu menyatakan, demokrasitisasi pendidikan adalah gagasan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasanya bagi manusia menurut kondisi subjektif atau kemampuanya untuk mengembahkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diraihnya.[27]

---

[24] Ainun Naqim dan Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multicultural: Konsep dan Aplikasi*, (Yokyakarta: Ar Ruz Media,2008), hal. 61

[25] Hujair Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia,* cet. I (Yokyakarta: Safira Insania Press, , 2003,) hal: 245

[26] Moh Shofan, *ed. Realistik Educatioan; Menuju Masyarakat Utama,* (Yokjakarta: Ircisod). hal. 123.

[27] Mastuhu, "Demokrasi Pendidikan Islam Indonesia", *Makalah,* disampaikan dalam diskusi panel Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, (Malang, 26 Oktober 1996).

Demokratisasi pendidikan berguna untuk menyiapkan peserta didik agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, turut bertanggung jawab (*melu angrungkebi*), terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki (*melu handarbeni*), sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya (*padhasarasa*), dan mempelajari kehidupan masyarakat. Pendeknya demokratisasi pendidikan bertujuan untuk menghasilkan manusia-manusia yang merdeka, berpikir kritis, toleran dengan pandangan dan praktik-praktik demokrasi.

Mewujudkan pendidikan yang demokratis bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab berbagai kendala yang tidak mendukung terbentuknya demokratisasi dalam dunia pendidikan tidak mudah disingkirkan begitu saja. Menurut H.A.R Tilaar setidaknya ada lima tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan demokrasi pendidikan termasuk pendidikan Islam. *Pertama*, Pendidikan yang penuh kesombongan; *Kedua,* Sistem pendidikan yang elitis; *Ketiga*, proses domestifikasi; *Keempat*, Proses pembodohan; dan *Kelima*, Budaya korporasi.[28]

Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, namun mengupayakan pendidikan dan khususnya pendidikan Islam yang demokratis adalah tuntutan zaman dan sebuah keharusan. Apalagi mengingat pendidikan adalah sebuah investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa.

Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pribadi, individu yang unik, mempunyai potensi yang perlu diwujudnyatakan dan dikembangkan

[28] H.A.R. Tilaar, *Multikultural Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 297-299

secara optimal. Dalam pendidikan yang demokratis peserta didik sungguh ditempatkan sebagai subjek belajar, dilibatkan dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, menganalisis, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Perlakuan dan treatment kepada setiap peserta didik juga berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Pendidikan yang demokratis pada esensinya adalah pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, yakni pola pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat (*the right to be different*), kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri-sendiri (*self realization*), pendidikan yang membangun moral, pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta-Nya.[29]

John S Brubacher dalam *Modern Philosophies of Education* (1978) menjelaskan, ”pendidikan demokratis” merupakan pendidikan yang menghargai kemuliaan manusia (*dignity*); individualitas dan kebebasan (akademis); perbedaan dan keanekaragaman; persamaan hak (*equalitarianism*), di mana model pendidikan harus ”disesuaikan” dengan aneka perbedaan (kebutuhan, kecerdasan, kemampuan); dan ”keberbagian” (*sharing*), di mana yang berbeda-beda itu (*differences*) harus diberi tempat, tetapi semua yang berbeda dapat berbagi untuk prinsip-prinsip umum.

Dalam pendidikan yang demokratis perlu dikembangkan komunikasi structural dan cultural antara pendidik dengan peserta didik, sehingga akan terjadi interaksi yang sehat dan bertanggung jawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri dan mungkin saja

[29] Diding Nurdin, “Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani”, *Harian Pikiran Rakyat,* (23 Nopember 2008).

berbeda dengan pendidiknya asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkannya.[30]

Dalam pendidikan yang demokratis, kemerdekaan dan kebebasan setiap peserta didik untuk beraktualisasi dan berekpresi harus dijunjung tinggi. Sebaliknya, penindasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan harus dijauhkan, karena penindasan dalam segala bentuknya tidak sesuai dengan esensi pendidikan sebagai pembebas dan pemanusiaan manusia secara hakiki. Hal ini sejalan dengan indikator dari demokrasi yang harus terbuka, rasional, mengutamakan motivasi umum, jujur, bebas tekanan (paksaan), dan mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama.

Di samping itu, pendidikan yang demokrastis juga harus dapat mengembangkan toleransi dan *social trust* di kalangan anak didik, dengan memberikan kesempatan bahkan mendorong setiap anak didik untuk belajar hidup bersama dan saling menghargai melalui kebiasaan hidup berdampingan, dan berinteraksi dengan individu-individu dan kelompok-kelompok yang memiliki berbagai perbedaan dengan dirinya. Ini artinya, pendidikan yang demokratis menuntut adanya kondisi yang saling menghargai, kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan ide dan gagasan, keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama (komunal-bermasyarakat) di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan dan latar belakang yang berbeda-beda. Ini artinya pendidikan yang demokratis bukan hanya untuk menyiapkan peserta didik bagi kehidupan mereka nanti di masyarakat, tetapi sekolah sendiri juga harus menjadi masyarakat mini, di mana praktik demokrasi yang ada dalam masyarakat perlu diadakan secara nyata di sekolah. Model hidup di sekolah yang mirip dengan

---

[30] Hujair Sanaky, *Paradigma Pendidikan*, hal. 245

situasi masyarakat tempat si anak berasal mesti diciptakan.[31] Dengan begitu, anak didik akan terbiasa dengan karakteristik perikehidupan yang demokratis.

Dalam paradigma pendidikan demokratis, pendidikan haruslah dijadikan sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang zaman dengan segala suasana aktivitas kehidupan. Pendidikan harus berlangsung di segala bentuk tingkatan kehidupan yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri peserta didik. Sebab hanya dengan cara itu, peserta didik akan mampu mengembangkan dirinya menjadi lebih dewasa, cerdas, kreatif, dan matang.

Konsep pendidikan yang demokratis juga harus memahami kebutuhan manusia untuk selalu bersikap maju, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal, serta mengantarkan mereka untuk memahami hakikat dirinya sebagai mahluk spiritual di satu sisi, dan mahluk sosial disisi yang lain. Oleh sebab itu, proses penyelenggaran pendidikan haruslah mampu menjelaskan tentang manusia secara utuh bagi kepentingan pendidikan dengan berpegang pada 5 (lima) prinsip berikut:

1. Manusia memiliki sejarah, maksudnya adalah manusia mampu melakukan *self-reflection,* mampu keluar dari dirinya dan menengok ke belakang, kemudian mengadakan penelitian dan perenungan yang merupakan koreksi terhadap masa lalu untuk sebuah rekonstruksi baru di masa depan;
2. Manusia adalah mahluk dengan segala individualitasnya, artinya masing-masing orang memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan potensi yang dimiliki sehingga manusia adalah sebagai subjek, bukan lagi hanya sebagai objek;

[31] Priyono, *Menuju Pendidikan Demokratis-Humanistik,* dalam Kompas, Sabtu, 23 Juli 2005Y

3. Manusia selalu membutuhkan sosialisasi untuk menyatakan eksistensinya dalam hubungan sosial antar manusia;
4. Manusia mengadakan hubungan juga dengan alam sekitar. Kesadaran manusia menyatakan bahwa ketersediaan alam belum semuanya cocok untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu manusia harus bekerja, dan bekerja di sini merupakan kegiatan mencipta dengan tetap mengandung dimensi kemanusian. Ia merupakan gabungan antara budi dan rasa yang berdaya untuk menafsirkan dunianya; dan,
5. Manusia dalam kebebesan mengolah alam pikir dan rasa sehingga bisa menemukan yang transendental. Hubungan manusia dengan Tuhan yang terlembagakan dalam kepercayaan atau iman merupakan trobosan manusia untuk keluar dari eksistensi empirisnya yang terbatas menuju sumber yang pertama dari eksistensi dirinya dan dunianya.[32]

Dalam hal ini Snauwaert sebagaimana yang dikutip Zamroni mengatakan, pendidikan yang demokratis haruslah mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kemanusiaan, dan menitik beratkan pada tujuan untuk mengembangkan pada diri siswa empati, toleransi, respek pada yang lain, dan memiliki pandangan sebagai warga negara bangsa dan warga masyarakat global. Sebab pendidikan yang demokratis akan selalu terkait dengan masalah hak asasi dan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan, atas dasar kemampuan mereka.[33]

Pendidik yang bervisi democratik akan mengedepankan pendekatan pembelajarannya pada kapasitas kritis, keinginta-

[32] A. Atmadi dan Y. Styaningsih (*ed.*), *Transformasi Pendidikan,* (Yokyakarta: Kanasius, 2000), hal. 22-23. Lihat pula dalam A. Widl, "*pendidikan yang Memahami Manusia*, dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (editor)., *Transformasi Pendidikan*, (Yogyakarta :Kanisius, 2000), hal. 22-23.

[33] Zamroni, "Demokrasi dan Pendidikan dalam Transisi: Perlunya Reorientasi Pengejaran Ilmu-Ilmu Sosial di Sekolah Menengah", *Pidato* Pengukuhan Guru Besar dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yokyakarta: 2002, hal. 15.

huan, dan otonomi siswa. Di sini jelas, peranan seorang pendidik menggambarkan adanya kesan bahwa pembelajaran adalah tidak hanya menyampaikan isi (konten) melainkan juga ”berpikir yang benar”. Proses belajar-mengajar, bersama dengan penyelidikan atau penelitian adalah hal penting yang tidak terpisahkan dari lingkaran pengetahuan kespiritualan pada keingintahuan.

Dalam konteks pembelajaran, pendidikan yang demokratis menuntut adanya interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam bentuk *egaliter* dan *equity* (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan). Dengan adanya kesetaraan ini maka kebebasan berinisiatif, berbeda aspirasi dan pendapat, serta keadilan dalam pendidikan akan terakomodasi dengan baik.[34] Karena itulah, dalam proses pembelajaran harus terdapat interaksi dua arah antara guru dan siswa. PBM harus terbuka dan penuh dialog yang sehat dan bertanggung jawab antara pendidik dengan peserta didik. Guru memberikan bahan pembelajaran dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif memberikan reaksi, siswa bisa bertanya maupun memberi tanggapan kritis tanpa ada perasaan takut. Bahkan, kalau perlu siswa diperbolehkan menyanggah informasi atau pendapat guru jika memang dia mempunyai informasi atau pendapat yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pendapat Freire yang menyarankan untuk mencapai demokratisasi pendidikan yang berwawasan adalah dengan menciptakan kebebasan interaksi antara pendidik dengan peserta didiknya dalam PBM di kelas.[35]

Pola pengajaran yang demokratis harus terjadi ke segala arah dan bukan hanya bersifat satu arah yaitu dari pendidik ke peserta (top down) melainkan juga ada keseimbangannya yaitu dari peserta didik dengan pendidik (*bottom up)* dan antar peserta didik

---

[34] Sudarman Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 15.

[35] Fiere, *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan, (* Jakarta: Gramedia. 1984), hal. 24

dengan peserta didik (*network*), sehingga tidak ada lagi pemaksaan kehendak pendidik kepada peserta didik, tetapi yang akan terjadi tawar-menawar kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, media, proses belajar mengajar, dan evaluasi hasil belajarnya. Dengan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dan peserta didik ini, maka akan terjadi interaksi yang sehat, wajar, dan bertanggung jawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri dan mungkin saja berbeda dengan pendidiknya asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Inovasi model dan disain pembelajaran demokratis ini semula dikembangkan berlandaskan kerangka pikir Teori Belajar Kognitivisme. Menurut teori ini "belajar" adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar akan berjalan baik apabila materi pelajaran yang baru beradaptasi (bersambung) secara "klop" dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki siswa.

Adapun teori pembelajaran yang mengilhami inovasi model dan disain pembelajaran demokratis adalah teorinya Bruner yang menyatakan bahwa penyajian materi bisa dimulai dari yang termudah secara bertahap ke arah materi yang lebih sukar. Dengan kata lain, materi yang bersifat sederhana sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu, sehingga jika diberikan materi yang lebih rumit peserta didik tidak terlalu kaget. Dalam pelaksanaan pengembangannya model dan disain pembelajaran demokratis, penyajian

materi dimulai dari hal-hal yang berisi materi konkret, nyata, sederhana diberikan terlebih dahulu karena lebih mudah dipahami, kemudian disusul dengan materi abstrak, konseptual dan kompleks secara bertahap.

Dalam iklim PBM yang demokratis, pendidik tidak harus merasa paling pandai dan merasa paling benar di kelasnya, merasa telah menang belajar satu malam dibandingkan dengan peserta didiknya; tetapi akan terjadi saling tukar informasi dan pengalaman dengan peserta didiknya. Sebab sumber belajar bukan hanya terletak pada pendidik melainkan juga pada peserta didik. Di sini peserta didik betul-betul ditempatkan sebagai subjek belajar, bukan sebagai objek belajar atau sebagai gelas kosong yang diisi dengan berbagai ilmu oleh guru.

Proses pembelajaran juga harus terbuka, penuh dialog yang sehat dan bertanggung jawab antara pendidik dengan peserta didik, sehingga tercipta lingkungan belajar yang mendorong seoptimal mungkin bagi berkembangnya potensi peserta didik. Seorang pendidik harus lebih banyak memberi komentar positif kepada peserta didiknya dibandingkan dengan komentar negatif, memberi motivasi kepada peserta didik agar lebih bersemangat dalam belajar, bukan mematahkan semangat belajar peserta didik, serta lebih mengutamakan pemberian hadiah (*reward)* daripada pemberian hukuman (*punishment*).

Melalui penerapan pola pembelajaran yang demokratis ini, diharapkan mampu memberikan proses belajar-mengajar yang lebih menyenangkan dan membesarkan hati (*mbombong*) peserta didik, bukan menekan atau merendahkan kemampuan peserta didik. Ini artinya seorang pendidik haruslah mengedepankan pendekatan pembelajarannya pada kapasitas kritis, keingintahuan dan otonomi siswa dengan menerapkan desain pembelajaran yang

variatif dan inovatif, sehingga tercipta proses pembelajaran yang aktif, kratif dan menyenangkan (*fun*).

Dalam era global ini, pola pembelajaran yang demokratis cukup mendesak untuk diimplementasikan hal ini setidaknya berdasarkan tiga alasan berikut:

1. kenyataan bahwa guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Dalam era globalisasi sekarang ini, tidak bisa dipungkiri akses terhadap berbagai sumber informasi menjadi begitu luas: televisi, radio, buku, koran, majalah, dan Internet. Saat berada di kelas, siswa telah memiliki seperangkat pengalaman, pengetahuan, dan informasi. Semua ini bisa sesuai dengan bahan pelajaran, bisa juga bertentangan. Pembelajaran yang demokratis memungkinkan terjadinya proses dialog yang berujung pada pencapaian tujuan instruksional yang ditetapkan. Tanpa demokrasi di kelas, guru akan menjadi penguasa tunggal yang tidak dapat diganggu gugat. Siswa terkekang, dan akhirnya potensi kreativitasnya terbunuh.
2. kompleksnya kehidupan yang bakal dihadapi siswa setelah lulus. Masa depan menuntut mereka mampu menyesuaikan diri. Prinsip belajar yang relavan adalah belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*). Artinya, di kelas target pembelajaran bukan sekadar penguasaan materi, melainkan siswa harus belajar juga bagaimana belajar (secara mandiri) untuk hal-hal lain. Ini bisa terjadi apabila dalam kegiatan pembelajaran siswa telah dibiasakan untuk berpikir mandiri, berani berpendapat, dan berani bereksperimen.
3. sebagai bagian dari anggota masyarakat, siswa hendaknya sejak dini telah dibiasakan bersikap demokratis, bebas berpendapat tetapi tetap dalam *rule of game*. Ini bisa dimulai di

kelas dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang menekankan adanya demokrasi.

Menciptakan pendidikan yang demokratis merupakan tuntutan perkembangan zaman, yang bertujuan untuk melepaskan manusia dari penjara ketertindasan dan eksploitasi tertentu yang akan mengkungkung kemerdekaan manusia.

Sampai di sini dapat dipahami bahwa pendidikan Islam yang demokratis adalah sebuah pola pendidikan dan pembelajaran yang setidak-tidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrah-nya:
2. Pendidikan yang menempatkan pendidik dan peserta sebagai subjek pendidikan yang saling berintegrasi, saling mengisi, dan saling melengkapi satu dengan lainya;
3. Pendidikan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap keilmuan, dan konsisten dengan prinsip belajar tuntas;
4. Pendidikan yang tidak hanya berhenti pada retorika dan teori tetapi ada langkah-langkah konkret estafet dan pengalaman ilmu;[36]
5. Pendidikan yang menghargai adanya perbedaan (*the right to be different*) antar pendidik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik;
6. Pendidikan yang mengakui dan menghargai adanya kebebasan setiap individu untuk mengaktualisasikan diri, dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bersaing di dalam perwujudan diri-sendiri (*self realization*); dan adanya

[36] Syamsul Muarif dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasais Pluralis dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam,* (Malang: Kerjasama UMM dengan PSIF, 2001), hal.138.

perbedaan dan keanekaragaman, serta persamaan hak (*equal-itarianism*);

7. Pendidikan yang didalamnya berkembang komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dengan peserta didik, sehingga terjadi interaksi yang sehat dan bertanggung jawab;[37]
8. Pendidikan yang memberikan kesempatan, bahkan mendorong setiap anak didik untuk belajar hidup bersama dan saling menghargai melalui kebiasaan hidup berdampingan;
9. Pendidikan yang di dalamnya terdapat kondisi yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan, dan adanya keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas;
10. Pendidikan yang berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong seoptimal mungkin berkembangnya potensi diri peserta didik;
11. Pendidikan yang menghargai kemuliaan manusia (*dignity*); individualitas dan kebebasan (akademis);
12. Pendidikan yang menempatkan pendidik dan anak didik secara proporsional;
13. Pendidikan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kemanusiaan, dan menitik beratkan pada tujuan untuk mengembangkan pada diri siswa empati, toleransi, respek pada yang lain (*social trust)* di kalangan anak didik;
14. Pendidikan yang memahami kebutuhan manusia untuk selalu bersikap maju, bersifat flexsibel dan adapatif terhadap perkembangan zaman; dan,
15. Pendidikan yang lebih mengutamakan proses daripada hasil.

[37] Hujair Sanaky, *Paradigma*., hal. 245.

BAB 6
PARADIGMA PENDIDIKAN HUMANISTIK

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan Allah Swt. Jika dibandingkan dengan makhluk lain manusia adalah mahkluk terbaik yang menyimpan banyak potensi, seperti memiliki akal (*aql*), hati (*qolbu*), dan tubuh (raga). Dengan akal-nya manusia akan mampu memilah dan memilih nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran dan keindahan yang tertuang dalam risalah para Rasul. Manusia dengan hati-nya akan mampu memutuskan sesuatu yang sesuai dengan kehendak pencipta-Nya, dan dengan raganya, manusia diharapkan pro-aktif untuk melahirkan karya-karya besar dan tindakan-tindakan positif, sehingga ia tetap mempertahankan gelar kemuliaan yang telah diberikan Allah Swt., kepadanya seperti *ahsanu taqwim*, *ulul albab*, *rabbaniun* dan sebagainya.

Dari sumber materil potensi tersebut, tampak jelas bahwa manusia memiliki keistimewaan dibanding dengan makhluk Tuhan lain di muka bumi ini. Keistimewaan itu bisa dilihat dari sisi penciptaan fisik maupun personalitas karakternya. Karena keistimewaan itu manusia memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan makhluk lain. Dengan kelengkapan tersebut, Allah selalu bertanya kepada manusia dalan firman-Nya *afala ta'kilun*,

afala tata fakkarun, dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan Allah kepada manusia tersebut menunjukkan jika manusia mempunyai potensi untuk belajar.

Berbeda dengan makhluk lain, manusia adalah pelaku sejarah yang menentukan seluruh tatanan dalam kosmos ini. Dia bertanggung jawab terhadap masa depan peradaban di muka bumi. Karena itu dalam konsepsi Islam, manusia diberi gelar sebagai *khalifatullah*, makhluk yang harus memerankan segala sifat Tuhan di muka bumi sehingga tatanan kosmos tetap berjalan seimbang. Hal ini tidak terlepas dari eksistensi manusia dalam kehidupan dunia yang pada hakikatnya adalah untuk melaksanakan tugas kekhalifahan, yaitu membangun dan mengelola dunia tempat di mana ia hidup, sesuai dengan kehendak Pencipta-Nya.

Manusia sebagai khalifah dalam pengertian wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan dan sebagai hamba Allah, pada dasarnya mengandung implikasi moral sehingga kehidupannya harus dibatasi oleh nilai-nilai dan etika ketuhanan. Manusia tidak diperkenankan untuk menentang hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah, sebaliknya ia harus mendasarkan seluruh kehidupannya atas nilai-nilai dan norma-norma universal dan eternal yakni wahyu Ilahi.

Menurut Jalaluddin Rahmat, peran yang dilakonkan oleh manusia menurut statusnya sebagai khalifah Allah setidak-tidaknya terdiri dari dua jalur, yaitu jalur horizontal dan jalur vertikal. Peran dalam jalur horizontal mengacu kepada bagaimana manusia mengatur hubungan yang baik dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.[1] Mengatur di sini tidak hanya dalam pengertian sosio politik atau dalam pengertian mengendalikan alam secara ilmiah, tetapi yang lebih fundamental adalah dicakupnya konsep

[1] Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001), hal. 31

sifat yang mengandung pengertian, pemerintahan, pengendalian dan pemeliharaan diri manusia oleh dirinya sendiri. Mengatur di sini bukan juga sesuai dengan kemauan manusia itu sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Peran dalam jalur vertikal menggambarkan bagaimana manusia berperan sebagai mandataris Allah. Dalam peran ini manusia penting menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya untuk menguasai alam dan sesama manusia adalah karena penugasan dari Penciptanya.[2]

Dengan posisi istemewa sebagai *-khalifah Allah-* tersebut, manusia juga disebut sebagai makhluk teomorfis (cermin Tuhan). Sebagai makhluk teomorfis maka manusia tidak hanya memiliki unsur-unsur kemanusiaan tetapi juga unsur-unsur Ilahiah, seperti yang dinyatakan al-Quran, bahwa Allah telah meniupkan ruh-Nya kepada manusia. Sebagai konsekuensinya, manusia berpotensi untuk dapat memantulkan semua sifat Tuhan. Dan potensi ini hanya akan terealisasi hanya ketika manusia mencapai tingkat kesempurnaannya yaitu *insan kamil*. Potret manusia semacam inilah yang dikehendaki dalam bangunan pendidikan Islam.

A. Landasan Epistimologi Pendidikan Humanistik

Manusia merupakan makhluk yang paling menakjubkan, makhluk yang unik, makhluk multidimensi, makhluk yang serba meliputi, sangat terbuka, dan mempunyai beragam potensi yang tidak dimiliki mahkluk jenis lain. Sebagai makhluk unik, manusia berada pada posisi antara hewan dan malaikat, ia memiliki sifat-sifat kehewanan (*nafsu syaitoniah*) dan sifat-sifat kemalaikatan (budi luhur). Manusia bisa diposisikan sebagai hewan bahkan lebih rendah dari hewan ketika hanya memperturutkan hawa nafsu dan sifat-sifat kebinatangan. Begitupun sebaliknya, manusia akan menempati posisi yang jauh lebih mulia dari malaikat ketika ia

[2] *Ibid., hal.* 31.

sukses melaksanakan tugas kehidupannya yaitu sebagai wakil Allah (*khalifatullah*) di muka bumi, dan sebagai hamba Allah (*'abdulllah*).

Atas dasar itu, maka pendidikan dalam Islam haruslah memandang manusai sebagai *khalifah fil ardl*, manusia yang dapat didik, dilatih dan diberdayakan untuk melahirkan manusia beriman, manusia sempurna, bermoral tinggi, memiliki pengetahuan, berwawasan luas, manusia yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai spritual ilahiyah dengan nilai-nilai kultural duniyawiyah dalam konstruksi yang kokoh, seimbang, harmonis, dinamis, dan kreatif. Karenanya salah besar jika pendidikan dan khususnya pendidikan Islam hanya menekankan pada aspek *kognitif*, dengan melupakan aspek *afektif* sebagai tuntutan kepekaan manusia terhadap segala hal yang berada di luar dirinya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alamnya. Kecerdasan *kognitif* dan *afektif* harus dipadukan agar menjadi pacuan bagi kemampuan gerak dan laku manusia (*psikomotorik*). Sebab jika masing-masing dimensi itu dipisahkan, maka eksistensi kemanusiaan akan terpotong-potong, tak ubahnya makhluk lainnya di muka bumi.

Pendek kata, pendidikan yang dijalankan dalam Islam haruslah mendudukan manusia dalam posisinya sebagai manusia seperti yang digambarkan Allah Swt., yakni makhluk yang terbaik (*ahsana taqwim)*.

> *"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya."* (QS. At Tin [95]:4-6).

Ayat di atas mengisyaratkan pesan pendidikan yang sangat berharga yakni untuk menjaga kontinuitas manusia dalam posisi *ahsana taqwim,* maka pendidikan keimanan merupakan dasar dalam aktualisasi amal saleh untuk berbuat yang terbaik dalam menjalankan tugas kemanusiaan di muka bumi.

Paradigma pendidikan dalam Islam juga harus mengacu pada dua dimensi, yakni dimensi ketuhanan *theocentris* (*hablum minallah*) dan dimensi kemanusiaan *anthropocentris* (*hablum minannas*). Keseimbangan dalam dua hubungan ini akan berdampak positif terhadap posisi manusia dalam memerankan tugas kemanusiaannya. Bila tidak seimbang maka ia akan mengakibatkan kerusakan dan kehinaan bagi manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

> *"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.."* (Q.S Ali Imran [3] : 112)

Dimensi *theocentris* dan *anthropocentris* adalah dua dimensi bagaikan dua sisi mata uang. Kesalehan seseorang kepada Tuhan tidaklah dianggap cukup jika tidak disertai dengan kesalehannya kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Rasa kemanusiaan yang terpisah dari rasa ketuhanan akan menjadikan manusia memberhalakan manusia, karena makna sejati dari kemanusiaan itu terletak pada kebersamaannya dengan ketuhanan. Demikian juga rasa ketuhanan tidak akan memperoleh makna yang luhur bila tidak diikuti dengan rasa kemanusiaan.

Di samping itu, pendidikan dan khususnya pendidikan Islam juga harus mampu mengantarkan manusia (peserta didik) untuk menjawab pencarian manusia tentang hakekat hidupnya. Dari

mana ia berasal?; Bagaimana asal-usulnya?; Seberapa lama akan hidup?; Untuk apa ada di dunia dan kemana akan kembali?; Apa tujuan hidup ini?; Untuk apa ia hidup?; Apa tujuan hidupnya?; Untuk apa bekerja?; dan, Untuk apa harta yang dimiliki?. Tuntutan untuk menjawab pertanyaan-pertayaan di atas tidak sekadar dianjurkan dalam al-Qur'an, tetapi ia berkedip-kedip di dalam fungsi otak ketiga manusia yang disebut kecerdasan spiritual atau *God Spot (*titik Tuhan).[3]

Pertayaan-pertayaan di atas adalah pertayaan yang sangat mendasar, dan dapat membantu manusia untuk mengungkap kesadaran fitrah[4] kemanusiannya yang cenderung kepada kebenaran (*hanif*), dan yang menjadikan manusia lebih manusiawi. Sebab itu pula pendidikan harus diarahkan pada pengembangan dan kesadaran beberapa hal berikut:

1. Manusia yang menyadari ada kekuatan yang Maha Agung yang mengatur hidup manusia;
2. Manusia yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia;
3. Manusia yang memahami dan memanfaatkan potensi dirinya;
4. Manusia yang menghargai dirinya sendiri sebagai manusia;
5. Manusia yang menghargai manusia lain;
6. Manusia yang bersedia menerima manusia lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya;

---

[3] *God Spot* atau rasa bertuhan dalam Islam sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari dimensi keaagamaan karena *God Spot* adalah bagian dari *lobus temporal* yang berkaitan dengan pengalaman religius atau spiritual seseorang. Baca, Taufik Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ*: Antara Neurosisain dan Al Qur'an*. (Bandung: Mizan, 2003), hal. 127.

[4] Kata fitrah dalam al-Qur'an, dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 28 kali, 14 diantaranya dalam konteks urian bumi dan langit, sisanya disebut dalam konteks pembicaraan tentang manusia baik yang berkaitan dengan fitrah penciptaan maupun fitrah keberagamaan. Selengkapnya baca, Ahmad Mubarok, dalam *Al Irsyad an Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus.* (Jakarta :Bina Rena Parawira, 2000), hal. 35.

7. Manusia yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki semangat untuk memperbaiki diri;
8. Manusia yang tidak memaksakan kehendaknya atas manusia lain;
9. Manusia yang menyadari bahwa setiap manusia memiliki krakteristik yang berbeda-beda;
10. Manusia yang yang bertanggungjawab serta penuh kasih saying terhadap manusia lain.

Pendidikan dalam Islam juga harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan untuk ber-Tuhan, kebutuhan akan makna hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman dan mencapai kebahagian.[5] Dan pendidikian yang sesuai dengan tujuan ini adalah pendidikan yang berkarakter humanis, yaitu pola pendidikan yang bertujuan memanusiakan manusia, sesuai dengan perannya dimuka bumi sebagai hamba dan wakil Allah Swt.

Di sinilah pendidikan Islam sebagai proyeksi kemanusiaan (*humanisasi*) memiliki peran yang signifikan. Melalui pendekatan humanistik ini maka pendidikan benar-benar sebagai upaya bantuan bagi anak untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Betapa penting konsep humanisme untuk diterapkan dalam dunia pendidikan ini tergambarkan dengan jelas dalam firman Allah Swt., yang artinya:

> *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa*

[5] Kebahagiaan adalah kepuasan-kepuasan emosi yang timbul dalam pergaulan dengan sesama manusia, dengan alam dan dengan Sang Pencipta. Pengalaman pribadi seseorang dalam menerima penghargaan, pujian, perlindungan akan menimbulkan rasa percaya diri dan rasa aman dalam kehidupan.

mengerjakan haji, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Q.S. al-Baqarah [2]: 197).

Titik tekan ayat di atas adalah suatu ajaran *misbehavior*; ajaran dasar tentang kedamaian pada semua makhluk. Ini artinya, Islam adalah *universal religion of peace*; Agama yang sangat menekankan kedamaian pada seluruh alam;[6] Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kaitan ini, Abdur Rahman Assegaf, dkk dalam ringkasan laporan hasil penelitian tentang "Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan", mengemukakan beberapa prinsip tentang manusia yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang lebih humanis, di antaranya:

1. Manusia adalah makhluk termulia yang melebihi makhluk-makhluk lain seperti malaikat, jin, setan, dan hewan. Karena itu, dalam proses pendidikan, para guru lebih mendahulukan strategi pembelajaran yang memanusiakan manusia daripada yang bersifat pemaksaan;
2. Manusia memiliki kemampuan berfikir dan merenung. Ia dapat menjadikan alam sekitarnya sebagai objek renungan, pengamatan, dan arena tempat menimbulkan perubahan yang diingini;
3. Manusia adalah makhluk yang mampu melakukan *self-reflection*, ia mampu keluar dari dirinya dan menengok ke belakang, kemudian mengadakan penelitian dan perenungan;

[6] Lihat, Abdurrahman Mas'ud, "Agama dan Perilaku Politisi Dalam Proses Pilkada: Dari Kesalihan Pribadi Ke Kesalihan Sosial" dalam Satoto, *et.al., Pilkada di Era Otonomi; Berlayar Sambil Menambal Lubang di Kapal,* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hal. 54.

4. Adanya perbedaan perseorangan, yakni bahwa masing-masing manusia memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya, baik lahir maupun batin;
5. Menelaah manusia hanya pada satu sisi, akan membawa pada stagnasi pemikiran tentang manusia, sekaligus menjadikannya objek yang statis;
6. Manusia dalam kehidupannya dipengaruhi dan bersosialisasi dengan faktor-faktor bawaan dan alam lingkungan, terutama lingkungan sosial;
7. Manusia memerlukan sosialisasi di antara mereka. Hubungan antar manusia didasari oleh hubungan kekhalifahan, kebaikan, dan *egaliter*. Manusia lain dipandang sebagai pribadi yang harus dipersilahkan mengembangkan dirinya;
8. Manusia dalam kebebasannya mengolah spiritualitasnya untuk dapat menyadari eksistensi Tuhan. Menyadari eksistensi Tuhan akan melahirkan tanggung jawab kepada Sang Ilahi. Pendidikan bukan hanya memberikan keleluasaan terhadap pengabdian spiritual, melainkan yang lebih penting lagi harus memungkinkan terselesaikannya berbagai peristiwa tragis kemanusiaan seperti penindasan, pembodohan, teror, radikalisme, keterbelakangan, dan permasalahan lingkungan.[7]

Atas dasar itu, maka pengembangan pendidikan dalam Islam, haruslah memperhatikan aspek potensi dasar manusia yang ideal, dan menyediakan serta menciptakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, baik aspek spritual, intelektual, imaginatif, fisikal, ilmiah, linguistik, baik secara individual maupun secara kolektif serta dapat memotivasi semua aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan manusia. Karenan-

[7] Abd. Rachman Assegaf, dkk, *Ringkasan Laporan Hasil Penelitian*; “Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan”, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 2002.

ya pendidikan dalam Islam tidak boleh hanya menekankan pada kehebatan dan perkembangan intelektulitas (IQ) semata, tetapi disamping perkembangan intelektualitas, pendidikan juga harus mampu memfasilitasi perkembangan kecerdasan emosi (EQ), kecerdasan spiritual (SQ), serta memberikan pembinaan hati nurani, jati diri, rasa tanggung jawab, sikap egaliter dan kepekaan normative yang menyangkut makna nilai dan tata nilai. Hal ini tidak terlepas dari sasaran utama dari pendidikan, yakni pengembangan semua potensi yang dimiliki manusia. Dengan pengembangan potensi-potensi tersebut, diharapkan manusia dapat tumbuh dan berkembang secara utuh, harmonis, integratif sesuai dengan nilai-nilai dan hakekat manusia (humanisasi).

Pendidikan dalam Islam harus meletakkan kebebasan manusia sebagai dasar pijakan operasional sekaligus sebagai tujuan dari pendidikan itu sendiri.[8] Karena pada hakikatnya pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia dalam rangka mempertahankan hidup, dalam hidup dan penghidupan manusia yang mengemban tugas sebagai *abd. Allah* dan *Khalifah Allah* di muka bumi.

Di era global ini, aktualisasi dan implementasi humanisme dalam pendidikan dan khususnya pendidikan Islam merupakan tuntutan dan bahkan suatu keharusan. Aktualisasi merupakan sebuah upaya perwujudan dari proses pengejawantahan diri dalam dunia pendidikan Islam. Dengan mengaktualkan sisi-sisi kemanusiaan diharapkan akan menjadi *real* dalam dunia pendidikan Islam untuk kebutuhan hidup sekarang,[9] dan masa yang akan datang. Menurut Abdurrahman Mas'ud, upaya aktualisasi humanisme dalam dunia pendidikan (Islam) ini setidaknya dilatar

---

[8] Ahmad Warid Khan, *Membebaskan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Istawa, 2002), hal. I

[9] Sodiq A. Kuntoro, "Pengembangan Ilmu Pendidikan", *makalah.* disampaikan dalam Seminar Pengembangan Ilmu Pendidikan, di Gedung Serbaguna FIP Universitas Negeri Yogyakarta, (5 April 2008).

belakangi oleh hal-hal berikut:

1. Keberagaman yang cenderung menekankan hubungan vertical dan kesamarakatan ritual;
2. Kesalehan sosial yang agaknya masih jauh dari orientasi masyarakat kita;
3. Potensi peserta didik belum dikembangkan secara proporsional;
4. Pendidikan belum berorientasi pada pengembangan sumberdaya manusia atau belum *individual oriented;* dan,
5. Kemandirian anak didik dan tanggung jawab (*responsibility*) masih jauh dalam capaian dunia pendidikan.[10]

Namun sayangnya, gagasan pendidikan humanistik dalam dunia pendidikan Islam hingga kini kurang mendapatkan perhatian yang serius. Tendensinya adalah pendidikan Islam lebih berorientasi pada konsep '*abdullah* daripada *khalifatullah* dan *hablum minallah* daripada *hablum minannas*. Ketidakseimbangan antara konsep *hablum minallah* dan *hablum minannas* ini telah mengakibatkan diabaiakanya rumusan *khalifatullah* dalam rumusan pendidikan.[11] Orientasi yang timpang ini kemudian melahirkan persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke *the tradition of learning*.[12]

Terlepas dari berbagai permasalahan besar yang sedang dihadapi dunia pendidikan Islam, dalam era global ini humanisasi pendidikan sudah seharusnya diaplikasikan dalam suatu bangsa termasuk di Indonesia, karena ia mempunyai potensi besar untuk keberhasilan pendidikan sebagai bagian dari kehidupan bangsa.

[10] Penjelasan selengkapnya terkait dengan latar belakang pentingnya implementasi humanisme dalam pendidikan Islam. Baca: Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format.*, hal.144-154.

[11] Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas,* hal. 15.

[12] *Ibid.*, hal. 15.

Tanpa hal tersebut, tidak mungkin sebuah bangsa akan mencapai cita-citanya untuk berkembang dan maju sesuai dengan keinginan bersama.

Dengan pendidikan yang memanusiakan (*humanistik*), maka akan tercipta pola pendidikan berbasis pada pembelajaran bukan pengajaran. Sehingga pribadi manusia yang kompleks dan unik, termasuk anak didik akan diperhatikan tidak semata-mata melihat modul pelajaran dan sangat tekstual. Selain itu, pendidikan yang humanistik juga diyakini mampu menyiapkan dan membentuk generasi bangsa yang cerdas nalar, cerdas emosional dan cerdas spiritual, bukan menciptakan manusia yang picik, kerdil, dan pasif, yang tidak mampu mengatasi berbagai persoalan hidup yang sedang dihadapinya.

B. Paradigma Pendidikan Islam Humanistik

Manusia adalah aktor utama dalam proses pendidikan, karenanya system pendidikan benar-benar dituntut untuk menyelenggarakan praktik pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yakni pendidikan yang menekankan pengembangan potensi manusia supaya mampu memerankan fungsi kemanusiaanya sebagai *'abdi* dan *khalifah* Allah, serta membantu anak didik dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya secara utuh, sehingga menjadi manusia mandiri yang kreatif, sadar akan hakikat dirinya dan kehadiran Tuhan dalam jiwanya. Pola pendidikan seperti inilah yang sering disebut sebagai pendidikan yang humanistik.

Dalam pandangan Abdurahman Mas'ud, humanisme dalam pendidikan adalah proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk sosial (berkemanusiaan) dan sebagai makhluk *religious* (berketuhanan), serta individu yang

diberi kesempatan oleh Allah untuk mengembangkan potensi-potensinya.[13] Sementara, Baharudin dan Muh. Makin mengatakan, pendidikan berparadigma humanistik merupakan praktik pendidikan yang memandang manusia sebagai sautu kesatuan yang integralistik, yakni pendidikan yang memandang manusia sebagia manusia, mahluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrahnya tertentu untuk dikembangkan secara maksimal.[14] Dan menurut Mukhtar, pendidikan humanis lebih memandang manusia sebagai "manusia", yaitu makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah atau potensi tertentu. Di sini manusia digambarkan sebagai mahluk yang optimistic dan penuh harapan.[15]

Di sini dapat dipahami jika pendidikan berparadigma humanistik merupakan praktik pendidikan yang memandang manusia sebagai manusia, makhluk terbaik ciptaan Tuhan yang memiliki fitrah-fitrah tertentu yang harus dikembangkan secara optimal, sehingga peserta didik mampu memerankan fungsi kemanusiaanya sebagai hamba sekaligus duta Allah di alam semesta dengan baik dan sesuai kehendak sang Pencipta. Pendidikan humanistik dapat pula dikatakan sebagai pola pendidikan yang menfokuskan pada peran peserta didik, yakni pola pendidikan yang menghargai keragaman karakteristik peserta didik dan berupaya untuk mengembangkan setiap potensi peserta didik secara optimal, sehingga mereka memiliki kecakapan hidup untuk dapat hidup selaras dengan kondisi pribadi dan lingkungannya.

Pendidikan humanistik merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya. Model ini sangat menghormati harkat dan martabat manusia (peserta didik), termasuk apa yang

[13] *Ibid.*,hal.135
[14] Baharudin dan Moh Makin, *Pendidikan,* hal., hal.23
[15] Mukhtar, *Desain Pembelajaran PAI*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2005), hal. 82

ada dalam diri peserta didik. Pendidikan humanistik memberi kemerdekaan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sendiri secara penuh. Karena itulah faktor paling penting dalam pendidikan humanistik adalah upaya memunculkan dan menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia didik yang sedang mengalami pertumbuhan dan pembentukan jati diri, agar mereka dapat mengenal, memahami dan mengakui secara realistis kenyataan dirinya sebagai mahluk unik yang multidimensional.

Paradigma pendidikan humanis menekankan bahwa pertama dan yang utama untuk diperhatikan adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Relasi ini berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah pendidikan jika dilandasi oleh cinta kasih antar mereka. Sebab pribadi-pribadi hanya akan dapat berkembang secara optimal dan tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta (*unconditional love*), adanya saling pengertian (*understanding*), serta relasi pribadi yang efektif (*personal relationship*). Dengan pola seperti ini diharapkan anak didik dapat memahami hakikat dan potensi dirinya, serta mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif.

Orientasi utama dari pendidikan humanistik adalah untuk memanusiakan manusia, yakni membantu peserta didik untuk mengembangkan dan mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang unik, dan membantu mereka untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Di antara karakteristik kemanusiaan yang penting untuk ditumbuhkembangkan adalah; pengembangan nilai-nilai kemanusiaan; penumbuhan kesadaran diri dalam pemahaman terhadap orang lain; kepekaan perasaan dan emosi

yang manusiawi; dan keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pengajaran dan efisien dalam cara belajarnya. Karakteristik kemanusiaan tersebut secara prinsipil sesuai dengan pandangan Islam.[16] Selain itu, pendidikan humanistik juga ditujukan untuk;

1. Mengembangkan potensi anak didik, baik fisik, mental, maupun spiritual;
2. Membangkitkan kehausan akan ilmu pengetahuan dan senang (cinta) belajar;
3. Membekali anak-anak didik dengan kemampuan akademik, dan kemampuan lain yang diperlukan untuk pendidikan selanjutnya;
4. Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak didik yang meliputi moralitas, integritas, percaya diri, disiplin, dan kerjasama;
5. Mengembangkan kemantapan fisik dan ketahanan mental melalui yoga dan meditasi, olahraga dan bermain;
6. Mengembangkan rasa estetika dan penghargaan terhadap kebudayaan melalui drama, tari, musik dan senirupa;
7. Mendorong anak-anak agar menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggungjawab;
8. Meningkatkan kesadaran ekologi dalam makna yang paling luas, yaitu kesadaran akan saling terkaitnya segala sesuatu, dan mendorong rasa hormat dan peduli terhadap semua makhluk;
9. Meningkatkan pandangan universal, terbebas dari perbedaan agama, warna kulit, jenis kelamin;
10. Memberikan kesadaran akan pentingnya peranan guru dalam memberikan contoh.

---

[16] Baca, Asep Nurjaman, "*Praksis Pendidikan Nasional dalam Perspektif Filsafat Humanisme*", dalam *Jurnal Pendidikan* (FAI UNIGA, Juli 04 2008), hal.18

Pendidikan berparadigma humanis memberikan pendidikan kepada keseluruhan bagian yang membentuk anak didik, bukan hanya menghafalkan informasi dan menjejalkannya kepada intelek, atau melatih anak menjadi robot agar guru menjadi senang karena anak akan mengeluarkan jawaban-jawaban yang dikehendaki guru yang dikatakan sebagai "benar". Akan tetapi pendidikan harus mengembangkan semua lapisan kesadaran manusia dan secara berangsur-angsur mengarahkan individu menuju tujuan yang tidak terbatas.

Dalam pendidikan berparadigma humanistik setidaknya terdapat beberapa aspek dari kepribadian manusia yang menjadi sasaran utama untuk dikembangkan, yakni:

1. Badan jasmani; pengembangannya melalui latihan-latihan gerak badan yang ringan dan kasar, latihan yoga yang halus (yoga asanas), tarian, dan makanan sehat.
2. Kesadaran sadar; pengembangannya melalui kegiatan sensori-motorik termasuk latihan-latihan dalam kehidupan praktis, lingkungan yang mendukung, etika atau kegiatan pro-sosial.
3. Kesadaran bawah sadar; pengembangan intelek melalui kegiatan-kegiatan sensori-motor dan penggunaan permainan dan fantasi (*playway method*).
4. Kesadaran kreatif; pengembangan inisiatif sendiri dan ekspresi diri melalui seni yang kreatif, permainan fantasi dan drama.
5. Kesadaran intuitif; pengembangan kebijaksanaan yang halus dan cinta universal melalui kurikulum Lingkaran Kasih (*Circle of Love*) dan penggunaan cerita dan lagu-lagu yang memiliki nilai universal.

6. Kesadaran spiritual; pengembangannya melalui meditasi (*quiet-time*), cerita dan lagu-lagu spiritual, dan tarian yoga yang halus.

Dengan demikian, maka pendidikan humanistik sebenarnya merupakan pendidikan keseluruhan (*holistic education*), karena di dalam proses pendidikan tidak terdapat bagian kesadaran manusia yang terbaikan, dan tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak ditangani. Pendidikan *holistik* merupakan proses pembelajaran yang menuntut adanya aktivitas-aktivitas kelas yang berpusat pada pembelajar, bermakna, dan otentik. [17]

Dalam pendidikan humanistik peserta didik merupakan komponen yang harus dilibatkan secara aktif dan total. Aktif berarti peserta didik tidak hanya menjadi tempat menabung ilmu pengetahuan gurunya. Dan dilibatkan secara total artinya, peserta didik harus dianggap sebagai manusia dengan segala dimensi humanistiknya.

Peserta didik harus dipandang sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab mengembangkan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mereka harus ditempatkan dan diperlakukan sebagai manusia yang sama-sama memiliki kebebasan dan kemerdekaan, seperti halnya pendidik dan manusia lainnya. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan humanistik yang lebih

---

[17] Pembelajaran holistik menggunakan pengetahuan awal, pengalaman, dan minat peserta didik sebagai *sping board* dalam pembelajaran dan mendukung pengkonstruksian pengetahuan secara aktif. Pembelajaran holistik juga menyediakan makna dan tujuan belajar dan melibatkan para pebelajar dalam interaksi sosial untuk mengembangkan pengetahuan melalui aktivitas pemecahan masalah dan berpikir. Pembelajaran *holistik* menghendaki pergeseran peran pebelajar dari pengamat informasi secara pasif menjadi pebelajar aktif, pemecah masalah secara mandiri, pemikir kritis dan kreatif dalam menganalisis dan mengaplikasikan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari. Kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis dan kreatif merupakan hakikat tujuan pendidikan dan menjadi kebutuhan bagi peserta didik untuk menghadapi kehidupan di dunia nyata. Lihat, I Wayan Santyasa, "Model Problem Solving dan Reasoning sebagai Alternatif Pembelajaran Inovatif", *makalah,* disampaikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) V: dengan tema *"Menata Pendidikan Nasional yang Bermutu untuk Membangun Kualitas Kehidupan dan Peradaban Bangsa"* (Surabaya, 5-9 Oktober 2004), hal. 3

di orientasikan untuk memanusiakan manusia, yakni membantu anak didik untuk mengembangkan dan mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang unik, dan membantu mereka untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga tercipta iklim kemanusiaan yang lebih utuh (*conscientizacao*). Di sini tampak sekali nilai luhur pendidikan yaitu sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya, dengan dasar pendidikan adalah kasih sayang dan cinta kasih yang tulus.

Sedang terkait dengan hubungan antara pendidik dengan peserta didik berada dalam posisi *egaliter* yaitu belajar bersama (*learning together*) yang sama sekali tidak menimbulkan kontradiksi. Keduanya berinteraksi dalam memberikan informasi pengetahuan secara horizontal tanpa adanya perendahan martabat salah satunya. Di sini pendidik haruslah lebih berperan sebagai fasilitator dan partner dalam proses pendidikan, dalam rangka mencapai sebuah penyadaran diri anak didik sebagai manusia. Karena itulah seorang pendidik benar-benar dituntut mampu memberikan motivasi, dan menumbuhkan kesadaran anak didiknya mengenai makna belajar. Dengan kata lain, tugas utama pendidik adalah memfasilitasi pengalaman belajar anak didiknya, dan mendampingi mereka untuk memperoleh tujuan pembelajaran.

Dalam pendidikan yang humanistik, pendidik berperan untuk mendidik, menuntun dan memberikan suasana serta memfasilitasi dan memotivasi mereka supaya dapat berkembang sebagaimana mestinya. Sementara anak didik berperan sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri, dengan pola pendekatan *stundent center* (berpusat pada siswa). Hal ini sejalan dengan pemikiran tokoh Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tugas seorang guru (pendidik) adalah "*in ngarso sung*

tuladha", (di depan memberi teladan), "*ing madya mbangun karsa",* (di tengah membangun semangat) dan "*tut wuri handayani"* (di belakang memberi pengaruh).

Dengan demikian pola hubungan pendidik-peserta didik adalah, pendidik belajar dari peserta didik dan peserta didik belajar dari pendidik, pendidik menjadi rekan (patner) peserta didik yang melibatkan diri dan menumbuhkan daya pemikiran kritis-produktif-progresif peserta didiknya, keduanya saling memanusiakan. Baik pendidik maupun peserta didik sama-sama menjadi subjek yang belajar, subjek yang bertindak dan berpikir. Sehingga tidak ada lagi istilah yang satu mendominasi yang lain, atau pendidik menindas peserta didik dan sebaliknya. Akan tetapi, kedua belah pihak (pendidik-peserta didik) berada pada kondisi yang sama, saling berinteraksi dalam proses dialog, sehingga yang terjadi bukan lagi pendidik berbicara ***kepada*** peserta didik, atau peserta didik berbicara ***untuk*** pendidik, akan tetapi pendidik berbicara ***dengan*** peserta didik.

Dalam konteks pembelajaran, pendidikan berparadigma humanistik ini tidak hanya memperhatikan sisi intelektual, tetapi juga sisi fisik, perasaan, dan motivasi anak didik. Ini artinya pendidikan tidak hanya memperhatikan pada pengembangan sisi intelektual (*kognitif*) saja, akan tetapi juga sisi fisik (*psikomotorik*), perasaan, dan emosi (*afektif*) anak didik secara utuh dan seimbang. Sedangkan terkait dengan model pembelajaran yang humanis, berdasarkan beberapa literatur Abdur Rahman Assegaf, dkk, telah merumuskan beberapa model pembelajaran yang diyakininya berkarakter humanis, di antaranya; *Humanizing of the classroom; Active learning; Quantum learning; Quantum teaching; The accelerated learning.*[18] Selain beberapa model di atas, mod-

[18] Penjelasan terkait dengan model pembelajaran tersebut, baca Abd. Rachman Assegaf, dkk. "Ringkasan Laporan Hasil Penelitian*", Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

el-model pembelajaran seperti, *Open education*, *Cooperative learning*; *Independent learning*; *Student centered learning*.[19] Juga diyakini sebagai model pembelajaran yang humanis.

Pendidikan yang humanistik, diyakini akan dapat mengembalikan peran dan fungsi manusia yaitu mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk [*khairu ummah*]. Maka, manusia "yang manusiawi" yang dihasilkan oleh pendidikan humanistik diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia berpikir, berasa dan berkemauan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat mengganti sifat individualistik, egoistic dan egosentrik, dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat menghormati dan dihormati, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan, sifat menghargai hak-hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan dan sebagainya.

Lebih dari itu, pola pendidikan yang humanis juga disinyalir akan dapat membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang "berperikemanusiaan", dan akan menghasilkan pribadi-pribadi utuh, yakni:

1. Pribadi-pribadi yang tinggi secara intelektual, gemar beramal, anggun dalam bermoral sebagai perwujudan dari potensi kodrati yang dimilikinya;
2. Pribadi-pribadi yang memahami hakikat dirinya;
3. Pribadi-pribadi yang memahami tugas serta tanggung jawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah di alam semesta;
4. Pribadi-pribadi yang menghargai dirinya sendiri sebagai manusia;

[19] Penjelasan selengkapnya terkait dengan model pembelajaran tersebut, baca Ratna Syifa'a Rachmahana, "Psikologi Humanistik dan Aplikasinya", dalam *Jurnal Pendidikan Islam el-Tarbawi,* No. 1. Vol. I. (Jokjakarta: UII, 2008), hal. 107-114

5. Pribadi-pribadi yang menghargai manusia lain seperti halnya dia menghargai dirinya sendiri;
6. Pribadi-pribadi yang memahami dan bersedia melaksanakan kewajiban serta hak-haknya sebagai manusia;
7. Pribadi-pribadi yang mampu memanfaatkan seluruh potensi dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya; dan,
8. Pribadi-pribadi yang menyadari adanya kekuatan akhir yang mengatur seluruh hidup manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam yang humanistik adalah pola pendidikan dan pembelajaran yang setidaknya memiliki karakteristik berikut:

1. Pendidikan yang menghargai dan mengembangkan segenap potensi manusia secara utuh, baik dimensi *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik;*
2. Pendidikan yang mengembangkan semua aspek kecerdasan manusia (intelektual, emosional dan spiritual) secara utuh dan seimbang;
3. Pendidikan yang didalamnya terdapat interaksi antara siswa dan guru yang tulus, ikhlas, saling percaya dan saling memahami satu dengan yang lain;
4. Pendidikan yang didalamnya penuh dengan penghormatan dan penghargaan, jauh dari tindak kekerasan, penindasan, serta pelecehan harkat dan martabat manusia;
5. Pendidikan yang menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan diri peserta didik secara utuh, sehingga mereka menjadi pribadi dewasa yang matang dan mapan, mampu menghadapi berbagai masalah dan konflik dalam kehidupan sehari-hari, dengan arif dan bijaksana;

6. Pendidikan yang didalamnya terdapat proses pembelajaran yang mendorong terjadinya interaksi dalam kelompok, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi pengalaman, mengungkapkan ide-ide kreatif, kebutuhan, perasaannya sendiri sekaligus belajar memahami orang;
7. Pendidikan yang mengembangkan metode pembelajaran yang dapat menggerakkan setiap siswa untuk menyadari diri, mengubah perilaku, dan belajar dalam aktivitas kelompok melalui permainan, bermain peran dan metode belajar aktif lainnya;
8. Pendidikan yang didalamnya terdapat pendidik yang peduli, penuh perhatian, menerima siswa apa adanya, dan memiliki pandangan positif terhadap siswa sesuai dengan fitrah kemanusiannya;
9. Pendidikan yang mengembangkan sistem penilaian yang memungkinkan keterlibatan siswa, misalnya siswa menilai kemajuan yang telah dicapai sendiri melalui evaluasi diri.
10. Pendidikan yang lebih mengutamakan proses daripada hasil, dan lebih mendahulukan *reward* (pemberian hadiah) daripada *punishment* (pemberian hukuman).

BAB 7
FORMAT PENDIDIKAN ISLAM DEMOKRATIS DAN HUMANISTIK

A. Urgensi Pendidikan Demokratis dan Humanistik

Pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mengandung unsur-unsur pengajaran, latihan, bimbingan dan pimpinan dengan tumpuan khas kepada pemindahan berbagai ilmu (*transfer of knowledge*), nilai agama, budaya serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu kepada individu yang memerlukan pendidikan yang akan menjadi penolong dalam menjalani kehidupan dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia.

Secara empiris, pendidikan dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar. Namun pada tataran implementasinya hampir tidak disadari jika trend pendidikan dan pembelajaran yang berkembang pada dekade terakhir ini adalah belajar untuk belajar. Bukan lagi belajar untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi yang jauh makin kompleks ke depan. Bahkan sekolah sebagai ujung tombak pendidikan secara sengaja ataupun tidak, selama ini telah menanamkan sikap yang berlebihan pada diri siswa bahwa pentingnya belajar adalah untuk "menghadapi ujian". Ujian merupakan target dan derajat tertinggi yang harus dikuasai dan ditempuh

dengan segala cara.[1] Akibatnya makna dan hakikat belajar menjadi semakin sempit dan dangkal, "hanya untuk menghadapi ujian". Sekolah telah melupakan betapa pentingnya memperhatikan dan memberikan penghargaan kepada para siswa dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing individu secara optimal.[2]

Fakta juga menunjukan jika pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah selama ini kurang memberikan peluang bagi peserta didik untuk berimajinasi dan berkreasi menunjukkan eksistensinya dengan perspektif diri mereka sendiri. Praktik pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung masih saja memperlakukan peserta didik tidak lebih sebagai pelayan dengan menempatkan posisi pendidik sebagai tuannya. Peserta didik masih menjadi objek pendidikan. Mereka diposisikan sebagai orang yang tertindas, orang yang tidak tahu apa-apa, dan orang yang harus dikasihani, karenanya harus dijejali dan disuapi bahkan dilakukan indoktrinasi-indoktrinasi.

Kondisi ini diperparah lagi dengan proses pembelajaran yang masih menekakan pada "hafalan", tanpa pengertian yang memadai, dan taat kepada komando. Budaya bertanya, berpikir kritis-praktis merupakan suatu yang tabu. Siswa tidak dididik, tetapi di-drill, dilatih, ditatar, dibekuk agar menjadi penurut, tidak jauh berbeda dari pelatihan binatang-binatang "pintar dan terampil" dalam sirkus. Jika ia diajari sesuatu, maka sesuatu itu diajarkan tanpa disesuaikan dengan konteks sosial-budayanya.

---

[1] Banyak cara yang dilakukan sekolah dalam menghadapi ujian, baik cara yang positif semisal dengan memberikan tambahan pelajaran secara intensif. Maupun cara negatif, seperti dengan memberikan bocoran soal, kunci jawaban dan lain sebagainya, fenomena ini terbukti dengan terungkap beberapa kasus kecurangan di beberapa lembaga pendidikan.

[2] Kondisi semacam ini dapat disaksikan di hampir semua sekolah, baik Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta yang begitu sibuknya untuk menghadapi UN hingga melupakan makna dan hakikat dari pendidikan itu. Bahkan sebagian diantaranya mengesampingkan (dianggap tidak penting), mata pelajaran yang tidak di-UN-kan seperti, Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Ketrampilan, dan sebagainya.

Suasana pembelajaran yang "salah urus" semacam itu, tegas Rama Mangun, telah membikin cakrawala berpikir peserta didik menyempit dan mengarah kepada sikap-sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun/perompak/penggusur yang menghambat kemajuan bangsa. Maka timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak dan bertopeng seolah-olah semakin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan pun merajalela, kejujuran dan kewajaran dikalahkan, keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang, banyak orang yang bicara tentang moral tapi itu hanya dalam "retorika" tidak pernah terimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung nyaris tak pernah berupaya serius dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi kepada para peserta didik. Bahkan, yang terjadi adalah sebuah proses pembusukan nilai-nilai demokrasi di mana para pelajar, mulai dari tingkat Dasar, menengah, bahkan Perguruan Tinggi telah dibiasakan dan dikondisikan untuk menjadi "anak Mami" yang manis, manutan, dan ditabukan untuk berbeda pendapat.

Ruang belajar pun telah berubah fungsi menjadi tembok pemasung yang membelenggu kebebasan berpikir, berkreasi, bernalar, berinisiatif dan berimajinasi. Disisi lain, beratnya beban kurikulum yang harus dituntaskan juga telah membikin proses belajar mengajar kehilangan ruang dan waktu untuk berdiskusi, berdialog, berdebat, dan bercurah pikir, guru menjadi satu-satunya sumber belajar yang paling berkuasa dan merasa paling hebat.

Lebih dari itu, proses pendidikan dan pembelajaran juga belum diarahkan untuk memanusiakan manusia secara "utuh" dan "paripurna", tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersi-

fat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti luhur. Hal ini dapat dilihat dari orientasi pendidikan yang lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran logis, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, emosi, dan spiritual. Akibatnya apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi dan nurani menjadi nihil. Mereka menjadi "robot-robot" zaman yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistis, dan mau menang sendiri. Sehingga tidak berlebihan jika banyak kalangan yang menilai bahwa dunia pendidikan memiliki andil yang cukup besar dalam melahirkan manusia-manusia kerdil yang berkarakter oportunis, penjilat, hedonis, besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai.

Dalam pada itu, berbagai penyimpangan perilaku dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini juga semakin marak. Belum lama ini dunia pendidikan tercoreng oleh kasus kekerasan di IPDN, STIP, geng motor, dan tawuran antar pelajar dan mahasiswa. Sebelumnya, berbagai kasus kekerasan belum lepas dari ingatan kita, sebut saja kasus Unas dan Monas yang telah banyak menarik perhatian masyarakat. Dan terungkapnya Geng Nero di Pati Jawa Tengah, menambah deret panjang perilaku kekerasan dalam dunia pendidikan. Kasus parah lain, yang tampak sebagai indikator degradasi moral dalam pandangan umum adalah tawuran yang sering dilakukan di kalangan pelajar yang ternyata telah merambah di kalangan mahasiswa.

Di tingkat perguruan tinggi, fenomena kekerasan dari waktu ke waktu juga semakin marak. Brutalisme dan vandalisme sudah biasa dipertontonkan oleh para mahasiswa. Beberapa waktu lalu sebuah Telivisi Swasta mengabarkan sekelompok mahasiswa yang

merusak fasilitas kampus gara-gara mereka di-DO (*drop-out*) oleh pihak Universitas karena prestasi mereka yang jeblok dan melebihi waktu studi yang digariskan Universitas. Dalam atmosfer politik kampus sering pula mahasiswa bentrok gara-gara terlibat dukung-mendukung calon pimpinan Fakultas atau Universitas.

Kampus yang seharusnya menjadi lembaga terdepan untuk membentuk manusia unggul secara intelektual, kaya dalam amal serta anggun dalam moral dan kebijakan, ternyata sudah tercemar tindak kekerasan, brutalisme, vandalisme, dan tindakan tidak bermoral lainya yang mengebiri harkat dan martabat manusia.

Ironisnya lagi berbagai tindak kekerasan dan penyimpangan perilaku dalam dunia pendidikan ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh siswa dan mahasiswa, akan tetapi pendidik yang seharusnya menjadi model dan contoh terbaik bagi anak didiknya, juga melakukan tindakan yang tak jauh berbeda. Beberapa waktu yang lalu salah satu Stasiun Telivisi Nasional mengabarkan, seorang kepala sekolah yang memukuli siswa-siswi-nya dengan ikat pigang hanya karena mereka datang terlambat.

Sumber *Media Indonesia* juga mengungkapkan Video pemukulan yang dilakukan oleh seorang guru di SMPN Mojoagung 1 Jombang terhadap siswinya, disebutkan bahwa pelaku pemukulan adalah guru laki-laki berinisial YY. Korban pemukulan dalam video bertanggal 20 Desember itu adalah siswi kelas 3 sekolah itu yang berinisial RA. Dalam rekaman tersebut terlihat korban tengah berdiri di muka kelas saat rekannya yang lain mengikuti pelajaran YY. Tiba-tiba sang guru mendekati dan memukul RA. Adegan itu direkam teman korban dengan kamera video ponsel.

Tak lama berselang, dunia pendidikan dikejutkan lagi dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang Guru SMP di Muara

Enim, Sumatera Selatan kepada siswanya. Walaupun kali ini tidak berujung kepada kematian, tetapi kasus ini mendapat perhatian yang besar dari publik. Bagaimana tidak, dari tayangan yang muncul di televisi terlihat Guru itu *membanting* siswanya tanpa ampun.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak ini terus meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini dari 1.626 kasus pada tahun 2008 meningkat menjadi 1.891 kasus pada tahun 2009. Dari data 1.891 kasus pada 2009 tercatat sebanyak 891 kasus kekerasan terjadi di lingkungan sekolah.[3] Jenis kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak didik ini belum termasuk perlakuan menekan dan mengancam anak yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar, menjelang pelaksanaan ujian nasional atau ujian akhir sekolah berstandar nasional.

Berbagai fakta di atas, mengindikasikan bahwa pendidikan belum mempunyai peran signifikan dalam proses membangun kepribadian generasi bangsa yang berjiwa demokratis dan berwatak humanis. Pendidikan yang seharusnya menanamkan nilai-nilai kemanusian (humanisme) justru melunturkan makna humanisme itu sendiri. Pendidikan yang semestinya menanamkan sikap toleransi, kepedulian terhadap sesama, kesadaran tentang perbedaan (*pluralisme*), adanya kesamaan hak serta kewajiban, kebebasan berpendapat dan sebagainya, justru mengebiri makna kebebasan dan memasung kemerdekaan peserta didik. Akibat dari semua itu adalah apresiasi *output* pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, demokrasi, keluhuran budi dan hati nurani, menjadi nihil. Mereka menjadi "robot-robot" zaman yang telah

---

[3] Selengkpanya baca: Komisi Nasional Perlindungan Anak (*National Commission for Child Protection*), "Catatan Akhir Tahun 2009: Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat", dikutib dari www.komnaspa.or.id/accessed 12 Desember 2009.

kehilangan hati nurani dan perasaannya, cenderung bar-bar, vandalistik, egois, hedonis, dan materalitis yang akan melanggengkan *status quo.*

Tak berlebihan apabila banyak kalangan yang menilai jika pendidikan yang berlangsung selama ini masih jauh dari nilai-nilai demokratis dan humanisme. Bahkan dapat dikatakan jika pendidikan secara tidak disadari telah mengalami proses "*de-humanisasi*" dan *"de-demokratisasi"*. Dikatakan demikian karena pendidikan telah mengalami proses kemunduran dengan terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan (*humanisasi*) dan demokrasi yang dikandungnya, ini ditandai dengan munculnya berbagai macam kasus kekerasan yang merebak dalam dunia pendidikan, kasus pelecehan seksual terhadap peserta didik, praktik korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum penguasa adalah potret buram dari rendahnya produk pendidikan.

Terkikisnya nilai-nilai demokrasi dan humanisme dalam karakter pendidikan saat ini, juga ditunjukan dalam proses pembelajaran di kelas yang masih menempatkan guru sebagai seorang "penindas" yang memposisikan dirinya sebagai subjek pendidikan, dengan menganggap dirinya paling berkuasa dan paling mengetahui tentang pengetahuan. Sedang anak didik diposisikan sebagai objek pendidikan yang tidak mengetahui apa-apa, karenanya harus selalu siap untuk menerima transfer pengetahuan *(transfer of knowladge)* yang diberikan oleh gurunya, tanpa adanya upaya untuk mengembangkan kreativitas berpikir secara mandiri. Hal inilah yang sempat disinggung oleh Paulo Freire, sebagai pendidikan gaya bank *(banking education concept),* yaitu pendidikan yang hanya mengkomsumsi pengetahuan saja tanpa disertai sebuah usaha untuk menumbuhkan kebesaran rasa ingin tahu (*curiosity*) murid terhadap pengetahuan yang diperolehnya.

Lebih lanjut Paulo Freire menjelaskan, pendidikan gaya bank adalah pendidikan yang menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana para murid adalah celengannya dan guru adalah penabungnya. Sehingga yang terjadi bukanlah proses komunikasi tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataannya dan "mengisi" tabungan yang diterima, dihafal dan diulangi dengan patuh oleh para murid. Di sini ruang gerak yang disediakan bagi kegiatan para murid hanya terbatas menerima, mencatat dan menyimpannya. Dalam pendidikan model ini, walaupun mereka (para murid) mempunyai kesempatan untuk menjadi pengumpul dan pencatat barang-barang simpanan, pada akhirnya mereka sendirilah yang tersimpan, karena miskinnya daya cipta, daya ubah dan pengetahuan.[4]

Dalam konsep pendidikan gaya bank, pengetahuan adalah sebuah anugrah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya lebih berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan.[5] Artinya, pendidikan hanya dianggap sebagai upaya pemindahan ilmu dari otak yang satu (guru) ke otak yang lain (peserta didik). Sehingga aktivitas pendidikan hanya sekadar sebuah *mekanisme otomatik* dan lebih bersifat *formalistik* belaka.

Berdasar pada asumsi di atas maka perlu ada terobosan baru dalam dunia pendidikan, yakni perubahan dalam pendekatan pendidikan dan strategi pembelajaran yang dapat menjadi solusi bagi berbagai problem yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini. Dan salah satu tawaran strategis dalam tataran paradigmatik adalah dengan membangun, mengembangkan serta mengimplementasikan format pendidikan yang berkarakter demokratis dan berwawasan kemanusiaan (*humanis*).

---

[4] Lihat, Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas,* (Jakarta: LP3ES,1972), hal. 190.

[5] *Ibid*., hal. 51.

Nilai-nilai positif demokratis dan humanisme penting dimasukkan ke dalam karakter pendidikan, agar peserta didik mampu membangun empati dan simpati atas penderitaan orang lain, bertanggung jawab, menghargai adanya perbedaan (*pluralism*), menghormati orang lain, dan mengetahui serta memahami hakikat dirinya sebagai mahluk terbaik (*ahksana takwim*), yang berfungsi sebagai *abdi* dan *khalifah* Allah di alam semesta.

B. Format Pendidikan Demokratis dan Humanistik

Titik tolak praksis pendidikan bermula dari keyakinan, bahwa manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Dari sejak seorang bayi lahir pada hakikatnya ia telah memerlukan bantuan orang lain. Tanpa bantuan ibu atau orang dewasa lain yang mengasuhnya bayi itu tidak akan dapat memiliki kecakapan hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Dari perspektif filosofis, keyakinan itu mengisyaratkan adanya pusat perhatian yang utama dalam pendidikan, yakni manusia dengan segala potensi kemanusiaannya yang masih memerlukan proses pendidikan.

Pendidikan sebenarnya adalah bentuk pendidikan yang benar-benar mampu memfungsikan kesadaran manusia untuk bergerak membentuk pengetahuan yang lebih luas secara bebas. Pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik, tapi juga mentrasformasikan nilai-nilai ke dalam jiwa, kepribadiaan dan struktur kesadaran manusia didik itu. Pendidikan juga bukan sekadar proses kegiatan belajar mengajar "*an sich*", melainkan juga sebagai proses penyadaran untuk menjadikan manusia yang utuh. Seperti yang dikatakan Ahmad Ludjito, bahwa hakikat pendidikan adalah proses humanisasi, yang men-

gandung implikasi bahwa tanpa pendidikan, manusia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya.[6]

Atas dasar itu, maka dalam memperbincangkan suatu paradigma pendidikan termasuk pendidikan Islam seyogyanya berangkat dan berorientasi dari kerangka dasar pemikiran tentang manusia, sebab manusia merupakan aktor utama dalam proses pendidikan. Pencarian paradigma pendidikan Islam ini haruslah dimulai dari konsep manusia menurut Islam dan pandangan Islam terhadap Iptek, kemudian baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh.[7]

Pencarian paradigma dalam pendidikan Islam haruslah mengacu pada dua dimensi yakni, dimensi ketuhanan *theocentris* (*hablum minallah*) dan dimensi kemanusiaan *anthropocentris* (*hablum minannas*). Keseimbangan dalam dua hubungan ini akan berdampak positif terhadap posisi manusia dalam memerankan tugas kemanusiaannya. Bila tidak seimbang maka ia akan mengakibatkan kerusakan dan kehinaan bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt;

> "... *mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia*" (QS al-Imran (3): 112).

Paradigma pendidikan Islam harus mendudukan manusia dalam posisinya sebagai manusia seperti yang digambarkan Allah, yakni mahluk yang terbaik (*ahsana taqwim),* mahluk yang sempurna dan istimewa, hamba Allah yang mulia, yang berfungsi sebagai abd. Allah sekaligus pemimpin atau pengelola bumi (*khal-*

---

[6] Ahmad Ludjito, "Filsafat Nilai dalam Islam", dalam Thoha, Chabib, (*ed.*,), *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996}, hal. 21.

[7] Mastuhu, *Pemberdayakan Sistem Pendidikan Islam,* (Logos: Jakarta,1999), hal. 15.

ifah fil ardh) yang terlahirkan dalam keadaan fitrah dan menyukai kebajikan (kebenaran), serta makhluk yang di dalam dirinya tersimpan berbagai potensi hebat yang harus dikembangkan secara utuh dan maksimal, sehingga akan terbentuk manusia yang benar-benar "manusiawi", yakni manusia memahami tentang Tuhan-Nya, hakikat diri-nya, dan lingkungannya, (manusia ideal: ***insan kamil)***.

Suatu masyarakat yang religious, humanis dan demokratis tentunya memerlukan berbagai praksis pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang religious, humanis dan demokratis pula. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik dan sekurelistik baik didalam manajemen maupun didalam penyusunan kurikulum yang kering dari nilai-nilai moral dan spiritual (agama) harus diubah dan disesuaikan kepada tuntutan pendidikan yang religious, demokratis dan humanis. Demikian pula di dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, maka proses pendidikan harus pula mampu mengembangkan kemampuan untuk berkompetensi didalam kerja sama, mengembangkan sikap inovatif dan ingin selalu meningkatkan kualitas.

Paradigma pendidikan yang sesuai dan diyakini dapat mewujudkan cita-cita luhur di atas, adalah paradigm pendidikan yang demokratis dan humanistik, sebuah format pendidikan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrah kemanusiaan-nya; Pendidikan yang menghargai dan mengembangkan segenap potensi manusia baik dimensi *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik* secara utuh dan seimbang.

Pendidikan yang demokratis dan humanistik merupakan pola pendidikan yang memiliki komitmen tinggi terhadap keilmuan,

dan konsisten dengan prinsip belajar tuntas;[8] Pendidikan yang menghargai adanya perbedaan (*the right to be different*) antar pendidik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik; Pendidikan yang mengakui dan menghargai adanya kebebasan setiap individu untuk mengaktualisasikan diri, dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bersaing di dalam perwujudan diri-sendiri (*self realization*); dan adanya perbedaan dan keanekaragaman, serta persamaan hak (*equalitarianism*); Pendidikan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kemanusiaan, dan menitik beratkan pada tujuan untuk mengembangkan pada diri anak didik empati, toleransi, respek pada yang lain (*social trust)* di kalangan anak didik; Pendidikan yang memahami kebutuhan manusia untuk selalu bersikap maju, bersifat flexsibel dan adapatif terhadap perkembangan zaman; Pendidikan yang lebih mengutamakan proses daripada hasil, serta lebih mengutamakan *reward* (pemberian hadiah) daripada *punishment* (pemberian hukuman).

Untuk lebih mensistematisasikan bagaimana format pendidikan yang demokratis dan humanistik ini, dapat dilihat pada table di bawah ini:

---

[8] Pembelajaran tuntas adalah pola pembelajaran yang menggunakan prinsip *ketuntasan secara individual.* Dalam hal pemberian kebebasan belajar, serta untuk mengurangi kegagalan peserta didik dalam belajar, strategi belajar tuntas menganut pendekatan individual, dalam arti meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada sekelompok peserta didik (klasikal), tetapi mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan perorangan peserta didik sedemikiah rupa, sehingga dengan penerapan pembelajaran tuntas memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing peserta didik secara optimal. Dasar pemikiran dari belajar tuntas dengan pendekatan individual ialah adanya pengakuan terhadap perbedaan individual masing-masing peserta didik. lihat, Depdiknas. *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tuntas (Mastery-Learning)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2008).

Format Pendidikan Demokratis dan Humanistik

Aspek	Paradigma Pendidikan Islam Demokratis dan Humanistik
Perencanaan	*Top-dwon* yang diimbangi dengan *buttom-up*
Prinsip	prinsip-prinsip kemanusiaan
Landasan	al-Qur'an, As Sunah dan Ijtihâd
Pelaksanaan	• didasarkan atas profesionalitas; • memahami kebutuhan manusia untuk selalu bersikap maju; • flexsibel, dan adapatif terhadap perkembangan zaman.
Target	tercapainya tujuan *hablum minallah*, *hablum minas*, *hablum minal'alam* (*insan kamil).*
Pemahaman terhadap tujuan dan target	• didasarkan atas kondisi sekolah; • konsisten dengan prinsip belajar tuntas; • semua memperoleh pelayanan yang proporsional; • semua harus berakhir dengan batas minimal pencapaian kompetensi sesuai angka yang ditetapkan bersama dalam koridor *master learning*.
Umpan balik orang tua peserta didik	diperlukan secara teratur dan *continue*.
Orientasi	• membantu individu (peserta didik) untuk mengembangkan seluruh potensinya secara optimal; • mengembangkan segenap aspek manusia secara utuh dan seimbang, baik aspek *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik;* • mengembangkan semua potensi kecerdasan manusia (intelektual, emosional dan spiritual) secara seimbang.

Tujuan	• membentuk pribadi *khalifah, 'abdulllah*, *Insan saleh* dan *masyarakat saleh* yang mengikuti petunjuk agama Islam; • mengembangkan *fitrah* manusia berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (*insan kamil*); • memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar kemanusiaan; • merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah di dalam kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat; • membentuk manusia unggul secara intelektual, kaya dalam amal, anggun dalam moral dan kebijakan, yang bertumpu pada keimanan; • mewujudkan manusia yang mampu beribadah kepada Allah, baik dengan pikiran, amal, maupun perasaan; • proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, otonomi kepribadian, serta sikap yang sehat (positif) terhadap diri sendiri, dan orang lain, menuju terciptanya manusia ideal (*insan kamil*).
Persepsi terhadap Input	• peserta didik bukan merupakan *raw input* melainkan klien yang memerlukan pelayanan jasa sekolah; • peserta didik adalah subjek pendidikan bukan objek pendidikan.

Kurikulum	• tujuan dari pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis; • kurikulum menekankan pada integrasi intelektual, emosional, spritual dan tindakan nyata (*kognitif, afektif* dan *psikomotorik);* • kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman dan pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik; • kurikulum harus dapat membantu peserta didik menghadapi masalah kehidupan sehari-hari dengan arif dan bijksana; • kurikulum harus memperhatikan hakikat dan kebutuhan siswa, masyarakat dan masalah pokok yang digumuli peserta didik; • kurikulum harus menyajikan materi yang memungkinkan bagi tumbuhnya sikap kritis bagi peserta didik; • proses pendidikan dan pembelajaran menuntut adanya hubungan emosional yang baik antara pihak pengajar (guru) dan peserta didik (murid).
Evaluasi	• dilaksanakan sepanjang waktu dengan menekankan kebutuhan sekolah; • mengembangkan sistem evaluasi yang memungkinkan keterlibatan peserta didik; • lebih mengutamakan proses dari pada hasil; • evaluasi terjadi dalam dua arah yakni pendidik mengevaluasi peserta didik dan sebaliknya peserta didik mengevaluasi pendidik: • evaluasi bersifat adil dan objektif.
Kontrol sekolah	dilakukan oleh orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar melalui komite sekolah dan semua pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Pengambilan keputusan	rapat guru dan kepala sekolah, dengan melibatkan orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar (komite sekolah), melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat
Peran orang tua dan masyarakat	terlibat dalam seluruh proses pendidikan, kecuali menentukan nilai.
Metode pembelajaran	pengembangan metode pembelajaran yang mampu menggerakkan setiap siswa untuk menyadari diri, mengubah perilaku, aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan (*fun*).
Pendekatan pembelajaran	*Student Center* (berpusat pada peserta didik).
Proses Pembelajaran	• proses pembelajaran mendorong terjadinya proses interaksi dalam kelompok, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi pengalaman, mengungkapkan ide kreatif, kebutuhan, perasaannya sendiri sekaligus belajar memahami orang lain; • pembelajaran bersifat dialogis, kritis, dan komunikatif (adanya interaksi komunikatif dua arah); • pembelajaran didalamnya berkembang komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dengan peserta didik, sehingga terjadi interaksi yang sehat dan bertanggung jawab; • pembelajaran yang memberikan kesempatan, bahkan mendorong setiap anak didik untuk belajar hidup bersama dan saling menghargai melalui kebiasaan hidup berdampingan; • pembelajaran yang mendorong seoptimal mungkin berkembangnya potensi peserta didik sesuai dengan fitrah kemanusiaanya secara utuh.

Peran pendidik	*fasilitator*, *motivator*, *konselor* dan *dinamisator*.
Hubungan pendidik dengan peserta didik	• tulus, ikhlas, saling percaya dan saling memahami, serta saling menghargai satu dengan yang lain; • saling menghormati, dan jauh dari tindak kekerasan, penindasan, pelecehan harkat dan martabat manusia; • guru yang memiliki pandangan positif terhadap peserta didik sesuai dengan fitrah kemanusiannya; • menghargai adanya perbedaan (*the right to be different*) antar pendidik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik; • pendidik dan peserta didik saling berintegrasi saling mengisi, dan saling melengkapi satu sama lain; • hubungan kemitraan antara guru dengan siswa, guru bertindak sebagai pendamping belajar para siswanya dengan suasana belajar yang dialogis, partisipatif, demokratis, dan humanis; • prinsip relasi dan interaksi edukatif berpola demokratis, partisipatif, dialogis dan humanis.
Sistem insentif	• sistem prestasi; • mengutamakan *reward* (pemberian hadiah) daripada *punishment* (pemberian hukuman)

Sebagai sebuah kerangka berpikir (paradigm), format pendidikan Islam yang demokratis dan humanistik ini disamping memiliki banyak kelebihan juga terdapat beberapa kelemahan. Di antara kelebihan pendidikan Islam yang demokratis dan humanistik ini, adalah:

1. Format ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial;
2. Siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri;
3. Dapat membantu siswa menjadi manusia yang bebas, merdeka, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan dapat mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain, atau melanggar aturan, norma, disiplin atau etika yang berlaku;
4. Format ini dapat memfasilitasi pengembangan aspek *kognitif*, *afektif* dan *psikomotorik* anak didik secara seimbang.

Adapun kelemahan dari format pendidikan Islam yang demokratis dan humanistik, di antaranya adalah:

1. Format ini sulit untuk diterapkan secara praktis, karena dalam teori ini anak diberi kesempatan untuk berkembang tanpa terikat oleh aturan;
2. Paradigma ini akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat anak didik pada gurunya, karena dalam penerapan konsep ini guru seakan-akan seperti temannya sendiri di mana anak bebas mengkritik gurunya;
3. Penerapan konsep ini, dapat menyebabkan peserta didik yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar, dan siswa yang tidak aktif serta malas belajar akan merugikan diri sendiri.

Terlepas dari kelebihan dan kelemahan di atas, format pendidikan yang demokratis dan humanistik ini diyakini tepat untuk diterapkan dalam konteks pendidikan dalam era global ini, karena

format ini disinyalir akan dapat membawa perubahan lebih baik dalam praksis pendidikan dan pembelajaran, dapat meningkatkan kualitas *output* pendidikan, dan dapat menjadi salah satu solusi bagi berbagai problem yang sedang dihadapi dunia pendidikan saat ini.

Selain itu, format pendidikan yang demokratis dan humanistik juga berpotensi besar untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas nalar, cerdas emosional dan cerdas spiritual, berjiwa besar, aktif, kreatif, dan mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya dengan lebih arif dan bijaksana serta mampu memerankan fungsi kemanusiaanya, sebagai *abd* (hamba), dan sebagai *khalifah* (wakil) Tuhan di alam semesta. Pendeknya, format ini dapat dijadikan sebagai salah satu dari beberapa solusi strategis untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, yang selama ini dinilai kurang memuaskan.

Untuk mewujudkan pendidikan Islam demokratis dan humanistik ini, setidaknya diperlukan tenaga pendidik (guru) yang profesional, murid yang aktif dan partisipatif, orangtua yang selalu berdialog dengan guru dan anak didik, serta masyarakat peduli dan memiliki kontrol sosial terhadap proses pendidikan. Dalam konteks ini Y. Priyono dalam artikel yang dipublikasikan Kompas, Sabtu, 23 Juli 2005, mewarkan beberapa strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis dan humanis, yakni;

1. Hindari indoktrinasi;

   Biarkan siswa aktif dalam berbuat, bertanya, bersikap kritis terhadap apa yang dipelajarinya, dan mengungkapkan alternatif pandangannya yang berbeda dengan gurunya.

2. Hindari paham bahwa hanya ada satu nilai saja yang benar;

Guru tidak berpandangan bahwa apa yang disampaikannya adalah yang paling benar. Seharusnya yang dikembangkan adalah memberi ruang yang cukup lapang akan hadirnya gagasan alternatif dan kreatif terhadap penyelesaian suatu persoalan.

3. Beri anak didik kebebasan untuk berbicara;

   Siswa mesti dibiasakan untuk berbicara. Siswa berbicara dalam konteks penyampaian gagasan serta proses membangun dan meneguhkan sebuah pengertian harus diberi ruang yang seluas-luasnya.

4. Berilah ”peluang” bahwa siswa boleh berbuat salah;

   Kesalahan merupakan bagian penting dalam pemahaman. Guru dan siswa menelusuri bersama di mana telah terjadi kesalahan dan membantu meletakkannya dalam kerangka yang benar.

5. Kembangkan cara berpikir ilmiah dan berpikir kritis;

   Dengan ini siswa diarahkan untuk tidak selalu mengiyakan apa yang dia terima, melainkan dapat memahami sebuah pengertian dan memahami mengapa harus demikian.

6. Berilah kesempatan yang luas kepada siswa untuk bermimpi dan berfantasi;

   Kesempatan bermimpi dan berfantasi bagi siswa menjadikan dirinya memiliki waktu untuk dapat berandai-andai tentang sesuatu yang menjadi keinginannya. Dengan cara demikian, siswa dapat berandai-andai mengenai berbagai kemungkinan cara dan peluang untuk mencari inspirasi serta untuk mewujudkan rasa ingin tahunya. Hal demikian pada gilirannya menanti dan menantang siswa untuk menelusuri dan mewujudkannya dalam aktivitas yang sesungguhnya.

Selain beberapa hal di atas, untuk membangun pendidikan yang lebih demokratis dan humanistik, juga diperlukan sikap-sikap sebagai berikut:

1. Terimalah setiap anak apa adanya, lengkap dengan kekurangan dan kelebihannya;
2. Berilah anak pengalaman sukses sehingga mereka tumbuh dengan percaya diri;
3. Jangan memaksakan kehendak, karena tanpa dipaksa setiap individu akan bergerak untuk memenuhi kebutuhannya;
4. Ukuran keberhasilan tiap anak berbeda-beda, karena itu tugas pendidik adalah membantu anak sesuai dengan kemampuannya;
5. Berilah anak toleransi, dorongan semangat, penghargaan serta rasa persahabatan;
6. Berilah anak kebebasan yang disertai rasa hormat dan tanggung jawab;
7. Dahulukan pemberian hadiah daripada hukuman, hal ini akan dapat memicu peserta didik untuk lebih bersemangat dalam belajar.

Mewujudkan pendidikan yang demokratis dan humanistik memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai kendala yang tidak mendukung terbentuknya pendidikan yang demokratis dan humanistik tidak mudah disingkirkan begitu saja. Meski demikian, membangun, memperkenalkan dan menerapkan pendidikan dan khususnya pendidikan Islam yang demokratis dan humanistik adalah tuntutan sejarah yang harus dilakukan secara integral, sistematis dan didukung oleh semua pihak. Apalagi mengingat pendidikan adalah sebuah investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Ini artinya, format pendidikan Islam yang

demokratis dan humanistik sudah saatnya untuk dikembangkan dan diaplikasikan dalam suatu bangsa termasuk Indonesia, karena pola ini mempunyai potensi besar untuk keberhasilan pendidikan sebagai bagian dari kehidupan bangsa.

BAB 8
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN HUMANISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan sebagai salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia haruslah bersifat dinamis dan selalu berkembang. Perkembangan dalam dunia pendidikan adalah hal yang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan umat manusia. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan yang mencakup pada semua tingkat dan aspek, baik pada sisi konsepnya, kurikulumnya, kualitas sumberdaya insaninya, metode pembelajaran-nya, lembaga-lembaga-nya, organisasi-nya, sistem evaluasi-nya, penerapan *reward* dan *punishment*-nya. Penting untuk terus diupayakan agar pendidikan dapat relevan dengan perubahan social budaya masyarakat yang terus berkembang dan sesuai karakter masayarakat global yang mendambakan adanya transparansi/keterbukaan, perlakuan yang sama/adil bagi setiap manusia (demokrasi), dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia. Untuk ini, maka penting kiranya memasukkan nilai-nilai positif demokrasi dan humanisme dalam sistem pendidikan. Dengan harapan proses pendidikan dan pembelajaran berlangsung lebih demokratis dan humanis sehingga akan melahirkan generasi

bangsa yang sadar akan eksistensi dirinya sebagai mahluk religius sekaligus mahluk sosial.

A. Kurikulum yang Demokratis dan Humanistik

Secara etimologis kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*currir*" yang artinya pelari dan "*curure*" yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olah raga yang berarti "*a little racecoreus*" (suatu jarak yang harus di tempuh dalam pertandingan olah raga).[1] Dalam konsepsi pendidikan Islam kurikulum dikenal dengan istilah "*manhaj*" yang berarti sebuah jalan terang yang dilalui pendidik atau guru dengan orang-orang yang di didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka.[2]

Dalam pengertian yang lebih luas kurikulum merupakan segala kegiatan yang dirancang oleh lembaga pendidikan, yang disajikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut pengertian ini, segala pengalaman yang dialami peserta didik adalah kurikulum, karena kurikulum tidak terbatas hanya pada pengalaman, ruang dan tempat tertentu tetapi pada setiap pelajaran yang berlangsung. Ini sejalan dengan pendapat Harold B. Alberty dan Elsie J. Alberty, yang mengatakan, kurikulum adalah semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan peraturan-peraturan.[3]

Dalam konteks pendidikan Nasional, kurikulum didifinisikan sebagai rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipela-

---

[1] Abd. Azis, *Filsafat Pendidikan Islam; Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*, (Yokyakarta: Teras, 2009), hal. 155.

[2] Oemar Muhamad al Taomy al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 478

[3] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 52.

jari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu. Dengan lebih spesifik rumusan ini mengandung pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Kurikulum merupakan suatu rencana/perencanaan;
2. Kurikulum merupakan pengaturan yang sistematis dan terstruktur;
3. Kurikulum memuat isi dan bahan pelajaran bidang pengajaran tertentu;
4. Kurikulum mengandung cara, metode dan strategi pengajaran;
5. Kurikulum merupakan pedoman kegiatan belajar mengajar;
6. Kurikulum, dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan;
7. Kurikulum merupakan suatu alat pendidikan.

Dengan demikian dapat pula dikatakan jika kurikulum merupakan suatu patokan rencana-rencana dalam penyelenggaran pembelajaran yang memiliki tujuan dan cita-cita tertentu yang berlandaskan pada pengalaman-pengalaman pembelajaran sebelumnya, bersifat *flexible* dan didesain oleh sekolah agar peserta didik memiliki representasi fungsi langsung di masyarakat.

Dalam setiap satuan pendidikan kurikulum adalah komponen yang sangat penting dan strategis, karena didalamnya berisikan tentang rumusan tujuan yang harus dicapai,[4] materi pelaja-

[4] Tujuan pendidikan adalah sesuatu yang akan dicapai oleh peserta didik melalui proses pendidikan itu. Tujuan merupakan masalah sentral dalam pendidikan, tanpa tujuan maka semua usaha pendidikan yang dilakukan akan berakhir dengan kegagalan atau mungkin tersesat dan salah langkah. Lihat dalam Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Bandung: Rosda, 2000), hal.110.

ran yang harus dipelajari,[5] cara atau metode untuk mempelajari,[6] serta bagaimana cara untuk mengetahui pencapaiannya atau evaluasi.[7] Keempat komponen kurikulum tersebut harus tersusun dan mengacu pada sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam pembentukannya. Sumber-sumber kekuatan tersebut dikatakan sebagai asas-asas pembentukan kurikulum.[8]

Kurikulum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan komponen pendidikan lainnya. Tanpa kurikulum suatu sistem pendidikan tidak dapat dikatakan sebagai sistem pendidikan yang sempurna. Sebab kurikulum dalam sistem pendidikan merupakan ruh (spirit) yang menjadi gerak dinamik suatu sistem pendidikan, juga sebagai sebuah idea vital yang menjadi landasan bagi terselenggaranya pendidikan yang baik, sekaligus sebagai tolak ukur bagi kualitas penyelenggaraan pendidikan dan sebagai kerangka acuan dalam memberikan arah terhadap pencapaian tujuan pendidikan dari tingkat nasional sampai pada tingkat interaksi di kelas. Karenanya berhasil atau tidaknya suatu pendidikan, mampu tidaknya seorang anak didik dan pendidik dalam menyer-

---

[5] Materi atau bahan pendidikan bisa berupa kitab kuning (seperti di pesantren-pesantren salaf), buku-buku, jurnal-jurnal, laporan-laporan hasil penelitian dan apa saja yang dapat digunakan sebagai konteks untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Materi pendidikan pada masa sekarang diatur dalam bentuk nama-nama mata pelajaran atau matakuliah sesuai dengan nomenklatur keilmuannya. Dari masing-masing mata pelajaran atau mata kuliah tersebut terdapat sekian banyak literatur yang berfungsi sebagai bahan atau sumber pembelajaran. Baca, Sukmadinata, *Pengembangan.,* hal.110.

[6] Metode pendidikan diperlukan untuk mengatur proses pembelajaran mulai dari persiapan sampai dengan melakukan evaluasi. Menurut Purwoto, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai; suatu cara mengajarkan topik tertentu agar proses dari pengajaran tersebut berhasil dengan baik. Baca Purwoto, *Strategi Pembelajaran Mengajar*, (Surakarta: UNS press, 2003), hal. 65.

[7] Evaluasi hasil belajar. Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan telah dicapai peserta didik. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum yang penting dalam pendidikan. Dalam pengertian terbatas evaluasi dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan.

[8] Asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam diantaranya adalah asas agama, asas falsafah, asas psikologis, dan asas sosial. Penjelasan tentang keempat asas pembentukan kurikulum tersebut, Baca Abd. Azis, *Filsafat Pendidikan Islam.,* hal. 161-162. Baca pula dalam Oemar Muhamad al Taomy al-Syaibani, *falsafah*.., hal.523.

ap dan memberikan pengajaran, dan sukses tidaknya suatu tujuan, sangat bergantung pada kurikulum yang diterapkan dalam satuan pendidikan tersebut. Bila kurikulumnya didesain dengan sistematis dan komprehensif serta integral dengan segala kebutuhan pengembangan dan pembelajaran anak didik untuk mempersiapkan diri mengahadapi kehidupannya, tentu hasil/output pendidikan pun akan mampu mewujudkan harapan. Tetapi jika tidak, kegagalan demi kegagalan akan terus menerus membayangi dunia pendidikan.

Dalam konfigurasi sistem pendidikan di Indonesia, seiring dengan perjalanan waktu telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam hal kurikulum ini.[9] Hingga saat ini dunia pendidikan di Indonesia sudah berkali-kali mengalami perubahan kurikulum, setidaknya sudah tujuh kali perubahan kurikulum yang tercatat dalam sejarah, yakni kurikulum 1962, 1968, 1975, 1984, 1994 dan 2004 yang berbasis kompetensi (KBK), kemudian diperbaharui dengan Kurikulum 2006 (KTSP), yang saat ini sedang diterapkan. Perubahan kurikulum sejak kurikulum yang pertama (kurikulum 1962) hingga kurikulum 2006 (KTSP), ternyata belum juga membawa dampak positif terhadap perkembangan mutu di dunia pendidikan, sehingga sampai saat inipun mutu pendidikan masih rendah.

Ditinjau dari kurikulum 1975, 1984, 1994 masih memfokuskan padatnya bahan ajar yang harus dikuasai oleh setiap anak didik, sehingga beban belajar siswa menjadi sangat berat. Kemudian diperbaharui dengan kurikulum tahun 2004 (KBK), dalam kurikulum ini meski sudah ada pengurangan bahan ajar, tetapi kesempatan dari peran orang tua juga masih belum berfungsi penuh terhadap proses pembelajaran di masing-masing

[9] Pengembangan dan perubahan kurikulum ke arah yang lebih baik adalah hal yang wajar dan bahkan sebuah keharusan.

tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sehingga pengaruh terhadap mutu pendidikan belum terpenuhi.

Selanjutnya adalah Kurikulum Tahun 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),[10] prinsip dasar KTSP adalah pada pengetahuan yang belum sempurna sehingga harus disempurnakan melalui proses pencairan, penemuan dan eksperimentasi sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Muatan KTSP meliputi beberapa mata pelajaran yang merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Selain itu muatan lokal dan pengembangan diri masih dalam isi kurikulum. Dengan KTSP pun ternyata belum bisa mengubah mutu pendidikan kita. Sehingga dapat dikatakan dengan diadakannya pembaharuan kurikulum pun mutu pendidikan kita masih memprihatinkan atau dapat dikatakan peranan reformasi kurikulum pendidikan belum membawa dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. [11]

Perubahan kurikulum dari kurikulum 1962 hingga kurikulum 2006 (KTSP), juga tampak terdapat degenerasi dalam hal tujuan utama kegiatan pendidikan, yang dapat dilihat dari semakin etatifnya praksis pendidikan, praksis pendidikan semakin ti-

---

[10] Dalam penyusunannya KTSP ini berlandaskan: UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional; PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan; Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi; Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan; Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 tahun 2006

[11] Meski demikian, harus diakui jika KTSP yang sekarang ini sedang diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia secara konseptual lebih baik dibanding kurikulum sebelumnya, lebih demokratis dan lebih humanis. Indikasinya dalam KTSP guru dan pihak sekolah diberi wewenang yang luas untuk menyusun sendiri kurikulum (materi pembelajaran) dengan berpegangan pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta panduan-panduan yang telah disusun oleh Badan Standar Nasional pendidikan (BNSP). Hanya saja dalam praktiknya konsep ideal KTSP belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik. Kurang dapat diterapkanya konsep KTSP dalam dunia pendidikan ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal berikut: [1]. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada; [2]. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP; dan [3]. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan, dan sebagainya

dak berorientasi pada anak tetapi lebih pada *impuls* kepentingan politik praktis.[12] Disamping itu, kurikulum juga terlihat belum mampu memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan setiap potensinya secara optimal dan masih terlalu menekankan pada pengembangan aspek *kognitif,* dengan mengesampingkan aspek *afektif* dan *psikomotorik* peserta didik.[13] Padahal ketiga aspek ini harus dikembangkan secara integral sehingga peserta didik menjadi pribadi yang utuh.

Atas dasar itu, maka perlu adanya terobosan baru dalam pengembangan kurikulum, sebuah kurikulum pendidikan yang menyediakan ruang bagi eksplorasi masalah kemanusiaan, kurikulum yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal, kurikulum yang menekankan pada pengembangan aspek *kognitif*, *afektif*, *psikomotorik*, secara integral dan komprehensif.

Perubahan kurikulum ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta didik adalah subjek yang menjadi pusat pendidikan yang mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Disamping itu, hakikat dan kebutuhan anak didik serta hakikat dan kebutuhan pokok di masyarakat juga menjadi dasar perubahan kurikulum dengan harapan ilmu yang dipelajarinya peserta didik tidak menjadi menara gading di mana dia berinteraksi. Ini sejalan dengan pandangan John Dewey yang mengatakan, dalam mengembangkan sebuah kurikulum disegala tingkatan haruslah memperhatikan tiga butir berikut:

1. hakikat dan kebutuhan siswa-siswa;
2. hakikat dan kebutuhan masyarakat di mana para peserta di-

---

[12] Sularto, "Praksis Pendidikan Minus Visi: Catatan atas "Bongkar Pasang" Kurikulum", *Kompas*, Suplemen 60 Tahun Indonesia Merdeka, (Jakarta: 16 Agustus 2005), hal. 53.

[13] Hal ini dapat kita saksikan dari muatan mata peelajaran dalam satuan pendidikan yang lebih menekankan pada materi-materi yang bersifat hitungan dan penalaran logis.

dik merupakan bagian dari masyarakat tersebut;

3. masalah pokok yang digumuli peserta didik untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang matang dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.[14]

Di sinilah urgensinya pengembangan kurikulum pendidikan ke arah kurikulum yang lebih demokratis dan humanistik. Suatu desain kurikulum yang menyediakan pengalaman berharga dalam memperlancar perkembangan pribadi dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, otonomi kepribadian, serta sikap yang sehat (positif) terhadap diri sendiri, orang lain, maupun saat belajar. Semua ini merupakan bagian dari cita-cita perkembangan manusia yang teraktualisasi dalam dirinya (*self actualizing person*). Sebab apabila peserta didik telah mampu mengaktualisasikan dirinya, maka ia akan dapat mencapai keseimbangan (harmoni) perkembangan seluruh aspek pribadinya, baik aspek kognitif, efektif, estetika, moral maupun psikomoriknya.

Pengembangan kurikulum ke arah kurikulum yang demokratis dan humanistik ini, menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan peserta didik, setiap kegiatan yang dilakukan oleh pendidik adalah kegiatan yang baik dan bermanfaat bagi peserta didik yakni kegiatan yang memberikan pengalaman yang akan membantu peserta didik dalam memperluas kesadaran akan dirinya dan orang lain, serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya.[15] Di sini pendidik selain harus mampu menciptakan hubungan yang hangat dan akrab dengan peserta didiknya, ia juga harus menjadi sumber inspirasi bagi terciptanya keharmonisan tersebut.

---

[14] John Dewey, dalam M. Yunus Firdaus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial; Paulo Freire dan Y.B.Mangunwijaya,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal.110.

[15] M. Yunus Firdaus, *Pendidikan.,* hal. 90-91.

Kurikulum yang demokratis dan humanistik juga harus mampu menjadi solusi bagi berbagai problem yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini, terutama pada aspek moralitas peserta didik, dan bahkan pendidik yang pada dekade terakhir ini mengalami dekredasi moral yang cukup memprihatinkan.[16] Ini artinya, kurikulum harus menyajikan materi yang memungkinkan bagi tumbuhnya sikap kritis, ahlak terpuji, kepedulian sosial yang tinggi, kesadaran akan nilai-nilai kemanusian, kesadaran akan adanya perbedaan antar individu, dan seterusnya. Hal lain yang meski diperhatikan adalah kurikulum harus bersifat komprehensif dan mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh pada peserta didik, bukan pengalaman yang parsial, sehingga ilmu yang dipelajari peserta didik tidak menjadi menara gading di mana dia berinteraksi.

Dalam hal evaluasi, konsep kurikulum yang demokratis dan humanistik berbeda dengan kurikulum yang biasa. Model ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Kalau kurikulum yang biasa digunakan terutama subjek akademis mempunyai kriteria pencapaian tertentu, maka dalam kurikulum yang demokratis dan humanistik tidak ada kriteria tertentu. Sebab sasaran dari kurikulum ini adalah perkembangan anak supaya menjadi manusia yang lebih terbuka (*open ended*), dan mandiri di dalam menciptakan kreativitas dan aktivitas. Di sini kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman (pengetahuan) berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik yang dinamis saat belajar maupun di lingkungan masyarakat sesuai prinsip integrasi, kesatuan prilaku *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik,* yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, otonomi kepribadian,

[16] Hal ini ditandai dengan semakin maraknya penyimpangan perilaku dan tindak kekerasan dalam dunia pendidikan, seperti tawuran antar pelajar dan mahasiswa, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pelecehan seksual, dan sebagainya.

serta sikap yang sehat terhadap diri sendiri dan orang lain, menuju terciptanya manusia ideal (*insan kamil*).

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat diketahui jika kurikulum yang demokratis dan humanistik adalah model kurikulum pendidikan yang setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tujuan dari pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis;
2. Pendidikan dan pembelajaran menuntut adanya hubungan emosional yang baik antara pihak pengajar (guru) dan peserta didik (murid);
3. Dalam prinsipnya menekankan pada integrasi intelektual, emosional, spritual dan tindakan nyata (*kognitif, afektif* dan *psikomotorik);*
4. Menyediakan pengalaman dan pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik sesuai fitrahnya secara optimal;
5. Dapat membantu peserta didik menghadapi masalah kehidupan sehari-hari dengan arif dan bijaksana;
6. Menyajikan materi yang memungkinkan bagi tumbuhnya sikap kritis bagi peserta didik;
7. Dalam hal evaluasi lebih mengutamakan proses dari pada hasil, dan tidak ada kreteria tertentu.

B. Guru yang Demokratis dan Humanis

Dari sekian banyak komponen pendidikan, pendidik merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Istilah pendidik jika dilihat dari segi bahasa (etimologi) berarti orang

yang mendidik atau orang memberikan bimbingan.[17] Dalam Bahasa Inggris terdapat istilah yang berdekatan arti dengan pendidik seperti *teacher* atau *tutor,* yang artinya seseorang yang mengajar.

Secara terminologis pendidik memiliki arti beragam yang menurut Ahmad. D Miramba, "Pendidik adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik".[18] Sementara Amir Dien Indrakusuma, mendifinisikan pendidik sebagai pihak yang mendidik, pihak yang memberikan anjuran-anjuran, pihak yang berbagi pengetahuan dan kecakapan, serta pihak-pihak yang turut menghumanisasikan anak.[19] Dalam kaitan ini, Samsul Nizar dalam *Filsafat Pendidikan Islam,* mengatakan pendidik adalah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi *afektif* (rasa), *kognitif* (cipta), maupun *psikomotorik* (karsa).[20] Ini artinya, seorang pendidik atau guru tidak hanya memberi materi di depan kelas, tetapi ia juga harus aktif dan berjiwa kreatif dalam mengarahkan perkembangan peserta didiknya secara optimal.[21]

---

[17] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), hal. 263.

[18] Ahmad D. Miramba, *Pengantar.,* hal. 37.

[19] Amir Dien Indrakusama, *Pengantar Ilmu Pendidikan,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hal.134.

[20] Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: CiputatPers, 2002), hal. 41.

[21] Dalam perkembangan selanjutnya istilah pendidik (Guru) ini mengalami perluasan makna yakni semua orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau pengetahuan tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang. Misalnya, seseorang yang mengajarkan silat bisa disebut guru silat, seseorang yang mengajarkan mengetik disebut guru mengetik, seseorang yang mengajarkan ketrampilan menjahit disebut guru menjahit, bahkan orang yang mengajari seseorang mencopet juga dapat disebut sebagai guru copet, dan seterusnya.

Dalam literatur Islam pendidik sering disebut sebagai istilah *ustadz,*[22] *mu'allim,*[23] *murabbi,*[24] *mursyid,*[25] *mudarris,*[26] dan *mu'addib.*[27] Istilah-istilah tersebut memiliki penggunaan sesuai dengan peristilahan pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Berdasar pada istilah-istilah di atas, Abdul Mujib mengemukan beberapa karakteristik pendidik dalam pendidikan Islam:

No	Pendidik	Karakteristik
1	Ustadz	Orang yang berkomitmen dengan profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continuous improvement*
2	Mu'allim	Orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi (amaliah)
3	Murabbi	Orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya.

[22] Kata *Ustadz,* biasa digunakan untuk memanggil seorang profesor; ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya.

[23] Kata *Muallim* berasal dari kata dasar *'ilm* yang berarti menangkap sesuatu. Dalam setiap *'ilm* terkandung dimensi teoritis dan dimensi amaliah (*al-asfahani*).

[24] Kata *murabby* yang berasal dari kata dasar *Rabb*. Tuhan adalah sebagai *Rabb al-'alamin* dan *Rabb al-nas*, yakni yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia.

[25] *Mursyid,* biasa digunakan untuk guru dalam *thariqah (tasawuf)*

[26] *Kata Mudarris* yang berasal dari akar kata *darasa - yadrusu - darsan wa durasan wadirasatan*, yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih ke-trampilan mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

[27] *Kata Mu'addib* berasal dari kata *'adab*, yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir dan batin.

4	Mursyid	Orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya
5	Mudarris	Orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
6	Mu'addib	Orang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan
7	Muhażżib	Orang yang membersihkan, memperbaiki perliku dan hati nurani dengan sesegera mungkin karena adanya suatu penyimpangan atau kekhawatiran akan adanya penyimpangan, sehingga tahżib itu dapat mewujudkan insan muslim yang berhati nurani bersih, berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Dari tabel di atas, tugas-tugas pendidik sangat amat berat, yang tidak saja melibatkan kemampuan kognitif, tetapi juga kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik.[28]

Pendidik merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Bermutu dan tidaknya pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya, sebab pendidik berada dalam posisi terdepan dalam pendidikan *(central of education),* seperti yang ditegaskan Zaenal Aqib bahwa pendidik adalah faktor penentu bagi keberhasilan pendidikan di sekolah, karena guru merupakan

[28] Abdul Mujib, *et al, Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 92.

sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar,[29] sekaligus sebagai komponen yang paling berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.[30]

Dalam proses pendidikan guru memegang tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Menurut Djamarah, baik mengajar maupun mendidik merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga professional.[31] Sebagai pengajar, guru bertugas menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didiknya, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas membimbing, dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri. Tugas berat dari seorang pendidik ini pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi.[32]

Guru yang profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, menguasai metode yang tepat, mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. Akan tetapi guru yang profesional juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia, dan masyarakat. Guru sebagai tenaga profesional juga harus memiliki kompetensi dasar. Kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang

---

[29] Zainal Aqib, *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran,* (Surabaya: Cendekia, 2002), hal.22.

[30] Dalam konteks ini, Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar mengatakan, bahwa prestasi anak didik dipengaruhi oleh banyak faktor, namun yang paling menentukan adalah faktor guru. Baca: Ace Suryadi, H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebayakan Pendidikan,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hal. 111.

[31] Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*. (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hal.74

[32] Guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem Pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Lihat, Undang-Undang R.I. Nomor. 14 Tahun 2005, Pasal.6, tentang Guru dan Dosen. Lihat, Undang-Undang R.I. Nomor. 14 Tahun 2005, Pasal.6, tentang Guru dan Dosen

dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu.[33] Dalam konteks ini Paul Suparman mengatakan, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru berkaitan dengan kemampuan dalam mengajar, membimbing dan memberikan teladan hidup kepada siswa.[34]

Dalam konteks pendidikan yang demokratis dan humanistik, Guru selain harus professional dan memiliki kompetensi tertentu, ia juga harus mampu membantu anak didiknya untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik, membantu mereka dalam mengembangkan potensi–potensi yang ada secara optimal. Di sini pendidik tidak hanya menyampaikan materi pelajaran agar peserta didiknya dapat menguasai materi pelajaran kemudian memperoleh nilai yang baik atau ”lulus ujian”. Sebab masih ada hal lebih penting yang harus menjadi perhatian seorang pendidik, yaitu proses pendewasaan dan membantu peserta didik untuk menemukan sebuah makna dari suatu materi pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang baik, santun dan berbudi, hal inilah yang merupakan sesuatu inti dari tugas guru dalam mendidik. Maka dapat ditegaskan bahwa pendidik yang demokratis dan humanis adalah pendidik yang mampu membangun suasana belajar yang kondusif untuk belajar-mandiri (*self-directed learning*), bermakna, aktif, dinamis dan menyengkan (*fun*).

Sedang terkait dengan peran guru dalam proses belajar-mengajar tidak hanya tampil sebagai pengajar *(teache*r) seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan ia juga harus bertindak dan berperan sebagai seorang *fasilitator*, *motivator*, *mediator*, *counselor* dan *evaluator* yang baik.

---

[33] Terkait Kompetensi Dasar yang harus dimiliki Guru ini, baca dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

[34] Paul Suparman, "*Dampak RUU guru Terhadap Kualitas dan Kesejahteraan Guru", Kedaulatan Rakyat,* Yogyakarta: 15/11/2005.

1. Fasilitator

Dalam konteks pendidikan yang demokratis dan humanistik peran seorang pendidik lebih sebagai fasilitator.[35] Fasilitator baik dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, maupun konatif. Sebagai fasilitator pendidik bertugas memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didiknya, dan memberi kemudahan belajar (*to facilitate of learning*), bukan hanya menceramahi atau mengajar, apalagi menghajar peserta didik.[36] Sebagai fasilitator guru meski bersikap akrab dan penuh tanggung jawab, memperlakukan peserta didiknya sebagai mitra dalam menggali dan mengolah informasi menuju tujuan belajar-mengajar yang telah direncanakan.

Peran guru sebagai fasilitator ini membawa konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru-siswa, yang semula lebih bersifat *top-down* ke hubungan *kemitraan*. Dalam hubungan yang bersifat *top-down*, guru seringkali diposisikan sebagai *atasan* yang cenderung bersifat otoriter, sarat komando, bergaya birokrat, bahkan sering bertindak sebagai *pawang*. Sementara, siswa lebih diposisikan sebagai *bawahan* yang harus selalu patuh mengikuti instruksi dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh guru. Berbeda dengan pola hubungan *top-down*, dalam pola hubungan *kemitraan,* guru bertindak sebagai pendamping belajar para siswanya dengan suasana belajar yang demokratis, dialogis, humanis dan menyenangkan.

Agar guru mampu menjalankan peran sebagai fasilitator yang baik, maka Ia dituntut untuk memahami dan memenuhi prin-

[35] Istilah fasilitator semula lebih banyak diterapkan untuk kepentingan Pendidikan orang dewasa (*andragogi*), khususnya dalam lingkungan Pendidikan non formal. Namun sejalan dengan perubahan makna pengajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa, belakangan ini istilah fasilitator mulai diadopsi dalam lingkungan Pendidikan formal di sekolah, yakni berkenaan dengan peran guru pada saat melaksanakan interaksi belajar mengajar.

[36] Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung:Rosdakarya,2007)., hal.54

sip-prinsip belajar yang dikembangkan dalam pendidikan kemitraan, yaitu siswa akan belajar dengan baik apabila:

a. Siswa secara penuh dapat mengambil bagian dalam setiap aktivitas pembelajaran;
b. Apa yang dipelajari bermanfaat dan praktis (*usable*);
c. Siswa mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuan dan keterampilannya dalam waktu yang cukup;
d. Pembelajaran dapat mempertimbangkan dan disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan daya pikir siswa;
e. Terbina saling pengertian, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa.

Dalam hal ini, Rogers (dalam Knowles,1984) dalam Mulyasa mengungkapkan, dalam kapasitasnya sebagai fasilitator sedikitnya seorang pendidik harus memahami dan menerapkan tujuh sikap berikut:

a. tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinanya, atau kurang terbuka;
b. dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya;
c. mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif, bahkan yang sulit sekalipun;
d. lebih meningkatkan perhatianya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran;
e. dapat menerima balikan (*feedback*), baik yang sifatnya positif maupun negatif dan menerima sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan pelakunya;

f. toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran; dan,
g. menghargai peserta didik, meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya.[37]

2. Mediator

Guru selain berperan sebagai fasilitator, ia juga harus berperan sebagai mediator. Sebagai mediator, maka seorang pendidik dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan sebab media merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar-mengajar. Disamping itu, sebagai mediator guru dituntut hadir di tengah-tengah siswanya untuk mendorong terjadinya interaksi[38] yang positif dan konstruktif.

Dalam kapasitasnya sebagai mediator tugas utama seorang pendidik adalah membantu peserta didik untuk memformulasikan pertanyaan atau mengkonstruksi representasi visual dari suatu masalah, memandu mereka untuk mengembangkan sikap positif terhadap belajar, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal dan menjelaskan bagaimana mengaitkan gagasan-gagasan peserta didik, pemodelan proses berpikir dengan menunjukkan kepada peserta didik bagaimana berpikir kritis. Lebih jauh terkait peran pendidik sebagai mediator dan fasilitator dapat ini dapat dijabarkan dalam beberapa tugas berikut:

a. Pendidik menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam membuat rancangan, proses, dan penelitian.

[37] *Ibid*., hal. 55.
[38] A. Syukur Ghazali, "Strategi Belajar Kooperatif dalam Belajar Mengajar Konteksstual" *Jurnal Pendidikan & Pembelajaran*, Vol. 9, No. 1, (April 2002), hal. 53.

b. Pendidik menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa, dan
c. Pendidik memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran anak didiknya berjalan dengan baik atau tidak.[39]

3. Motivator

Selain berperan sebagai fasilitator dan mediator seorang pendidik juga berperan sebagai motivator bagi peserta didiknya untuk lebih giat dan bersemangat dalam belajar. Di sini tugas guru yang paling utama adalah membangkitkan motivasi[40] peserta didiknya, sehingga mereka mau melakukan belajar dengan lebih bersemangat. Motivasi menurut Mulyasa, merupakan factor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi.[41] Di sini terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pendidik agar motivasi belajar peserta didiknya dapat tumbuh, yakni:

a. Pada permulaan belajar mengajar pendidik (guru) terlebih dahulu menjelaskan mengenai Tujuan Instruksional Khusus yang akan dicapainya kepada peserta didik, sebab dengan semakin jelas tujuan yang hendak dicapai maka akan makin besar pula motivasi peserta didik dalam belajar.

---

[39] Martinis Yamin, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi",*(Jakarta:Gaung Persada Press, 2004), hal.3

[40] Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi Intrinsik dan motivasi ektrinsik. Motivasi Intrinsik adalah jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik, adalah jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, seperti ajakan, suruhan, atau bahkan paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Lebih mendalam lagi, Menurut Mulyasa, motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Baca: Mulyasa, *Standar Kompetensi.,* hal.58.

[41] Mulyasa, *Standar Kompetensi*, hal.58

b. Terhadap peserta didik yang berprestasi, pendidik hendaklah memberikan hadiah. Pemberian hadiah secara efektif dan tepat guna (proporsional) ini akan memotivasi semangat pesrta didik untuk belajar lebih giat. Disisi lain peserta didik yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengejar siswa yang berprestasi dan memperoleh hadiah.

c. Pendidik berusaha menciptakan persaingan (kompetisi) positif di antara peserta didiknya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, dan berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya.

d. Memberikan pujian kepada pesrta didik yang berprestasi, dengan pujian yang bersifat konstruktif (membangun). Dan memberikan hukuman kepada peserta didik yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar, dengan harapan agar peserta didik tersebut merubah menjadi lebih baik dan lebih bersamgat untuk belajar.[42]

e. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar, dengan memberikan perhatian secara maksimal ke peserta didik;

f. Pendidik hendaknya berusaha membentuk kebiasaan belajar yang baik kepada peserta didiknya;

g. Pendidik *m*embantu kesulitan belajar yang dialami anak didik secara individual maupun kelompok;

h. Pendidik menerapkan metode yang bervariasi (tidak monoton) dalam proses belajar mengajar, dan menggunakan media yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Sebagai seorang motivator pendidik tidak boleh menghadapi muridnya dengan sikap kasar, karena itu akan dapat meng-

[42] Memberikan pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan.Lihat, Mulyasa, *Standar Kompetensi,* hal. 63.

hilangkan rasa simpati peserta didiknya yang pada gilirannya mereka akan menolak pelajaran yang disampaikan. Jika ini terus berlangsung maka akan mengakibatkan hilangnya minat dan semangat anak didik untuk belajar.

4. Counselor

Peran guru sebagai pembimbing (*counselor*) adalah menjadi tempat bertanya bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, memberi bantuan dengan menunjukkan jalan untuk memecahkan masalah, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan peserta didik, memberi dorongan dan memotivasi peserta didik untuk lebih giat dalam belajar. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai kegiatan memantau murid dalam perkembangannya dengan jalan menciptakan lingkungan dan arahan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Bentuk-bentuk bimbingan tersebut selanjutnya adalah dengan jalan membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat pribadi, membantu proses sosialisasi dan sensivitas kepada kebutuhan orang lain, mengembangkan motif-motif intrinsik dalam belajar, memberikan dorongan dalam pengembangan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan, mengembangkan nilai dan sikap serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri sendiri, memahami tingkah laku peserta didik, membantu peserta didik untuk memperoleh kepuasan pribadi dan dalam penyesuaian diri secara maksimum terhadap masyarakat, serta aspek fisik, mental dan sosial,[43] sehingga tercapai kemajuan dalam pembelajaran.

Sebagai pembimbing (*teacher counsel*), guru dituntut untuk mampu mengidentifikasi peserta didik yang diduga mengalami

[43] Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1992), hal. 65.

kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahannya (*remedial teaching*). Oleh sebab itu, seorang pendidik dituntut untuk memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental, karena ini akan banyak membantu untuk menjalankan fungsinya sebagai konselor, di samping sebagai guru yang mengampu mata pelajaran tertentu.

5. Evaluator

Guru sebagai *evaluator* artinya dalam setiap pembelajaran guru haruslah melakukan evaluasi sesuai indikator yang harus dicapai. Dalam mengevaluasi guru meski kreatif dengan berbagai cara, dan memberikan penguatan agar keberhasilan belajar siswa dapat dirasakan. Kegiatan evaluasi ini haruslah dilakukan dengan cara yang adil dan objektif. Evaluasi yang adil menurut Mulyasa tidak dipengaruhi oleh faktor keakraban (*hallo effect*), menyeluruh, memiliki kriteria yang jelas, dilakukan dalam kondisi yang tepat, dan dengan instrument yang tepat pula, sehingga mampu menunjuk prestasi belajar peserta didik sebagaimana adanya (*objektif*).[44]

Selain beberapa fungsi diatas, dalam format pendidikan yang demokratis dan humanistik, Pendidik juga harus berperan sebagai model idola atau figur teladan bagi anak didiknya.[45] Seorang pendidik harus memiliki sifat-sifat yang positif, seperti bertanggungjawab, disiplin, berwibawa, bijaksana, inovative, kreatif, berdedikasi tinggi, tak kenal menyerah, berwawasan luas, mengayomi anak didik, lapang dada, sederhana, jujur, adil, lugas, disiplin,

---

[44] Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan,* (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal. 62.

[45] Pendidik sebagai model bagi anak didiknya, selaras dengan salah satu teori *Quantum Learning,* yaitu *modelling*. Teori ini mempercayai bahwa seseorang memerlukan model/figur yang akan memotivasi dirinya mengidentifikasi diri seperti model atau figur tersebut. Jika seseorang telah teridentifikasi oleh modelnya, apapun yang dilakukan model akan menjadi inspirasi baginya untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan perbuatan atau tindakan model. Dalam konteks ini patut kiranya diajukan pengalaman guru Madrasah.

empatik, dan sebagainya, disamping ia juga meski bernampilan menarik.

Pendidik yang demokratis dan humanis juga harus memiliki sikap rendah hati (*tawadlu'*) dan ikhlas. Sikap tawadlu' akan menimbulkan simpatik dari anak didik, sedangkan sikap ujub akan berdampak pada guru kurang mendapat simpati.[46] Dengan sikap *tawadlu'* dan *ikhlas* ini maka seorang guru akan dapat menghargai muridnya sebagai makhluk yang memiliki potensi, disamping akan menyebabkan pendidik mampu bersikap dan bertindak demokratis dan humanis dalam menghadapi peserta didiknya.

Sedang terkait dengan hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan yang demokratis dan humanistik, adalah hubungan dialogis, sejajar antar subjek yang saling belajar dan diajar. Keduanya dipersatukan oleh satu pandangan yakni dunia yang tengah berproses dalam gerak perubahan. Di sini pendidik bagi peserta didik adalah *partner* didalam memahami realitas tersebut. Karena itu, dalam pendidikan yang demokratis dan humanistik, tidak ada istilah pengkultusan terhadap pribadi seseorang. Pendidik di sini bukan *sosok yang paling*, ia bukanlah Nabi penyelamat ataupun wali yang mempunyai keistimewaan. Pendidik hanyalah fasilitator, motivator, coenselor dan partner dalam proses pendidikan dalam rangka mencapai sebuah penyadaran diri sebagai manusia.

Hubungan antara pendidik dengan peserta berada dalam posisi yang sejajar yang diletakkan sebagai subjek pendidikan yang sadar akan dirinya, yang sama-sama ingin mengetahui lebih banyak

---

[46] Sikap tawadlu' menurut Al-Mawardi bukanlah sikap merendahkan diri ketika berhadapan dengan orang lain, karena sikap ini akan menyebabkan orang lain meremehkan. Sikap tawadlu' yang dimaksud adalah sikap rendah hati dan sederajat dengan orang lain dan saling menghargai. Sikap yang demikian akan menumbuhkan rasa persamaan dan menghormati orang lain, toleransi serta rasa senasib dan cinta keadilan. Lihat. al Maududi, *Adab al Dunya wa al Din*, (Beirut: Dar al Fikr, tt)., hal.80

realitas dan pengetahuan sebagai objeknya. Keduanya berinteraksi dalam memberikan informasi pengetahuan secara horizontal tanpa adanya perendahan martabat salah satunya, masing-masing memiliki peran sebagai subjek atau sebagai pendidik-pendidik, saling memanusiakan dan saling memberi kebebasan. Di sini terlihat adanya posisi *guru yang murid* dan *murid yang guru*, karena keduanya saling berinteraksi dalam memberikan informasi pengetahuan secara horizontal.

Jadi, pola hubungan pendidik-peserta didik dapat dicirikan sebagai berikut: Pendidik belajar dari peserta didik dan peserta didik belajar dari Pendidik; Pendidik menjadi rekan peserta didik yang melibatkan diri dan menumbuhkan daya pemikiran kritis-produktif-progresif peserta didiknya dan keduanya saling memanusiakan; Baik Pendidik maupun peserta didik sama-sama menjadi subjek yang belajar, subjek yang bertindak dan subjek yang berpikir.

Atas dasar itu, maka format pendidikan yang demokratis dan humanistik sangat mengecam bentuk pendidikan *gaya bank*, yang memposisikan pendidik sebagai subjek, sedang peserta didik menjadi objek bersama pengetahuan yang dipelajarinya. Pendidikan *gaya bank* disinyalir oleh Andrias Harefa, hanya akan menghasilkan pendidikan yang monolog. Tidak ada kreativitas yang ada hanyalah pendidikan verbalistik (hafalan). Tidak ada orisinalitas yang ada hanyalah peniruan dan pembajakan. Tidak ada percakapan antar *dalang*, yang ada hanyalah seorang *dalang* dengan setumpuk *wayang.*[47] Sehingga yang terlihat aktif adalah gurunya, sedangkan anak didik berada pada posisi pasif yang tidak ada bedanya dengan benda mati.

[47] Andrias Harefa, 2000, Menjadi Manusia Pembelajaran, Jakarta: Harian Kompas, h. 12

Format pendidikan yang demokratis dan humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya, untuk itu pendidik dituntut memiliki hubungan emosional yang positif dengan anak didik. Seorang pendidik yang demokratis dan humanis haruslah menyajikan materi-materi secara imajinatif serta kreatif dalam memfasilitasi proses pembelajaran, menaruh kepercayaan bahwa para peserta didik mampu mempelajari bahan-bahan yang telah didiskusikan bersama, memberikan pujian kepada siswa yang berhasil mendapat nilai bagus, dan memotivasi siswa yang agak lamban dalam menyerap pelajaran.

Dalam proses pembelajaran di kelas, guru yang demokratis dan humanistik haruslah mengedepankan prinsip relasi dan interaksi edukatif berpola demokratis–partisipatif–dialogis dan humanis. Di samping mengembangkan pola pikir kritis–kreatif–reflektif berasaskan kebebasan berpendapat. Guru harus menjauhi model indoktrinatif, dan lebih berperan sebagai fasilitator dan moderator yang baik, yang membiarkan dan merangsang siswa untuk aktif dalam menggeluti bahan pelajaran. Guru dan murid harus saling mengembangkan budaya pemikiran dan sikap kritis dengan memadukan teori dan praktek. Sehingga dalam pembelajarannya lebih menekankan pada pengalaman refleksi dan aksi yang menawarkan sejumlah cara. Di sini peserta didik dituntut secara aktif membangun pengetahuan menurut perspektifnya sendiri. Sedangkan pendidik membantunya supaya pencarian tersebut berjalan dinamis.

Dari pemaparan diatas, maka dapat dipahami pendidik (guru) yang demokratis dan humanis lebih bertindak sebagai fasilitator; pelindung; pembimbing dan punya figur yang baik (disiplin, loyal, bertanggung jawab, kreatif, melayani sesuai dengan visi, misi

yang diinginkan sekolah); termotivasi menyediakan pengalaman belajar bermakna untuk mengalami perubahan belajar berdasarkan keterampilan yang dimiliki siswa dengan berfokus menjadikan kelas yang kondustif secara intelektual fisik dan sosial untuk belajar; menguasai materi, kelas, dan teknologi, serta memiliki sikap yang demokratis dan humanis terhadap setiap peserta didik.

Pelaksanaan prinsip demokratis di dalam kegiatan KBM dapat diwujudkan dalam bentuk timbal balik antara siswa dan siswa dan antara siswa dan guru.[48] Sedangkan sikap humanis dalam kegaitan KBM terwujudkan dalam perlakuan guru terhadap anak didiknya, di mana seorang guru lebih banyak memberikan motivasi sehingga murid menjadi bersemangat dan bergairah serta merasa mempunyai harga diri, dan merasa dihargai, sehingga akan mendorong terciptanya belajar siswa aktif.

Di sini terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pendidik (guru) dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan perilaku mengajar yang demokratis dan humanis, di antaranya:

1. Mengenali penyebab perilaku;

   Perilaku seseorang adalah hasil interaksi antara komponen fisik, pikiran, emosi dan keadaan lingkungan. Namun, untuk memperkuat kontrol manusia terhadap perilakunya seseorang perlu mencari tahu penyebab internal baik fisik, pikiran dan emosi yang dialaminya.

2. Mengatasi distorsi dalam penilaian;

   Ketika seorang guru menyadari dirinya telah mengalami distorsi atau kesalahan dalam menilai siswa maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meyakinkan diri bahwa ia mampu mengendalikan hal tersebut.

[48] Lihat, Rusyan A. Tabrani, *Kemampuan guru dalam Proses Mengajar*, Bandung: 1994, hal. 117.

3. Mengembangkan cara pandang yang positif terhadap siswa;

   Seorang Pendidik harus menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai potensi yang kadang tidak dapat terungkap, tidak diterima dan tidak dihargai dalam proses pendidikan. Cara pandang positif tersebut akan mendorong guru untuk mengembangkan perilaku yang konstruktif, suportif, humanis, demokratis dan tidak menggunakan cap negatif atau perilaku-perilaku yang menghancurkan harga diri siswa. Cara pandang yang positif dapat dikembangkan jika guru: tetap mempertahankan harapan positif terhadap siswa, melihat potensi siswa dari berbagai sisi, meyakini prinsip perkembangan bahwa setiap siswa dapat berbeda dan bersifat unik, dan berusaha mencari sisi positif siswa.

4. Membangun hubungan yang apresiatif;

   Hubungan guru dan siswa adalah penting dalam proses pembelajaran. Hubungan guru dan siswa bukanlah hubungan yang kering dari aspek emosi. Karena itulah, Pendidik harus mengembangkan komunikasi apresiatif. Komunikasi apresiatif dapat dilakukan dalam setiap interaksi antar guru siswa, dan antar siswa. Percakapan apresiatif dilakukan untuk memahami sesuatu yang terbaik dari individu, memberikan dukungan terhadap kelebihan, kesuksesan, dan potensi masa lalu dan masa kini. Selama ini, komunikasi yang terjadi kadang cenderung tidak apresiatif.

5. Mengembangkan model pembelajaran yang tepat;

   Seiring dengan perkembangan zaman, model-model pembelajaran juga semakin banyak, dalam konteks ini guru dituntut untuk mencari dan menerapkan desain atau model pembelajaran yang berjiwa demokratis dan humanistik.

C. Desain Pembelajaran Demokratis dan Humanistik

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan di mana guru (pengajar) dan murid (pembelajar) berinteraksi, membicarakan suatu bahan atau melakukan suatu aktivitas, guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Menurut Mulyasa, pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan.[49] Sementara Oemar Hamalik mengartikan pembelajaran sebagai "suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur, yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.[50]

Difinisi lain mengungkapkan, pembelajaran merupakan proses, cara, menjadikan makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.[51] Sedang dalam Pasal I Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tantang Pendidikan Nasional menyebutkan, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.[52] Interaksi antara pendidik dan peserta didik ini disebut dengan interaksi pendidikan (*interaksi educatif*), yaitu saling pengaruh antara pendidik dengan peserta didik.

Sebagai sebuah proses, pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar.[53]

---

[49] E. Mulyasa, *Menjadi.,* hal. 69.
[50] Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 70.
[51] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). (Jakarta: Balai Pustaka., 1996), hal.14.
[52] Baca, Undang- Undang No. 20 tahun 2003 tantang Pendidikan Nasional, Pasal I
[53] Lihat, Ahmad Sugandi, dkk. *Teori Pembelajaran*. (Semarang: UPT MKK UNNES, 2004), hal. 4.

Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara pengajar itu sendiri dengan si belajar.[54] Sedang aktivitas belajar adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah, berkembang daya pikir, sikap dan lain-lain.[55] Aktivitas belajar-mengajar (pembelajaran) ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis;
2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar;
3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa;
4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik;
5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa;
6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis.[56]

Proses belajar-mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama.[57] Proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan *aut-*

[54] Morgan, dkk dalam Sumantri dan Permana, mengatakan bahwa " Belajar adalah setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman". Lihat, Sumantri dan Permana, *Strategi Belajar Mengajar*. (Bandung: CV Maulana), hal. 13). Dan Purwoto, menyatakan bahwa "Belajar adalah suatu proses yang berlangsung dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, atau dari baik menjadi lebih baik, dari pasif menjadi aktif, dari tidak teliti menjadi teliti, dari tidak trampil menjadi trampil, dari belum cerdas menjadi cerdas, dari sikap belum baik menjadi baik dan seterusnya" (lihat, Purwoto, *Strategi Belajar Mengajar Matematika*. (Surakarta: UNS Press,2003), hal. 24.

[55] Soetomo, *Dasar-dasar*, hal.120

[56] Achmad Sugandi, dkk., *Belajar dan Pembelajaran,* (Semarang: IKIP Press, 2000), hal. 25.

[57] Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi.,* hal. 73.

put yang baik, demikian pula sebaliknya.

Pembelajaran terkait dengan bagaimana (*how to*) membelajarkan siswa atau bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari apa (*what to*) yang teraktualisasikan dalam kurikulum sebagai kebutuhan (*needs*) peserta didik. Karena itu, pembelajaran berupaya menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kurikulum dengan menganalisis tujuan pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi yang terkandung di dalam kurikulum. Selanjutnya, dilakukan kegiatan untuk memilih, menetapkan, dan mengembangkan cara-cara (strategi) pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sesuai kondisi yang ada, agar kurikulum dapat diaktualisasikan dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar terwujud dalam diri peserta didik.[58]

Namun dalam realitasnya, proses pembelajaran yang berlangsung selama ini masih terlihat sangat monoton, terkesan menjemukan dan penuh ketegangan, peserta didik terlihat dalam kondisi tertekan dan tidak memiliki ruang untuk mengembangkan ide-ide kreatif-nya, dan masih bersifat guru centris, artinya guru masih mendominasi kelas, sedangkan siswa pasif, guru memberitahukan konsep, siswa mendengar, mencatat dan menerima konsep (bahan) yang disampaikan guru. Sehingga yang terlihat aktif adalah gurunya, sedangkan anak didik berada pada posisi pasif yang tidak ada bedanya dengan benda mati.

Hal ini didukung fakta di lapangan yang mengungkapkan bahwa dalam proses belajar-mengajar siswa cenderung pasif, kurang menunjukkan gairah, minat, dan antusiasme untuk belajar. Interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar juga lebih me-

[58] Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 146.

nekankan pada peran guru sebagai penyampai ilmu, berlangsung monolitik, membosankan dan kurang optimal untuk membantu peserta didik mengembangkan potensinya. Peserta didik hanya dipandang sebagai objek, bukannya subjek atau individu yang aktif. Interaksi antar siswa dan guru kadang memang terjadi, namun hal itu sejauh karena diminta atau ditunjuk oleh gurunya.

Tidak hanya itu, proses pembelajaran yang berlangsung selama ini juga terlihat masih sebatas pada penyampaian informasi saja (*transfer of knowledge*), kurang terkait dengan lingkungan di mana peserta didik hidup, akibatnya peserta didik tidak mampu memanfaatkan konsep kunci keilmuan yang dimilikinya untuk memecahkan berbagai problems kehidupan yang dialaminya.

Realitas pendidikan dan pembelajaran seperti inilah yang menyebabkan banyak kalangan menilai jika proses belajar-mengajar yang berlangsung hingga saat ini kurang demokratis dan tidak humanis, indikasinya adalah praktik pembelajaran masih menempatkan guru sebagai seorang *penindas* yang memposisikan dirinya sebagai subjek pendidikan, dengan menganggap dirinya paling berkuasa dan paling mengetahui tentang pengetahuan. Sedang anak didik diposisikan sebagai objek pendidikan yang tidak mengetahui apa-apa, karenanya harus selalu siap untuk menerima transfer pengetahuan yang diberikan oleh gurunya tanpa adanya upaya untuk mengembangkan kreativitas berpikir secara mandiri.

Berdasar asumsi di atas, maka perlu adanya perubahan dan pembaharuan dalam proses pembelajaran di sekolah. Perubahan proses pembelajaran ini adalah perubahan dari kebiasaan yang sudah berlangsung selama ini (model konvensional), di mana guru memegang peranan penting sehingga guru harus menguasai materi pelajaran dan mempunyai kemampuan yang memadai dalam menyampaikan materi kepada siswa. Menuju model

pembelajaran yang bervisi demokratis[59] dan berkarakter humanis,[60] sebuah desain pembelajaran yang mengakui hak anak untuk melakukan tindakan belajar sesuai karakteristiknya, pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, pembelajaran yang memberi ruang bagi peserta didik untuk berimajinasi dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis-analitis yang merupakan kecakapan dan modal awal anak agar mampu menghadapi tantangan masa depan yang jauh lebih kompetitif. Perubahan ini setidaknya dilatar belakangi oleh lima hal berikut:

1. peserta didik bukan hanya sebagai objek belajar akan tetapi juga merupakan subjek dalam pembelajaran;
2. peserta didik adalah individu-individu yang bebas, merdeka dan memiliki berbagai potensi dasar (*fitrah*) yang harus dikembangkan secara optimal;
3. peserta didik harus disiapkan sejak awal agar mampu bersosialisasi dengan lingkungannya, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual selain kecerdasan intelektual;
4. seiring dengan arus globalisasi setiap individu dituntut untuk memiliki jiwa demokratis dan humanis;
5. penggunaan metode konvensional yang lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam kondisi tertentu akan menjadikan anak didik merasa bosan, jenuh, dan merasa tertekan, ini disebabkan karena mereka harus tenang mendengarkan

[59] Model pembelajaran demokratis, dapat diartikan sebagai tampilan grafis, prosedur kerja yang teratur atau sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan berikut saran yang sesuai dengan karakteristik nilai-nilai dan jiwa demokratisasi dalam pembelajaran.

[60] Pembelajaran yang humanistik adalah model pembelajaran yang lebih menekankan peran siswa, pendidikan ini menekankan bagaimana mengajar siswa (mendorong siswa) dan bagaimana merasakan atau bersikap terhadap sesuatu. Pendekatan pembelajaran humanis memandang manusia sebagai subjek yang bebas dan merdeka untuk menentukan arah hidupnya.

penjelasan guru, tanpa memiliki ruang kebebasan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran.

Dalam kaitan ini, setelah mengadakan penulusuran dari berbagai literatur, penulis menemukan beberapa model/metode pembelajaran yang diyakini sejalan dengan format pendidikan yang demokratis dan humanistik, di antaranya:

1. *Active Learning Method*

Pembelajaran aktif,[61] diyakini termasuk salah satu model pembelajaran yang berkarakter demokratis dan humanistik, ini dapat dilihat bahwa motode ini merupakan pembelajaran yang membawa siswa untuk melakukan tindakan yang lebih dari sekadar mendengarkan, namun melakukan kegiatan-kegiatan seperti menemukan, memproses dan memanfaatkan informasi.

Dalam pembelajaran aktif peserta didik akan mendapatkan pengalaman melakukan (*do*) sesuatu, mengamati (*observe*) sesuatu dan melakukan diskusi dengan diri sendiri dan dengan siswa lain tentang apa yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Ini artinya, pembelajaran aktif tidak sekadar membuat siswa sibuk beraktivitas, namun membuat siswa berpikir tentang proses pembelajaran yang sedang mereka alami. Di sini peran pendidik bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi merupakan salah satu sumber dari sekian sumber belajar, dengan tugas utamanya adalah membantu peserta didik untuk mengakses sendiri informasi dan pengetahuan yang diperlukan dari berbagai sumber belajar, sebab dalam pembelajaran aktif pendidik lebih berfungsi sebagai fasilitator, moderator, mediator, dinamisator dan motivator, daripada pengajar.

[61] Metode belajar active ini dulu pernah diterapkan sebagai metode pembelajaran siswa yang terkenal dengan cara belajar active (CBSA). Baca: Muhaimin (*et.all*), *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Citra Media, 1996), hal. 133.

Model ini dicetuskan oleh Melvin L. Silberman, asumsi dasar yang dibangun dari model pembelajaran ini, adalah bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa, akan tetapi belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Model pembelajaran aktif sebenarnya didasarkan pada pernyataan Confucius lebih dari 2400 tahun lalu yang menyatakan: *What I here, I forget* (apa yang saya dengar, saya lupa), *What I see, I remember* (apa yang saya lihat, saya ingat), *What I do, I understand* (apa yang saya lakukan, saya paham).[62]

Dalam perkembangannya, Mel Silberman memodifikasi dan memperluas pernyataan Confucius tersebut menjadi apa yang ia sebut dengan paham belajar aktif. Mel Silberman menyatakan: *What I hear, I forget* (apa yang saya dengar, saya lupa), *What I hear and see, I remember a little* (apa yang saya dengar dan lihat, saya ingat sedikit), *What I hear, see, and ask questions about or discuss with someone else, I begin to understand* (apa yang saya dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan dengan beberapa teman, saya mulai paham), *What I hear, see, discuss, and do, I acquire knowledge and skill* (apa yang saya dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan, saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan), *What I teach to another, I master* (apa yang saya ajarkan pada orang lain, saya menguasainya).[63]

Model pembelajaran aktif ini memiliki berbagai strategi pembelajaran yang diyakini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Di antara strategi pembelajaran aktif yang telah digunakan dan telah teruji keefektifannya dalam proses pembelajaran di kelas, adalah; Strategi Belajar "Kekuatan Berdua" (*The Power of*

---

[62] M. Silberman, *Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif*, Terjemahan Sarduli dkk, (Yogyakarta: Yappendis, 2001), hal. 2.

[63] *Ibid.*, hal. 1-2.

Two), strategi belajar "Studi Kasus Kreasi Siswa" (*Student-Created Case Studies*), strategi belajar "Memilah dan Memilih Kartu" (*Card Sort*), strategi belajar "Perdebatan Aktif" (*Active Debate*), strategi belajar "Saling Beradu Pendapat" (*Point-Counter Point*), strategi belajar "*SQ3R", "Rolling Cognitive",* dan "Studi Kritis".[64]

Meskipun memiliki strategi yang beragam, namun pada dasarnya metode ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode pembelajaran lain, seperti:

1. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas;
2. Peserta didik tidak hanya mendengarkan materi pelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran;
3. Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi;
4. Peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa dan melakukan evaluasi; dan,
5. Umpan-balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran.[65]

2. *Cooperative Learning*

Cooperative learning berasal dari kata *cooperative* yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim.[66]

---

[64] Penjelasan selengkapnya terkait dengan strategi pembelajaran aktif ini, dapat dibaca dalam Mel Silberman, *Active Learning,* hal. 121,130,149,153,168.

[65] Bonwell, C.C., *Teaching Improvement Workshop Enginering Education Development Project*, (ABD Loan, No.1432-INO, 1995), hal. 47.

[66] Isjoni, *Cooperative Learning; Mengembangkan Kemampuan Belajar Berkelompok,* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 15.

Falsafah yang mendasari *cooperative* dalam pembelajaran adalah falsafah *homo homoni socius*. Falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah mahkluk sosial. Kerja sama merupakan kebutuhan penting untuk kelangsungan kehidupan. Tanpa kerja sama tidak akan ada individu, keluarga, organisasi atau sekolah, dan tanpa kerja sama kehidupan sudah punah.[67]

Metode pembelajaran kooperatif dikembangakan salah satunya oleh Robert E. Selvin, dengan berpijak pada beberapa pendekatan yang diasumsikan mampu meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik. Pendekatan dimaksud adalah belajar aktif,[68] konstruktivistik,[69] dan kooperatif.[70] Beberapa pendekatan tersebut diintegrasikan untuk menghasilkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Belajar kooperatif memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih banyak lagi dari siswa lain sewaktu penyelesaian suatu

---

[67] Lie A. *Cooperative Learning, Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas,* (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 28.

[68] Pendekatan aktif, ditunjukkan dengan adanya keterlibatan intelektual dan emosional yang tinggi dalam proses belajar, tidak sekadar aktifitas fisik semata. Di sini peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat dan idenya, melakukan eksplorasi terhadap materi yang sedang dipelajari serta menafsirkan hasilnya secara bersama-sama di dalam kelompok. Peserta didik juga diberi kebebasan untuk mencari berbagai sumber belajar yang relevan. Kegiatan demikian memungkinkan peserta didik berinteraksi aktif dengan lingkungan dan kelompoknya, sebagai media untuk mengembangkan pengetahuannya.

[69] Pendekatan konstruktivistik, dalam model pembelajaran kooperatif dapat mendorong peserta didik untuk mampu membangun pengetahuannya secara bersama-sama di dalam kelompok. Mereka didorong untuk menemukan dan mengkonstruksi materi yang sedang dipelajari melalui diskusi, observasi atau percobaan. Dengan cara demikian, materi pelajaran dapat dibangun bersama dan bukan sebagai transfer dari pendidik. Pengetahuan dibentuk bersama berdasarkan pengalaman serta interaksinya dengan lingkungan di dalam kelompok belajar, sehingga terjadi saling memperkaya diantara anggota kelompok.

[70] Pendekatan kooperatif, mendorong dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk trampil berkomunikasi. Artinya, peserta didik didorong untuk mampu menyatakan pendapat atau idenya dengan jelas, mendengarkan orang lain dan menanggapinya dengan tepat, meminta *feedback* serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Selain itu, dengan pembelajaran kooperatif peserta didik juga akan mampu membangun dan menjaga kepercayaan, terbuka untuk menerima dan memberi pendapat serta ide-idenya, mau berbagi informasi dan sumber, mau memberi dukungan pada orang lain dengan tulus, dan sebagainya.

tugas kelompok.[71] Sebab model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkontruksi konsep yang melibatkan empat sampai enam orang siswa. Di dalam kelompok ini, siswa bekerja bersama-sama siswa yang lain di bawah pengawasan guru untuk menyelesaikan persoalan yang disediakan oleh guru. Di dalam diskusi kelompok tersebut, siswa-siswa dapat mengemukakan pendapatnya dan seorang siswa yang diangkat sebagai pimpinan kelompok dapat mengambil inisiatif untuk menyimpulkan hasil diskusi.[72]

Adapun ciri-ciri dalam pembelajaran kooperatif, menurut Muslim Ibrahim, dkk, di antaranya adalah:

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya;
2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah;
3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda-beda;
4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok ketimbang individu.[73]

Berpijak pada karakteristik pembelajaran kooperatif di atas, maka dapat diasumsikan jika pembelajaran kooperatif akan mampu memotivasi peserta didik dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan dapat meminimalisir kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses belajar mengajar.[74] Sehingga tidak mengherankan jika banyak kalangan yang menganggap model pembelajaran ko-

[71] A. Syukur Ghazali, *Jurnal.,* hal. 49-60.

[72] *Ibid.,* hal. 54.

[73] Muslim Ibrahim, dkk, *Pembelajaran Kooperatif,* (Surabaya: UNESA University Press, 2001), hal. 6.

[74] Baca: Wahyu Widada, *Pendekatan-Pendekatan dalam Pembelajaran Matematika,* (Surabaya: UNESA University Press, 2000), hal. 38.

operatif perlu untuk diterapkan dalam pendidikan termasuk dalam pendidikan Islam, sebab model pembelajaran ini tidak hanya unggul dalam membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit, tetapi juga berguna dalam menumbuhkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis, kemampuan membantu teman dan sebagainya. Ini artinya, selain dapat meningkatkan hasil belajar pada ranah kognitif, pembelajaran kooperatif juga memberikan pengaruh positif pada sejumlah hasil belajar seperti memperbaiki hubungan antara kelompok.[75]

Sedangkan terkait dengan teknik dan strategi dalam belajar kooperatif, menurut Robert A. Selvin, dalam *Cooperatif Learning: Teori, Riset dan Praktik,* terdapat 4 (empat) strategi yakni: *Student Teams Achievement Division* (STAD), *Group Investigation*, *Jigsaw,* dan *Structural Approach.*[76]

3. *Independent Learning*

Pembelajaran mandiri adalah proses pembelajaran yang menuntut siswa menjadi subjek yang harus merancang, mengatur dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Diyakini model ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang berkarakter demokratis dan humanistik, sebab metode ini merupakan cara belajar aktif dan partisipatif untuk mengembangkan potensi masing-masing individu tanpa tekanan dari siapapun dan tidak terikat dengan kehadiran guru.

Pembelajaran mandiri diawali dengan konsep yang sangat sederhana, yakni bagaimana seorang guru bisa membangkitkan selera belajar peserta didik seperti ketika mereka sedang butuh

---

[75] Model pembelajaran ini dapat diterapkan dalam pembelajaran di berbagai bidang studi atau matakuliah, baik untuk topik-topik yang bersifat abstrak maupun yang bersifat konkrit.

[76] Penjelasan terkait dengan penerapan teknik-teknik belajar kooperatif ini, lihat dalam Robert A Selvin, *Cooperatif Learning: Teori, Riset dan Praktik*, Terjemhan Lita, Cet. III (Bandung: Nusa Media, 2009), hal.10-16.

makan[77] atau minum. Model ini menawarakan cara belajar yang akan membawa siswa ke dunianya sendiri, yaitu dunia belajar yang menyenangkan, bebas dan tanpa tekanan dari siapapun.

Dalam prosesnya pembelajaran mandiri tidak bergantung pada subjek maupun metode instruksional, melainkan kepada siapa yang belajar, mencakup siapa yang memutuskan tentang apa yang akan dipelajari, siapa yang harus mempelajari sesuatu hal, metode dan sumber apa saja yang akan digunakan, serta bagaimana cara mengukur keberhasilan upaya belajar yang telah dilaksanakan.[78] Desain pembelajaran mandiri memberikan otonomi kepada siswa dalam menentukan arah atau tujuan belajarnya, sumber belajar, program belajar, materi pelajaran,[79] dan bagaimana cara mempelajarinya tanpa aturan secara ketat oleh guru atau peraturan.

Belajar mandiri tidak berarti peserta didik belajar sendiri, sebab hal terpenting dalam proses belajar mandiri ialah peningkatan kemauan dan keterampilan peserta didik dalam proses belajar tanpa bantuan orang lain, sehingga peserta didik tidak tergantung pada guru/instruktur, pembimbing, teman, atau orang lain dalam belajar. Di sini peserta didik benar-benar dituntut untuk berusaha secara mandiri dalam memahami isi pelajaran yang dibaca atau

[77] Muhamad Darori, *Bulletin Pusat Pembukuan,* Vol. 9, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal.24.

[78] Ratna Syifa'a Rachmahana, "Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Islam "el tarbawj"* No. 1. Vol. I. 2008, hal. 110.

[79] Menurut Prawiradilaga beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh materi ajar dalam pembelajaran mandiri diantaranya adalah, *Pertama*, Kejelasan rumusan tujuan belajar (umum dan khusus); *Kedua*, Materi ajar dikembangkan setahap demi setahap, dikemas mengikuti alur desain pesan, seperti keseimbangan pesan verbal dan visual; *Ketiga*, Materi ajar merupakan sistem pembelajaran lengkap, yaitu ada rumusan tujuan belajar, materi ajar, contoh/bukan contoh, evaluasi penguasaan materi, petunjuk belajar dan rujukan bacaan; *Keempat*, Materi ajar dapat disampaikan kepada siswa melalui media cetak, atau komputerisasi seperti CBT, CD-ROM, atau program audio/video; *Kelima*, Materi ajar itu dikirim dengan jasa pos, atau menggunakan teknologi canggih dengan internet (situs tertentu) dan e-mail; atau dengan cara lain yang dianggap mudah dan terjangkau oleh peserta didik; *Keenam*, Penyampaian materi ajar dapat pula disertai program tutorial, yang diselenggarakan berdasarkan jadwal dan lokasi tertentu atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Selengkapnya baca: Prawiradilaga, Dewi S dan Eveline Siregar, *Mozaik Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Prenata Media, 2004), hal.194.

dilihatnya. Dan jika mendapat kesulitan, barulah bertanya atau mendiskusikannya dengan teman, guru atau orang lain.

Pembelajaran mandiri lebih menekankan pada inisiatif dan kreatifitas peserta didik, dengan atau tanpa bantuan orang lain. Proses ini akan memberi manfaat yang positif bagi peserta didik seperti, dapat mengurangi ketergantungan peserta didik kepada pendidik atau orang lain, dapat menumbuhkan proses alamiah perkembangan jiwa peserta didik, dapat menumbuhkan tanggung jawab dalam diri peserta didik, dapat melatih kemandirian siswa agar tidak bergantung atas kehadiran atau uraian materi ajar dari guru. Berdasar gagasan keluwesan dan kemandirian inilah belajar mandiri telah ber-metamorfosis sedemikian rupa, di antaranya menjadi sistem belajar terbuka dan belajar jarak jauh. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain dan kenyataan di lapangan.

Berdasar pada urain di atas, maka dapat dipahami dalam pembelajaran mandiri pendidik bukanlah sebagai pihak yang menentukan segala-galanya dalam proses pembelajaran, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator[80] atau sebagai teman peserta didik dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Di sini guru bukanlah pengendali dalam proses belajar akan tetapi guru hanya sebagai penasehat yang memberikan pengarahan kepada siswa.

4. *Contectual Teaching Learning*

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan pendidik sebagai pemegang peranan utama, karenanya seorang pendidik dituntut untuk mer-

[80] Sebagai fasilitator, pendidik dapat membantu peserta didik dalam mengakrabi masalah yang dihadapi peserta didik, dan berupaya agar peserta didik dapat menemukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya. Sedangkan sebagai teman, pendidik menempatkan dirinya sama dengan peserta didik sebagai peserta yang mengharapkan nilai tambah dalam kehidupannya untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi, serta mengaktualisasikan dirinya. Lihat, Ratna Syifa'a Rachmahana, *Jurnal.*, hal.110.

ancang sebuah pembelajaran yang benar-benar dapat membekali anak didiknya baik pengetahuan secara teoritis maupun praktik. Dan salah satu strategi pembelajaran yang disinyalir dapat mengakomodir hal-hal di atas adalah strategi pembelajaran kontekstual (*contextual teaching learning)*.

Istilah kontekstual (*contextual*) berasal dari kata konteks (*contex*), yang berarti bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.[81] Sedangkan kontekstual (*contextual*) diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan konteks (*contex*).[82] Sesuai dengan pengertian konteks maupun kontekstual tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) merupakan pembelajaran yang dapat memberikan dukungan dan penguatan pemahaman siswa dalam menyerap sejumlah materi pembelajaran serta mampu memperoleh makna dari apa yang mereka pelajari sehingga mampu menghubungkannya dengan kenyataan hidup sehari hari.

Dalam penerapannya desain pembelajaran kontekstual ini tidak lepas dari landasan filosofisnya yaitu aliran konstruktivisme. Aliran ini melihat pengalaman langsung peserta didik (*direct experiences*) sebagai kunci dalam pembelajaran. Penerapan pembelajaran kontekstual juga melibatkan tujuh komponen utama dalam pembelajaran yaitu: konstruksivisme (*contructivism*);[83] bertanya

---

[81] Tim Penyusun, *Kamus.,* hal. 591.

[82] *Ibid.*

[83] Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sediki yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Lihat, Nurhadi, dkk. *Pembelajaran Kontekstual (Contextual Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK,* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), hal. 33.

(*questioning*);[84] menemukan (*inquiry*);[85] masyarakat belajar (*learning community*);[86] pemodelan (*modeling*);[87] refleksi (*reflection*);[88] dan asesmen otentik (*authentic assesment*).[89] Di sini dapat dipahami jika pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang berlandaskan pada dunia kehidupan nyata (*real world*), berpikir tingkat tinggi, aktivitas siswa (*doing math*), aplikatif, berbasis masalah nyata, penilaian komprehensif, dan pembentukan "manusia" yang memiliki akal dan nurani.

Selain melibatkan komponen-kompenan di atas, pembelajaran kontekstual juga harus didasarkan pada lima prinsip berikut:

1. Prinsip keterkaitan (*relevansi/relating*)

   Pembelajaran kontekstual hendaknya senantiasa memperhatikan adanya keterkaitan atau kesesuaian antara pengetahuan, keterampilan bakat, dan minat yang telah dimiliki siswa dengan unsur-unsur pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru (media, materi, alat bantu dan lain-lain).

[84] Bertanya merupakan induk dari strategi pembelajaran kontekstual, awal dari pengetahuan, jantung dari pengetahuan, dan aspek penting dari pembelajaran. Bertanya adalah suatu strategi yang digunakan secara aktif oleh siswa untuk menganalisis dan mengekplorasi gagasan-gagasan. Baca: Nurhadi, dkk. *Pembelajaran Kontekstual (Contextual Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK,* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), hal. 45.

[85] Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Lihat, Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching Learning)* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003), hal. 1.

[86] Masyarakat belajar menekankan bahwa hasil pembelajaran dapat diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari diskusi antar teman, antar kelompok dan antara mereka yang tahu dengan mereka yang belum tahu. Lihat, Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual*, hal. 16.

[87] Pembelajaran kontekstual memiliki prinsip salah satunya adalah guru bukan satu-satunya model, model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa bisa ditunjuk untuk memberikan contoh kepada siswa yang lain, siswa ditunjuk untuk mendemonstrasikan kemampuannya. Lihat, Nurhadi, dkk. *Pembelajaran Kontekstual*, hal. 50.

[88] *Refleksi* adalah cara berpikir tentang apa yang dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dimasa yang lalu. Refleksi merupakan gambaran terhadap kegiatan atau pengetahuan yang baru saja diterima. Lihat, Nurhadi, dkk. *Pembelajaran Kontekstual*, hal. 51.

[89] *Assessment* adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Penjelasan selengpanya baca: Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual,* hal. 19.

2. Prinsip pengalaman langsung (*experiencing*)

   Pengalaman langsung atau *experiencing* merupakan jantung dari pembelajaran kontekstual. Pemberian pengalaman langsung kepada siswa ini dapat melalui kegiatan, *eksplorasi* (perluasan), *discovary* (penemuan), *inventory* (pendaftaran), *investigasi* (penyelidikan) penelitian, dan lain-lain.

3. Prinsip aplikasi (*applying*)

   Penerapan prinsip aplikasi merupakan salah satu pembelajaran tingkat tinggi. Di sini siswa tidak hanya memiliki pengetahuan secara abstrak di alam pikiran namun mereka juga memiliki pengetahuan secara konkrit di alam nyata. Melalui pembelajaran aplikasi (penerapan), kepercayaan diri siswa akan tumbuh sehingga mereka terdorong untuk memikirkan karir dan profesi yang diminati.

4. Prinsip kerjasama (*cooperating*)

   Penerapan prinsip kerjasama dalam pembelajaran kontekstual, tidak hanya membantu para siswa dalam upaya menguasai materi pembelajaran tetapi juga memberikan wawasan kepada mereka bahwa penyelesaian suatu masalah atau tugas diperlukan kerjasama dalam bentuk tim kerja.

5. Prinsip alih pengetahuan (*transferring*)

   Prinsip alih pengetahuan dalam pembelajaran kontekstual merupakan pengembangan dari prinsip aplikasi. Selain siswa mampu menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam situasi yang berbeda, bahkan diharapkan mampu mengembangkan dan menemukan konsep baru. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran kontekstual yakni, siswa mampu menerapkan materi yang telah dipelajarai untuk memecahkan masalah-masalah baru merupakan penguasaan

strategi *kognitif* atau pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentuk menemukan (finding).[90]

Kelima prinsip di atas memiliki teknik yang berbeda, sehingga pembelajaran akan berlangsung secara veriatif, kreatif, aktif dan rekreatif.

Dalam *contextual teaching and learning* (CTL) pembelajaran diatur oleh siswa sendiri dan pembelajaran kerja sama. Tugas guru di sini adalah menyiapkan jenis dan bentuk tugas yang akan dikerjakan siswa yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa.[91] Di sini seorang guru berperan sebagai *ekspert* (ahli) dan mentor, karena ia akan lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas lain seorang guru dalam pembelajaran kontektual ialah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas.

5. Pembelajaran Quantum

Termasuk salah satu strategi pembelajaran yang erat kaitannya dengan format pendidikan Islam yang demokratis dan humanistik adalah strategi pembelajaran *quantum*. Istilah kuantum merupakan *term* yang dipinjam dari fisika kuantum, yang diartikan sebagai konsep perubahan energi menjadi cahaya. Sedangkan istilah pembelajaran kuantum bermakna interaksi-enteraksi yang mengubah energi menjadi cahaya karena semua kehidupan adalah energy.[92] Tokoh utama model pembelajaran ini adalah Bobbi

---

[90] Abdul Gafur, *Modul Perencanaan Pembelajaran PPKn Berbasis Kompetensi,* (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal. 2-3.

[91] Guru sebagai *ekspert* karena mengusai materi dan proses pembelajaran secara professional, dan Guru sebagai mentor karena dengan pengalaman dan wawasannya yang luas mampu mengerti kebutuhan dan minat, serta kesulitan yang dihadapi siswa. Baca: Sukmadinata, *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. (Bandung: Yayasan Kusumakarya, 2004), hal.176.

[92] Bobbi de Porter, *Quantum Learning; Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Terjemahan Meutia Sari, Abdurrahman Alwiyah (Bandung: Kaifa, 2000), hal.16.

dePorter.[93]

Meskipun dinamakan pembelajaran kuantum falsafah dan metodologi pembelajaran kuantum ini tidaklah diturunkan atau ditransformasikan secara langsung dari fisika kuantum dan tidak pula ditransformasikan dari prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan utama fisika kuantum yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Dengan perkataan lain, prinsip-prinsip pembelajaran kuantum bukanlah penurunan, adaptasi, modifikasi atau transformasi prinsip-prinsip fisika kuantum, melainkan hanya sebuah analogi prinsip relativitas Einstein saja.

Dalam pembelajaran kuantum berlaku prinsip bahwa proses pembelajaran merupakan permainan orkestra simfoni. Sebuah simfoni selain memiliki lagu atau partitur, pemainan simfoni juga memiliki struktur dasar *chord*. Struktur dasar *chord* ini dapat disebut prinsip-prinsip dasar pembelajaran kuantum. Prinsip-prinsip tersebut adalah, segalanya berbicara; segalanya memiliki tujuan; pengalaman sebelum pemberian nama; mengakui setiap usaha; dan layak dipelajari maka layak dirayakan (diberi *reward*) .[94] Selain prinsip-prinsip di atas, dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa pembelajaran harus berdampak bagi terbentuknya keunggulan peserta didik, artinya proses pembelajaran perlu diartikan sebagai pembentukan keunggulan.

Berdasarkan pada karakteristik dan penerapannya, model pembelajaran kuantum terbagi menjadi dua *quantum learning* dan *quantum teaching*.

---

[93] Bobbi de Porter, adalah seorang ibu rumah tangga yang terjun di bidang bisnis properti dan keuangan, dan setelah semua bisnisnya bangkrut akhirnya menggeluti bidang pembelajaran. Dialah perintis, pencetus, dan pengembang utama pembelajaran kuantum

[94] Penjelasan selengkanya terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran *quantum* tersebut, baca: "Konsep Quantum Teaching" dikutib dari http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/Pendas11.asp.

a. ***Quantum Learning***

Quantum learning merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Bobbi de Porter perintis, pencetus, dan pengembang utama pembelajaran kuantum menjelaskan pengertian *quantum learning* (QL), sebagai berikut:

> *Quantum learning is a comprehensive model that covers both educational theory and immediate classroom implementation. Into integrates research-based best practices in education into a unified whole, making content more meaningful and relevant to students' lives. Quantum learning is about bringing joy to teaching and learning with ever-increasing 'Aha' moment of discovery. It help teachers to present their content a way that engages and energizes students. This model also integrates learning and life skills, resulting in students who become effective lifelong learners-resposible for their own education.*[95]

(*Quantum learning* adalah keseluruhan model yang mencakup kedua teori pendidikan dan pelaksanaan di kelas dengan cepat. Ini menggambarkan praktik dasar penelitian terpadu yang terbaik dalam pendidikan ke dalam keseluruhan, yang membuat isi lebih bermakna dan relevan bagi kehidupan siswa. *Quantum learning* menjadikan mengajar dan belajar menjadi senang dengan peningkatan 'Aha' pada kegiatan penemuan. Ini membantu guru menampilkan isi mereka yang merupakan sebuah jalan yang dapat menyertakan dan memberdayakan siswa. Model ini juga memadukan belajar dan kecakapan hidup, menghasilkan siswa-siswa sebagai pebelajar yang efektif selamanya-bertanggungjawab bagi pendidikannya sendiri).

[95] Bobbi de Potter "The Impact of Quantum Learning", dikutip dari http://learningforum.com

Quantum learning pada dasarnya menggabungkan *suggestology* atau *suggestopedia,*[96] teknik percepatan belajar dan NLP dengan teori, keyakinan dan metode, karena itulah *quantum learning* memiliki konsep-konsep kunci dari berbagai teori dan strategi belajar yang lain, seperti: teori otak kanan/kiri;[97] teori otak *triune* (3 in 1);[98] pilihan modalitas (*visual*, *auditorial*, dan *kinestetik*);[99] teori kecerdasan ganda (*multiple intelegences)*;[100] pendidikan *holistik* (menyeluruh);[101] belajar berdasarkan pengalaman;[102] belajar dengan simbol;[103] dan simulasi atau permainan.[104]

---

[96] Prinsip *suggestology* hampir mirip dengan proses *accelerated learning*, pemercepatan belajar: yakni, proses belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang normal, dan dibarengi kegembiraan. Suasana belajar yang efektif diciptakan melalui campuran antara lain unsur-unsur hiburan, permainan, cara berpikir positif, dan emosi yang sehat. Baca: Septiawan Santana Kurnia, "Quantum Learning bagi Pendidikan Jurnalistik: Studi pembelajaran jurnalistik yang berorientasi pada *life skill"*; *Editorial Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, dikutip dari www.depdiknas.go.id/accessed 10 Oktober 2009.

[97] Teori otak kanan/kiri, di mana cara berpikir otak kanan dan otak kiri yang berbeda, di mana proses berpikir otak kiri bersifat logis, sekuensial, linear dan rasional. Baca: Bobbi de Porter, hal. 37-39.

[98] Teori otak *triune,* di mana dimensi-dimensi otak yang disebut *triune brain* yang menggambarkan cara-cara berfikir dari mulai tingkat terendah (primitif) sampai tingkat tertinggi. Baca: DePorter, *Quantum Learning,* hal. 29.

[99] Pilihan modalitas atau gaya belajar, yaitu cara orang menyerap dan mengatur informasi. Penjelasan selengkanya baca: DePorter, *Quantum Learning,* hal. 113.

[100] Teori kecerdasan ganda atau *multiple intelegence*, dikembangkan oleh Howard Gardner, intelegensi ganda mempunyai dimensi linguistik-verbal, logis-matematik, visual-spasial, *bodily kinestetik*, *musical-rhytmic, naturalist*, interpersonal dan intrapersonal. Penjelasan terkait dengan *multiplate intelegence* ini, baca: Daniel Goleman. 1999. *Kecerdasan Emosional.* Terjemahan T. Hermaya. (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama).

[101] Pendidikan yang bersifat menyeluruh (holistik), balajar tidak hanya menggunakan "otak" dalam arti sadar, rasional, otak kiri, dan verbal, melainkan melibatkan seluruh tubuh dan pikiran dengan menekankan keseimbangan berbagai dimensi; pikiran, tubuh, emosi dan semua indera serta saraf; pelajar. Lihat, Dave Meier, *The Accelerated Learning Handbook: Panduan Kreatif dan Efektif Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan*. Terjemahan Rahmani Astuti. (Bandung: Kaifa, 2003), hal. 40.

[102] Belajar berdasarkan pengalaman, yaitu pendekatan praktis pembelajaran di mana biasanya peserta belajar membentuk kelompok kecil yang dimulai dengan satu kegiatan, permainan atau simulasi yang bersemangat. Baca: Agus Nggermanto, *Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum),* (Bandung: Nuansa, 2003), hal. 209.

[103] Belajar dengan simbol (*metaphoric learning*), yaitu pembelajaran yang menekankan pencitraan dengan menggunakan metafora dalan proses belajarnya.

[104] Permainan belajar, jika dimanfaatkan secara bijaksana, dapat; menyingkirkan keseriusan yang menghambat, menghilangkan stres dalam lingkungan belajar, mengajak orang terlibat penuh, dan meningkatkan proses belajar. Baca, Dave Meier. *The Accelerated*, hal. 206.

Dalam penerapanya *quantum learning* mengkonsep tentang menata pentas, lingkungan belajar yang tepat. Penataan lingkungan sebagai upaya untuk membangun dan mempertahankan sikap positif. Dengan mengatur lingkungan belajar sedemikian rupa, para pelajar diharapkan mendapat langkah pertama yang efektif untuk mengatur pengalaman belajar.[105] Dari proses inilah, *quantum learning* menciptakan konsep motivasi, langkah-langkah menumbuhkan minat, dan belajar aktif.

b. ***Quantum Teaching***

Quantum teaching merupakan orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar situasi belajar. Interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa, mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Menurut de Porter *quantum teaching*, adalah pengubahan belajar yang meriah, dengan segala nuansanya.[106] *Quantum teaching* juga menyertakan segala kaitan, interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar, yang berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas.

Pada dasarnya, *quantum teaching* merupakan strategi mengajar yang diciptakan berdasarkan teori-teori pendidikan seperti, *accelerated learning* (Lozanov), *multiple intelegences* (Gardner), *neuro-linguistic programming* (Grinder dan Bandler), *experiential learning* (Hahn), *socratic inquiry*, *cooperative learning* (Johnson

[105] Penataan lingkungan belajar ini dibagi dua yakni, lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro ialah tempat peserta didik melakukan proses belajar (bekerja dan berkreasi). Sedangkan yang dimaksudkan lingkungan makro ialah "dunia yang luas." Peserta didik diminta untuk menciptakan ruang belajar di masyarakat. Mereka diminta untuk memperluas lingkup pengaruh dan kekuatan pribadi, berinteraksi sosial ke lingkungan masyarakat yang diminatinya. (lihat dalam, Septiawan Santana Kurnia, "Quantum Learning bagi Pendidikan Jurnalistik: Studi pembelajaran jurnalistik yang berorientasi pada *life skill*"; online: *Editorial* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, dikutip dari www.depdiknas.go.id).

[106] Bobbi de Porter, *Quantum Teaching: Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-Ruang Kelas*, Terjemahan Nilandari (Bandung: Kaifa 2000), hal. 3.

dan Johnson), dan *element of effective instruction* (Hunter).[107] Teori-teori tersebut menawarkan model-model pembelajaran yang meninggalkan metode-metode belajar konvesional.

Dalam penerapannya, model pembelajaran ini bersandar pada asas "*Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita, dan Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka*".[108] Ini adalah asas utama sebagai alasan dasar dibalik strategi, model, dan keyakinan *quantum teaching*. Maksudnya untuk mendapatkan hak mengajar, seorang guru harus membuat jembatan autentik memasuki kehidupan murid sebagai langkah pertama. Setelah kaitan itu terbentuk, guru dapat membawa muridnya ke dalam dunia guru, dan memberi mereka pemahaman guru mengenai isi dunia itu. Dengan begitu, maka dapat dikatakan jika pembelajaran quantum sebenarnya merupakan kegiatan *full content* yang melibatkan semua aspek kepribadian peserta didik (pikiran, perasaan, dan bahasa tubuh) di samping pengetahuan, sikap, dan keyakinan sebelumnya, serta persepsi masa mendatang. Semua ini harus dikelola sebaik-baiknya, diselaraskan hingga mencapai harmoni (diorkestrasi).[109]

Dalam *quantum teaching* juga terdapat empat prinsip komunikasi ampuh yang dapat menciptakan komunikasi efektif antara guru dan siswa, serta dapat memperbaiki interaksi komunikasi guru dan siswa di kelas. Komunikasi ampuh dapat dipakai oleh guru ketika mengajar, memberikan petunjuk, menata konteks, atau memberikan umpan balik.[110] Empat prinsip komunikasi ampuh dalam *quantum teaching* dimaksud adalah, Munculkan kesan; Arahkan fokus; Inklusif; dan, Spesifik.[111] Mengutip pendapat

---

[107] Penjelasan selengkapnya terkait dengan landasan teori *quantum teaching*, baca Bobbi de Porter, *Quantum Teaching*, hal. 4.

[108] Bobbi de Porter, *Quantum Teaching,* hal. 6.

[109] Abd. Rachman Assegaf, dkk, "Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan",

[110] Bobbi De Porter, *Quantum Teaching.,* hal. 118.

[111] Penjelasan selengkapnya terkait dengan empat prinsip komunikasi ampuh dalam *quantum teaching*, baca: Bobbi De Porter, *Quantum Teaching.,* hal.122.

Didit Darmawan, ke-empat prinsip komunikasi ampuh tersebut merupakan komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan melalui suatu percakapan. Komunikasi verbal harus didukung oleh komunikasi nonverbal, yaitu mengarah kepada komunikasi tanpa kata seperti sikap, gerakan tubuh, gerak isyarat, dan ekspresi wajah.[112]

D. Evaluasi yang Demokratis dan Humanis

Perwujudan pola pembelajaran dan pendidikan yang demokratis dan humanistik dapat dimulai dengan mengubah salah satu komponen penting pendidikan yakni evaluasi.[113] Secara etimologis evaluasi berasal dari Bahasa Inggris *evaluation* yang bertarti *value*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai penilaian.[114] Sedang menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.[115]

Menurut Murray Print "Evaluasi adalah sumber informasi bagi *staekeholdier* pendidikan untuk mengetahui pencapain kinerja dalam proses belajar mengajar sekaligus menentukan kebijakan pendidikan maupun keputusan dalam pengembangan kurikulum pada periode selanjutnya".[116] Evaluasi juga sering diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu

---

[112] Didit Darmawan, *Komunikasi dan Presentasi,* (Surabaya: Mahardika, 2006), hal. 4.

[113] Istilah evaluasi, pengukuran (*measurement*), dan penilaian (*assessment*) memiliki makna yang berbeda. Evaluasi sebagai kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Penilaian (*assesment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian) kemampuan siswa. Baca: Depdiknas, *Pelayanan Profesional Kurikulum 2004*, (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, 2004). hal. 11.

[114] Tim Penyusun, *Kamus*., hal. 400.

[115] Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bum Aksara,1993) hal. 03

[116] Murray Print (1993:187)

objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur[117] untuk memperoleh suatu kesimpulan.[118]

Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, mendifinisikan Evaluasi sebagai kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai (*value judgment*).[119]

Sementara dalam konsepsi Islam, evaluasi merupakan penetapan baik buruk memadai kurang memadai terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati sebelumnya dan dapat dipertanggung jawabkan.[120] Pengertian lain dari evaluasi ini adalah suatu usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku, atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu proses pembelajaran telah berhasil dengan baik atau tidak.

Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan, seka-

---

[117] Tolok ukur yang dipakai guru untuk menilai adalah *rubric*, di mana di dalamnya berisi kriteria yang mesti ada dan atau dicapai siswa dari setiap bentuk evaluasi yang diadakan. Untuk mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem *student centered* dan kemudian dapat membuat evaluasi dan penilaian dengan baik, di sekolah High/Scope diterapkan suatu strategi yang disebut *Understanding by Design*â. Salah satu aspeknya adalah konsep *backward design*, di mana kita sebagai guru mesti pertama-tama menentukan hasil yang diharapkan dari siswa dari suatu proses belajar sebelum menentukan proses belajarnya sendiri. Penilaian terhadap hasil belajar siswa mesti memperhiungkan keseluruhan proses yang mencakup tiga unsur, yakni produk, proses, dan progress.

[118] Chabib Toha, Tekhnik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 1

[119] Depdiknas, *Pelayanan Profesional Kurikulum 2004; Penilaian Kelas,* (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, 2004), hal. 11.

[120] Abd. Azis, *Filsafat Pendidikan Islam*, hal. 165

ligus sebagai sarana pendidik untuk mengetahui titik kelemahan kegiatan belajar-mengajar sehingga mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik ke depan.

Dalam hal ini, Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pemdidikana Nasional Pasal 57 ayat (1), menegaskan, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelangara Pendidikan kepada pihak-piahk yang berkepentingan, diantarnya terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan. Sebab itu, seorang pendidik (guru) dituntut untuk menyelenggarakan evaluasi di akhir setiap sesi pelajaran, baik untuk melihat efektifitas strategi yang dikembangkan, maupun untuk mengukur hasil belajar siswa yang dapat dijadikan input untuk perencanaan pembelajaran berikutnya. Jika guru tidak mempunyai data tentang keberhasilan hari itu, maka akumulasi ketidakpahaman siswa juga akan terulang, dan sekolah akan terus dikritik oleh client-nya karena meluluskan siswa dengan nilai di bawah standar minimal penguasaan bahan ajar.[121]

Esensinya evaluasi bukanlah sekadar menilai suatu aktifitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas. Kegiatan evaluasi memerlukan penggunaan informasi yang diperoleh melalui pengukuran maupun dengan cara lain untuk menentukan pendapat dan membuat keputusan pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan yang demokratis dan humanistik, evaluasi pembelajaran haruslah didasarkan pada bukti yang baik dan memadai, serta dilakukan dengan cara yang adil dan objektif. Penilaian atau evaluasi yang adil menurut Mulyasa, ti-

[121] Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis.,* hal.22

dak dipengaruhi oleh faktor keakraban (*hallo effect*), menyeluruh, memiliki kriteria yang jelas, dilakukan dalam kondisi yang tepat, dan dengan instrument yang tepat pula, sehingga mampu menunjukan prestasi belajar peserta didik sebagaimana adanya (*objektif*),[122] sebab dalam pendidikan yang demokratis dan humanistik yang menjadi dasar dari evaluasi belajar adalah bukti yang baik dan memadai.

Dalam hal ini ada 3 kualitas untuk dapat menentukan baik atau tidaknya bukti-bukti pendukung penilaian, yakni *validity,*[123] *reliability,*[124] dan *quantity.*[125] Karena itulah, sejak merencanakan pelajaran, guru harus sudah menentukan hasil akhir yang diharapkan dari para siswa atas materi yang diajarkan dan apa saja piranti yang dipakai untuk penilaian.

Piranti yang bisa digunakan untuk mengevaluasi perkembangan belajar peserta didik, di antaranya *Informal checks for understanding;*[126] Tes dan kuis;[127] dan *Project.*[128] Selain ke-tiga piranti

---

[122] E. Mulyasa, *Menjadi.*, hal. 62.

[123] Mengacu pada kepatutan dan memadainya interpretasi yang dibuat berdasarkan informasi atau data yang tersedia.

[124] Mengacu pada kekonsistenan hasil assessment yang dilakukan. Konkretnya, siswa yang sama dapat memperoleh skor yang sama pada dua kesempatan test pada waktu yang berbeda atau mendapat score yang sama ketika dievaluasi oleh dua guru yang berbeda.

[125] Menggunakan berbagai macam bukti yang dapat dipercaya

[126] Mengecek pemahaman siswa secara informal dapat dilakukan dengan cara tanya-jawab ketika pelajaran sedang berlangsung, bisa juga dalam bentuk mengecek pemahaman siswa atas pekerjaannya sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan, dan lain-lain. Observasi guru dan dialog dengan siswa masuk dalam kategori ini. *Informal check for understanding* merupakan bagian integral dari proses pembelajaran bila kita menganut sistem *ongoing assessment*. Hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter siswa.

[127] Tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat pertanyaan dan/atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait, atribut pendidikan, psikologik atau hasil belajar yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Baca dalam Tim PEKERTI-AA PPSP LPP, *Panduan Pengembangan Kurikulum; Panduan Evaluasi Pembelajaran,* cet. I (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007), hal.10

[128] Project sifatnya sifatnya bisa short-term maupun long-term (bulanan atau satu smester). *Project* lebih merupakan pengaplikasian teori atau konsep yang didapat di sekolah dalam kasus-kasus konkret, dengan tujuan, audiens dan situasi yang tertentu. Pada level ini, siswa dimungkinkan untuk menggarap project yang sesuai dengan minatnya.

tersebut, guru juga masih memerlukan piranti-piranti lainnya, seperti *anecdotal notes*. Guru membuat catatan harian tentang apa yang dicapai siswa lebih khusus berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran atau aplikasi nilai-nilai dari materi yang diajarkan atau dipelajari. *Anecdotal notes* sifatnya individual atau per siswa, seperti: Pekerjaan rumah;[129] Report;[130] Presentasi,[131] Student self assessment.[132]

Hal penting lain yang harus diperhatikan dalam kegiatan evaluasi ini ialah evaluasi belajar haruslah bersifat komprehensif, artinya mencangkup semua aspek, baik aspek *kognitif*, *afektif* maupun *psikomotorik*.[133]

1. Ranah kognitif

   Ranah kognitif, sebagai ranah hasil relajar yang berkenaan dengan kemampuan pikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, pengetahuan yang berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisai, penentuan dan penalaran dapat diartikan sebagai kemampuan intelektual. Evaluasi hasil belajar kognitif ini dapat dilakukan dengan menggunakan tes objektif maupun tes uraian, dan lain-lain.

---

[129] Pekerjaan rumah, selain bermanfaat untuk melihat sejauh mana siswa dapat menggunakan konsep yang telah dipelajari, juga akan membantu guru untuk mengukur keseriusan dan tanggung jawab siswa dalam belajar. Ketepatan waktu, kerapihan dan ketuntasan dalam mengerjakan PR dapat menjadi catatan guru.

[130] Report bisa menjadi bagian dari satu project, bisa juga menjadi bagian yang berdiri sendiri. Kelengkapan informasi, sistematika atau komposisi, dan lain-lain menjadi hal yang diperhatikan dalam pengerjaan report.

[131] Siswa yang sungguh menguasai pokok pembelajaran dapat diketahui lewat kemampuan presentasinya. Kendati demikian, harus juga diperhatikan karakter masing-masing siswa. Misalkan ada siswa yang sungguh menguasai materi tetapi sulit mengkomunikasikannya lewat presentasi.

[132] Student self assessment bermanfaat untuk mendapat umpan balik dari para siswa. Siswa menilai dirinya sendiri sejauh mana dia telah menguasai materi yang telah diajarkan atau dipelajari.

[133] Lihat, Tim Pekerti-AA PPSP LPP, *Panduan.,* hal. 13-20

2. Ranah afektif

   Ranah afektif adalah kemampuan yang berkenaan dengan perasaan, emosi, sikap penerimaan atau penolakan status objek, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: *attitude*/sikap, *self concept/self-esteem*, *interest, value/beliefs as to what should be desired*.

3. Ranah Psikomotor

   Ranah ketrampilan motorik atau psikomotor dapat diartikan sebagai serangkaian gerakan otot-otot yang terpadu untuk dapat menyelesaikan suatu tugas. Evaluasi ketrampilan psikomotor dapat dilakukan melalui analisis tugas (*task analyisis*). Dengan analisis tugas itu akan dapat dipelajari ciri-ciri demensi itu dan dapat tidaknya demensi itu untuk diobservasi dan diukur.

Evaluasi terhadap ketiga ranah tersebut, haruslah dilakukan dengan seimbang, sebab jika aspek *afektif* atau *psikomotorik* lepas dari proses evaluasi, dan hanya menekankan pada ranah *kognitif* seperti yang terjadi selama ini, itu berarti proses belajar mengajar hanya mengejar penumpukan materi dan informasi, kurang demokratis dan tidak humanis.

Disamping itu dalam pendidikan demokratis dan humanis kegiatan evaluasi juga harus berjalan dua arah, yakni pendidik mengevaluasi peserta didik, dan peserta didik mengevaluasi pendiknya. Menurut Abdurahman Mas'ud, "evaluasi para siswa terhadap gurunya ini lebih representative dan objektif jika dibandingkan dengan evaluasi yang dilakukan oleh tenaga pengawas yang belum tentu sebulan sekali mengadakan interaksi dengan guru"[134]. Evaluasi dua arah ini tidak terlepas dari pandangan bahwa peserta didik adalah pusat dari proses pendidikan dan pembelajaran,

[134] Abdurahaman Mas'ud, *Menggagas,* hal. 212

mereka adalah individu-individu yang merdeka, dan memiliki otoritas serta mampu mengambil keputusan yang didasari sikap tanggung jawab.

E. Penerapan Reward dan Punisment

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah *reward* diartikan sebagai ganjaran atau hadiah (sebagai pembalas jasa), dan hukuman; balasan.[135] Dari definisi ini dapat dipahami bahwa ganjaran dalam Bahasa Indonesia bisa dipakai untuk balasan yang baik maupun balasan yang buruk. Sementara dalam Bahasa Arab ganjaran diistilahkan dengan *tsawab.*[136] Kata *tsawab* bisa juga berarti pahala upah dan balasan. Kata *tsawab* banyak ditemukan dalam al-Quran, khususnya ketika kitab suci ini membicarakan tentang apa yang akan diterima oleh seseorang, baik di dunia maupun di akhirat dari amal perbuatannya.

> *"Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat".* (Qs. an-Nisa [4]: 134)

Secara umum *reward* dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu kebaikan, yang diberikan pada seseorang dengan pertimbangan adanya beberapa tugas yang harus diselesaikan agar seseorang merasa lebih berguna. Sedangkan secara khusus reward dapat dimaknai sebagai pemberian hadiah/imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik. Sedang hukuman adalah beberapa stimulus atau kejadian

---

[135] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hal. 435

[136] Berdasarkan penelitian dari ayat-ayat tersebut, kata tsawab selalu diterjemahkan kepada balasan yang baik. Sebagaimana salah satu diantaranya dapat dilihat dalam firman Allah SWT pada surat Ali Imran: 145, 148, an-Nisa: 134. Dari ketiga ayat di atas, kata tsawab identik dengan ganjaran yang baik.

yang bilamana ditampilkan akan melemahkan kekuatan respon atau menurunkan/mengurangi frekuensi munculnya respon.

Konsep *reward* dan *punishment* ini juga dikenal dalam ajaran agama. Dalam Islam misalnya diajarkan tentang adanya sorga dan neraka. Siapa saja yang melakukan amal buruk (negatif) atau mengingkari ajaran Allah Swt,. adalah dosa (diberi *punishment*), dan siapa saja yang melakukan amal baik (positif) dan mematuhi perintah serta meninggalkan laranganNya, maka akan diberi pahala atau *reward*. Dalam ajaran Islam, seseorang yang memiliki banyak dosa akan dimasukan kedalam Jahanam (neraka) sebagai *punishment*, dan yang melakukan banyak kebajikan, memiliki banyak pahala maka bagi mereka akan dimasukkan kedalam sorga sebagai ganjaran (*reward*).

Dalam literatur Islam, Istilah hukuman sepadan dengan istilah '*iqab*, *jaza'* dan '*uqubah*. Kata '*iqab* dalam al-Qur'an disebut sebanyak 20 ayat, kata ini biasanya diikuti dengan kata *syadid,* yang berarti keras, sangat, amat, yang mengarah kepada tindakan Allah atas perilaku negatif yang dilakukan hambaNya, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya:

> *"(keadaan mereka) adalah sebagai Keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan Allah sangat keras siksa-Nya".* (QS. Ali Imran [3]: 11)

Reward dan *punishment* merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Kedua metode ini sudah cukup lama dikenal dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan reward dan punishmen dapat diterapkan tetapi harus selalu dengan

tujuan dan cara-cara edukatif, padagogis, atau mendidik.[137]

Pemberian hukuman dalam konteks pendidik bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah berlanjutnya perilaku negative peserta didik, sedangkan ganjaran berguna untuk penguatan atas perilaku positif yang dilakukan oleh anak didik. Bentuk konsep hadiah dan hukuman ketika dikaitkan dengan konteks pendidikan adalah bentuk penguatan terhadap peserta didik. Bentuk dari *reward* seperti menghargai, memuji, mencium, bertepuk tangan dan sampai pada memberi hadiah. Sementara bentuk dari *punishment* seperti tidak acuh, membentak, menghardik, menasehati, sampai pada memukul, atau hukuman fisik lain. Keduanya sangat penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Jika reward merupakan bentuk *reinforcement* yang positif; maka *punishment* sebagai bentuk *reinforcement* yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi.

Terkait penerapan *rewards* dalam konteks pendidikan Islam dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Ekspresi Verbal/Pujian yang Indah.

   Pujian ini diberikan agar anak lebih bersemangat belajar. Penggunaan teknik ini dilakukan oleh Rasulullah Saw., ketika memuji cucunya, al-Hasan dan al-Husein yang menunggangi punggungnya seraya beliau berkata; *"Sebaik-baik unta adalah unta kalian, dan sebaik-baik penunggang adalah kalian."* (H.R. Ath-Thabrani dari Jabir ra).

2. Imbalan materi/hadiah.

   Anak memiliki tabiat menyukai hadiah. Biasanya mereka begitu ingin mendapatkannya. Karena itu, layak kiranya jika

[137] Abdurahman Mas'ud, *Menggagas.*, hal.172

kita berikan apa yang mereka sukai ini pada kesempatan tertentu. Tidak sedikit anak-anak yang termotivasi dengan pemberian hadiah. Cara ini bukan hanya menunjukkan perasaan cinta, tetapi juga dapat menarik cinta dari si anak, terutama apabila hal itu tidak diduga.

3. Memandang dan tersenyum

   Hal ini terkadang dianggap sepele, padahal ia menunjukkan cinta dan kasih sayang, sebagaimana juga dapat menunjukkan hukuman apabila pandangan yang diberikan adalah pandangan yang tajam disertai muka yang masam. Karena itu, pandangan yang lembut disertai dengan senyuman dapat meningkatkan motivasi belajar anak didik.

4. Menuliskan namanya di papan.

   Bentuk ganjaran (*rewards*) juga dapat dilakukan pendidik dengan memasang semacam papan pengumuman di tempat yang mudah dilihat. Disitu ditulis nama-nama anak sesuai kelebihannya, baik dalam perilaku, kesungguhan, kebersihan, dan yang lainnya. Pengumuman semacam ini akan menjadi motivasi bagi yang lainnya untuk mencontoh mereka, sehingga nama mereka juga akan ditulis di papan tersebut.

5. Menunjukkan kebaikannya.

   Ketika anak mampu dengan baik menerangkan suatu pelajaran di depan kelas, pendidik dapat menepuk bahunya atau dengan memujinya, hal ini akan memotivasi anak didik untuk terus belajar dengan lebih giat.

6. Menganggap diri kita bagian dari mereka.

   Pemberian penghargaan kepada anak yang berprestasi, bisa pula dengan menyatakan bahwa kita merupakan bagian dari mereka. Ini akan menjadi penghargaan besar bagi mereka.

7. Wejangan.

   Penghargaan pada seorang anak yang baik bisa pula berupa wejangan kepada anak-anak dan pendidik yang lain untuk berbuat baik pada si anak. Ini merupakan motivasi bagi anak itu sendiri maupun bagi anak-anak yang lain, sehingga mereka pun akan mencontoh kesungguhan dan akhlaknya.

Adapun pemberian hukuman (*punishment*), dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

1. Nasihat dan bimbingan.

   Ini merupakan metode dasar dalam mendidik dan mengajari anak yang tak dapat ditinggalkan. Metode ini telah ditempuh oleh sang pendidik yang agung terhadap anak-anak kecil maupun orang dewasa. Penerapan metode ini pada anak-anak dilakukan oleh Rasulullah Saw, ketika melihat seorang anak yang tangannya menjelajahi makanan yang terhidang saat itu. Lalu beliau pun mengajarinya tata-cara makan yang benar, Rasulullah Bersabda: *"Nak, sebutlah dulu nama Allah, makan dengan tangan kananmu, dan makan dari makanan yang dekat denganmu."* (HR. Al-Bukhari no. 5376 dan Muslim no. 2022)

   Adapun nasihat dan bimbingan beliau pada orang-orang yang telah dewasa lebih banyak lagi contoh yang menunjukkan pengaruhnya. Seperti kisah A'rabi yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu: Suatu ketika, kami sedang berada di masjid bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Tiba-tiba datang seorang A'rabi, lalu dia berdiri dan buang air kecil di dalam masjid. Para shahabat menyergah, *"Hus! Hus!"* Rasulullah Saw, mengatakan, *"Jangan kalian putuskan kencingnya! Biarkan dia dulu!"* Para shahabat pun membiarkannya sampai selesai buang air. Setelah itu, Rasu-

lullah Saw, memanggil dan menasihatinya: *"Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk buang air kecil ataupun buang kotoran. Masjid-masjid ini hanyalah untuk dzikir kepada Allah, untuk shalat, dan membaca Al-Qur`an."* Atau sebagaimana yang beliau katakan. Kemudian beliau menyuruh seseorang untuk mengambil setimba air, lalu dituangkan pada bekas kencing tersebut. (HR. Al-Bukhari no. 219 dan Muslim no. 285).

2. Wajah masam

   Kadangkala boleh pula seorang pendidik menunjukkan wajah masam pada anak-anak bila melihat mereka gaduh saat mengikuti pelajaran di kelas. Ini lebih baik daripada membiarkan mereka berbuat gaduh, setelah keterlaluan baru memberi hukuman kepada mereka.

3. Teguran keras.

   Biasanya bila kita menegur dengan keras anak yang berbuat salah, dia akan berhenti berbuat kesalahan dan duduk kembali dengan penuh adab. Metode ini diterapkan Rasulullah Saw, saat beliau melihat seseorang yang menggiring unta hadyu (hewan kurban bagi jamaah haji) dalam perjalanannya berhaji dan tidak mau menungganginya. Beliau mengatakan; *"Tunggangi hewan itu!"* Orang itu menyangka bahwa hewan hadyu tidak boleh ditunggangi, hingga ia pun menjawab: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini hewan hadyu!" Setelah dua atau tiga kali, akhirnya beliau menghardiknya, "Tunggangi hewan itu! Celaka kamu!"* (Hr. Al-Bukhari No. 6160 dan Muslim No. 1322).

4. Menghentikan perbuatan anak.

   Jika anak ribut berbicara dalam pelajaran, kita bisa menghentikannya dengan suara keras, dalam sebuah hadist Rasulullah

Saw, pernah mengatakan pada seseorang yang bersendawa dihadapan beliau: *"Hentikan sendawamu di hadapan kami!"* (HR. At-Tirmidzi No. 2478).

5. Memalingkan wajah.

   Ketika anak berbohong, atau berbuat kesalahan lain, boleh seorang pendidik memalingkan wajah darinya, ini dimaksudkan agar anak tahu kemarahan kita dan menghentikan perbuatannya.

6. Mendiamkan.

   Bentuk lain dari hukuman adalah dengan membiarkan anak didik yang berlaku negative, dengan ini diharapkan anak didik akan menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulanginya lagi.

7. Cercaan.

   Cercaan sebagai bentuk hukuman dapat diterapkan kepada anak didik yang melakukan tindakan negatif, jika nasehat dan bimbingan sudah tidak lagi berpengaruh/diperhatikan. Tentunya cercaan ini tetap tidak boleh menjatuhkan harga diri dan kepercayaan diri anak karena ini akan memiliki dampak yang kurang baik bagi perkembangan mental anak yang bersangktan.

8. Hukuman orangtua.

   Jika anak didik melakukan kesalahan terus-menerus, dan setelah diberi nasihat/bimbingan tidak berpengaruh, maka seorang guru boleh menulis surat untuk orang tuanya dan menyerahkan kepada wali untuk menghukumnya. Dengan cara ini, akan sempurna kerjasama antara sekolah dengan keluarga dalam mendidik anak.

9. Pukulan ringan.

   Jika metode lain ternyata tidak membuahkan hasil, maka seorang pendidik diperbolehkan untuk memukul dengan pukulan ringan. Namun demikian, hendaknya penggunaan hukuman fisik ini meski dijauhi, terkecuali dalam keadaan yang benar-benar memaksa. Misalnya mendidik anak-anak bandel yang tidak mempan dengan cara selain hukuman fisik, atau untuk menjaga kewibawaan serta kelancaran jalannya kegiatan belajar mengajar. Hukuman ini bertujuan agar anak tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya sehingga anak merasa bersalah.

Hukuman sebagai salah satu sarana mendidik anak merupakan alternatif terakhir jika keadaannya sudah sangat memaksa. Dalam menerapkan hukuman ini setiap pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian hukuman, yaitu:

1. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, dan kasih sayang;
2. Pemberian hukuman harus mengandung makna edukasi;[138]
3. Pemberian hukuman harus didasarkan pada alasan keharusan;
4. Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan positif di hati anak didik;
5. Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik;
6. Pemberian hukuman meski diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan jika anak didik dapat berubah menjadi lebih baik.

---

[138] Hukuman yang mendidik adalah hukuman yang menyadarkan pihak yang bersalah, bahwa hal yang baru saja terjadi hendaknya tidak diulangi karena hal tersebut tidak baik.

7. Pemberian hukuman harus mengandung makna edukasi, yakni hukuman yang menyadarkan pihak yang bersalah, bahwa hal yang baru dilakukan tidak diulangi karena hal tersebut tidak baik;
8. Pemberian hukuman merupakan jalan atau solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada;
9. Pemberian hukuman terutama hukuman fisik diberikan setelah anak didik mencapai usia 10 tahun,[139] dan dilakukan jika berbagai metode telah dicoba dan tidak membawa pengaruh positif.

Selain itu dalam memberikan hukuman sebagai upaya pendidikan dan perbaikan, hendaknya dilakukan secara bertahap yakni dari yang paling ringan hingga yang paling keras. Pertama-tama dimulai dengan menunjukkan kesalahan dengan pengarahan yang membekas, ringkas dan jelas, dengan tutur kata yang tidak keras dan tidak mencelanya, bisa juga menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat. Bila hal ini belum cukup maka kesalahan ditunjukkan dengan nada *kecaman*, dan seterusnya. Sedang bentuk pemukulan diberikan sebagai tahapan paling terakhir.

Kendati hukuman diperbolehkan, namun pada prinsipnya pemberian penghargaan harus lebih dikedepankan daripada pemberian hukuman, karena penghargaan akan lebih memotivasi anak didik untuk lebih giat dalam belajar, serta menyampaikan keinginan untuk mendapat tambahan pendidikan dan pengajaran. Sebaliknya hukuman sebisa mungkin dihindari, sebab hukuman apapun bentuknya akan menimbulkan penderitaan dan ketakutan. Dampak lain dari penggunaan hukuman adalah perasaan ti-

[139] Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Saw, yang diriwayatakan Hurairah, r.a berkata: Rasulullah bersabda: *"Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah bila ia membangkang (meninggalkan shalat) jika mereka telah berusia sepuluh tahun serta pisahkan tempat tidurnya."* (HR. Abu Daud).

dak nyaman pada anak didik, menguburkan sikap optimisme dan keberanian anak didik, serta dapat meninggalkan pengaruh yang buruk dalam jiwa anak didik, yang pada akhirnya justru menjadi penghalang baginya untuk memahami serta mencerna ilmu yang diberikan.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam format pendidikan yang demokratis dan humanistik, *reward* haruslah lebih dominan diberikan pada peserta didik, daripada memberikan hukuman (*punishment*). Demikian ini tidak berarti *punishment* tidak penting, *punishment* tetap penting diterapkan terhadap siswa yang bersikap dan berperilaku negatif (menyimpang) untuk memberi efek jera, namun dengan cara yang tepat dan dilakukan secara proporsional.

BAB 9
PENUTUP

Pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan karakter bangsa. Namun hingga kini pendidikan Islam masih saja menghadapi permasalahan yang komplek, dari permasalah konseptual-teoritis, hingga persoalan operasional-praktis. Berbagai persoalan yang dihadapi pendidikan Islam yang belum dapat teselesaikan dengan baik inilah yang menyebabkan pendidikan Islam mengalami stagnasi. Karena itulah, pendidikan Islam perlu di desain ulang, agar mampu menjawab tantangan prubahan zaman, baik pada sisi konsepnya, kurikulum, kualitas sumberdaya insaninya, lembaga-lembaga, organisasinya, serta mengkonstruksinya agar dapat relevan dengan perkembangan zaman.

Pendidikan Islam sudah harus diupayakan untuk mengalihkan paradigma yang berorientasi ke masa lalu (abad pertengahan) ke paradigma yang berorientasi ke masa depan, yaitu mengalihkan dari paradigma pendidikan yang hanya mengawetkan kemajuan, ke paradigma pendidikan yang merintis kemajuan. Mengalihkan paradigma yang berwatak *feodal* ke paradigma pendidikan yang berjiwa demokratis dan humanistik, yakni sebuah format pendidikan yang didalamnya terdapat suasana saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan, adanya keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas

di sekolah, dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama (komunal-bermasyarakat) di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Format pendidikan Islam demokratis dan humanistik ini perlu dikembangkan dalam pendidikan, sebab format ini diyakini akan membawa perubahan lebih baik dalam praksis pendidikan dan pembelajaran, dapat meningkatkan kualitas *output* pendidikan, dan dapat menjadi salah satu solusi bagi berbagai problem yang sedang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Disamping itu, Implementasi nilai-nilai humanisme dan demokrasi dalam pendidikan juga diyakini memiliki potensi yang besar untuk dapat mencetak generasi bangsa yang cerdas nalar, cerdas emosional, cerdas spiritual, berjiwa besar, aktif, kreatif, dan mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya dengan lebih arif dan bijaksana, sehingga mampu memerankan fungsi dan peran kemanusiaanya yakni sebagai *abd* (hamba) sekaligus *khalifah* (wakil) Tuhan di alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kuntoro, Sodiq. 2008. “Pengembangan Ilmu Pendidikan”. Dalam *makalah* yang disampaikan dalam Seminar Pengembangan Ilmu Pendidikan, FIP Universitas Negeri Yogyakarta. Yokyakarta.

Abdullah, M. Amin. 2002. *Antara Ghazali dan Kant.* Bandung: Mizan.

________________. 2000. *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer.* Bandung: Mizan.

Abidin, Zainal.2001. *Filsafat Manusia.* Bandung: Rosdakarya.

Achmadi.1987. *Ilmu Pendidikan Islam I.* Salatiga: FT IAIN Walisongo.

Admin.2006. “Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan”, Situs informasi Indonesia Serba serbi Dunia Pendidikan, dikutip dari http://edu-articel.com/accessed 20 November 2009.

Al Khaldun, Abdurrahman Ibnu.1998. *Muqaddimah.* Cetakan Kesatu. Beirut: Daar alFikr.

Al-Abrashy, Muhammad ‘Atiyah.1970. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

al-Attas, Muhmmad al-Nauquib.1984. *Konsep Pendidikan dalam Islam; Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam.* Bandung: Mizan.

Al-Ghazali.2000. *Ihya Ulumuddin.* Qairo Mesir: Daar al-Taqwa.

Al-Ghazali.1984. *Bidayatul Hidayah, Mutiara Ihya Ulumuddin;* Terjemahan oleh H. Rus'an. Semarang: Wicakyana.

Alias, Othman. 1991. *Asas-Asas Pemikiran Politik Islam.* Kuala Lumpur: Pustaka Islam Sdn.

Al-Imam Muslim bin al Hajjah al-Naisaburi. t.th., *Shahih. Muslim: Kitab al-Imam, Bab Kauniah al-Nahyi'an al-Munkar mmal-Iman.* Vol. 1. Kairo: Bathba'ah al-Babi al-Halabi wa Syirkahu.

Al-Jamali, Muhammad Fadhil. 1981. *Filsafat Pendidikan Islam dalam al-Qur'an;* Terjemahan oleh Zaenal Abidin Ahmad. Jakarta: Pepara.

Al-Maududi, Abul A'la. 1990. *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam. Jakarta:* Mizan

Al-Syaibany, Omar Muhammad al-Toumy. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam.* Cetakan Kesatu. Terjemahan oleh Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang.

Amir Faisal, Yusuf. 1995. *Reorientasi pendidikan Islam.* Jakarta: Gema Insani Press.

Anam, M. Khoirul. 2003. "Pendidikan", dikutip dari http://www.pendidikan.net

Ancok, Djamaluddin. 1995. *Psikologi Islam atas Problem-Problem Psikologi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

An-Nahlawi. A. 1989. *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga di Sekolah dan Masyarakat;* Terjemahan oleh Herry Noer Ali. Bandung: Dipenogoro.

Aqib, Zainal. 2002. *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran.* Surabaya: Cendekia.

Arends, R. 1997. *Classroom Instruction and Management.* New York: McGraw-Hill Companies.

Arifin, H.M. 1991. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

__________. 1976. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama.* Jakarta: Bulan Bintang.

__________. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara.

__________. 2003. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsini. 2002. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.* Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

_______________. 1998. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Assegaf, Abd. Rachman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

___________________. dkk. 2002. *Ringkasan Laporan Hasil Penelitian,* "Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, dikutib dari http://www.ditpertais.net

Atmadi Y. Styaningsih, (ed,). 2000. *Transformasi Pendidikan.* Yokyakarta: Kanasius.

Azis, Abd. 2009. *Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam.* Yokyakarta: Teras.

Azizy, A. Qodri A. 1999. "Al-Qur'an dan Pluralisme Agama". Dalam *Profetika Jurnal Studi Islam,* PMSI UMS.Vol. 1. No.1. Januari 1999. Surakarta.

Azra, Ayzumardi. 1998. *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

_______________. 2000. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru.* Ciputat: Logos.

_______________. 2009. "Islam dan Demokrasi". Dalam *Republika*, 28 Mei 2009. Jakarta.

Baedhowi. 2008. *Humanisme Islam Kajian terhadap Pemikiran Filosofis Mohammed Arkoun.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat,* Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia.

Baharudin dan Muh.Makin. 2009. *Pendidikan Humanistik: Teori, Konsep dan Aplikasi Praksis dalam Dunia Pendidikan.* Yokyakarta: ar Ruzz Media.

Bastian, Sunil dan Robin Luckham (ed,). 2003. *Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies.* London & Newyork: Zed Books.

Boehori, 1982, *Islam Mengisi Kehidupan*, Surabaya: Al-Ikhlas.

Boisard, Marcel. A. 1979. *Humanisme dalam Islam.* Terjemahan M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang.

Bonwell, C.C. 1995. "Teaching Improvement Workshop Enginering Education Development Project". Dalam ABD Loan, No.1432-INO.

Buan, Irsyad Syafar. 2000. "Orientasi Pembaharuan Pendidikan dalam Tantangan Modernitas". Dalam *Jurnal OASE*, edisi 16 tahun 2000. Mesir.

Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengritiknya.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Daradjat, Zakiah., *et.al.* 2000. *Ilmu Pendidikan Islam.* Cetakan Keempat. Jakarta: Bumi Aksara.

__________________. 1976. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

__________________. 1991. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Darmawan, Didit. 2006. *Komunikasi dan Presentasi*. Surabaya: Mahardika.

_______________. 2003. *Bulletin Pusat Pembukuan.* Vol. 9. Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

_________. 2003. *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching Learning)* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

_________. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang.

_________. 2006. *Standar Nasional Pendidikan (SNP).* Jakarta: Asa Mandiri.

_________. 2007. *Gagasan Kurikulum Masa Depan.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.

DePorter, Bobbi & Mike Hernacki. 2000. *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Terjemahan Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Kaifa

________________________________. 2000. *Quantum Business: Membiasakan Bisnis secara Etis dan Sehat.* Terjemahan oleh Basyrah Nasution, Bandung: Kaifa.

________________________________. 2000. *Quantum Teaching*: *Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-Ruang Kelas*. Bandung: Kaifa.

________________________________. 2009. *"The Impact of Quantum Learning",* dikutip dari http://www.newhorizons.org.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam.1999.*Ensiklopedi Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Dewantara, Ki Hajar. 1962. *Bagian Pertama Pendidikan.* Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dewey, John. 1963. *Democracy and Education*. New York: Mac Millan Company.

Diding, Nurdin. 2008 "Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani". Dalam *Harian Pikiran Rakyat,* 23 Nopember 2008. Jakarta.

Dimyati & Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran.* Jakarta: Rineka Cipta.

Djamarah, Syaiful Bahri 2002. *Psikologi Belajar.* Jakarta: Rineka Cipta.

____________________. 2002. *Strategi Belajar Mengajar.* Jakarta: Renika Cipta.

Earl W, Stevick. 1991. *Humanism.* Oxford: Oxford University Press.

Edwards, Paul (*ed*,). 1972. *Encyclopedia of Philosophy.* Jilid IV. Macmillan: New York.

Effendy, Bahtiar. 2008. "Mohamad Roem, Islam dan Demokrasi untuk Membangun Indonesia". Dalam *Annual Lecture,* yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) UIN. (16 Juni 2008). *Jakarta.*

Eggen, Paul D and Donald P. Kauchak. 1984. *Strategies for Teaching.* New Jersey: Prentice-Hall.

Esposito, John. 1996. *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas? Menggugat Tesis Huntington.* Bandung: Mizan.

Fajar, A. Malik. l999. *Reorientasi Pendidikan Islam.* Jakarta: Fajar Dunia.

Fakih, Mansour. 2002. *Pendidikan Popular Membangun Kesadaran Kritis.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firdaus, M. Yunus. 2004. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire dan Y.B.Mangunwijaya.* Yogyakarta: Logung Pustaka.

Freire, Paulo. 1972. *Pendidikan Kaum Tertindas.* Jakarta: LP3ES.

__________. 1984. *Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan.* Terjemahan oleh Louis Nugroho. Jakarta: Gramedia.

Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gafur, Abdul. 2003. *Modul Perencanaan Pembelajaran PPKn Berbasis Kompetensi.* Jakarta: Depdiknas.

George A.M. 2000. *Cita Humanisme Islam.* Bandung: Serambi Ilmu Semesta.

Ghazali, A. Syukur. 2002. "Strategi Belajar Kooperatif dalam Belajar Mengajar Kontekstual". Dalam *Jurnal Pendidikan & Pembelajaran*, Vol. 9, No. 1, April 2002. Universitas Negeri Malang. Malang.

Goleman, Daniel. 1999. *Kecerdasan Emosional*. Terjemahan T. Hermaya. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Gunarto, H, 2004. "Mengusung Pendidikan Humanistik", http://www.freelists.org

Hadi W. M, Abdul. 2008. "Humanisme Barat dan Cina", dikutip dari http://icas-indonesia.org

Hadiyanto. 2002. "Makna Kebebasan Guru dalam Pembelajaran di Era Otonomi Pendidikan". Dalam *Buletin Pembelajaran,* Nomor 04 Tahun XXV Desember 2002, Universitas Negeri Padang. Padang.

Halim, Abdul, el-Muhammady. 1984. "Pendidikan Islam Skop dan Matlamatnya". Dalam *Jurnal pendidikan,* Tahun 1, bil. 1. Kuala Lumpur.

Hamalik, Oemar. 2001. *Proses Belajar Mengajar.* Jakarta: Bumi Aksara.

_________________. 1995. *Kurikulum dan Pembelajaran.* Jakarta: Bumi Aksara.

Hamid, Enayat. 1988. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-20.* Bandung: Pustaka.

Hanafi, Hasan, dkk. 2007. *Islam dan Humanisme.* Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harefa, Andrias. 2000. *Menjadi Manusia Pembelajar.* Jakarta: Harian Kompas.

Hasan, Ahmad Makki,(*ed*,). 2007. "Menciptakan Pendidikan Demokratis Humanistik". Dalam *Tabloid Koran Pendidikan,* Edisi 174/II/2007. Malang.

Hasbullah. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* Cetakan Keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hernowo. 2004. *Andaikan Buku itu Sepotong Pizza: Rangsangan baru untuk Melejitkan Word Smart.* Bandung: Kaifa.

Hitami, Munzir. 2004. *Mengkonsep Kembali Pendidikan Islam.* Yogyakarta: LKiS.

Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Ibrahim, Muslim, dkk. 2001. *Pembelajaran Kooperatif.* Surabaya: UNESA University Press.

Idris, Zahara.1992. *Pengantar Pendidikan I.* Jakarta: Grasindo.

Indrakusama, Amir Dien. 1973. *Pengantar Ilmu Pendidikan.* Surabaya: Usaha Nasional.

Ismail, SM (*ed*,). 2001. *Paradigma Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ismatullah, Deddy, Asep A. Sahid Gatara. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama.* Bandung: Pustaka Setia.

Izani, Mohd. 2007. "Konsep Theo-Democracy, Popular Vice Regency, dalam Wacana Islam dan Demokrasi". Dalam *Jurnal Usuluddin,* Bil 26.

Jalal, Abdul Fatah. 1988. *Asas-Asas Pendidikan Islam.* Bandung: Diponegoro.

Jamil Gunawan (*et.all*). 2005. *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES.

Jhonson, Elaine B. 2006. *Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikkan dan bermakna.* Cetakan Kesatu. Terjemahan *Ibnu Setiawan.* Bandung: MLC.

John L. Esposito and Jame P. Piscatori.1991. "Democratization and Islam". Dalam *MiddleEast Journal 45*, No. 3.

John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

Kartini, Kartono.1997. *Tinjuan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Perdaya Paramita.

Khudari Bik, Muhammad. 1981. *Usul al-Fiqh.* Beirut: Dar al-Fikr.

Kuntowijoyo.1993. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi.* Bandung: Mizan.

L. Dee Fink. 2008. *"Active Learning"*, dikutip dari http://honolulu.hawaii.edu.

L. Kreamer. Joel. 2003. *Renaisans Islam.* Bandung: Mizan.

Lamont, Corrliss. 1997. *The Philosophy of Humanism.* New York: Humanist Press.

Langgulung, Hasan. 1992. *Asas-Asas Pendidikan Islam.* Jakarta: Pustaka al-Husna.

_________________. 1995. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam.* Bandung: Al-Ma'arif.

_________________. 2003. *Pendidikan Islam dalam Abad ke 21.* Cetakan Kedua. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.

_________________. 1991. *Kreativitas dan Pendidikan Islam,* Cetakan Kesatu. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Loytard.1996. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Deden Ridwan, (*ed*,). 2001. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu.* Bandung: Nuansa.

Madjid, Nurcholis. l999. "*Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat".* Dalam *Tabloid Tekad.* Jakarta.

Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*). Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.

Majid, Abdul. (*et.all*).1998. *Al-Islam.* Malang: UMM Press.

Maksum, Ali dan Luluk Yunan Ruhendi. 2004. *Paradigma Pendidikan Universal: di Era Modern dan Postmodern, Mencari Visi Baru atas Realitas Baru Pendidikan Kita.* Yogyakarta: IRCiSoD.

Mangunhardjana. 1997. *Isme-Isme dari A sampai Z.* Yogyakarta: Kanisius.

Margaret, E Bell. 1991. Gredler, *Belajar dan Membelajarkan*. Terjemahan Munandir. Jakarta: Rajawali Press

Mas'ud, Abdurahhman. 2002. *Mengagas Format Pendidikan non Dikotomik (Humanism Religiuos sebagai Paradigma Pendidikan Islam).* Yokyakarta: Gema Media.

Mastuhu. 1999. *Pemberdayakan Sistem Pendidikan Islam.* Jakarta: Logos.

______. 1996. "Demokrasi Pendidikan Islam Indonesia". Dalam *makalah,* yang disampaikan dalam diskusi panel Sema Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 26 Oktober 1996. Malang

Meier, Dave. 2003. *The Accelerated Learning Handbook: Panduan Kreatif dan Efektif Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan*. Terjemahan Rahmani Astuti. Bandung: Kaifa.

Miarso, Yusuf Hadi. 2007. "Pendidikan Humanistik". Dalam *Jurnal Pendidikan Penabur,* No.09/Tahun ke-6/Desember 2007.

Miramba D. Ahmad. 1987. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam.* Bandung: Al Ma'arif.

Moh. Asror Yusuf (ed,). 2006. *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global.* Yogyakarta: IRCiSoD.

Muarif, Syamsul dan Ahmad Barizi. 2001. *Paradigma Pendidikan Berbasais Pluralis dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam.* Malang: Kerjasama UMM.

Muhadjir, Noeng. *2000. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhadjir, Noeng. 2001. *Filsafat Ilmu.* Edisi Kedua, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhadjir, Noeng. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhaimin, dkk. 1999. *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman, Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*. Cirebon: Pustaka Dinamika.

Muhaimin. 2003, *el-Hikmah; Jurnal Pendidikan Fakultas Tarbiyah*, Volume 1 No. 1 2003, STAIN Malang. Malang.

Muhfuzd, Sahal. dkk. 2000. *Pendidikan Islam Demokrasi dan Masyarakat Madani.* Cetakan Kesatu. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhtadi, Saeful dan Agus Safei. 2003. *Metode Penelitiam Dakwah.* Bandung: Pustaka Setia.

Mujai, Saiful. 1995. "Demokrasi dan Retorika Kelompok Dominan". Dalam *Harian Republika*, 4 Agustus 1995. Jakarta.

Mulyasa. 2007. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan.* Bandung: Rosda Karya.

_______. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru.* Bandung: Rosdakarya.

Munawir, A. W. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Murod, Ma'mun. 1999. *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Musa Towana, Muhammad. 1972. *al-Ijtihad: Madha Hajatina Ilaihi fi Hadha al-'Asr.* Dar al-Kutub al-Hadithah

Musawir, Musa. 2010, "*Humanisme*" dari http://islamalternatif.net

Najati, Usman. 2003. *Belajar EQ dan SQ dari Sunah Nabi,* Cetakan Kelima. Jakarta: Hikmah.

Naqim, Ainun dan Ahmad Sauqi. 2008. *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi.* Yokyakarta: Ar Ruz Media.

Nasution S. 1982. *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, Harun. 1982. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nata, Abudin. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam-Periode Klasik & Pertengahan.* Jakarta : Rajawali Press.

Natsir, Mohamad. 2001. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Media Dakwah.

Nggermanto, Agus 2001. *Capita Selecta,* Jilid Satu. Jakarta: Yayasan Bulan Bintang Abadi.

Nggermanto, Agus. 2003. *Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum)*. Bandung: Nuansa

Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Ciputat Pers.

____________. 2007. *Sejarah Pendidikan Islam,Menelusuri Jejek Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia.*Jakarta : Kencana.

Nur, M dan Wikandari. 2000. *Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan Konstrukstivis dalam Pengajaran.* Cetakan Kedua. Surabaya: Pusat Studi Matematika dan IPA Sekolah UNESA.

Nurhadi, Agus Gerrad Senduk. 2004. *Pembelajaran Kontekstual (Contextual Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK.* Malang: Universitas Negeri Malang.

O'neil, F. William. 2001. *Ideologi-Ideologi Pendidikan.* Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

Pasiak, Taufik. 2003. Revolusi IQ/EQ/SQ: *Antara Neurosisain dan Al Qur'an*. Bandung: Mizan.

Pasti, Y. Priyono, "Menuju Pendidikan Demokratis-Humanistik", *Kompas*, 23 Juli 2005.

Poerbakawatja, Soegarda, (et.all). 1981. *Ensiklopedi Pendidikan.* Jakarta: Gunung Agung.

Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Cetakan Keduabelas. Jakarta: Balai Pustaka.

Priatna, Tedi. 2004. *Cakarawala Pendidikan Islam.* Jakarta: Mimbar Pustaka.

Qomar, Mujamil. 2005. *Epistimologi Pendidikan Islam.* Jakarta: Erlangga.

Rachman, Budhy Munawar (ed.). 2008. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Sketsa Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban.* Jakarta: Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun.

Rahmat, M. Imdadun. 2007. "Demokrasi dan Penegakan Keadilan". Dalam *makalah,* yang disampaikan dalam Halqah Islam di Pesantren Cijawura, 15-17 Juni 2007. Bandung.

Rais M. Amien. 2008. *Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia,* Yogyakarta: PPSK Press.

Rais, M. Amin. 1998. "Masalah-masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia". Dalam *Jurnal Milenium: Agama dan Tamaddun*, No. 1 Th 1, Januari-April 1998.

Rapar, J. H. 1993. *Filsafat Politik Aristoteles.* Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Raqib, Moh. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integrative di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat.* Yokyakarta: LKiS.

Ratna, Syifa'a Rachmahana. 2008. "Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan". Dalam *Jurnal Pendidikan Islam "el tarbawj"*, No. 1. Vol. I.

Rosyada, Dede. 2007. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan,* Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana.

Sa'bani S, Mamad. 2002. *Memahami Agama Post Dogmatik.* Semarang: Aneka Ilmu.

Sabiq, Sayyid. Tanpa tahun. *Islamuna,* Beirut: Darul Kitab.

Sanaky, Hujair. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia.* Yokyakarta: Safira Insania Press.

____________. 2009. "Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern" http://www.sanaky.com.

Santoso, Listiyono. 2003. "Patologi Humanisme (Modern): Dari Krisis Menuju 'Kematian' Epistemologi Rasional". Dalam *Jurnal Filsafat*, Jilid 33, No.1. April 2003.

Santyasa, I Wayan. 2004. "Model Problem Solving dan Reasoning Sebagai Alternatif Pembelajaran Inovatif". *makalah,* dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) V: dengan tema *"Menata Pendidikan Nasioanal yang Bermutu untuk Membangun Kualitas Kehidupan dan Peradaban Bangsa"* 5-9 Oktober 2004. Surabaya.

Saryono, Djoko. 2007. "Pembelajaran Kuantum Sebagai Model Pembelajaran Yang Menyenangkan", dikutip dari http://lubisgrafura.Wordpress.com.

Satoto, *et.al*. 2003. *Pilkada di Era Otonomi: Berlayar Sambil Menambal Lubang di Kapal.* Semarang: Aneka Ilmu.

Selvin, A. Robert. 2009. *Cooperatif Learning: Teori, Riset dan Praktik*, Cetakan Ketiga. Terjemahan oleh Lita. Bandung: Nusa Media.

Semiawan, Conny. 1987. *Pendekatan Keterampilan Proses*. Jakarta: Gramedia.

Septiawan. 2009. "*Quantum Learning* bagi Pendidikan Jurnalistik: Studi pembelajaran jurnalistik yang berorientasi pada

life skill". Dalam *Editorial Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,* Depdiknas.

Shafi, Ali. 2003. *Kisah-Kisah Imam Ali.* Bandung: Lentera.

Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat.* Bandung: Mizan.

Shindunata. 2000. *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius.

_________. 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi,* Yogyakarta: Kanisius.

Shofan, Moh (ed,). 2007. *Realistik Educatioan: Menuju Masyarakat Utama.* Yokyakarta: Ircisod.

Sihbudi, Riza. 1993. *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*. Jakarta: Pustaka Hidayah.

Silberman, Mel. 2002. *Active Learning:101 Strategi Pembelajaran Aktif,* Cetakan Kedua. Yogyakarta: Yappendis.

Soebahar, Abd. Halim. 2002. *Wawasan Baru Pendidikan Islam.* Jakarta: Kalam Mulia.

Soeroyo. 1991. "Berbagai Persoalan Pendidikan, Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia". Dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *Problem dan Prospeknya*, Volume I, Fak. Tarbiyah IAIN Suka. Yokyakarta.

Stein, Steven J. 2002. *Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses;* Terjemahan oleh Murtanto, Yudhi. Bandung: Kaifa.

Sugandi, Ahmad, dkk. 2004. *Teori Pembelajaran.* Semarang: UPT MKK UNNES.

Sukmadinata. 2000. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik.* Bandung: Rosda Karya.

Sularto, ST. 2005. "Praksis Pendidikan Minus Visi: Catatan atas "Bongkar Pasang" Kurikulum". Dalam *Kompas*, 16 Agustus 2005. Jakarta.

Sulaymân, Sadek J. 2008. "Apakah Sistem Demokrasi haram?", dikutip dari http://www.Syariah Online.com/accessed 27 November 2008.

Suparno, Paul. 1997. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan.* Yogyakarta: Kanisius.

____________. 2002. *Reformasi Pendidikan sebuah Rekomendasi.* Jakarta: Kanisius.

____________. 2003. *Guru Demokratis di Era Reformasi.* Grasindo: Jakarta.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama.* Bandung: Rosda.

Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar.1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Susanto, Happy. 2009. "Menimbang Islam Humanis", dikutip dari http://www.republika.co.id.

Suseno, Frans Magnis. 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis.* Yokyakarta: Kanisius.

Syah, Muhibbin.2005. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru.* Bandung: Rosda Karya.

Syariati, Ali. 1996. *Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat;* Terjemahan Afif Muhammad. Bandung: Pustaka Hidayah.

Tafsir, Ahmad. 1995. *Epistimologi untuk Ilmu Pendidikan Islam.* Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.

____________. 2005. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tamrin. 2005. "Gagasan Demokrasi Amien Rais: Priode 1994-2005", *Tesis Ilmu Politik.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Thoha, Chabib, (*ed*,).1996. *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thompson, F. 2000. *Political Ethics and Public Office.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

____________. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Padagogik Transformative untuk Indonesia.* Jakarta: Grasindo.

____________. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.

Tim Penulis Rosda. 1999. *Kamus Filsafat.* Bandung: Rosdakarya.

Tim Penyusun.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Ubaedilah A. Abdul Rozak. 2006. *Pendidikan Kewarganegraan (Civic Education). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* Edisi Revisi II. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang R.I. 2003. *Nomor 20 Tahun 2003*, *tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Depdiknas.

Undang-Undang R.I. 2005. *Nomor. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.* Jakarta: Depdiknas

Usa, Muslih (*ed*,). 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta,* Yokyakarta: Tiara Wacana.

Wahyono, Padmo. 1996. "Ilmu Negara" *Kumpulan Kuliah*, (pengh.) T. Amir Hamzah, dkk, Jakarta.

Wasino. 2009. “Demokrasi; Dulu, Kini, dan Esok”. Dalam *makalah,* yang disampaikan dalam Diskusi Sejarah “Wajah Demokrasi Indonesia” diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Departmen Kebudayaan dan Pariwisata, 30-31 Maret 2009. Semarang.

Widada, Wahyu. 2000. *Pendekatan-pendekatan dalam Pembelajaran Matematika.* Surabaya: UNESA University Press.

Yamin, Martinis. 2007. *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP.* Jakarta: Gaung Persada Press.

Yunus, Mahmud. 1989. *Terjemah Qur'an Karim*, Cetakan Kelima. Bandung: Al-Ma'arif.

Yusrianto, Edi. 2008. *Lintasan Pendidikan Islam.* Pekanbaru: Intania Grafika.

Yusuf, Slamet Effendy. 2009. ”Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila”. Dalam *makalah,* yang disampaikan dalam Kongres Pancasila, yang diselenggarakan oleh UGM dan Mahkamah Konstitusi RI, 30 Mei – 1 Juni 2009. Yokyakrta.

Zaini, Syahminan.1986. *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam.* Jakarta: Kalam Mulia.

Zamroni. 2001. “Pendidikan Demokrasi: Dari Teori ke Aksi”. Dalam *makalah,* yang disampaikan pada dialog interaktif guru sekolah menengah se-DKI tentang Pendidikan Demokrasi, 15 Agustus 2001. Jakarta.

________. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi, Tantangan menuju Civil Society*. Yogyakarta: Biograf Publishing.

________. 2002. “Demokrasi dan Pendidikan dalam Transisi: Perlunya Reorientasi Pengejaran Ilmu- Ilmu Sosial di Sekolah Menengah”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar* dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Zohar, Danah dan Ian Marshall. 2000. *SQ Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*. Terjamahan oleh Rahmanai Astuti, dkk. Bandung: Mizan.

Zuhairini (*ketua tim*), 1982/1983. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Depag.

_________________. dkk.2000. *Sejarah Pendidikan Islam.*Jakarta : PT.Bumi Aksara.

Zuriah, Nurul, dkk. 2003. "Model Pembelajaran Demokratis pada Mata Pelajaran PPKn di Lingkungan Pendidikan Dasar", dalam *Laporan Penelitian Hibah Bersaing XI.1 Tahun 2003*, Ditbinlitabmas Dikti dan Lemlit UMM.Malang.

Zuriah, Nurul, dkk. 2004. "Model Pembelajaran Demokratis Pada Mata Pelajaran PPKn/IPS di Lingkungan Pendidikan Dasar", Laporan Penelitian Hibah Bersaing XI.2 Tahun 2004, Ditbinlitabmas Dikti dan Lemlit UMM. Malang.

TENTANG PENULIS

Sri Haryanto lahir di Wonosobo pada tanggal 15 November 1979. Pendidikan formalnya ditempuh di SDN I Sariyoso (1993), SMPN 1 Kertek-Wonosobo (1996), SMUN 2 Wonosobo (1999), IAIN Walisongo Jurusan Bimbingan Konseling (2004). AKTA IV UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo (2007), Pascasarjana UNSIQ di Wonosobo (2010), dan Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam di UMY.

Ketika masih Mahasiswa aktif di berbagai Lembaga Kemahasiswaan, seperti Lembaga Kajian Ilmiah (LKI), Korp Da'i Islam IAIN Walisongo, Ketua Keluarga Mahasiswa Wonosobo di Semarang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Presidium Mahasiswa Dakwah Indonesia, dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (2003-2004).

Karya tulis yang telah diterbitkan dalam bentuk buku di antaranya, *Mengapa Harus Stress: Terapi Stress* (Hamzah, Jakarta 2017), *The Power of Dzikrullah* (Hamzah, Jakarta, 2008), *The Word Idol Muhammad Rasulullah* (Hamzah, Jakarta, 2008), *Desain Pembelajaran Demokratis-Humanistik* (Ar-Ruzmedia, 2011), *Etika Beribadah* (Hamzah, Jakarta, 2012), *Etika Berdzikir* (Hamzah, Jakarta, 2012), *Etika bermasyarakat* (Hamzah, Jakarta, 2012), *Inspiration for Succesfull* (UNSIQ Press 2020), *Operasionalisasi Bimbingan Konseling di Sekolah* (Bildung, Yogyakarta 2020),

Pengantar Jurnalistik (Bildung, Yogyakarta 2020), *Al-Qur'an dan Sains Modern* (ed.) (LKiS, Yogyakarta 2017), *Kiamat Telah Dekat* (UNSIQ Press Wonosobo 2021), *Wawasan Al-Qur'an tentang Manusia* (Bildung, 2022), *Pendidikan Karakter Berbasis Spiritual* (Bildung, 2022).

Karya tulis di jurnal di antataranya adalah "Dialektika Pendidikan Islam Demokratis" (al-Qalam, 2016), "Manusia Dalam Terminologi Al-Qur'an" (Spektra, 2017), "Pendidikan Seumur Hidup" (al-Qalam, 2016), "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam" (Manarul Qur'an 2018), "Aplikasi Teori Psikologi Dalam Pendidikan Pondok Pesantren" (Manarul Qur'an 2018), "Pengembangan Kurikulum Berbasis Pendidikan Spiritualitas dalam Kearifan Lokal di Jawa" (Jurnal Teknologi Pendidikan, 2018), "Religious Spiritual Human: Qur'an And Transpersonal Psychology Perspective International" (Journal of Advanced Science and Technology 2020), "Why the Happiest Country in the World is Not a Muslim Country?" 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social 2020, "Partisipasi Publik Pondok Pesantren di Kabupaten Wonosobo"(Manarul Qur'an 2020), "Psychoanalytic Conceptual amework: a critical review of creativity in modeling inquiry training," (Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2020).

Sri Haryanto selain sebagai dosen tetap Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dan pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), saat ini beliau menjabat sebagai Dekan FITK UNSIQ.

PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

www.nuwonosobo.com

KERANGKA PARADIGMATIK PENDIDIKAN DEMOKRATIS DAN HUMANISTIK

BUKU ini patut diapresiasi karena berupaya untuk menguak lebih dalam masalah demokrasi dan humanisme yang dianalisnya dalam perspektif pendidikan Islam. Awalnya sulit menjelaskan bagaimana bisa menjelaskan konsep demokrasi dan humanisme yang *notabene* berkembang di dunia Barat dan Eropa yang sekuler tersebut dapat dicermati dalam sudut pandang Islam yang sarat nilai-nilai kewahyuan. Namun, berkat kejeliannya, penulis mampu menguraikan benang kusut kesenjangan di antara keduanya. Dunia Barat dan Eropa memaknai demokrasi dan humanisme secara sekuler dan kering agama sehingga menjadikan pola interaksi manusia dalam dimensi antropo-sentris semata, sementara saratnya nilai-nilai ketuhanan dalam ajaran Islam cenderung pada teo-sentris. Dalam titik ini, penulis mampu mengembangkan konsep dinamis pendidikan Islam yang demokratis dan humanis tanpa terjebak dalam sekularisme, sekaligus menawarkan gagasan pembenahan pendidikan Islam dengan pendekatan teo-demokrasi, dan di saat yang sama pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (*huquq al-Insan*) secara universal. Inilah nilai kontributifnya. Lagi pula, yang spesifik dalam buku ini adalah tinjauannya dalam sudut pandang Islam, atau implementasinya dalam pendidikan Islam cukup kuat, suatu hal yang tidak mudah dilakukan oleh penulis lain.